

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PANGKAL PINANG

2025 - 2029



Prof. H. Saparudin, Ph. D
Wali Kota Pangkal Pinang

Dessy Ayutrisna, SE., MM
Wakil Wali Kota Pangkal Pinang



WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka menengah antara Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51).
18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
19. Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan kinerja.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, dan program prioritas untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 5 (lima) bab yaitu:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e. penutup.

Pasal 4

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
(2) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan jika:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalamperaturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun;
(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

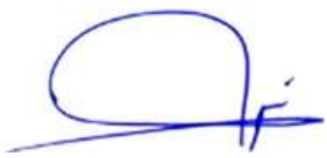
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 April 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,



SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,



MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 63

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.8/2026)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			**i**
DAFTAR TABEL			**vi**
DAFTAR GAMBAR			**ix**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	**1**
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	4
	1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I	8
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	14
	1.5 Sistematika Penulisan	I	15
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	1
	2.1 Aspek Geografis dan Demografis	II	1
	2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II	1
	2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II	1
	2.1.1.2 Kondisi Topografi	II	3
	2.1.1.3 Kondisi Kemiringan Lereng	II	5
	2.1.1.4 Morfologi	II	6
	2.1.1.5 Kondisi Jenis Tanah	II	8
	2.1.1.6 Kondisi Curah Hujan	II	9
	2.1.1.7 Geologi	II	10
	2.1.1.8 Hidrologi	II	12
	2.1.1.9 Penggunaan Lahan	II	12
	2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II	13
	2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II	18
	2.1.3.1 Peta Wilayah Perencanaan	II	18
	2.1.3.2 Peta Wilayah Fungsional	II	20
	2.1.3.3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	II	20
	2.1.3.4 Jasa Lingkungan Penyediaan	II	21
	2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II	31
	2.1.4.1 Konsumsi Listrik Per Kapita	II	31
	2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	II	33
	2.1.4.3 Kapasitas Air Baku	II	34
	2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II	36
	2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II	37
	2.1.5.2 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	II	37

2.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	II	39
2.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II	40
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II	40
2.1.7 Demografi	II	41
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	43
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II	44
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	II	44
2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan	II	45
2.2.1.3. PDRB Per Kapita	II	46
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	II	46
2.2.1.5. Indeks Gini	II	47
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	II	48
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	II	49
2.2.2.1 Usia Harapan Hidup	II	49
2.2.2.2 Prevalensi Stunting Pada Balita	II	50
2.2.2.3 Angka Kematian Ibu	II	51
2.2.2.4 Angka Kematian Bayi dan Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	II	52
2.2.2.5 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis	II	53
2.2.2.6 Cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II	53
2.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	II	54
2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah	II	54
2.2.3.2 Angka Literasi/ Numerasi	II	55
2.2.3.3 Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	II	56
2.2.3.4 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II	56
2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	II	57
2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	II	57
2.2.4.2 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	II	58
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II	58
2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	II	58
2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II	59
2.2.5.3 Indeks Zakat Nasional	II	60
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	II	60
2.2.6.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	II	60
2.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender	II	60

2.2.6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	II	61
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	62
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II	63
2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II	63
2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan	II	63
2.3.2.2 Pengembangan Pariwisata	II	64
2.3.2.3 Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	II	66
2.3.2.4 PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	II	66
2.3.2.5 Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi Bangka Belitung	II	67
2.3.2.6 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	II	68
2.3.2.7 Pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang	II	68
2.3.2.8 Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik	II	69
2.3.2.9 Tingkat Penguasaan IPTEK	II	70
2.3.2.10 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II	71
2.3.3. Transformasi Digital	II	72
2.3.3.1 Indeks Masyarakat Digital	II	73
2.3.3.2 Indeks Pemerintah Digital	II	73
2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II	74
2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto	II	74
2.3.4.2 Net Ekspor Barang dan Jasa	II	75
2.3.5. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II	76
2.3.5.1 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	II	77
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro	II	77
2.3.6.1 Tingkat Inflasi	II	77
2.3.6.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	II	78
2.3.6.3 Indeks Akses Keungan Daerah	II	79
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II	80
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II	80
2.4.1.1 Nilai SAKIP	II	80
2.4.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi	II	81
2.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum	II	81
2.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik	II	82
2.4.1.5 Indeks Integritas Nasional	II	82
2.4.1.6 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	II	83
2.4.1.7 Indeks Harmoni Indonesia	II	83
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II	83
2.4.2.1 Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	II	84
2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM	II	85

	2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II	85
	2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II	86
	2.5 Gambaran Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	II	101
	2.5.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024	II	101
	2.5.1.1 Kinerja Pendapatan	II	101
	2.5.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah	II	109
	2.5.2. Neraca Daerah	II	110
	2.5.2.1 Aset	II	110
	2.5.2.2 Kewajiban	II	111
	2.5.2.3 Ekuitas Dana	II	111
	2.5.2.4 Rasio Keuangan	II	118
	2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah	II	121
	2.5.3.1 Proyeksi Pendapatan	II	121
	2.5.3.2 Proyeksi Belanja	II	126
	2.5.3.3 Proyeksi Pembiayaan	II	133
	2.5.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan	II	140
	2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	II	145
	2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II	145
	2.6.2. Isu Pembangunan Daerah	II	153
	2.6.2.1 Isu Global	II	153
	2.6.2.2 Isu Nasional	II	156
	2.6.2.3 Isu Strategis Daerah	II	164
	2.6.3. Perumusan Isu Strategis Kota Pangkal Pinang	II	180
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1. Visi	III	2
	3.1.2. Misi	III	5
	3.1.3. Tujuan dan Sasaran	III	9
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	32
	3.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJM Daerah Tahun2025-2029	III	32
	3.2.1.1. Strategi RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025 – 2029	III	32
	3.2.1.2. Arah Kebijakan RPJM Daerah Tahun 2025-2029	III	38
	3.2.1.3. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkal Pinang 2025-2029	III	41
	3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029	III	74

	3.2.3. Program-Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang 2025 – 2029	III	101
	3.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	124
	3.2.4.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJM Nasional 2025 – 2029	III	124
	3.2.4.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kota Pangkal Pinang 2025 – 2045	III	127
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV	89
	4.2.1 Indikator Kinerja Makro	IV	89
	4.2.2 Indikator Kinerja Utama	IV	91
	4.2.3 Indikator Kinerja Daerah	IV	93
	4.2.5 Indikator Kinerja Kunci	IV	105
BAB V	**PENUTUP**	**V**	**1**
	5.1. Kaidah Pelaksanaan	V	1
	5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJM Daerah	V	2
	5.3. Perubahan RPJM Daerah	V	3
	5.4. Pedoman Transisi	V	3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pangkal Pinang	II	2
Tabel 2.2	Kondisi Topografi di Kota Pangkal Pinang	II	3
Tabel 2.3	Kondisi Kemiringan Lereng di Kota Pangkal Pinang	II	5
Tabel 2.4	Kondisi Morfologi di Kota Pangkal Pinang	II	6
Tabel 2.5	Kondisi Jenis Tanah di Kota Pangkal Pinang	II	8
Tabel 2.6	Kondisi Curah Hujan di Kota Pangkal Pinang	II	9
Tabel 2.7	Kondisi Batuan Geologi di Kota Pangkal Pinang	II	10
Tabel 2.8	Produksi Kepiting Bakau di Kota Pangkal Pinang	II	14
Tabel 2.9	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Wilayah Kota Pangkal Pinang	II	19
Tabel 2.10	Persebaran luas kelas jasa penyediaan pangan	II	22
Tabel 2.11	Persebaran Luas Kelas Jasa Penyediaan Air Setiap Penggunaan Lahan (Ha)	II	25
Tabel 2.12	Persebaran Luas Kelas Jasa Penyediaan Serat pada Penutup Lahan (Ha)	II	29
Tabel 2.13	Perhitungan Konsumsi Listrik Per Kapita 2020 – 2040 (KwH)	II	32
Tabel 2.14	Pembangunan Kualitas lingkungan hidup di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	37
Tabel 2.15	Akses Sanitasi Layak (%) Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	38
Tabel 2.16	Akses Sanitasi Aman (%)di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	39
Tabel 2.17	Jumlah Timbulan Sampah (Ton) dan Jumlah Sampah Terolah (Ton)	II	39
Tabel 2.18	Data Kependudukan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	42
Tabel 2.19	Proyeksi Penduduk di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030	II	43
Tabel 2.20	Indikator Kemiskinan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	45
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator IPM Kota Pangkal Pinang Tahun	II	49
Tabel 2.22	Persentase Satuan Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional	II	55
Tabel 2.23	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	II	57
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024	II	63
Tabel 2.25	Indikator Pengembangan Pariwisata di Kota Pangkal Pinang	II	65
Tabel 2.26	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	II	68
Tabel 2.27	Pelaku UMKM Berdasarkan Sektor Usaha di Kota Pangkal Pinang Tahun 2024	II	69
Tabel 2.28	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	II	75
Tabel 2.29	Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Pangkal Pinang	II	75
Tabel 2.30	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023	II	77

Tabel 2.31	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	81
Tabel 2.32	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kota Pangkal Pinang	II	82
Tabel 2.33	Perkembangan Indeks Integritas Nasional (IIN)	II	82
Tabel 2.34	Capaian Indikator Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dan Gangguan Tantribum yang dapat diselesaikan	II	84
Tabel 2.35	Capaian Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	84
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2019)	II	86
Tabel 2.37	Realisasi Pendapatan Daerah di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II	103
Tabel 2.38	Target dan Realisasi Pendapatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II	105
Tabel 2.39	Kategori Kemandirian Keuangan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	106
Tabel 2.40	Target dan Realisasi Belanja di Kota Pangkal Pinang	II	110
Tabel 2.41	Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	112
Tabel 2.42	Rasio Lancar di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	118
Tabel 2.43	Rasio Hutang di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	119
Tabel 2.44	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	120
Tabel 2.45	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	120
Tabel 2.46	Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	121
Tabel 2.47	Proyeksi Pendapatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Dalam Juta)	II	124
Tabel 2.48	Proyeksi Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Dalam Juta)	II	129
Tabel 2.49	Proyeksi APBD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam Juta)	II	133
Tabel 2.50	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Rp Juta)	II	140
Tabel 2.51	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Dalam Jutaan)	II	143
Tabel 2.52	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Pembangunan OPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	143
Tabel 2.53	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (juta rupiah)	II	144
Tabel 2.54	Permasalahan Perurusan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang	II	151

Tabel 2.55	Highlight Intervensi RPJMN 2025-2029 terhadap Kota Pangkal Pinang	II	159
Tabel 2.56	Lokasi Prioritas dan Intervensi Kebijakan Kota Pangkal Pinang	II	165
Tabel 2.57	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang	II	168
Tabel 2.58	Rumusan Isu Strategis RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang	II	183
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang	III	8
Tabel 3.2	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029	III	9
Tabel 3.3	Keterkaitan antara Visi. Misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029	III	13
Tabel 3.4	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Perangkat Daerah	III	18
Tabel 3.5	Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029	III	35
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029	III	38
Tabel 3.7	Program Prioritas Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029	III	75
Tabel 3.8	Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029	III	102
Tabel 3.9	Keselarasan Program Strategis Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi	III	122
Tabel 3.10	Dukungan Program Daerah Terhadap Program Strategis Nasional	III	126
Tabel 3.11	Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan RTRW 2025 – 2045	III	128
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029	IV	2
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030	IV	90
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030	IV	92
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030	IV	94
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030	IV	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I	9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pangkal Pinang	II	3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Pangkal Pinang	II	4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kota Pangkal Pinang	II	5
Gambar 2.4	Peta Morfologi Kota Pangkal Pinang	II	7
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kota Pangkal Pinang	II	8
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kota Pangkal Pinang	II	9
Gambar 2.7	Peta Geologi Kota Pangkal Pinang	II	11
Gambar 2.8	Peta Hidrologi Kota Pangkal Pinang	II	12
Gambar 2.9	Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang	II	12
Gambar 2.10	Peta Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang	II	13
Gambar 2.11	Peta Wilayah Perencanaan Kota Pangkal Pinang	II	19
Gambar 2.12	Peta Wilayah Fungsional Kota Pangkal Pinang	II	20
Gambar 2.13	Peta Indikasi Status D3TLH (Air) Kota Pangkal Pinang	II	21
Gambar 2.14	Profil Jasa Penyediaan Pangan Kota Pangkal Pinang	II	22
Gambar 2.15	Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Pangan Kota Pangkal Pinang	II	24
Gambar 2.16	Profil Jasa Penyediaan Air Kota Pangkal Pinang	II	25
Gambar 2.17	Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Air Kota Pangkal Pinang	II	27
Gambar 2.18	Profil Jasa Penyediaan Energi/Bahan Bakar Kota Pangkal Pinang	II	29
Gambar 2.19	Peta Indikatif Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar Kota Pangkal Pinang	II	31
Gambar 2.20	Jumlah Pelanggan Listrik Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	32
Gambar 2.21	Indeks Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	33
Gambar 2.22	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	34
Gambar 2.23	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	35
Gambar 2.24	Sumber Air Baku Kota Pangkal Pinang	II	36
Gambar 2.25	Grafik Akses Sanitasi Aman Kota Pangkal Pinang	II	38
Gambar 2.26	Indeks Risiko Bencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	40
Gambar 2.27	Indeks Ketahanan Daerah Kota Pangkal Pinang 2021 – 2025	II	41
Gambar 2.28	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	42
Gambar 2.29	Grafik Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkal Pinang	II	44
Gambar 2.30	PDRB Per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	46
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nsional Tahun 2021 – 2025	II	47
Gambar 2.32	Indeks Gini Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023	II	48

Gambar 2.33	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024 Tahun)	II	49
Gambar 2.34	Prevalensi Stunting Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Berdasarkan SSGI dan SKI Tahun 2021-2024	II	50
Gambar 2.35	Prevalensi Stunting dan Jumlah Balita Stunting Kota Pangkal Pinang berdasarkan EPPBGM Tahun 2021-2025	II	50
Gambar 2.36	Angka Kematian Ibu Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	51
Gambar 2.37	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021 – 2025 Kota Pangkal Pinang	II	52
Gambar 2.38	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage)* (%) Kota Pangkal Pinang	II	53
Gambar 2.39	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)Kota Pangkal Pinang	II	54
Gambar 2.40	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025 (Tahun)	II	55
Gambar 2.41	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	56
Gambar 2.42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Level Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2023	II	58
Gambar 2.43	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024	II	59
Gambar 2.44	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2023	II	61
Gambar 2.45	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Pangkal Pinang	II	61
Gambar 2.46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Pangkal Pinang	II	62
Gambar 2.47	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	II	64
Gambar 2.48	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	II	65
Gambar 2.49	Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Tahun 2022-2024	II	66
Gambar 2.50	Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	67
Gambar 2.51	Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 – 2025	II	67
Gambar 2.52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025	II	70
Gambar 2.53	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang	II	71
Gambar 2.54	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021 – 2025	II	72
Gambar 2.55	Grafik Indeks Masyarakat Digital Kota Pangkal Pinang	II	73
Gambar 2.56	Indeks SPBE Kota Pangkal Pinang Tahun 2023-2024	II	74
Gambar 2.57	Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025 (Rp. Milyar)	II	76
Gambar 2.58	Inflasi di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024	II	78
Gambar 2.59	Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023	II	79
Gambar 2.60	Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang	II	79
Gambar 2.61	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 s.d 2025	II	80

Gambar 2.62	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025	II	85
Gambar 2.63	Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pangkal Pinang 2020 – 2024	II	106
Gambar 2.64	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang 2020 – 2024	II	107
Gambar 2.65	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Pangkal Pinang	II	108
Gambar 2.66	Rasio Efektivitas Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 – 2024	II	109
Gambar 2.67	Target Belanja Operasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	126
Gambar 2.68	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (%)	II	128
Gambar 2.69	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	128
Gambar 2.70	Permasalahan Daerah Kota Pangkal Pinang	II	145
Gambar 2.71	Tingkat Pengangguran dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	II	146
Gambar 2.72	Isu Global yang Sesuai dengan Kondisi Pangkal Pinang	II	153
Gambar 2.73	Isu Nasional yang Sesuai dengan Pangkal Pinang	II	156
Gambar 2.74	Sistem Pusat Pelayanan Kota Pangkal Pinang	II	171
Gambar 2.75	Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota Pangkal Pinang	II	172
Gambar 2.76	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pangkal Pinang	II	173
Gambar 2.77	Peta Rencana Pola Ruang Kota Pangkal Pinang	II	174
Gambar 2.78	Bagan Rencana Kawasan Strategis Kota Pangkal Pinang	II	175
Gambar 2.79	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota Pangkal Pinang	II	175
Gambar 3.1.	Konsep RPJM Daerah	III	2
Gambar 3.2.	Keselarasan Visi RPJMD Kota Pangkal Pinang dengan Visi RPJMN dan Provinsi Bangka Belitung	III	4
Gambar 3.3.	Tema Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2026-2030	III	33
Gambar 3.4.	Pengembangan Kewilayahan di Kepulauan Bangka Belitung pada RPJMN 2025-2029	III	122



source: atapnegeri

01
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pangkal Pinang memiliki keunikan yang tercermin dari perpaduan budaya Melayu, Tionghoa dan etnis lainnya yang hidup berdampingan sejak berabad-abad. Harmoni ini tampak pada tradisi, kuliner, hingga arsitektur kawasan kotanya. Selain itu, Kota Pangkal Pinang memiliki potensi pariwisata yang kuat, baik dari sisi alam maupun sejarah. Pantai Pasir Padi menjadi salah satu destinasi unggulan dengan garis pantai yang panjang dan ombak yang tenang. Kawasan *heritage* seperti Museum Timah Indonesia juga memberikan nilai sejarah yang mendalam, mengingat Bangka Belitung merupakan salah satu pusat pertimahan terbesar di Indonesia. Dari sisi ekonomi, Kota Pangkal Pinang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, jasa dan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Infrastruktur yang terus dibenahi, terutama bandara dan pelabuhan, memperkuat peran sebagai pintu masuk utama wisatawan dan pelaku bisnis. Potensi pengembangan ekonomi kreatif mulai dari kerajinan berbahan timah hingga kuliner menjadi peluang besar bagi Kota Pangkal Pinang untuk tumbuh lebih kompetitif di masa depan.

Kontribusi Kota Pangkal Pinang terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sebesar 17,43 persen dan terhadap Pulau Bangka sebesar 22,7 persen. Untuk nilai PDRB Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Pangkal Pinang tahun 2025 terhitung sebesar Rp.20,36 triliun dan Rp.10,98 triliun untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pangkal Pinang menjadi kota utama, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan dengan perekonomian yang didukung oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah, meningkatkan daya saing, serta memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pangkal Pinang di dukung dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif lebih baik melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Pangkal Pinang mencapai angka 81,64 di tahun 2025, yang jauh melampaui rata-rata IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 75,26 dan nasional sebesar 75,90. Capaian-capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi pembangunan Kota Pangkal Pinang terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

Sebagai simpul utama pembangunan wilayah, Kota Pangkal Pinang memikul tanggung jawab strategis dalam merancang arah pembangunan yang terarah, responsif dan inklusif. Pemerintah kota perlu menyusun kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam menjamin keterjangkauan pendidikan, kesehatan, perumahan dan lapangan kerja berkualitas. Seluruh pendekatan ini harus ditopang oleh tata kelola yang bersih, adaptif terhadap teknologi, partisipatif, berpihak pada kepentingan warga dan tanggap terhadap tantangan zaman. Selain itu pembangunan kota harus dirancang dengan tata ruang yang akurat, adil dan berbasis data, agar pertumbuhan fisik tidak melahirkan ketimpangan spasial maupun degradasi lingkungan hidup.

Dengan dilantiknya Prof. H. Saparudin, Ph.D sebagai Wali Kota dan Dessy Ayutrisna, S.E., M.M sebagai Wakil Wali Kota pada tanggal 15 Oktober 2025, maka pembangunan Kota Pangkal Pinang periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama. Selain itu, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memuat bahwa penyusunan RPJM Daerah harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menyusun RPJM Daerah Tahun 2025–2029 yang sekaligus merupakan operasionalisasi RPJP Daerah Tahun 2025-2045 tahap pertama.

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2045 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 serta RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasi, dengan mengutamakan dukungan terhadap pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta Babel Berdaya 2029. Pedoman teknis penyusunan RPJM Daerah secara lebih lanjut juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya menjadikan dokumen rencana jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengintegrasikan hasil evaluasi RPJM Daerah periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic* model, berfikir sistem dan sistem dinamik. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Daerah. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan *pentahelix*-ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*), serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas guna memastikan bahwa arah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Kota Pangkal Pinang.

Penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan/ simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJM Daerah dan Renstra PD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Aspek strategis dan politis RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, antara lain:

1) Media untuk melaksanakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang pada saat kampanye sesuai dengan kaidah perencanaan;
2) Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
3) Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan perencanaan;

4) Pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5) Instrumen untuk mengukur ketercapaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dinamika pembangunan yang dihadapi seperti urbanisasi, transformasi digital, perubahan iklim dan tantangan ketimpangan sosial, menuntut perencanaan yang adaptif, berbasis data serta berorientasi pada hasil. Untuk itu, dokumen RPJM Daerah 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sinergi antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui semangat kolaborasi dan inovasi, dokumen RPJM Daerah diharapkan mampu menjadi landasan kokoh dalam mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6949);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

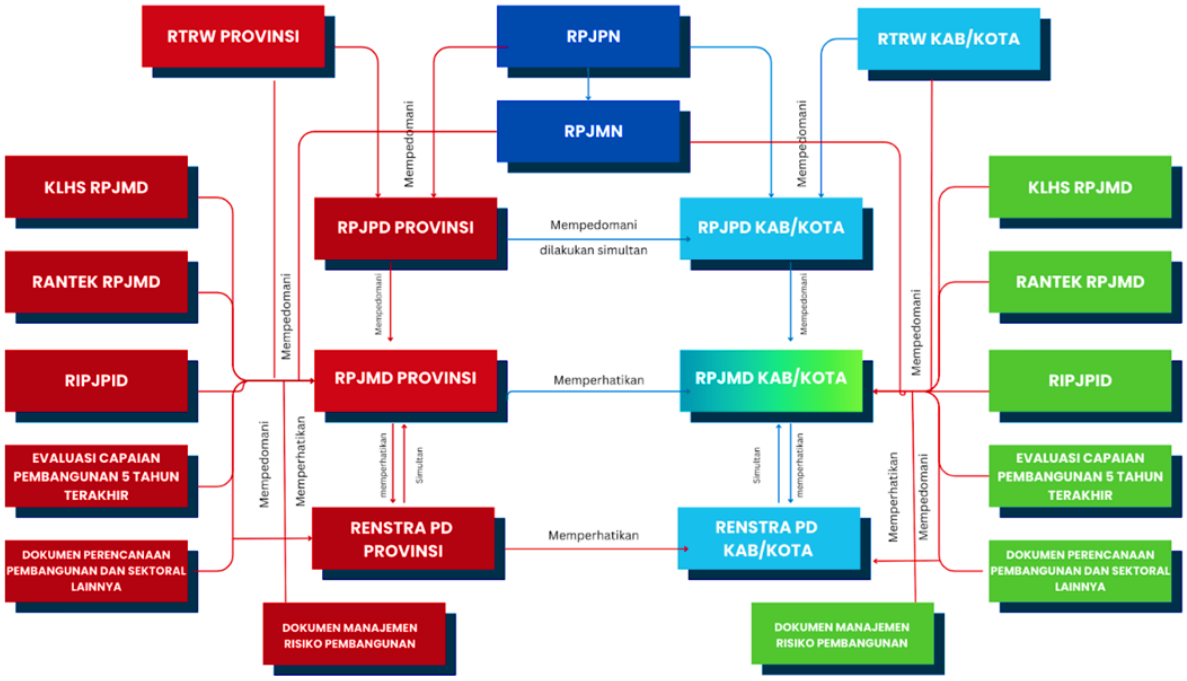
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011 -2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dan provinsi (RPJM Daerah Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJM Daerah yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJM Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)*

Penjelasan dari gambar keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral di atas sebagai berikut:

1. **Hubungan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029**

   Keterkaitan antara RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 terletak pada keselarasan arah pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Aspek penyelarasan mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029. RPJM Nasional memberikan kerangka besar pembangunan Indonesia, seperti penguatan ekonomi nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, transformasi digital, serta pembangunan berkelanjutan. Kerangka ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam RPJM Daerah menjadi program dan kegiatan yang lebih operasional sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, RPJM Daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan target-target nasional ke dalam konteks daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur kota, penguatan daya saing ekonomi lokal,

penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Melalui keterpaduan perencanaan tersebut, pembangunan Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi spesifik yang dimiliki daerah.

2. Hubungan RPJM Daerah dengan RPJP Daerah, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJM Daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi tahap I RPJP Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pangkal Pinang diarahkan pada kebijakan "Penguatan Fondasi". Tahap ini dilakukan dengan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, penyiapan kompetensi, kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, digitalisasi pelayanan publik, penguatan kapasitas masyarakat sipil, meningkatkan kondusivitas wilayah yang damai dan demokratis, pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup, pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkualitas, peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik dan terakhir optimalisasi keberlanjutan pembangunan.

Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dokumen RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Penetapan sasaran, indikator sasaran dan target harus mengacu pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Daerah serta menjadi indikator kinerja utama kepala daerah. Sasaran dan indikator pada dokumen Renstra PD akan menjadi indikator kinerja kepala perangkat daerah, yang akan dijabarkan pada program, *outcome* program, kegiatan dan *output* kegiatan beserta targetnya yang menjadi indikator kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra-PD ini mutlak untuk dilakukan proses *cascading* dari tujuan, sasaran, indikator, target dan program dalam dokumen RPJM Daerah ke dalam sasaran, indikator sasaran, target, program, *outcome* program, kegiatan dan *output* kegiatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Integrasi antara RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

merupakan wujud dari sistem perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berorientasi hasil. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menjaga kesinambungan dan akuntabilitas pembangunan melalui:

a. Penyelarasan indikator kinerja antar dokumen;
b. Penguatan peran BAPPERIDA sebagai koordinator perencanaan;
c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan berbasis digital; dan
d. Pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

Melalui integrasi ini, pembangunan Kota Pangkal Pinang diarahkan untuk lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan peluang strategis di tingkat lokal, regional dan nasional.

3. Hubungan RPJM Daerah dengan RTRW Kota Pangkal Pinang

Penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030. Integrasi RPJM Daerah dan RTRW Kota Pangkal Pinang dilakukan melalui pendekatan sinkronisasi kebijakan, harmonisasi spasial, dan penguatan kelembagaan. Setiap program prioritas dalam RPJM Daerah, seperti pengembangan kawasan ekonomi, peningkatan konektivitas, revitalisasi ruang publik, dan penguatan layanan dasar, dirancang agar selaras dengan arahan zonasi dan struktur ruang dalam RTRW. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terarah secara substansi, tetapi juga tertata secara spasial, menghindari konflik pemanfaatan ruang dan mendorong efisiensi investasi.

Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tantangan dan peluang strategis dalam pengelolaan ruang. Oleh karena itu, RPJM Daerah mendorong pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi, serta memperkuat peran RTRW sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Integrasi ini juga diwujudkan melalui forum koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sistem informasi geospasial, dan penyelarasan antara perencanaan tahunan (RKPD) dengan rencana tata ruang.

Dengan sinergi RPJM Daerah dan RTRW, pembangunan Kota Pangkal Pinang diarahkan untuk menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta memperkuat identitas kota sebagai mandala pengembangan perdagangan, jasa, ekonomi kreatif dan ekonomi digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Hubungan RPJM Daerah dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis inovasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menempatkan integrasi antara RPJM Daerah dan Rencana Induk serta Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) sebagai strategi utama dalam penguatan daya saing dan transformasi tata kelola.

RPJM Daerah sebagai dokumen strategis lima tahunan menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, RIPJPID berfungsi sebagai peta jalan teknis dan kelembagaan untuk mendorong pemanfaatan riset, teknologi, dan inovasi secara sistematis dan terukur dalam mendukung pencapaian target RPJM Daerah.

Integrasi kedua dokumen ini diwujudkan melalui:

a. Sinkronisasi program prioritas RPJM Daerah dengan agenda riset dan inovasi dalam RIPJPID, seperti pengembangan ekonomi biru, *smart city*, dan sistem informasi geospasial.
b. Penguatan kelembagaan riset daerah sebagai simpul koordinasi pemajuan IPTEK daerah yang mendukung perencanaan berbasis bukti dan inovasi.
c. Penyelarasan indikator kinerja pembangunan dengan indikator pemajuan IPTEK, sehingga pencapaian pembangunan dapat diukur secara holistik.
d. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas inovator lokal, untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah.

Dengan integrasi RPJM Daerah dan RIPJPID, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menjadikan IPTEK sebagai fondasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi kota sebagai mandala pengembangan perdagangan, jasa, ekonomi kreatif dan ekonomi digital di Kepulauan Bangka Belitung.

5. Hubungan RPJM Daerah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menempatkan KLHS sebagai instrumen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJM Daerah. KLHS RPJM Daerah disusun

untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah telah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta potensi risiko ekologis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 terdapat 8 (delapan) isu pembangunan paling strategis, yaitu

1) Rendahnya kualitas dan kuantitas air bersih;
2) Alih fungsi lahan;
3) Penurunan kualitas udara;
4) Belum optimalnya tata kelola dan pengolahan sampah dan limbah B3;
5) Tingginya risiko bencana alam terutama akibat perubahan iklim;
6) Kerusakan ekosistem;
7) Stabilitas ekonomi wilayah yang rendah; dan
8) Inkonsistensi Ruang.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menjadikan KLHS sebagai bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan, sehingga setiap langkah pembangunan senantiasa berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antar dimensi pembangunan.

6. Hubungan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang dengan Dokumen perencanaan sektoral

Keterkaitan antara RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang dan dokumen perencanaan sektoral bersifat saling melengkapi karena dokumen sektoral merupakan penjabaran lebih teknis dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah. RPJM Daerah menetapkan visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kota dalam lima tahun, sedangkan dokumen perencanaan sektoral seperti rencana pembangunan yang memberikan rincian strategis serta kebutuhan teknis pada masing-masing bidang. Dengan demikian, setiap rencana sektoral harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan target dan kebijakan yang termuat dalam RPJM Daerah.

Hubungan ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan pada setiap sektor berjalan sinkron dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Dokumen sektoral berfungsi memperdalam analisis kebutuhan dan menyediakan arah teknis yang lebih spesifik, sementara RPJM Daerah menjaga agar seluruh sektor bergerak dalam kerangka pembangunan kota yang terintegrasi. Melalui keterpaduan tersebut, perencanaan sektoral tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam konsistensi dan efektivitas pembangunan Kota Pangkal Pinang selama periode 2025–2029.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Pangkal Pinang pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang periode 2025-2029;
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Kota Pangkal Pinang serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2045;
4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Kota Pangkal Pinang yang merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota sampai dengan tahun 2030 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkal Pinang yang merupakan

perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan Kota Pangkal Pinang;
8) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
9) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kota Pangkal Pinang sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan permasalahan serta isu strategis daerah di Kota Pangkal Pinang.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan Kota Pangkal Pinang.

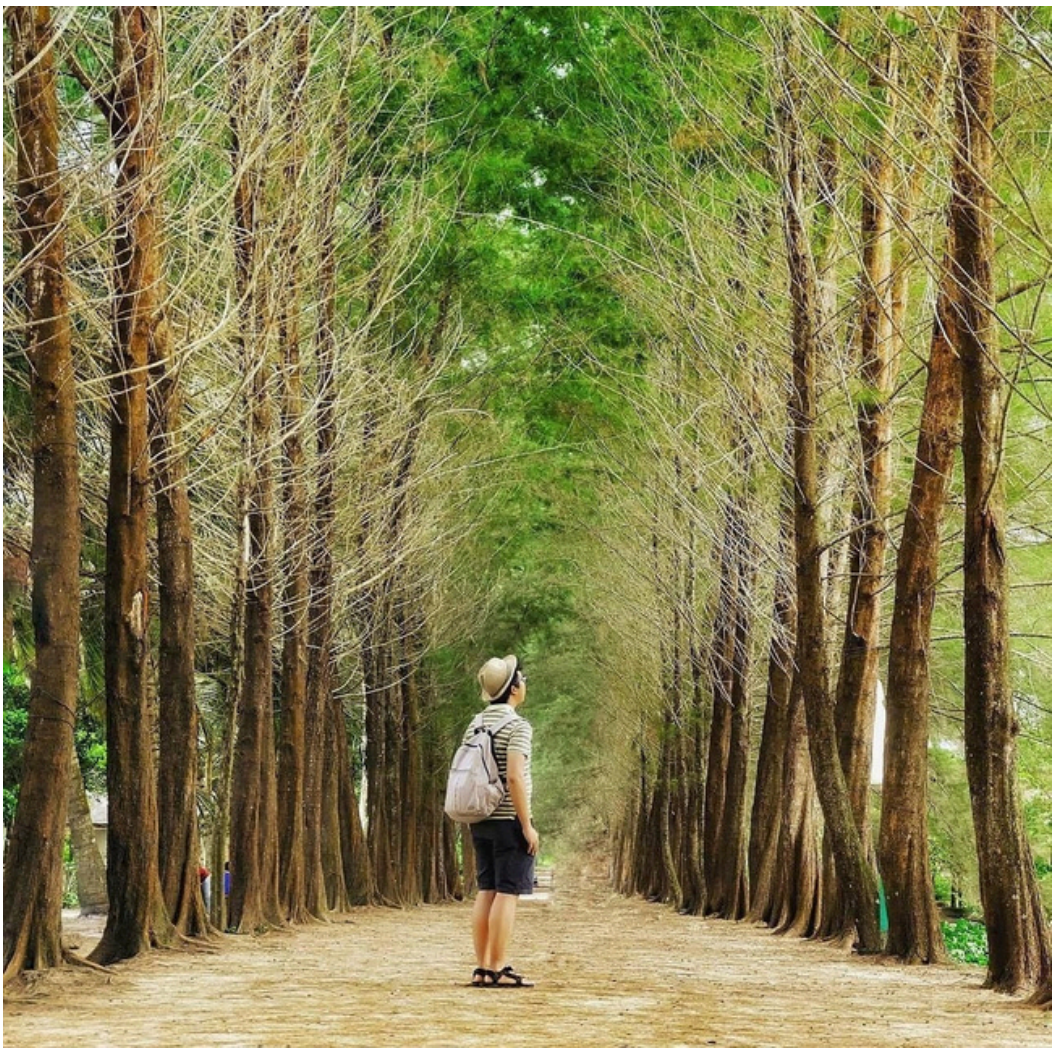
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



source: explorebangka

02
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Dengan memahami aspek geografis dan demografis secara mendalam, RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang menegaskan bahwa pembangunan harus berakar pada potensi lokal, sekaligus responsif terhadap tantangan global. Geografi memberikan panggung, demografi menghadirkan aktor, dan kebijakan pembangunan menjadi naskah yang memastikan harmoni antara keduanya.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang menempati posisi strategis yang tidak hanya menentukan arah pertumbuhan wilayah sekitarnya, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Letak geografis yang berada di jalur perdagangan dan mobilitas antar pulau menjadikan Pangkal Pinang sebagai simpul penting dalam konektivitas regional, pusat pelayanan pemerintahan, serta motor penggerak ekonomi berbasis jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Peran strategis daerah ini semakin diperkuat oleh potensi sumber daya manusia yang dinamis, keberagaman sosial budaya yang harmonis, serta kekayaan alam dan lingkungan pesisir yang mendukung pengembangan sektor unggulan. Pangkal Pinang bukan hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan budaya yang menjembatani kepentingan lokal dengan agenda pembangunan nasional dan global.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkal Pinang secara geografis terletak pada koordinat 02°03’ – 02°10’ Lintang Selatan dan 106°02’ – 106°12’ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas total sebesar 10.454,15 hektare dan terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu Bukit Intan, Gabek, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangkui, dan Taman Sari. Adapun batas-batas wilayah Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
- Sebelah Utara : Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka
- Sebelah Barat : Selat Karimata
- Sebelah Timur : Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang hanya mencakup sekitar 0,62 persen, menjadikannya sebagai wilayah dengan luas terkecil di antara kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, posisi Kota Pangkal Pinang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah bagian timur Pulau Bangka dan mudah dijangkau dari berbagai wilayah sekitarnya. Lokasi tersebut menjadikan Pangkal Pinang sebagai simpul penting transportasi dan perdagangan antar daerah di Pulau Bangka. Selain itu, karakter wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Karimata memberikan potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan jasa maritim. Berdasarkan data dari Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang memiliki 7 kecamatan dengan luas sebagai berikut:

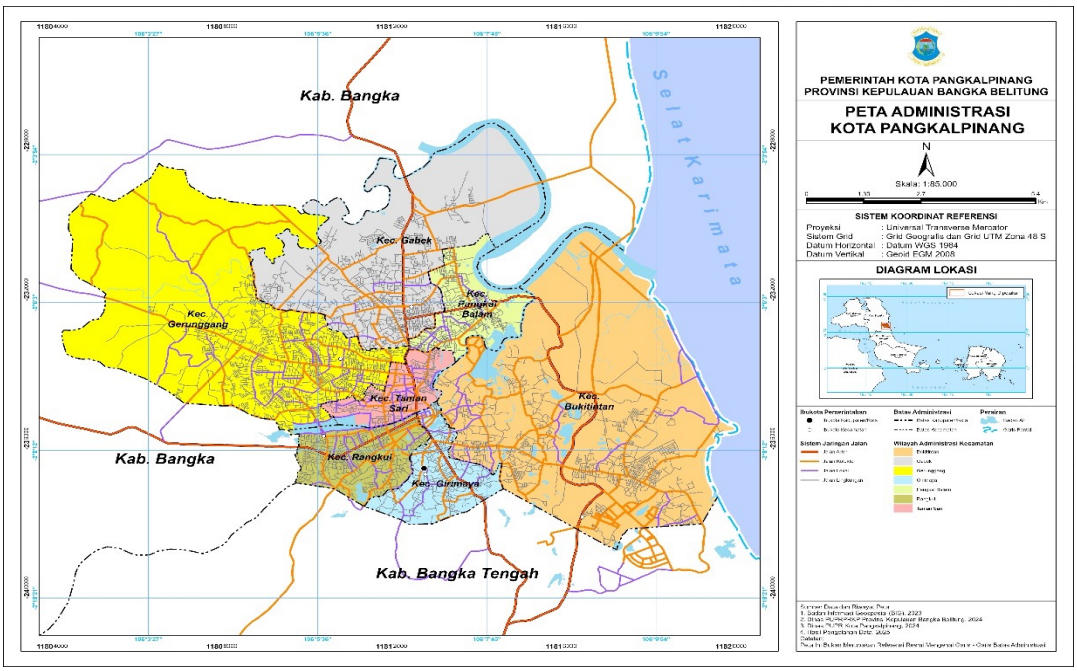
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
Rangkui	Keramat	501,11
Bukit Intan	Air Itam	3.568,01
Girimaya	Sriwijaya	434,72
Pangkal Balam	Ketapang	478,97
Gabek	Gabek Satu	2.040,78
Tamansari	Kejaksaan	321,48
Gerunggang	Bukit Merapin	3.109,09
Jumlah (Pangkal Pinang)		**10.454,15**

Sumber : Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024

Meskipun wilayahnya relatif kecil, struktur pembagian kecamatan tersebut menunjukkan distribusi ruang yang beragam dalam mendukung fungsi perkotaan.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Pangkal Pinang



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2023

2.1.1.2. Kondisi Topografi

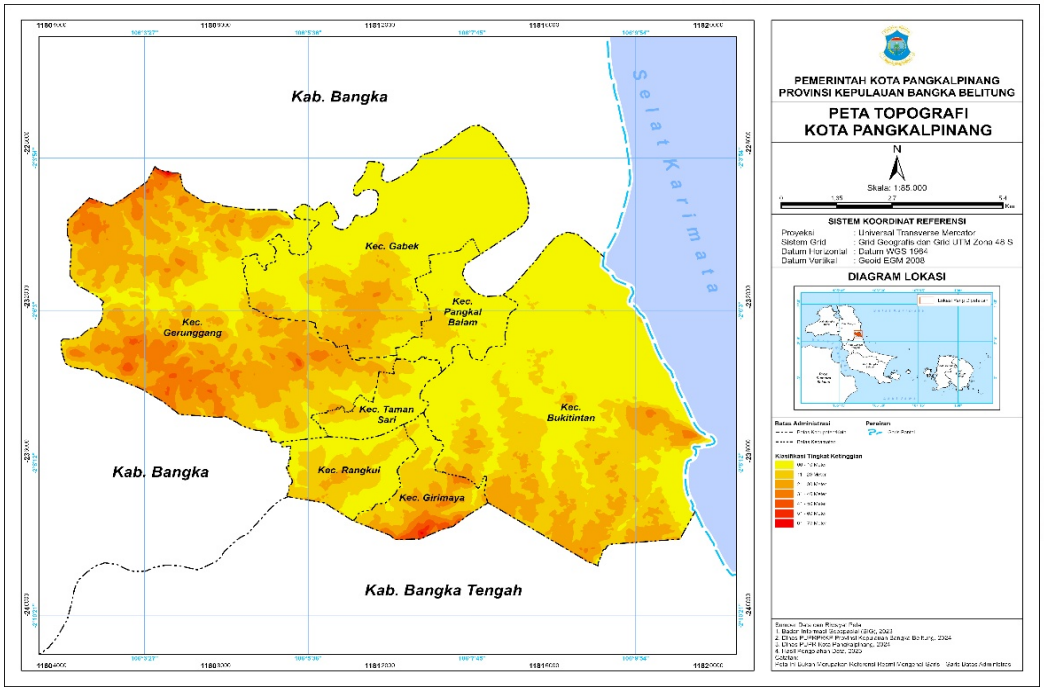
Topografi merupakan gambaran bentuk permukaan bumi yang ditunjukkan melalui variasi ketinggian suatu wilayah terhadap permukaan laut. Pemahaman terhadap kondisi topografi menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Berikut dilampirkan data sebaran ketinggian topografi Kota Pangkal Pinang yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Ketinggian Meter di Atas Permukaan Laut							Total (Ha)
		00 - 10 M	11 - 20 M	21 - 30 M	31 - 40 M	41 - 50 M	51 - 60 M	61 - 70 M	
1	Bukit Intan	2.102,34	1.032,66	406,57	9,90				**3.551,47**
2	Gabek	1.426,52	432,44	177,92	2,45				**2.039,33**
3	Gerunggang	501,26	1.055,98	1.188,79	347,19	17,78	2,12	0,88	**3.113,99**
4	Girimaya	80,93	187,44	110,82	42,95	23,19	4,04	0,24	**449,61**
5	Pangkal Balam	418,49	53,79	0,03					**472,30**
6	Rangkui	250,86	236,83	16,35					**504,04**
7	Taman Sari	232,04	83,18	3,79					**319,02**
Total		**5.012,44**	**3.082,30**	**1.904,28**	**402,49**	**40,97**	**6,16**	**1,12**	**10.449,76**
Persentase		**47,97%**	**29,50%**	**18,22%**	**3,85%**	**0,39%**	**0,06%**	**0,01%**	**100 %**

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Gambar 2. 2
Peta Topografi Kota Pangkal Pinang



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Secara sederhana, peta ini menjelaskan bahwa hampir setengah wilayah Kota Pangkal Pinang berada di tanah yang rendah, sehingga lebih mudah tergenang apabila terjadi hujan deras. Misalnya, sebagian besar Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Tamansari masuk dalam kategori dataran rendah tersebut. Sementara itu, ada juga wilayah yang agak lebih tinggi, seperti di Kecamatan Gerunggang, sehingga relatif lebih aman dari banjir. Namun, daerah yang benar-benar tinggi jumlahnya sangat sedikit, hanya terdapat di sebagian kecil wilayah Girimaya dan Gerunggang. Dengan kata lain, Kota Pangkal Pinang umumnya datar sehingga mendukung berbagai aktivitas pembangunan, tetapi juga memerlukan perhatian serius dalam hal pengendalian banjir dan tata kelola air.

2.1.1.3. Kondisi Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan tingkat kemiringan permukaan tanah yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kesesuaian lahan untuk pembangunan maupun kegiatan lainnya. Analisis kemiringan lereng bermanfaat untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan longsor, genangan air, serta menentukan fungsi ruang yang sesuai, seperti permukiman, pertanian, atau kawasan lindung. Pemahaman terhadap kondisi lereng menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.

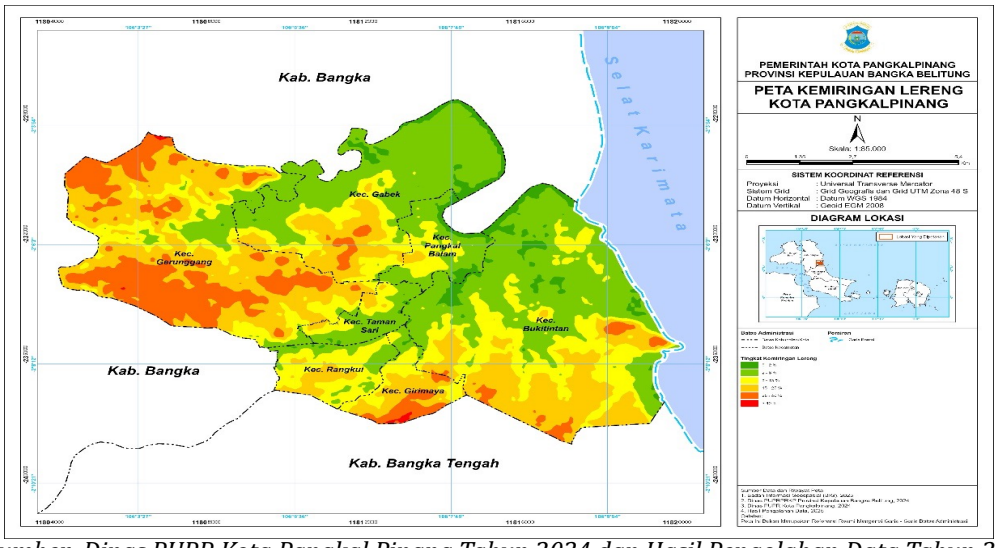
Berikut dilampirkan data sebaran tingkat kemiringan lereng Kota Pangkal Pinang yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.3
Kondisi Kemiringan Lereng di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Tingkat Kemiringan Lahan						Total (Ha)
		0 - 2 %	2 - 8 %	8 - 15 %	15 - 25 %	25 - 40 %	> 40 %	
1	Bukit Intan	228,64	1.588,66	788,98	863,86	81,34		**3.551,47**
2	Gabek	138,23	1.181,90	299,51	372,28	47,41		**2.039,33**
3	Gerunggang	1,64	289,89	446,04	1.421,31	950,05	5,05	**3.113,99**
4	Girimaya	3,55	40,44	123,77	177,72	93,38	10,75	**449,61**
5	Pangkal Balam	63,56	270,66	119,86	18,22			**472,30**
6	Rangkui	4,75	143,06	256,20	100,04			**504,04**
7	Taman Sari	8,15	204,53	73,38	32,95			**319,02**
Total		**448,51**	**3.719,16**	**2.107,74**	**2.986,38**	**1.172,17**	**15,79**	**10.449,76**
Persentase		**4,29%**	**35,59%**	**20,17%**	**28,58%**	**11,22%**	**0,15%**	**100%**

Sumber: Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Gambar 2. 3
Peta Kemiringan Lereng Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Secara sederhana, peta ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Pangkal Pinang berada di tanah yang agak miring, tidak terlalu datar dan tidak terlalu curam. Daerah yang benar-benar datar jumlahnya sedikit, misalnya di sebagian kecil Bukit Intan dan Gabek. Di sisi lain, ada juga daerah yang curam, terutama di Kecamatan Gerunggang dan Girimaya, sehingga wilayah tersebut kurang cocok untuk permukiman karena lebih rawan longsor. Dengan kata lain, Kota Pangkal Pinang umumnya punya

tanah miring ringan hingga sedang yang masih cukup aman untuk aktivitas, tetapi perlu hati-hati jika membangun di daerah yang kemiringannya curam.

2.1.1.4. Morfologi

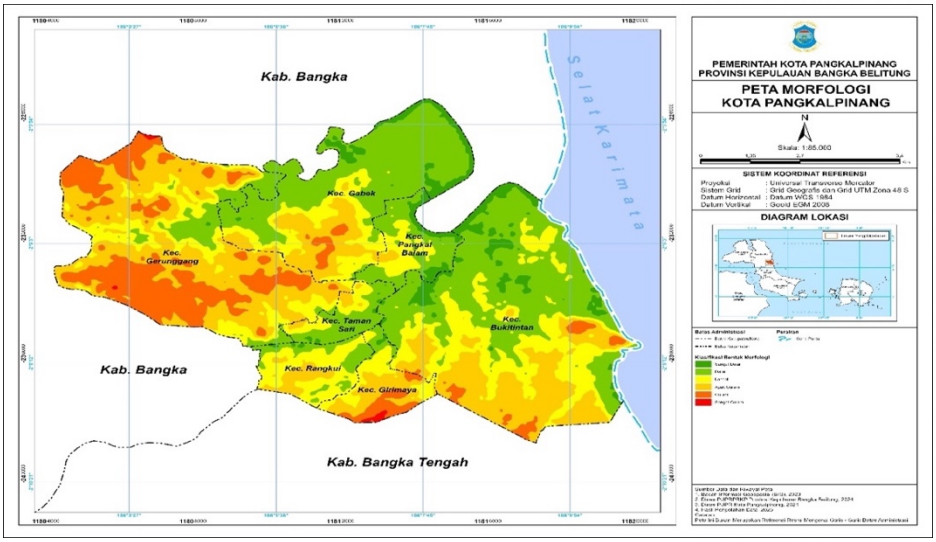
Morfologi lahan adalah gambaran bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat proses geologi maupun geomorfologi, seperti dataran, landai, perbukitan, hingga lereng curam. Analisis morfologi penting dilakukan karena bentuk lahan memengaruhi pola penggunaan ruang, aktivitas pembangunan, hingga potensi bencana. Dengan memahami morfologi, pemerintah daerah dapat menentukan arah peruntukan lahan yang sesuai, baik untuk permukiman, pertanian, maupun kawasan lindung. Berikut dilampirkan data klasifikasi bentuk morfologi Kota Pangkal Pinang yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.4
Kondisi Morfologi Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Klasifikasi Bentuk Morfologi Suatu Lahan						Total (Ha)
		Sangat Datar	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
1	Bukit Intan	228,64	1588,66	788,98	863,86	81,34		**3.551,47**
2	Gabek	138,23	1181,90	299,51	372,28	47,41		**2.039,33**
3	Gerunggang	1,64	289,89	446,04	1421,31	950,05	5,05	**3.113,99**
4	Girimaya	3,55	40,44	123,77	177,72	93,38	10,75	**449,61**
5	Pangkal Balam	63,56	270,66	119,86	18,22			**472,30**
6	Rangkui	4,75	143,06	256,20	100,04			**504,04**
7	Taman Sari	8,15	204,53	73,38	32,95			**319,02**
Total		**448,51**	**3.719,16**	**2.107,74**	**2.986,38**	**1.172,17**	**15,79**	**10.449,76**
Persentase		**4,29%**	**35,59%**	**20,17%**	**28,58%**	**11,22%**	**0,15%**	**100,00%**

Sumber: Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Gambar 2. 4
Peta Morfologi Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Secara sederhana, peta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar Kota Pangkal Pinang punya bentuk tanah yang datar dan agak miring. Daerah datar banyak terdapat di Bukit Intan dan Gabek, sehingga cocok untuk permukiman atau kegiatan pembangunan. Di sisi lain, wilayah yang lebih miring banyak dijumpai di Kecamatan Gerunggang, sehingga walaupun masih bisa dimanfaatkan, perlu hati-hati jika digunakan untuk permukiman. Daerah yang benar-benar curam jumlahnya sedikit, seperti di Gerunggang dan Girimaya, dan sebaiknya dijaga agar tidak dipakai secara berlebihan karena bisa berisiko longsor. Dengan kata lain, morfologi Kota Pangkal Pinang cukup mendukung pembangunan, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keselamatan di Daerah curam.

2.1.1.5. Kondisi Jenis Tanah

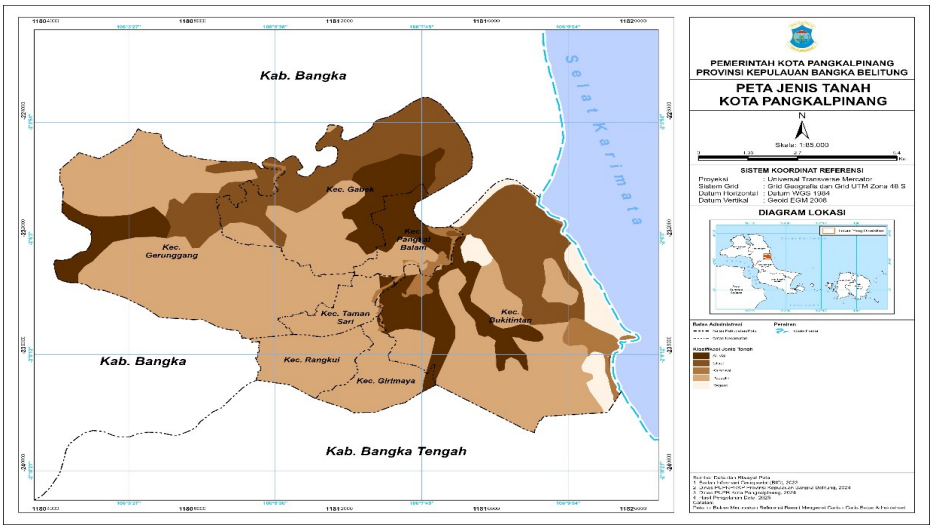
Jenis tanah merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan tata ruang karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesuburan, daya dukung lahan, serta kesesuaian lahan untuk berbagai peruntukan. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya tanah subur untuk pertanian, tanah keras untuk pembangunan, atau tanah dengan daya resapan rendah yang rentan genangan. Berikut dilampirkan data sebaran jenis tanah Kota Pangkal Pinang yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.5
Kondisi Jenis Tanah di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Klasifikasi Jenis Tanah					Total (Ha)
		Aluvial	Glisol	Kambisol	Podsolik	Regosol	
1	Bukit Intan	622,04	823,69	205,65	1.515,50	384,60	3.551,47
2	Gabek	407,38	1.033,56	6,14	592,25		2.039,33
3	Gerunggang	318,04	346,40	3,55	2.446,01		3.113,99
4	Girimaya	23,01		2,89	423,71		449,61
5	Pangkal Balam	246,57	9,13	55,62	160,99		472,30
6	Rangkui				504,04		504,04
7	Taman Sari	16,37		11,47	291,17		319,02
Total		1.633,40	2.212,77	285,32	5.933,67	384,60	10.449,76
Persentase		15,63%	21,18%	2,73%	56,78%	3,68%	100 %

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Gambar 2. 5
Peta Jenis Tanah Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Secara sederhana, peta ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah di Kota Pangkal Pinang adalah tanah *Podsolik*, yang biasanya kurang subur untuk pertanian. Namun, ada juga tanah *Aluvial* dan *Glisol* yang lebih cocok untuk tanaman, terutama di Daerah seperti Bukit Intan dan Gabek. Di sisi lain, ada jenis tanah yang jumlahnya sedikit seperti *Regosol* dan *Kambisol*, yang sifatnya lebih keras atau kurang cocok untuk banyak jenis tanaman. Dengan kata lain, tanah di Kota Pangkal Pinang bervariasi sebagian besar tidak terlalu subur, tapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan baik, sementara sebagian kecil tanah lebih mendukung pertanian.

2.1.1.6. Kondisi Curah Hujan

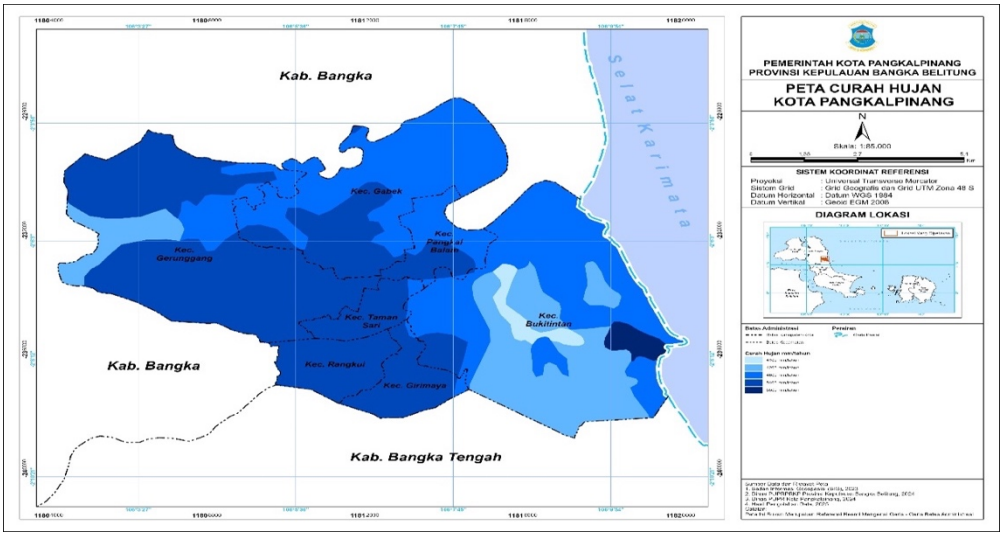
Tingkat curah hujan di Kota Pangkal Pinang bervariasi antar kecamatan, dengan nilai tahunan berkisar antara 4.100 milimeter hingga lebih dari 5.500 milimeter per tahun. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan pola intensitas hujan yang berimplikasi terhadap ketersediaan air, drainase, dan kerentanan wilayah terhadap genangan. Berikut dilampirkan data curah hujan Kota Pangkal Pinang yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.6
Kondisi Curah Hujan di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Klasifikasi Tingkat Curah Hujan Tahunan (mm/tahun)					Total (Ha)
		4100	4200	4600	5100	5500	
1	Bukit Intan	161,96	1.372,75	1.748,12	144,52	124,12	3.551,47
2	Gabek			1.447,07	592,25		2.039,33
3	Gerunggang		318,04	349,95	2.446,01		3.113,99
4	Girimaya			25,27	424,34		449,61
5	Pangkal Balam			289,47	182,84		472,30
6	Rangkui				504,04		504,04
7	Taman Sari			21,63	297,39		319,02
Total		**161,96**	**1.690,78**	**3.881,51**	**4.591,39**	**124,12**	**10.449,76**
Persentase		**1,55%**	**16,18%**	**37,14%**	**43,94%**	**1,19%**	**100 %**

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Gambar 2. 6
Peta Curah Hujan Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Secara sederhana, peta ini menunjukkan bahwa hampir setengah wilayah Kota Pangkal Pinang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, terutama di Kecamatan Gerunggang, Bukit Intan, dan Gabek. Sementara itu, wilayah dengan curah hujan sedang hingga rendah jumlahnya sangat sedikit, misalnya di sebagian kecil Bukit Intan. Dengan kata lain, Kota Pangkal Pinang pada umumnya beriklim basah, sehingga air tersedia cukup banyak untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga perlu diimbangi dengan infrastruktur pengendalian banjir agar tidak menimbulkan masalah.

2.1.1.7. Geologi

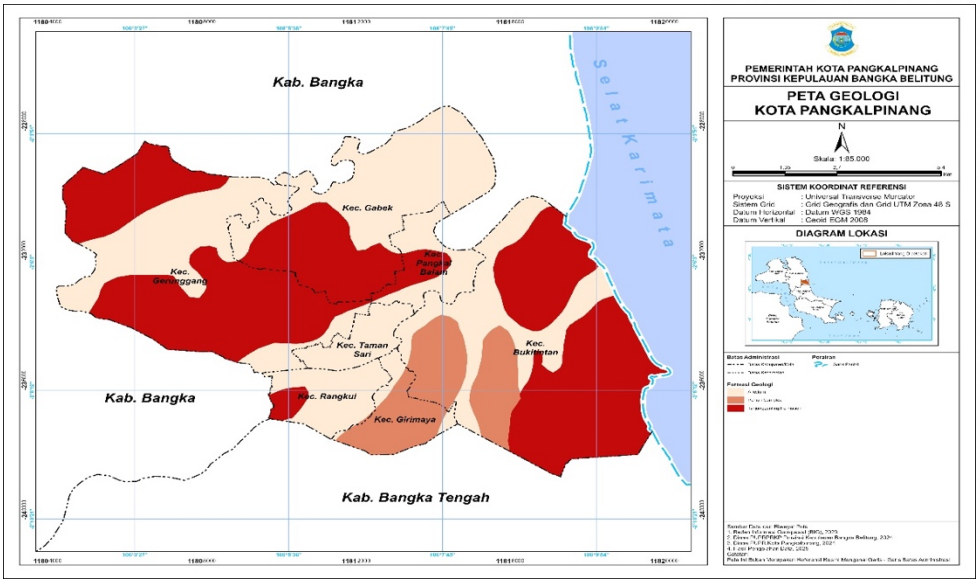
Secara umum, Kota Pangkal Pinang tersusun oleh tiga jenis satuan batuan utama, yaitu *Alluvium, Pemali Complex,* dan *Tanjunggenting Formation*. *Alluvium* merupakan endapan material lepas yang biasanya terdapat di dataran rendah dan relatif subur. *Pemali Complex* merupakan batuan tua berjenis metamorf dan beku yang cenderung keras. Sementara itu, *Tanjunggenting Formation* merupakan formasi batuan sedimen berumur lebih muda yang tersusun oleh berbagai material lempung, pasir, dan batuan konglomerat. Berikut dilampirkan data klasifikasi batuan geologi Kota Pangkal Pinang dalam bentuk tabel.

Tabel 2.7
Kondisi Batuan Geologi di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Klasifikasi Batuan Geologi			Total (Ha)
		Alluvium	*Pemali Complex*	*Tanjunggenting Formation*	
1	Bukit Intan	916,14	664,04	1.971,29	**3.551,47**
2	Gabek	1.319,51		719,82	**2.039,33**
3	Gerunggang	1.173,99		1.940,00	**3.113,99**
4	Girimaya	93,65	355,96		**449,61**
5	Pangkal Balam	340,63		131,67	**472,30**
6	Rangkui	426,43	2,51	75,10	**504,04**
7	Taman Sari	319,02			**319,02**
Total		**4.589,37**	**1.022,51**	**4.837,88**	**10.449,76**
Persentase		**43,92%**	**9,78%**	**46,30%**	**100,00%**

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Gambar 2. 7
Peta Geologi Kota Pangkal Pinang



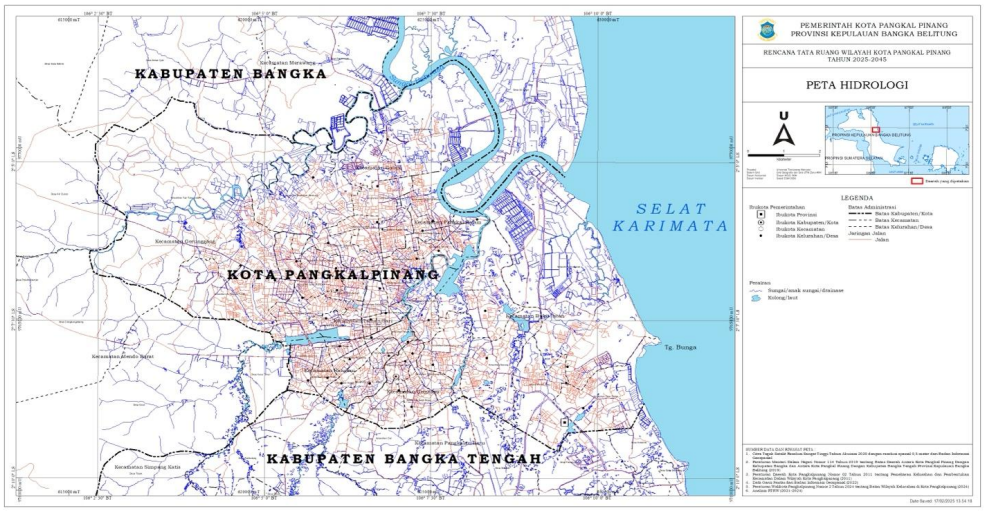
Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2025.

Peta ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Pangkal Pinang terdiri dari batuan sedimen muda yang banyak terdapat di Bukit Intan, Gerunggang, dan Gabek. Jenis batuan ini relatif lebih mudah diolah dan mendukung aktivitas pembangunan serta pertanian. Sementara itu, batuan tua seperti *Pemali Complex* jumlahnya lebih sedikit dan hanya terdapat di sebagian kecil wilayah Girimaya dan Bukit Intan. Dengan kata lain, kondisi geologi Kota Pangkal Pinang umumnya mendukung pembangunan, meskipun wilayah dengan batuan keras perlu diperhatikan dalam perencanaan agar tidak menimbulkan kesulitan teknis saat pembangunan infrastruktur.

2.1.1.8. Hidrologi

Kota Pangkal Pinang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Bangka yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka, yaitu: Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Wilayah Sungai Bangka terletak antara 105°05‟06”” - 107°06‟04”” BT serta 01°30‟04”” - 03°08‟00”” LS. Wilayah Sungai Bangka merupakan wilayah sungai strategis nasional dengan luas sekitar 11.623,50 km2. Terdapat 63 Daerah aliran sungai (DAS) pada Wilayah Sungai ini, DAS yang terbesar adalah DAS Batu Rusa.

Gambar 2. 8
Peta Hidrologi Kota Pangkal Pinang

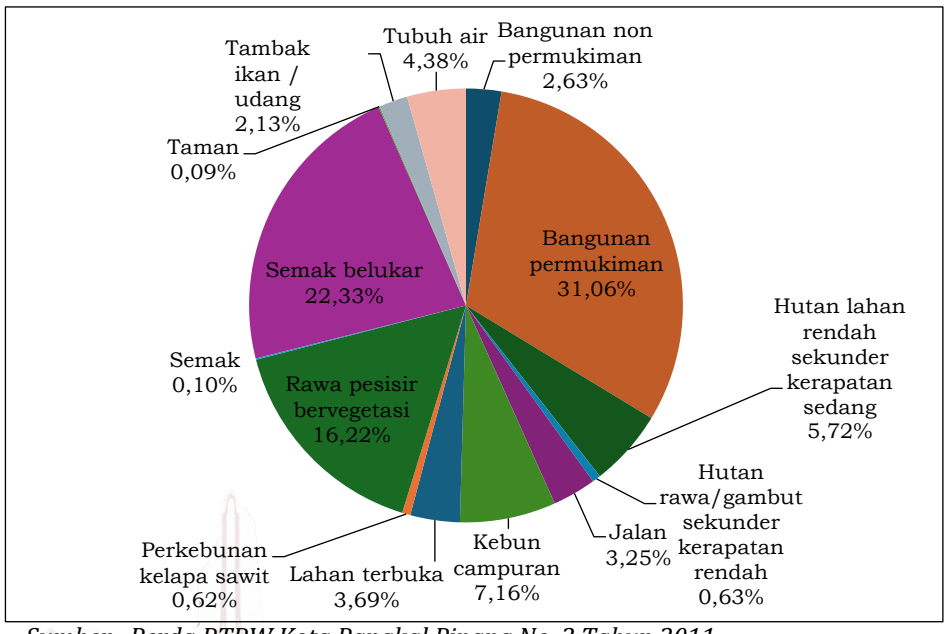


Sumber : Perda RTRW Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2011

2.1.1.9. Penggunaan Lahan

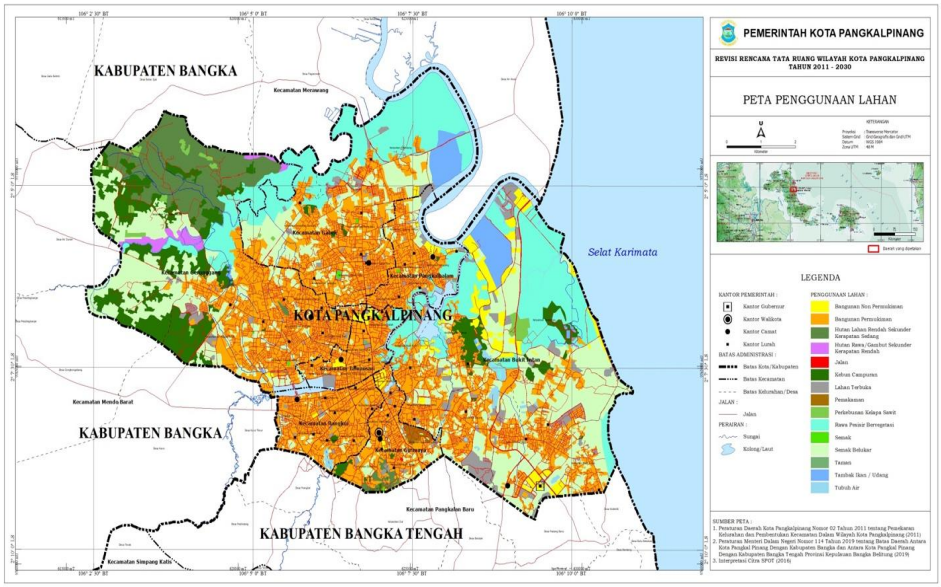
Persentasi penggunaan lahan di Kota Pangkal Pinang tertinggi ada pada bangunan permukiman sebesar 31,09 persen. Selebihnya merupakan Daerah semak belukar sebesar 22,33 persen dan rawa pesisir bervegetasi 16,22 persen, sedangkan yang terkecil adalah lahan penggunaan taman sebesar 0,09 persen dan semak 0,10 persen. Penggunaan lahan Kota Pangkal Pinang terakhir diinterpretasi dari Citra SPOT 6 tahun 2016, dengan hasil sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 9
Luas Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang



Sumber : Perda RTRW Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2011

Gambar 2. 10
Peta Penggunaan Lahan Kota Pangkal Pinang



Sumber : Perda RTRW Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2011

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Dengan luas lahan yang cukup terbatas Kota Pangkal Pinang memiliki potensi sumber daya alam yang di dukung dengan letak geografis pada wilayah kepulauan. Sebagai ibu kota provinsi Pangkal Pinang berperan sebagai pusat komando, pengolahan, dan layanan bagi seluruh potensi sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui diversifikasi produk dan pengembangan berbagai metode produksi perikanan, tanaman pangan dan hortikultural, hutan dan konservasi alam, industri dan perdagangan dan pengembangan pariwisata.

Sektor Perikanan di Kota Pangkal Pinang didominasi oleh perikanan budidaya yang pada tahun 2024 memiliki nilai produksi sebesar 75.592.885 ton, sedangkan volume perikanan tangkap pada tahun 2025 sebesar 1.884 ton.

Kawasan perikanan tangkap yaitu kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Kawasan perikanan tangkap berasosiasi dengan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa yang sebelumnya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ketapang. Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 161,154677 hektare terletak di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan), tepatnya bersebelahan dengan Jembatan EMAS.

Kawasan perikanan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan. Berbeda dengan kawasan lindung, kawasan budi daya lebih memiliki keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Perikanan budidaya mengunggulkan budidaya kepiting bakau dan udang vaname dengan nilai jual yang cukup tinggi di pasar nasional maupun internasional, sedangkan budidaya ikan lele dan ikan nila sebagai pemenuhan konsumsi pangan lokal di Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2.8
Produksi Kepiting Bakau di Kota Pangkal Pinang

Tahun	Jumlah Produksi (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp)
2021	600	140.000	84.000.000
2022	3.420	135.000	461.700.000
2023	4.101	120.000	492.120.000
2024	2.366	125.000	295.750.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, 2025

Guna meningkatkan pemasaran hasil perikanan dan pelayanan publik, pemerintah kota Pangkal Pinang mengupayakan berbagai diversifikasi hasil olahan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah seperti kemplang, kerupuk, kericu, getas, otak-otak dan pengembangan wisata berbasis rumah makan khas makanan lokal, bahkan ada yang sudah menyentuh dunia ekspor.

Tanaman Pangan dan Produk Hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan di Kota Pangkal Pinang. Salah satu jenis produk hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sayuran. Berdasarkan data hasil statistik Pertanian Hortikultura mencatat bahwa sayuran semusim yang terdapat di Kota Pangkal Pinang untuk tahun 2024 diantaranya bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, petai dan terung.

Hutan dan Konservasi Alam di Kota Pangkal Pinang berfungsi sebagai paru-paru kota dan lahan konservasi. Kawasan konservasi yang dilakukan terhadap flora, fauna, tanah dan terutama air tanah yang telah ditetapkan untuk mengembangkan fungsi tersebut perlu dipertahankan dan dan dikembangkan di Kota Pangkal Pinang dalam upaya untuk pengamanan pada kelestarian sumber-sumber air. Kawasan tersebut antara lain :

1. Kawasan Rimba Kota di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang.
2. Daerah Aliran Sungai Rangkui, Pedindang dan Kace.
3. Daerah kawasan sekitar mata air di Tamansari dan Daerah sekitar kolong.

4. Daerah kawasan pantai berhutan bakau di Daerah Aliran Sungai Baturusa dan Daerah Aliran Sungai Rangkui.

Ekosistem *semiterestrial* di Kota Pangkal Pinang meliputi Ekosistem *Mangrove*/Bakau. Dalam ekosistem *mangrove*, komposisi tumbuhan penutup ditentukan oleh beberapa faktor utama yaitu substrat (bentuk tekstur dan kemantapan), kondisi pasang surut (frekuensi, kedalaman, dan atau lama genangan), dan *salinitas* (variasi harian dan musiman).

Industri dan Perdagangan bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Luas total kawasan industri di Kota Pangkal Pinang kurang lebih 984,26 hektare.

Pengembangan Pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya, yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Kawasan pariwisata Kota Pangkal Pinang ditetapkan seluas kurang lebih 250,725098 hektare, terletak di :

1. Pantai Pasir Padi di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan); dan
2. Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan).
3. Kampung Ekowisata Sejagat merupakan pengembangan desa wisata yang mengabungkan Kelurahan Selindung yang memiliki luas ± 33.677.000m dan Kelurahan Jerambah Gantung memiliki luas ± 16.950.600m, yang keduanya merupakan kelurahan di dalam Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang.

Kota Pangkal Pinang memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Kawasan yang berpotensi ini disebut sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK) yang merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota dari sudut kepentingan:

1. KSK Pertumbuhan Ekonomi

   KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi atau kawasan strategis ekonomi memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

   a. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa yang merupakan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1) Kawasan Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kranas; dan
2) Kawasan Teluk Bayur CBD (*Central Business District*) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan).

Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perdagangan dan Jasa yaitu mewujudkan Kota Pangkal Pinang sebagai pusat perdagangan dan jasa terkemuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah pengembangan KSK Kawasan Perdagangan dan Jasa yaitu, pertama perencanaan pengembangan pusat perdagangan dan jasa berbasis kearifan lokal, Kedua peningkatan promosi daya tarik investasi, Ketiga peningkatan infrastruktur penunjang kawasan, Keempat pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup, dan Kelima peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ini terbagi atas tiga wilayah yaitu Temberan, Selindung, dan Ketapang.

1) Kawasan Peruntukan Industri Temberan

Kawasan ini terhubung dengan kawasan lainnya melalui jaringan jalan yang sesuai dengan moda angkutannya. Kawasan Peruntukan Industri Temberan meliputi Kelurahan Air Mawar, Kelurahan Bacang, dan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan.

2) Kawasan Peruntukan Industri Selindung

Kawasan ini merupakan kawasan strategis ekonomi bagi pengembangan industri dan pergudangan di Kota Pangkal Pinang, dalam rangka menunjang kebutuhan lahan industri dan pergudangan yang semakin mendesak. Kegiatan industri dan pergudangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan di tengah kota, sehingga perlu dilokalisir di suatu kawasan tersendiri dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Kawasan ini terhubung dengan kawasan lainnya melalui jaringan jalan yang sesuai dengan moda angkutannya.

3) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang

Kawasan ini merupakan kawasan baru untuk pengembangan industri dan pergudangan di Kota Pangkal Pinang, dalam rangka menunjang kebutuhan lahan industri dan pergudangan yang semakin mendesak. Kegiatan industri dan pergudangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan di tengah kota, sehingga perlu dilokalisir di suatu kawasan tersendiri dengan dukungan

infrastruktur yang memadai. Kawasan ini terhubung dengan kawasan lainnya melalui jaringan jalan yang sesuai dengan moda angkutannya.

2. KSK Sosial Budaya

Kawasan strategis sosial dan budaya memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria: Pertama merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan, Kedua memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; Ketiga merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, Keempat merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, Kelima merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya, Keenam memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, Ketujuh hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota, Kedelapan tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan, Kesembilan kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota

a. Kawasan Pariwisata Pantai Pasir Padi

Kawasan pariwisata Pantai Pasir Padi di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan) merupakan penunjang salah satu visi Kota Pangkal Pinang, yaitu sebagai kota tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kawasan ini telah tumbuh sebagai kawasan wisata di Kota Pangkal Pinang yang telah dilengkapi dengan sarana hotel, rumah makan, arena permainan dan memiliki pantai yang relatif landai. Namun secara keseluruhan, pengembangan kawasan ini belum optimal sehingga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata yang lebih baik.

b. Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Bunga

Kawasan pariwisata Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan) merupakan penunjang salah satu visi Kota Pangkal Pinang, yaitu sebagai kota tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Pantai Pasir Padi, meskipun letaknya bersebelahan, kawasan ini dikenal sebagai salah satu lokasi mangrove yang relatif terjaga, cenderung berlumpur sehingga cocok untuk tumbuh kembang mangrove. Namun secara keseluruhan pengembangan kawasan ini belum optimal sehingga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata yang lebih baik.

3. KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis lingkungan hidup memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:

1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5) menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan
7) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

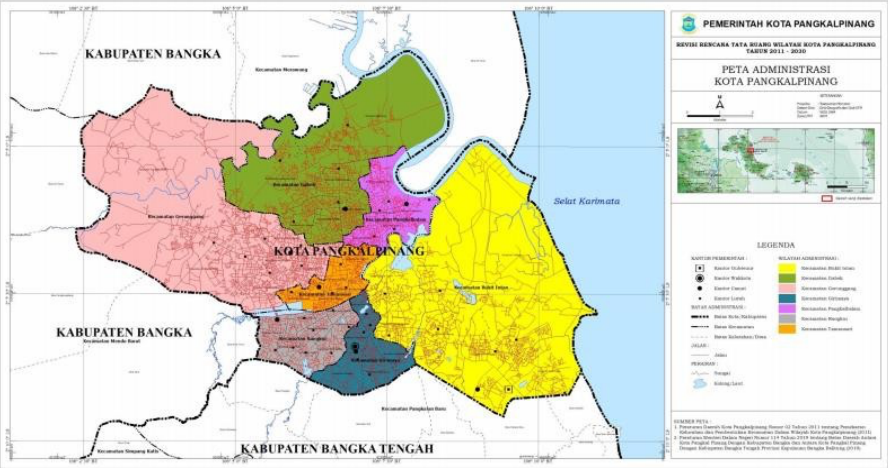
Rimba kota terletak di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang). Fungsi kawasan ini adalah memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro. Saat ini kawasan ini merupakan kawasan hutan dengan kondisi tutupan lahan yang sudah mengalami degradasi dengan luasan kurang lebih 1.000 ha, sehingga dengan kondisi ini harus diupayakan perbaikan pada kawasan tersebut. Keberadaan kawasan ini perlu tetap dipertahankan dan dilindungi dari upaya perambahan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis pada jasa lingkungan untuk perencanaan lingkungan hidup yaitu menyampaikan tentang potensi penggunaan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Pendekatan jasa lingkungan pada dasarnya digunakan untuk menentukan kinerja jasa lingkungan dengan menggunakan data historis jasa lingkungan itu sendiri. Jasa lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya.

2.1.3.1. Peta Wilayah Perencanaan

Gambar 2. 11
Peta Wilayah Perencanaan Kota Pangkal Pinang



Sumber:

1. *Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (2011)*
2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antar Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 serta KepMendagri 050-145 Tahun 2022 maka luas wilayah perencanaan dalam KLHS RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah 10.449,8 ha.

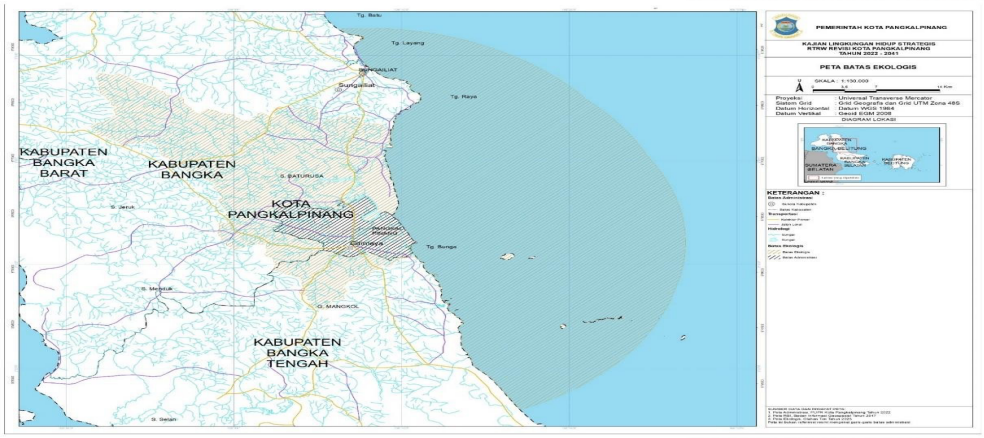
Tabel 2. 9
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Wilayah Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Rangkui	500,9	4,24
2	Bukit Intan	3.566,6	30,11
3	Girimaya	434,5	4,00
4	Pangkalbalam	472,3	3,95
5	Gabek	2.044,7	28,89
6	Tamansari	323,1	2,68
7	Gerunggang	3.107,7	26,12
Jumlah		10.449,8	100

Sumber: KepMendagri 050-145, 2022

2.1.3.2. Peta Wilayah Fungsional

Gambar 2. 12
Peta Wilayah Fungsional Kota Pangkal Pinang



Sumber:

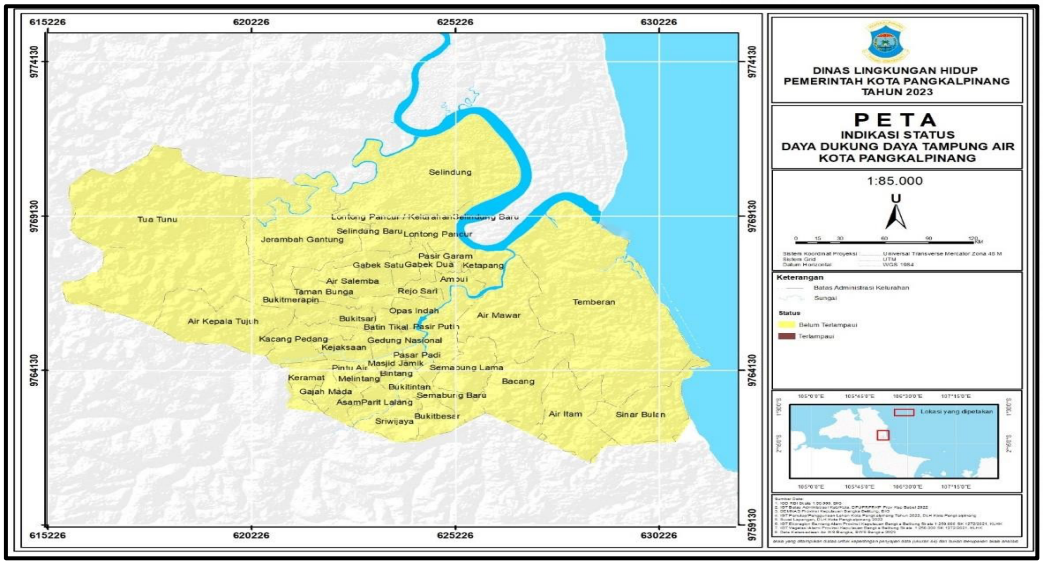
1. *Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (2011)*
2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antar Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)*

Batas fungsional Kota Pangkal Pinang didasarkan pada DAS Batu Rusa (Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah) sedangkan untuk batas fungsional laut berdasarkan dari potensi cemaran yang akan ditimbulkan dari adanya suatu kegiatan adalah mencapai 16 mil laut terutama untuk parameter pencemar TSS atau melihatnya sejauh mana dampak adanya aktivitas tambang laut di perairan Bangka Belitung yang menimbulkan pencemar tailing.

2.1.3.3. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup (D3TLH)

Status DDDT lingkungan hidup ditentukan dengan mempertimbangkan aspek *supply* dan *demand*, yang mana status DDDT suatu area terlampaui jika *demand* di area tersebut lebih besar daripada *supply*-nya. Status DDDT air dengan pertimbangan kesiapan metodologi ilmiah yang digunakan, serta mempertimbangkan posisi air sebagai sumber daya alam yang sangat vital untuk kehidupan maupun modal pembangunan. Berikut ini tersaji profil status DDDT air di wilayah Pangkal Pinang. Seluas 10.443,88 ha atau 99,99 persen DDDT air di Kota Pangkal Pinang belum terlampaui.

Gambar 2. 13
Peta Indikasi Status D3TLH (Air) Kota Pangkal Pinang



Sumber: Peta Administrasi, PUPR Kota Pangkal Pinang Tahun 2022; Peta RBI, Badan Informasi Geospasial, 2007; Peta D3TLH Kota Pangkal Pinang Tahun 2023

2.1.3.4. Jasa Lingkungan Penyediaan

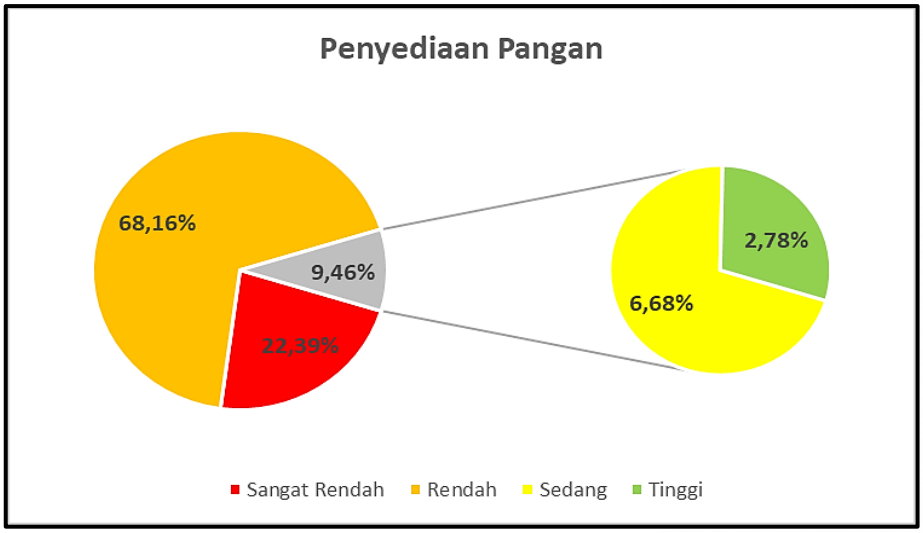
Jasa penyediaan yang dikaji dalam dokumen ini adalah jasa penyediaan pangan, air, serat, dan bahan bakar, dengan pertimbangan bahwa jasa-jasa tersebut sangat dibutuhkan informasinya dan dibutuhkan ketersediaannya sebagai modal pembangunan di wilayah perkotaan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penyusunan DDDT berbasis jasa lingkungan menggunakan metode yang hanya memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya alam, tanpa memperhatikan aspek permintaan atau konsumsi kebutuhan manusia di dalamnya. Dengan demikian, profil jasa penyediaan yang diilustrasikan dalam dokumen ini tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan pangan, air di area yang digambarkan.

1. Indikatif Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan pangan yang dalam peta terlampir diberi kode P1 adalah layanan jasa lingkungan dalam penyediaan produk pangan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia/penduduk di Kota Pangkal Pinang. Jasa penyediaan pangan ini terdiri atas pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan) dan pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian, perikanan budidaya, tambak).

Gambar 2. 14
Profil Jasa Penyediaan Pangan Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa secara keseluruhan, kelas jasa penyediaan pangan yang mendominasi di Pangkal Pinang adalah kelas rendah (68,16 persen), kemudian kelas sangat rendah (22,39 persen). Kondisi ini sejalan dengan posisi Pangkal Pinang sebagai daerah urban yang memiliki sedikit daerah bervegetasi. Selain itu, kondisi lahan terbangun yang tidak memungkinkan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan juga menjadi penyebab dominasi kelas rendah dan sangat rendah pada jasa penyediaan pangan ini. Penggunaan lahan di Pangkal Pinang didominasi dengan penggunaan bangunan permukiman seluas 3281,58 ha (31,41 persen) yang diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan tuntutan program pembangunan dan permintaan lahan permukiman yang menjawab kebutuhan pertumbuhan penduduk.

Sebagai ilustrasi distribusi luasan kategori kelas jasa lingkungan penyediaan pangan di Pangkal Pinang, tabel dan gambar berikut menyajikan luas dan persebaran kelas jasa penyediaan pangan di berbagai jenis penutup lahan yang ada di Pangkal Pinang.

Tabel 2. 10
Persebaran Luas Kelas Jasa Penyediaan Pangan

Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Tidak Ada Data	8,5					8,5
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran		19,0	32,5			51,5

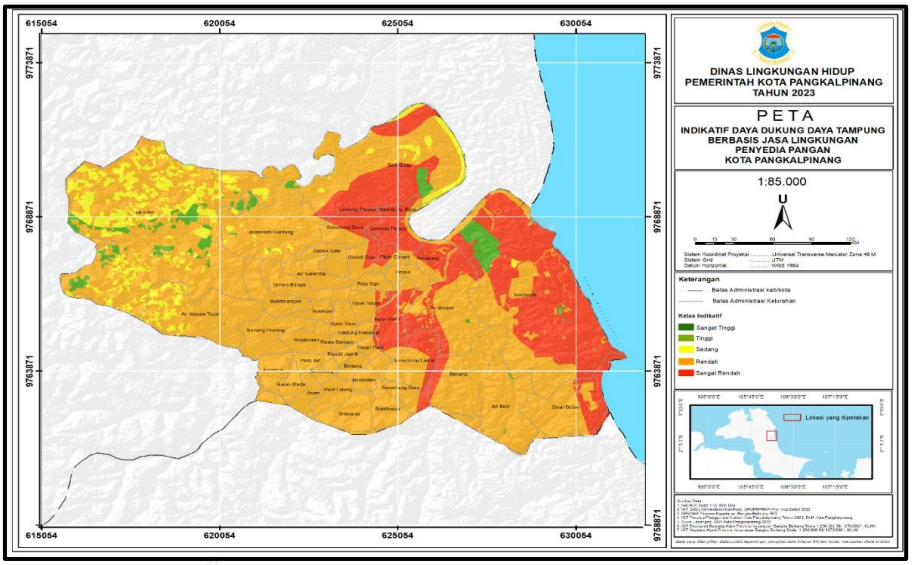
Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Bangunan non-permukiman lain		11,9	37,2			49,1
Bangunan permukiman kota		555,0	2.725,2			3.280,2
Danau wisata air			1,8	2,0		3,9
Hamparan pasir pantai		2,7				2,7
Hutan akasia			6,8			6,8
Hutan kota, jalur hijau dan taman kota			2,0			2,0
Hutan Lahan Kering Sekunder		42,3				42,3
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah		112,1	57,4			169,6
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang		146,9	653,9			800,8
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi		79,5	271,3			350,8
Hutan mangrove kerapatan rendah		5,6				5,6
Hutan mangrove kerapatan sedang		92,8	68,7			161,5
Hutan mangrove kerapatan tinggi		164,7	195,0			359,7
Hutan rawa/gambut kerapatan tinggi			29,0			29,0
Jaringan jalan aspal/beton/tanah		37,7	95,7			133,4
Kebun buah				4,5		4,5
Kebun campuran				506,3	147,6	653,9
Kolam ikan air tawar					12,0	12,0
Ladang/tegalan hortikultura			54,0	56,4		110,4
Lahan terbuka lain		291,7	380,3			672,0
Padang golf			1,0			1,0
Pelabuhan		15,7				15,7
Penambangan terbuka bukan sirtu		31,1	81,7			112,8
Perkebunan karet			174,2			174,2
Perkebunan kelapa			9,6			9,6
Perkebunan kelapa sawit			151,4	31,2		182,6
Semak		159,1	354,0			513,2
Semak belukar		542,0	1.408,3			1.950,3
Stadion dan sarana olah raga			4,9			4,9

Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Sungai		22,4	203,9	92,1		318,4
Tambak ikan/udang					130,6	130,6
Terminal bus			1,9			1,9
Tubuh air lain		3,2	116,3	4,9		124,4
Jumlah	**8,5**	**2.335,5**	**7.118,2**	**697,5**	**290,2**	**10.449,8**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Dengan melihat tabel di atas, dapat dibaca bahwa kelas rendah dan sangat rendah banyak terdapat di area dengan penutup lahan berupa bangunan permukiman kota dan semak belukar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah perkotaan yang berusaha untuk memperluas area lahan bangunan permukiman memiliki kecenderungan berimplikasi negatif pada kondisi layanan jasa penyediaan pangan. Semak belukar yang identik dengan lahan yang tidak produktif juga cenderung memiliki kelas jasa penyediaan pangan yang rendah atau sangat rendah. Kecenderungan ini dapat menjadi pertimbangan dalam upaya perencanaan pembangunan atau pengembangan wilayah perkotaan, khususnya pembangunan yang melibatkan konsumsi bahan pangan, program-program pengembangan pertanian, ataupun yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Pada gambar berikut ini terlihat jelas distribusi kelas jasa penyediaan pangan di wilayah Kota Pangkal Pinang yang didominasi dengan indikasi kelas rendah dengan warna jingga dan kelas sangat rendah dengan warna merah.

Gambar 2. 15
Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Pangan Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

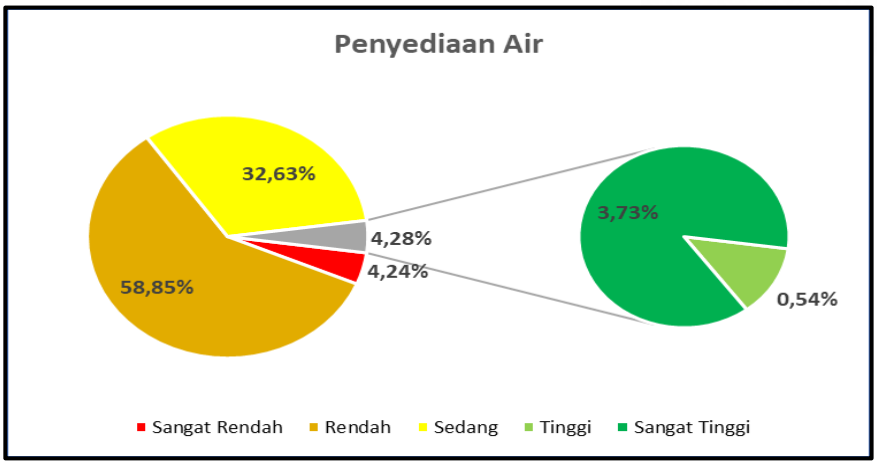
Kondisi indikatif layanan jasa penyediaan pangan di Pangkal Pinang yang cenderung rendah atau sangat rendah ini didukung fakta bahwa kebutuhan pangan utama

(padi/beras) yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah. Hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah.

2. Indikatif Jasa Penyediaan Air

Profil jasa penyediaan air di Pangkal Pinang secara umum dapat disajikan pada gambar berikut. Terlihat pada gambar bahwa wilayah Kota Pangkal Pinang didominasi dengan jasa penyediaan air kelas rendah (58,85 persen) dan kelas sedang (32,63 persen). Sebagaimana jasa penyediaan pangan, kondisi penyediaan air di Pangkal Pinang yang mayoritas kelas rendah ini juga dapat dipahami berdasarkan

Gambar 2. 16
Profil Jasa Penyediaan Air Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Sebagai ilustrasi distribusi luasan kategori kelas jasa lingkungan penyediaan air di Pangkal Pinang, tabel dan gambar berikut menyajikan luas dan persebaran kelas jasa penyediaan pangan di berbagai jenis penutup lahan yang ada di Pangkal Pinang.

Tabel 2. 11
Persebaran Luas Kelas Jasa Penyediaan Air Setiap Penggunaan Lahan (Ha)

Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Tidak Ada Data	8,5						8,5
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran			51,5				51,5
Bangunan non-permukiman lain		1,7	47,4				49,1
Bangunan permukiman kota		335,9	2.944,3				3.280,2

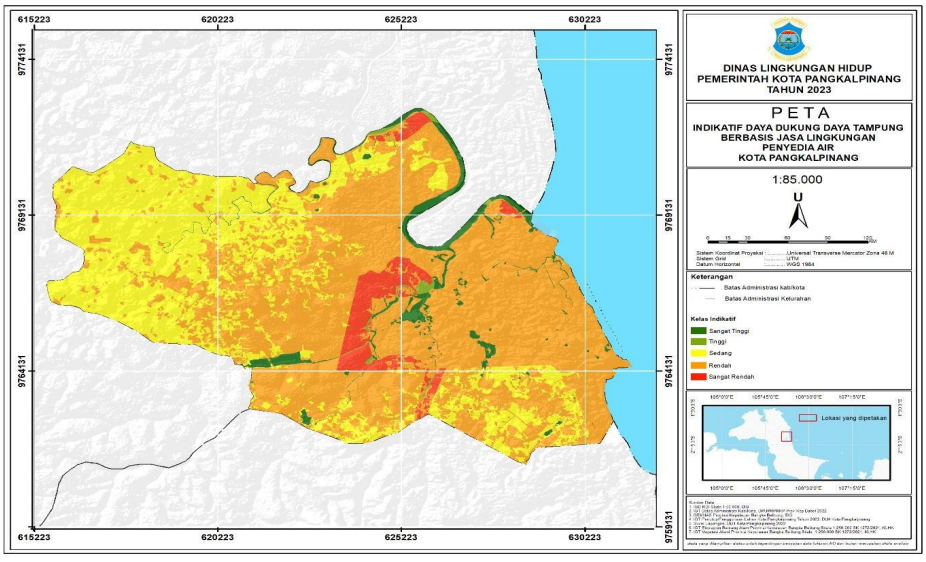
Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Danau wisata air						3,9	3,9
Hamparan pasir pantai			2,7				2,7
Hutan akasia			6,8				6,8
Hutan kota, jalur hijau dan taman kota		1,3	0,7				2,0
Hutan Lahan Kering Sekunder			42,3				42,3
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan Rendah			116,7	52,9			169,6
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan Sedang			216,9	583,9			800,8
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan Tinggi			85,1	265,7			350,8
Hutan mangrove kerapatan rendah			5,6				5,6
Hutan mangrove kerapatan sedang		1,1	160,4				161,5
Hutan mangrove kerapatan tinggi		21,6	338,2				359,7
Hutan rawa/gambut kerapatan tinggi				29,0			29,0
Jaringan jalan aspal/beton/tanah		13,3	120,1				133,4
Kebun buah			4,5				4,5
Kebun campuran				653,9			653,9
Kolam ikan air tawar			12,0				12,0
Ladang/tegalan hortikultura			24,0	86,4			110,4
Lahan terbuka lain		57,7	614,3				672,0
Padang golf			1,0				1,0
Pelabuhan		5,5	10,2				15,7
Penambangan terbuka bukan sirtu		5,1	107,7				112,8
Perkebunan karet				174,2			174,2
Perkebunan kelapa		0,0	9,6				9,6
Perkebunan kelapa sawit			182,6				182,6
Semak			180,4	332,7			513,2
Semak belukar			721,5	1.228,7			1.950,3

Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Stadion dan sarana olah raga			4,9				4,9
Sungai					49,4	269,1	318,4
Tambak ikan/udang			130,6				130,6
Terminal bus			1,9				1,9
Tubuh air lain					7,3	117,0	124,4
Jumlah	**8,5**	**443,3**	**6.143,9**	**3.407,4**	**56,7**	**390,0**	**10.449,8**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa jasa penyediaan air kelas sangat tinggi dan tinggi ada pada penutup lahan sungai, danau wisata air, dan tubuh air lainnya yang memang menampung ataupun mengalirkan air. Jasa penyediaan air kelas rendah dan sangat rendah cenderung didominasi penutup lahan berupa bangunan permukiman kota, semak belukar, dan lahan terbuka lain yang cenderung tidak memiliki penggunaan lahan vegetasi dan tidak dapat menyerap ataupun menyimpan air dengan baik.

Gambar 2. 17
Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Air Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui persebaran kondisi jasa lingkungan penyediaan air di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dengan melihat persebaran warnanya, terlihat bahwa wilayah Kota Pangkal Pinang didominasi penyediaan air kelas rendah (jingga) dan sedang (kuning). Data kondisi jasa lingkungan penyediaan air ini dapat

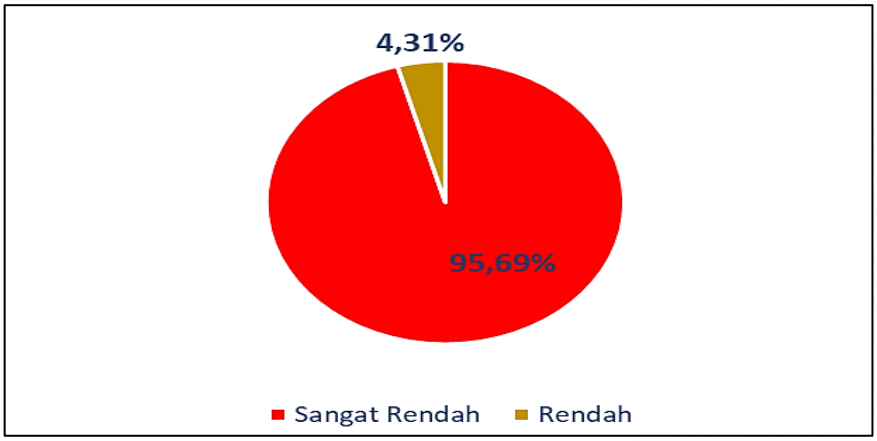
dimanfaatkan untuk pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah perkotaan Pangkal Pinang, khususnya yang terkait dengan persebaran permukiman penduduk yang seharusnya dekat dengan akses sumber air bersih yang layak, aktivitas industri, pertanian/kebun garapan, dan program pembangunan lainnya yang memerlukan air dalam jumlah besar. Informasi ini juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan, khususnya yang terkait dengan upaya konservasi air.

3. Indikatif Jasa Penyediaan Energi/Bahan Bakar

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini sebagian besar adalah kendaraan milik pribadi yang mayoritas menggunakan bahan bakar fosil. Dengan melihat fenomena tersebut dapat diperkirakan bahwa permintaan energi di Pangkal Pinang akan semakin meningkat. Dengan demikian, informasi terkait indikatif jasa lingkungan penyediaan bahan bakar sangat diperlukan untuk berbagai proses perencanana pembangunan perkotaan di Pangkal Pinang.

Berikut ini adalah gambar yang menyajikan secara umum profil jasa lingkungan penyediaan bahan bakar di Pangkal Pinang. Berdasarkan gambar berikut, wilayah Pangkal Pinang didominasi kelas sangat rendah (95,69 persen) pada jasa penyediaan energi/ bahan bakar. Selain itu, tidak ada kelas sedang, tinggi, maupun sangat tinggi. Kemampuan layanan penyediaan energi/ bahan bakar di Pangkal Pinang cenderung sangat rendah atau rendah. Kondisi ini didukung fakta bahwa pemenuhan kebutuhan bahan bakar fosil di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di wilayah perkotaan Pangkal Pinang, dipenuhi dengan cara mendatangkan bahan bakar fosil dari luar provinsi (luar pulau). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Pangkal Pinang hampir tidak memiliki persediaan bahan bakar fosil yang disediakan oleh alam. Kondisi ini akan berpengaruh pada ketahanan energi yang mirip dengan kondisi ketahanan pangan di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Gambar 2. 18
Profil Jasa Penyediaan Energi/Bahan Bakar Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Sebagai ilustrasi persebaran luasan kelas jasa penyediaan bahan bakar di berbagai jenis penutup lahan yang ada di wilayah Kota Pangkal Pinang, berikut ini tersaji tabel dan gambar yang menyajikan informasi tersebut.

Tabel 2. 12
Persebaran Luas Kelas Jasa Penyediaan Serat Pada Penutup Lahan (Ha)

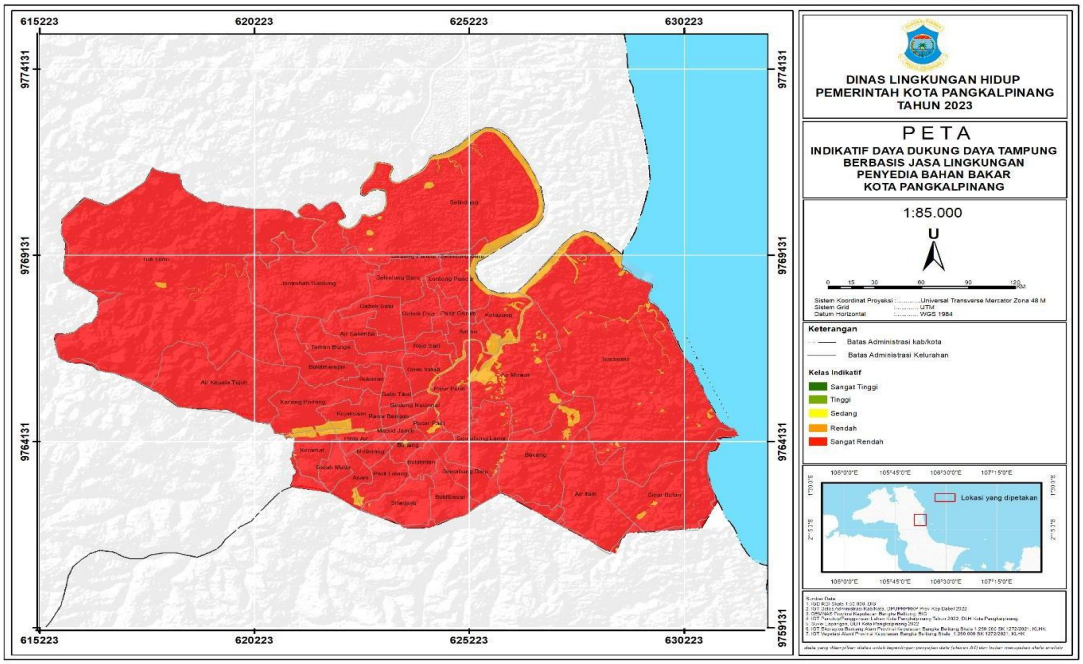
Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
Tidak Ada Data	8,5			8,5
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran			51,5	51,5
Bangunan non-permukiman lain			49,1	49,1
Bangunan permukiman kota			3.280,2	3.280,2
Danau wisata air		3,9		3,9
Hamparan pasir pantai			2,7	2,7
Hutan akasia			6,8	6,8
Hutan kota, jalur hijau dan taman kota			2,0	2,0
Hutan Lahan Kering Sekunder			42,3	42,3
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah			169,6	169,6
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang			800,8	800,8
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi			350,8	350,8
Hutan mangrove kerapatan rendah			5,6	5,6
Hutan mangrove kerapatan sedang			161,5	161,5
Hutan mangrove kerapatan tinggi			359,7	359,7
Hutan rawa/gambut kerapatan tinggi		3,4	25,6	29,0
Jaringan jalan aspal/beton/tanah			133,4	133,4
Kebun buah			4,5	4,5
Kebun campuran			653,9	653,9
Kolam ikan air tawar			12,0	12,0
Ladang/tegalan hortikultura			110,4	110,4
Lahan terbuka lain			672,0	672,0
Padang golf			1,0	1,0
Pelabuhan			15,7	15,7

Kelas Penutupan Lahan	Tidak Ada Data	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
Penambangan terbuka bukan sirtu			112,8	112,8
Perkebunan karet			174,2	174,2
Perkebunan kelapa			9,6	9,6
Perkebunan kelapa sawit			182,6	182,6
Semak			513,2	513,2
Semak belukar			1.950,3	1.950,3
Stadion dan sarana olah raga			4,9	4,9
Sungai		318,4		318,4
Tambak ikan/udang			130,6	130,6
Terminal bus			1,9	1,9
Tubuh air lain		124,4		124,4
Jumlah	**8,5**	**450,1**	**9.991,2**	**10.449,8**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persebaran jasa penyediaan bahan bakar dengan kelas sangat rendah terluas ada pada penutup lahan bangunan permukiman kota, kemudian semak belukar. Kondisi ini mirip dengan ketiga jasa penyediaan lain yang telah diuraikan sebelumnya, karena kedua jenis penutup lahan ini memang yang paling dominan di wilayah Pangkal Pinang dibandingkan jenis penutup lahan lainnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian/bab sebelumnya, sesuai dengan metode pembuatan peta DDDT yang digunakan, selain penutup lahan, jenis bentang alam dan vegetasi alami juga akan mempengaruhi kelas jasa lingkungan. Pada gambar berikut terlihat lebih jelas persebaran kondisi jasa penyediaan bahan bakar di wilayah Pangkal Pinang. Terlihat bahwa komponen warna hanya jingga (kelas rendah) dan merah (kelas sangat rendah).

Gambar 2. 19
Peta Indikatif Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar Kota Pangkal Pinang



Sumber: Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2023

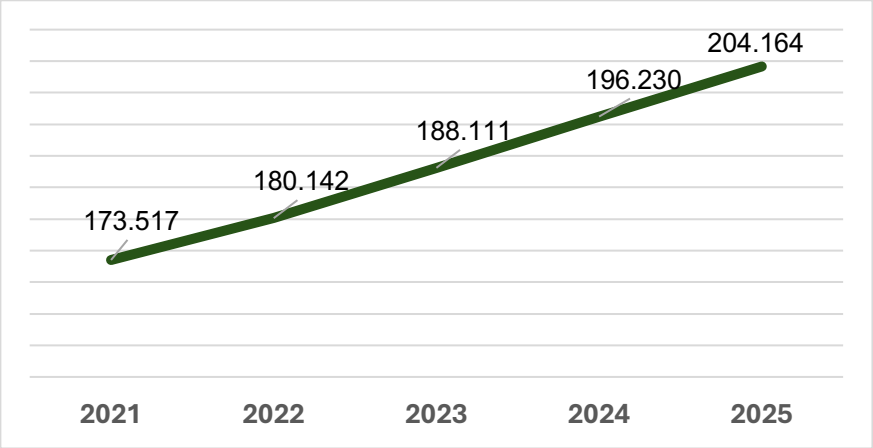
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Pangkal Pinang, aspek ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan. Ketiga sektor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan program yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas produksi pangan lokal menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)

Adapun dalam kemudahan akses listrik di Kota Pangkal Pinang ditandai dengan meningkatnya pengguna atau pelanggan listrik pada periode tahun 2021-2025. Pada tahun 2021 jumlah pelanggan listrik di Kota Pangkal Pinang sebesar 173.517 jiwa yang kemudian meningkat menjadi 204.164 jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut menandakan pemerataan dan peningkatan akses listrik semakin baik di Kota Pangkal Pinang sehingga semakin banyak masyarakat yang berlangganan listrik.

Gambar 2. 20
Jumlah Pelanggan Listrik Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2026

Secara umum, jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 217.650 jiwa pada tahun 2020 menjadi 244.741 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, jumlah listrik terjual juga menunjukkan tren meningkat dari 468.947.820 kWh pada tahun 2020 menjadi 565.035.131 kWh pada tahun 2025.

Kenaikan jumlah listrik terjual tersebut merefleksikan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di Kota Pangkal Pinang. Kenaikan aktivitas ekonomi, perluasan kawasan permukiman, serta bertambahnya fasilitas layanan publik turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsumsi listrik.

Tabel 2. 13
Perhitungan Konsumsi Listrik Per Kapita 2021 – 2025 (KwH)

KETERANGAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	221.988	226.297	227.336	230.441	244.741
Listrik Terjual	504.912.258	533.322.815	577.645.703	619.249.119	565.035.131
Konsumsi Listrik per Kapita	2.274,50	2.356,74	2.540,93	2.687,23	2.308,71

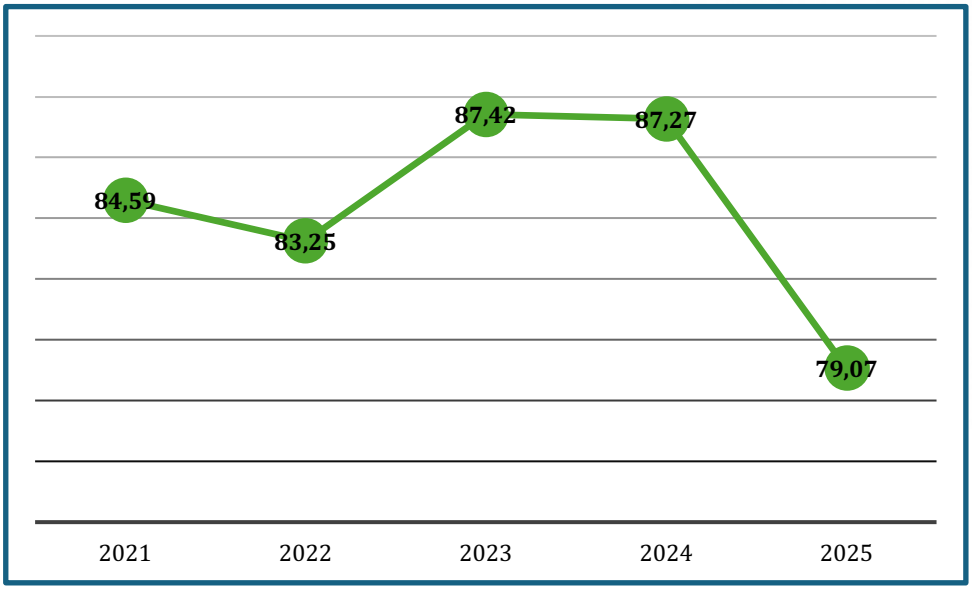
Sumber : Kota Pangkal Pinang Dalam Angka (Hasil Olahan)

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Kemandirian pangan suatu daerah dapat dilihat melalui capaian dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit ketahanan pangan di suatu wilayah. Berikut gambaran kondisi kemandirian

pangan Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, yang digambarkan dengan grafik indeks ketahanan pangan dan prevalensi ketidakcukupan pangan.

Gambar 2. 21
Indeks Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025

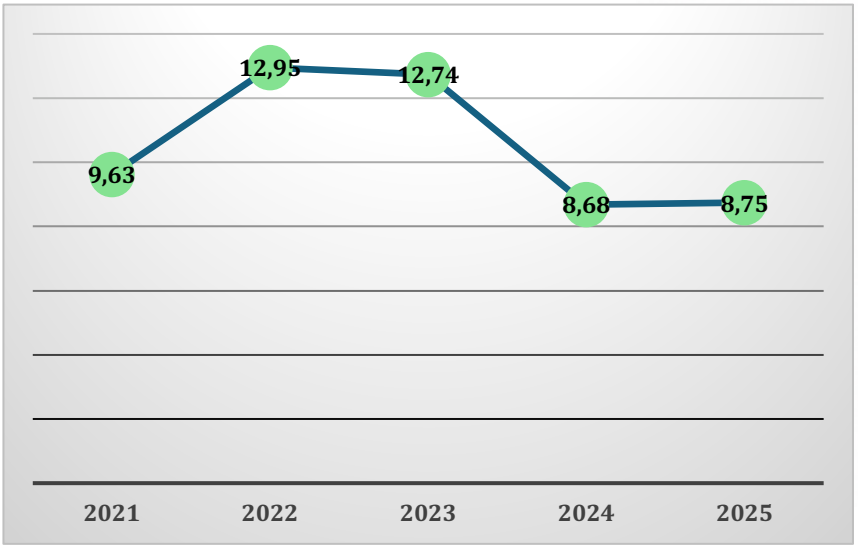


Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, 2026

Indeks Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 84,59, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 83,25. Kondisi ini membaik pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan hingga 87,42, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 87,27. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan tajam hingga 79,07, yang menandakan adanya pelemahan kapasitas daerah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Pangkal Pinang dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut:

Gambar 2. 22
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, 2025

Penurunan indeks ketahanan pangan pada tahun 2022 beriringan dengan meningkatnya prevalensi ketidakcukupan pangan hingga 12,95 persen, menunjukkan bahwa melemahnya kapasitas ketahanan pangan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pangan.

Meskipun indeks sempat membaik pada tahun 2023 dan 2024, prevalensi ketidakcukupan pangan tetap tinggi (12,74 persen di 2023) sebelum turun menjadi 8,68 persen di 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kapasitas ketahanan pangan belum sepenuhnya mampu menurunkan kerentanan pangan secara konsisten. Kondisi semakin mengkhawatirkan pada tahun 2025, ketika indeks ketahanan pangan turun drastis menjadi 79,07, sementara prevalensi ketidakcukupan pangan kembali naik menjadi 8,75 persen.

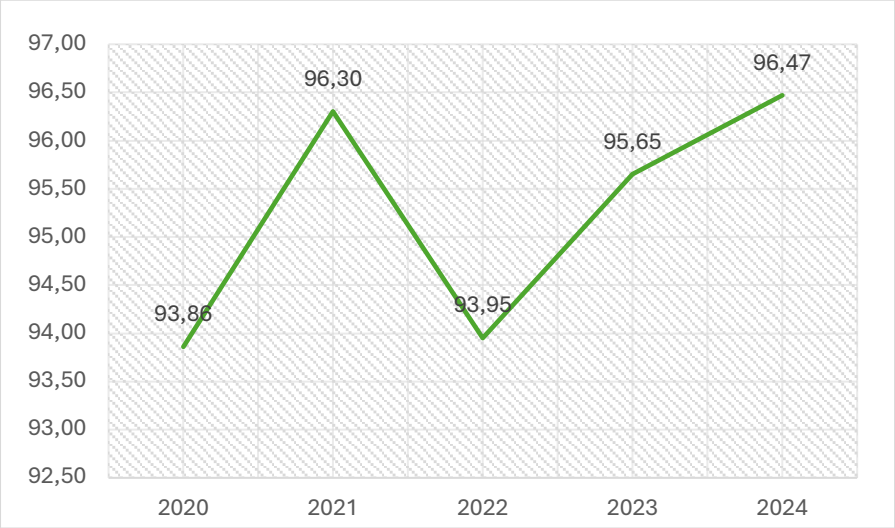
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Fluktuasi indeks ketahanan pangan dan prevalensi ketidakcukupan pangan mengindikasikan adanya masalah struktural dalam distribusi, akses, dan daya beli masyarakat.

2.1.4.3. Kapasitas Air Baku

Upaya terwujudnya ketahanan air yang baik diukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Di Kota Pangkal Pinang menunjukkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

sumber air minum layak, pada tahun 2020 sebesar 93,86 persen menjadi 96,30 persen pada tahun 2021. Terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 93,95 persen dan berhasil meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 95,65 persen dan 96,47 persen pada tahun 2024. Angka 96,47 persen menunjukkan semakin mendekati angka 100 persen yang artinya semakin meningkatnya kemudahan rumah tangga dalam mengakses air minum layak.

Gambar 2. 23
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2025

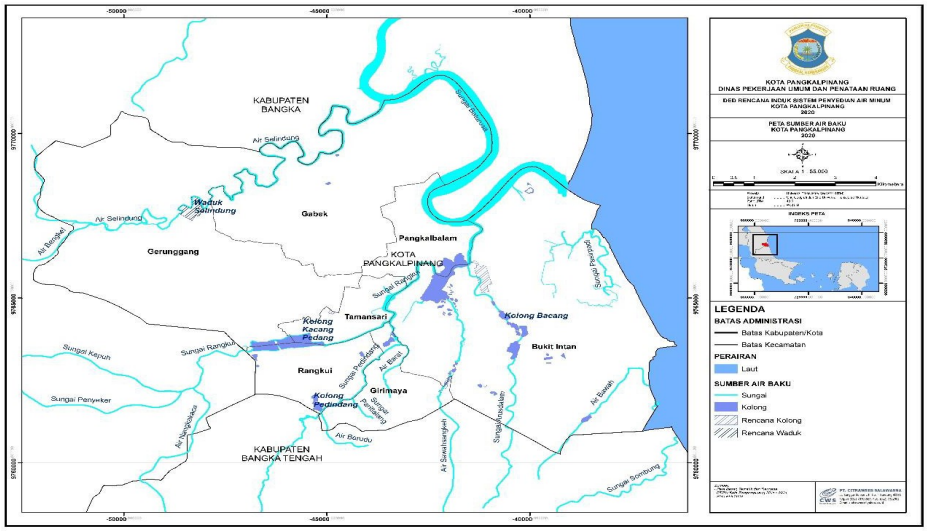
Sumber air baku yang digunakan Perumda Air Minum Tirta Pinang, yang merupakan satu-satunya perusahaan publik yang memberikan pelayanan penyediaan air minum perpipaan di dalam wilayah Pangkal Pinang, adalah berasal dari mata air dan air permukaan bekas galian timah atau dalam penamaan lokal disebut sebagai 'kolong'. Kolong merupakan istilah di daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk menyatakan lubang bekas tambang timah dengan sistem tambang semprot (*hydraulic mining*).

Berdasarkan data dari dokumen RISPAM Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2040, sumber air baku eksisting yang digunakan sebagai sumber pelayanan penyediaan air baku di Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

- Kolong Pedindang (Volume: 166.800 m3 dengan kapasitas IPA 85 l/dtk)
- Kolong Kacang Pedang (Volume: 1.058.000 m3)
- Kolong Bacang (Volume: 511.200 m3 dengan kapasitas IPA 40 l/dtk)
- Mata Air Gunung Mangkol (dengan kapasitas IPA 1 l/dtk)

Rencana Pembangunan Embung Selindung yang berlokasi di Sungai Selindung ini menjadi rencana strategis pemenuhan kebutuhan air baku jangka panjang bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang dengan potensi suplai kapasitas air sekitar 250–350 liter/detik dengan kawasan embung seluas sekitar 28 Ha. DED Embung yang telah disusun Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung pada tahun 2017 dan telah direview di tahun 2021 menunjukkan bahwa volume kolam tampungan efektif sebesar kurang lebih 490.000 m^3 dengan kedalaman bervariasi antara 5 m - 7 m dan desain yang telah memenuhi kriteria teknis WS Bangka.

Gambar 2. 24
Sumber Air Baku Kota Pangkal Pinang



Sumber: RISPAM Kota Pangkal Pinang 2020-2040

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan air baku Kota Pangkal Pinang pada periode perencanaan RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029 dapat dipenuhi melalui penguatan kapasitas sumber air, pembangunan embung baru, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan, serta optimalisasi pengelolaan jaringan distribusi. Pembangunan Embung Selindung, pengembangan IPA Selindung, dan peningkatan kapasitas kolong dapat menjadi program strategis yang menjadi dasar pemenuhan target pelayanan air minum hingga akhir tahun periode RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi bagi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kota Pangkal Pinang, dengan karakteristik geografis pesisir dan dinamika urban yang terus berkembang, dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian ekologi.

Lingkungan bukan sekadar ruang fisik, melainkan ekosistem yang menopang kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tersebut, IKLH Kota Pangkal Pinang mengalami penurunan dari 66,45 pada tahun 2020 menjadi 62,21 pada tahun 2021 dan relatif stagnan hingga 2023 di kisaran 62,17–62,25, sebelum kembali meningkat menjadi 65,26 pada tahun 2024. Peningkatan IKLH pada tahun 2024 ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan hidup dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara umum nilainya belum kembali ke tingkat tahun 2020. Dilihat dari komponen penyusunnya, kualitas udara relatif terjaga dan bahkan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan nilai 94,58. Sementara itu, kualitas air berfluktuasi dan cenderung berada pada kategori sedang. Adapun Indeks Tutupan Lahan mengalami penurunan paling tajam, terutama pada tahun 2022, dan hingga tahun 2024 belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan agar peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan dan seimbang antar komponennya.

Tabel 2. 14
Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021 – 2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62,21	62,17	62,25	65,26	70,77
Indeks Kualitas Air	Nilai	47,25	55,76	53,33	54,78	71,09
Indeks Kualitas Udara	Nilai	86,71	87,87	87,77	94,58	85,08
Indeks Tutupan Lahan	Nilai	42,60	25,69	30,38	29,07	43,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2025

2.1.5.2. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi aman merupakan salah satu indikator mendasar bagi kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menjadi prasyarat bagi kesehatan publik, lingkungan yang bersih, serta keberlanjutan pembangunan sosial.

1. Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian pembangunan bidang kesehatan lingkungan, khususnya terkait kualitas hidup masyarakat dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

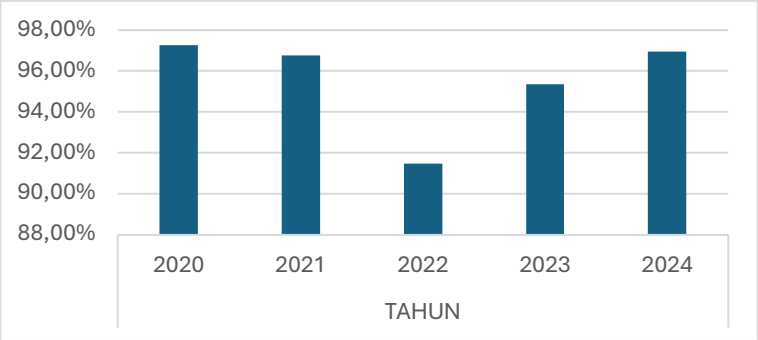
Tabel 2. 15
Akses Sanitasi Layak (%) Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

KETERANGAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sanitasi Layak	97,26%	96,78%	91,47%	95,35%	96,96%

Sumber: RPJM Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2025 - 2029

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pokja Sanitasi 2025), tingkat akses sanitasi layak di Kota Pangkal Pinang selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi meskipun berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2020, persentase akses sanitasi layak tercatat sebesar 97,26 persen, yang menempatkan kota ini pada kondisi yang relatif baik dalam penyediaan layanan sanitasi bagi penduduk.

Gambar 2. 25
Grafik Akses Sanitasi Layak Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 – 2024



Sumber: RPJM Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2025 - 2029

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren akses sanitasi layak Kota Pangkal Pinang dalam empat tahun terakhir menunjukkan pola perbaikan yang konsisten. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang aman, memadai, dan berkelanjutan. Capaian positif ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan investasi infrastruktur, penguatan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga sarana sanitasi agar dapat mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Sanitasi Aman

Sanitasi aman tidak hanya mencakup ketersediaan fasilitas sanitasi, namun juga memastikan bahwa pengelolaan limbah domestik dilakukan hingga tahap akhir yang aman dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel 2. 16
Akses Sanitasi Aman (%) Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

KETERANGAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sanitasi Aman	7,32%	11,87%	6,38%	7,32%	10,93%

Sumber: RPJM Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2025 - 2029

Secara keseluruhan, meskipun capaian sanitasi aman Kota Pangkal Pinang masih relatif rendah dibandingkan dengan target sanitasi layak, tren peningkatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah perkembangan yang positif. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sanitasi, sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan dan strategi lanjutan untuk memperluas cakupan layanan sanitasi aman di masa mendatang. Upaya peningkatan ini penting untuk memastikan lingkungan yang lebih sehat, mencegah pencemaran, serta mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.5.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Kota Pangkal Pinang saat ini memiliki 1 TPA dengan luas lahan efektif ± 2,4Ha dalam kondisi *overload*. Trend peningkatan sampah tanpa ada upaya 3R *(Reduce, Reuse, dan Recycle)*, akan terus menambah beban dari TPA. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang bahwa jumlah timbulan sampah Kota Pangkal Pinang terjadi peningkatan dari 55.416 ton pada Tahun 2020 menjadi 61.363,95 ton pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Pangkal Pinang terus meningkat. Jumlah sampah yang berhasil diolah juga meningkat setiap tahunnya dari 57.702,72 ton pada Tahun 2020 menjadi 59.276,37 ton pada Tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan kapasitas dalam sistem pengelolaan sampah.

Tabel 2. 17
Jumlah Timbulan Sampah (Ton) dan Jumlah Sampah Terolah (Ton)

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	Jumlah Sampah Terolah (Ton)
2020	55.416	52.702,72
2021	58.399	54.980,32
2022	59.856,5	58.236,12

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	Jumlah Sampah Terolah (Ton)
2023	60.366,22	59.134,02
2024	61.363,95	59276,37
2025	41.187,17	40.723,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, 2025

2.1.5.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

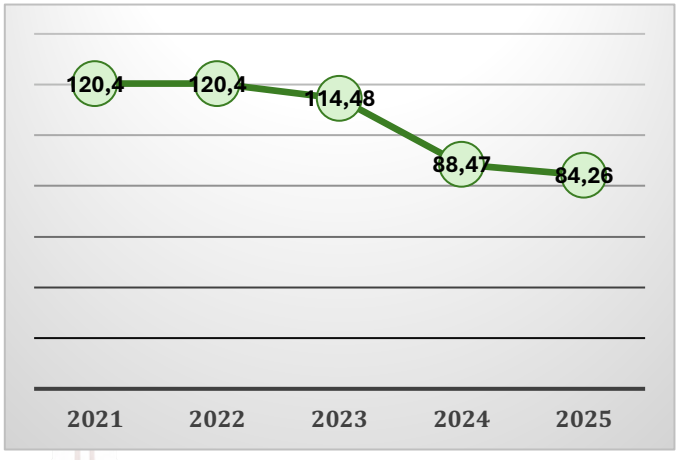
Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup, jumlah rumah tangga yang terlayani pengumpulan sampah tahun 2024 adalah 12.009 rumah. Pengumpulan sampah dilakukan oleh layanan mobil pink di Kota Pangkal Pinang. Setiap kelurahan di Kota Pangkal Pinang memiliki 2 mobil pink pengangkut sampah yang beroperasional setiap hari. Mobil pink tersebut akan mengangkut sampah dari setiap rumah berdasarkan wilayah kelurahan dengan TPA sebagai tempat pembuangan terakhir.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025 – 2029 yaitu jumlah timbulan sampah Kota Pangkal Pinang tahun 2023 sebanyak 150,88 ton/hari dengan sumber terbesar berasal dari kegiatan rumah tangga sebanyak 93,12 ton/hari. Jika sampah kegiatan rumah tangga tahun 2023 dikalkulasikan selama 1 tahun, jumlahnya sebanyak 33.988,8 ton/tahun. Kota Pangkal Pinang memiliki 1 TPA dengan luas lahan efektif ± 2,4 Ha dalam kondisi *overload*. Trend peningkatan sampah tanpa ada upaya 3R, akan terus menambah beban dari TPA.

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Selama kurun waktu 2021 hingga 2025 Indeks Risiko Bencana Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren penurunan yang konsisten, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 26
Indeks Risiko Bencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025

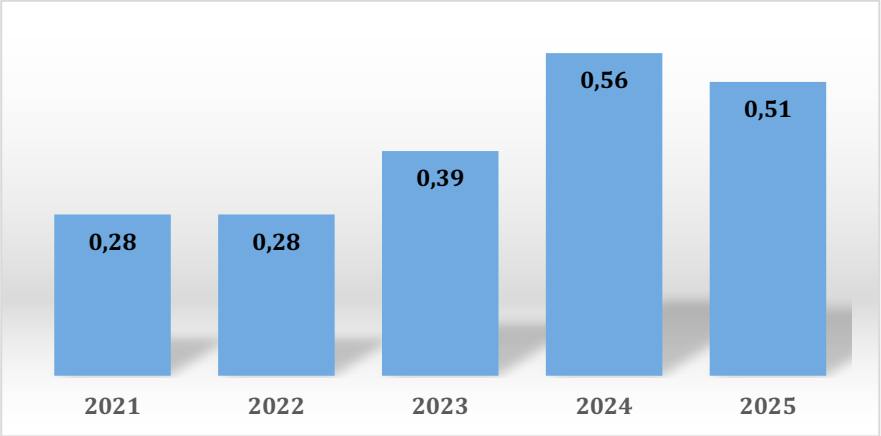


Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi, 2026

Nilai indeks tetap tinggi pada tahun 2021–2022 (120,4), kemudian menurun menjadi 114,48 pada 2023, turun lebih tajam menjadi 88,47 pada 2024, dan mencapai 84,26 pada 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas mitigasi, pengurangan kerentanan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Indeks Ketahanan Daerah memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. 27
Indeks Ketahanan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPBD Kota Pangkal Pinang, 2026

Dari gambar diatas, indeks ketahanan daerah Kota Pangkal pinang mengalami tren peningkatan yang siginifikan, dari nilai 0,28 pada 2021–2022, indeks naik menjadi 0,39 pada 2023, kemudian meningkat lebih tinggi menjadi 0,56 pada 2024. Meski sedikit menurun pada 2025 (0,51), capaian ini tetap menunjukkan adanya penguatan kapasitas adaptasi daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Penurunan drastis indeks risiko pada 2024–2025 bersamaan dengan lonjakan ketahanan daerah pada periode yang sama, memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan, peningkatan infrastruktur, serta program kesiapsiagaan masyarakat mulai memberikan dampak nyata. Namun, penurunan ketahanan daerah pada 2025 perlu dicermati. Hal ini bisa mengindikasikan adanya tantangan baru, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan iklim yang semakin kompleks, atau faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kapasitas adaptasi.

2.1.7. Demografi

Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kelas kota, Kota Pangkal Pinang masuk dalam kategori kota sedang, yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 hingga 500.000 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang berdasarkan hasil

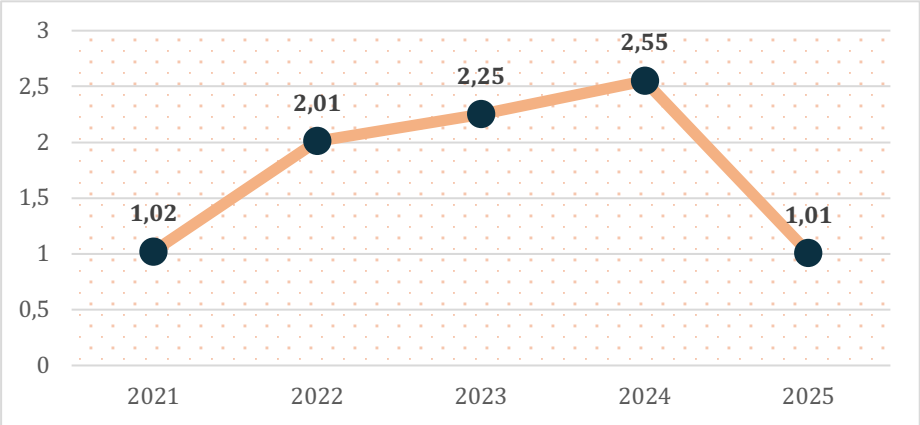
proyeksi penduduk pada tahun 2025 sebesar 244.741 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2020-2025 sebesar 1,01 persen dan rasio jenis kelamin Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sebesar 102,32. Populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Gerunggang yang dihuni sekitar 23.42 persen penduduk, diikuti Kecamatan Bukit Intan 18.45 persen, Kecamatan Rangkui 16.24 persen, Kecamatan Gabek 16.16 persen, Kecamatan Pangkal Balam 9.45 persen dan Kecamatan Taman Sari 8.36 persen. Sedangkan kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Girimaya dengan jumlah penduduk sekitar 7,93 persen.

Tabel 2. 18
Data Kependudukan Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Rasio Jenis Kelamin
2021	221.988	2.126	103,30
2022	231.062	2.210	102,03
2023	236.267	2.260	102,17
2024	242.285	2.318	102,40
2025	244.741	2.341	102,32

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka (data diolah)

Gambar 2. 28
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



Sumber : Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2021-2025

Penduduk di Kota Pangkal Pinang diproyeksikan mengalami 247,43 ribu jiwa dalam lima tahun mendatang pada tahun 2030. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 233,48 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 247,43 ribu jiwa pada tahun 2030. Adapun pada akhir periode pembangunan 2030, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan sebanyak 124,78 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 122,68 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,71. Penambahan penduduk di setiap tahunnya

ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 2.368 jiwa per kilometer persegi.

Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 hingga 2030 berada pada jendela bonus demografi dimana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada di bawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami *eskalasi* atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel 2. 19
Proyeksi Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) :	233,48	236,43	239,30	242,08	244,79	247,43
• Laki-laki	118,24	119,61	120,98	122,28	123,56	124,78
• Perempuan	115,26	116,81	118,32	119,82	121,27	122,68
Rasio Jenis Kelamin	102,59	102,40	102,25	102,05	101,89	101,71
Kepadatan Penduduk	2234	2263	2290	2317	2343	2368
Rasio Ketergantungan	46,13	46,51	46,90	47,28	47,66	47,94
Kelompok Umur (Ribu Jiwa) :						
• 0–14	57,59	58,05	58,53	58,97	59,38	59,67
• 15–64	159,78	161,38	162,90	164,37	165,78	167,25
• 65+	16,11	17,00	17,87	18,74	19,63	20,51

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung 2020-2035, 2025 (data diolah)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan peran stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memenuhi utilitas masyarakat.

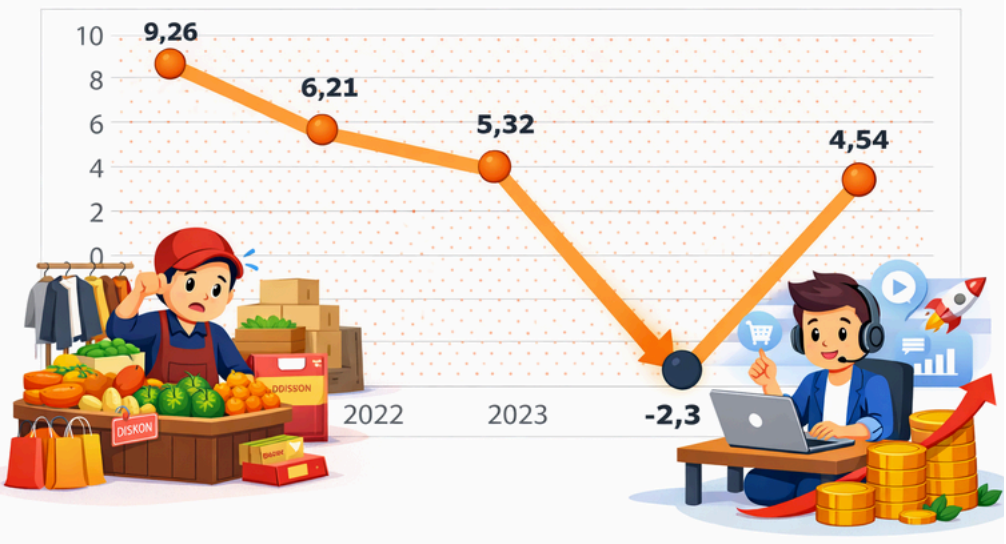
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, upaya pencapaian kesejahteraan ekonomi melibatkan peran penting pemerintah dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi pada tahun 2021 (9,26 persen), laju ekonomi mengalami perlambatan berturut-turut pada 2022 (6,21 persen) dan 2023 (5,32 persen). Kondisi memburuk pada 2024 dengan kontraksi sebesar -2,3 persen, sebelum kembali pulih pada 2025 dengan pertumbuhan positif 4,54 persen. Tren ini menegaskan adanya kerentanan struktural dalam perekonomian daerah, di mana guncangan eksternal maupun internal dapat memengaruhi stabilitas pertumbuhan. Pemulihan pada 2025 menunjukkan kapasitas adaptasi yang cukup baik, namun tetap memerlukan kebijakan antisipatif dan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan lebih berkelanjutan.

Gambar 2. 29
Grafik Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkal Pinang



Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang, 2021-2025 (data diolah)

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Situasi kemiskinan di Kota Pangkal Pinang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 20
Indikator Kemiskinan Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	808.839	858.840	894.224	925.522	956.990
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	10,10	9,76	9,27	8,87	9,99
Persentase Penduduk Miskin	4,76	4,55	4,27	4,04	4,50
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,57	0,79	0,62	0,68	0,64
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	0,21	0,17	0,19	0,13

Sumber: Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2026

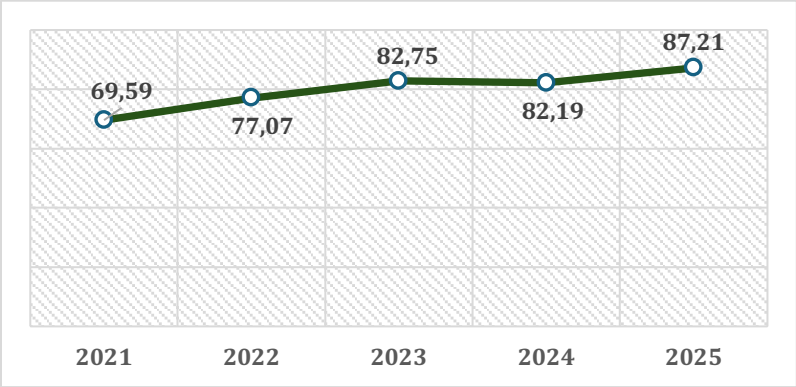
Indikator kemiskinan Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 10,10 ribu orang (4,76 persen) menjadi 8,87 ribu orang (4,04 persen). Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali menjadi 9,99 ribu orang (4,50 persen), yang menandakan adanya kerentanan ekonomi pasca kontraksi pertumbuhan tahun 2024.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan relatif rendah dan stabil, meskipun sempat meningkat pada 2022, menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin tidak terlalu tajam. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, namun sekaligus menegaskan perlunya penguatan perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pengendalian inflasi agar tren penurunan kemiskinan dapat berlanjut secara berkelanjutan.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Dari data yang tersedia, PDRB per kapita Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2025.

Gambar 2. 30
PDRB Per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



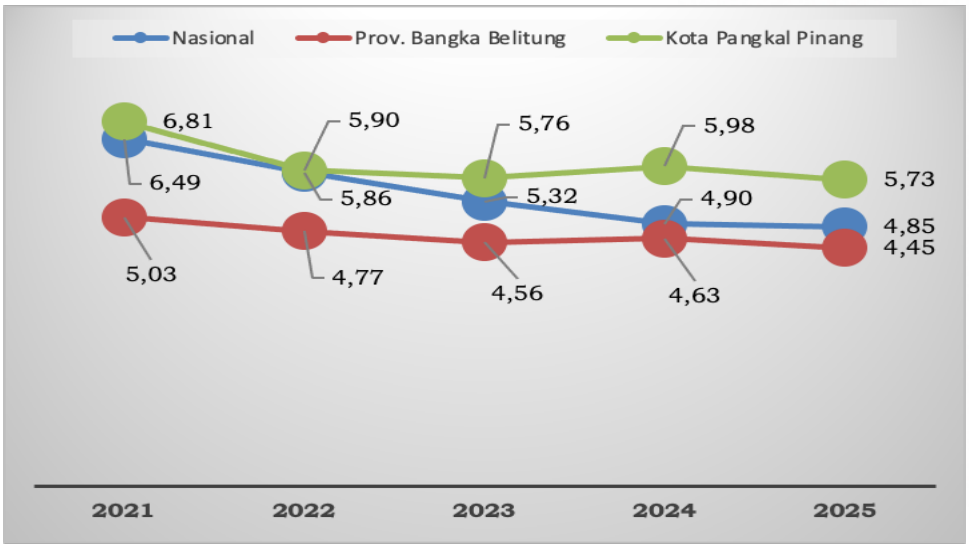
Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2021-2025

PDRB per kapita Kota Pangkal Pinang selama periode 2021–2025 secara umum mengalami peningkatan, meskipun sempat menurun pada tahun 2024. Capaian tertinggi pada tahun 2025 sebesar 87,21 juta rupiah menegaskan adanya pemulihan ekonomi pasca kontraksi, sekaligus mencerminkan perbaikan produktivitas dan daya saing daerah. Tren ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kota Pangkal Pinang relatif terjaga, namun tetap memerlukan kebijakan penguatan sektor produktif dan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan per kapita dapat berkelanjutan dan lebih stabil.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Posisi Pangkal Pinang sebagai ibukota Provinsi sedikit banyak memberi dampak pada naiknya angka pengangguran. Berbeda dengan tren nasional dan provinsi, angka pengangguran Kota Pangkal Pinang cenderung fluktuatif. Dari 6,81 Persen (2021) turun ke 5,90 persen (2022), sedikit turun ke 5,76 persen (2023), kembali naik ke 5,98 persen (2024), dan turun tipis ke 5,73 persen (2025). Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pangkal Pinang selama kurun waktu 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021-2025



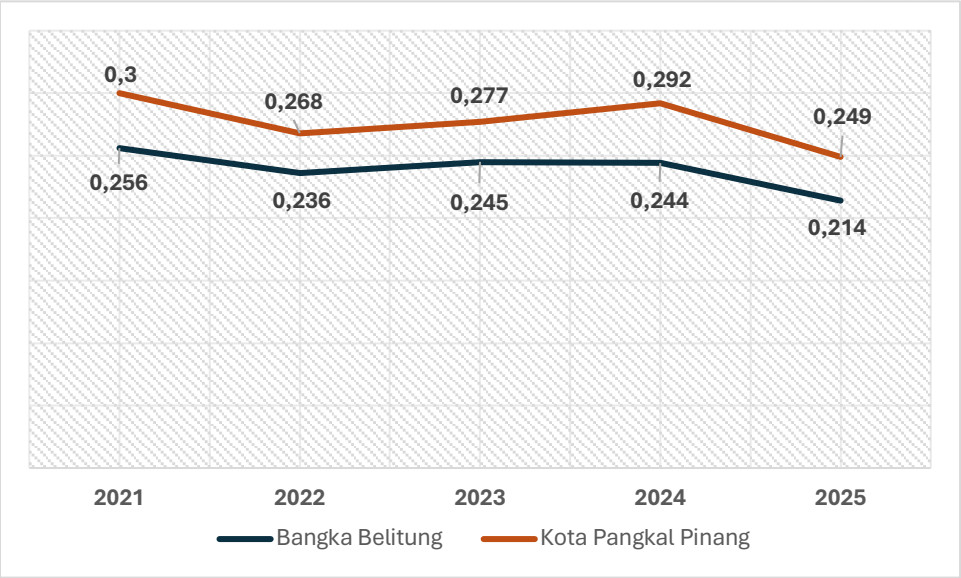
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkal Pinang selama periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif, berbeda dengan tren penurunan yang konsisten di tingkat nasional maupun provinsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam penyediaan lapangan kerja di daerah, terutama terkait daya serap sektor produktif terhadap angkatan kerja baru. Meskipun angka pengangguran relatif stabil di kisaran 5–6 persen, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, mendorong investasi, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tren pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan.

2.2.1.5. Indeks Gini

Berdasarkan perkembangan Indeks Gini selama periode 2020 hingga 2024, terlihat dinamika ketimpangan pendapatan baik di Kota Pangkal Pinang maupun di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum, Kota Pangkal Pinang menunjukkan tingkat ketimpangan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Gambar 2. 32
Indeks Gini Kota Pangkal Pinang dan Prov. Kep. Bangka Belitung



Sumber : BPS, Pangkal Pinang Dalam Angka 2026

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Pangkal Pinang masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas hasil pembangunan ekonomi agar dapat dinikmati secara lebih merata.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM yaitu masing-masing sebesar 79,12 (2021); 79,77 (2022); 80,45 (2023) dan 80,90 (2024), 81,64 (2025).

Secara keseluruhan, tren peningkatan pada keempat indikator utama IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang bergerak ke arah yang positif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini perlu terus diperkuat melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif agar kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 21
Perkembangan Indikator IPM Kota Pangkal Pinang

Tahun	IPM	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)
2020	78,76	74,43	13,15	9,92	15.663
2021	79,12	74,53	13,16	10,13	15.716
2022	79,77	74,76	13,17	10,27	16.307
2023	80,45	75,01	13,19	10,50	16.734
2024	80,90	75,26	13,30	10,67	16.750
2025	81,64	75,64	13,50	10,90	16.856

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2026

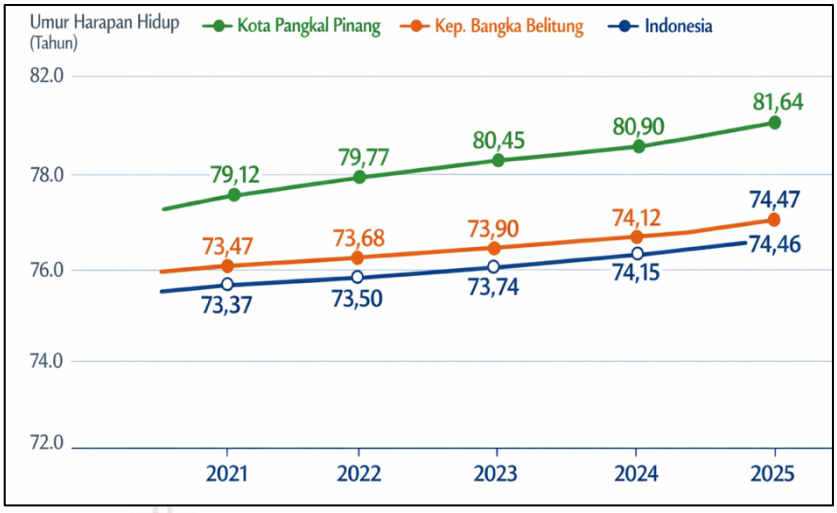
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab dengan masyarakat yang sehat, diharapkan produktivitas dan kualitas hidup juga meningkat.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Pangkal Pinang pada tahun 2020 hingga tahun 2025 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 74,43 tahun dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 75,64 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Umur harapan hidup Kota Pangkal Pinang berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 33
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Pangkal Pinang dengan Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021-2025 (Tahun)

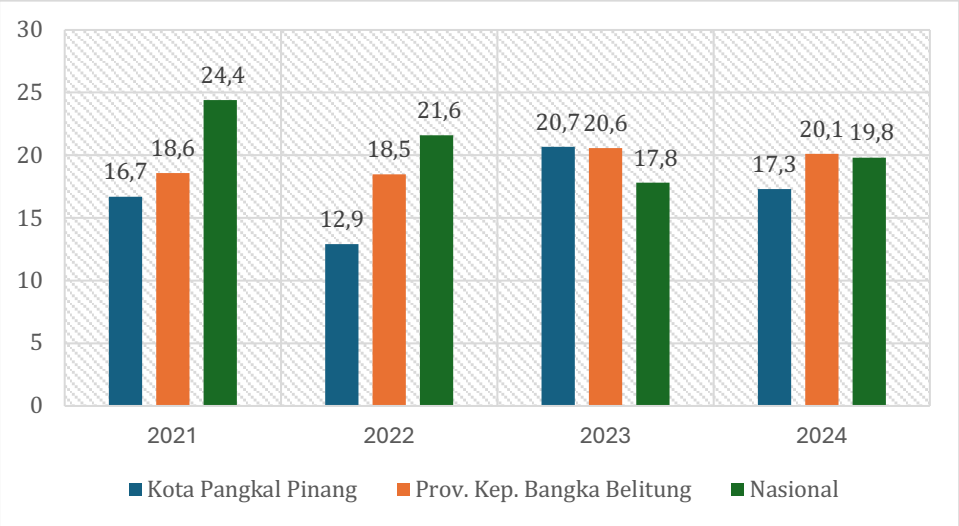


Sumber : BPS, Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang 2026

2.2.2.2. Prevalensi Stunting Pada Balita

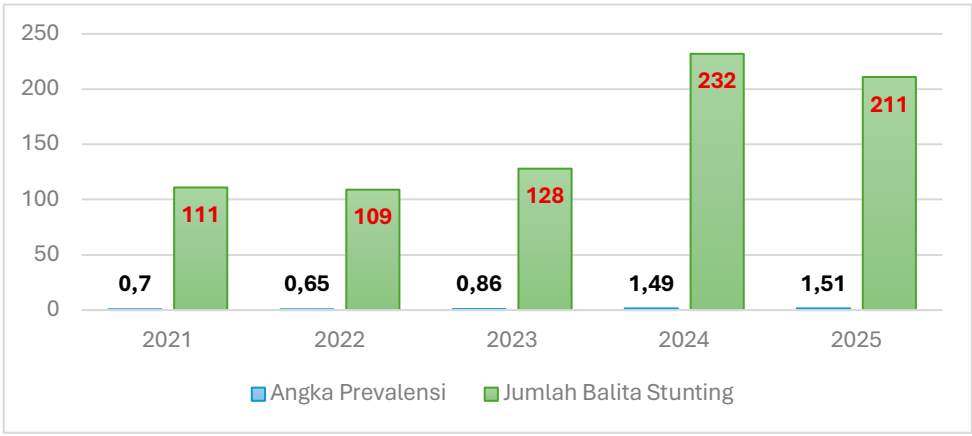
Prevalensi stunting menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan kesehatan dan ketahanan sumber daya manusia, karena tingginya angka stunting dapat menghambat pencapaian kualitas generasi penerus dan berdampak pada daya saing daerah di masa mendatang.

Gambar 2. 34
Prevalensi Stunting Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional berdasarkan SSGI dan SKI Tahun 2021-2024



Sumber : SSGI dan SKI 2021-2024

Gambar 2. 35
Prevalensi Stunting dan Jumlah Balita Stunting Kota Pangkal Pinang berdasarkan EPPGBM Tahun 2021-2025



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang 2025

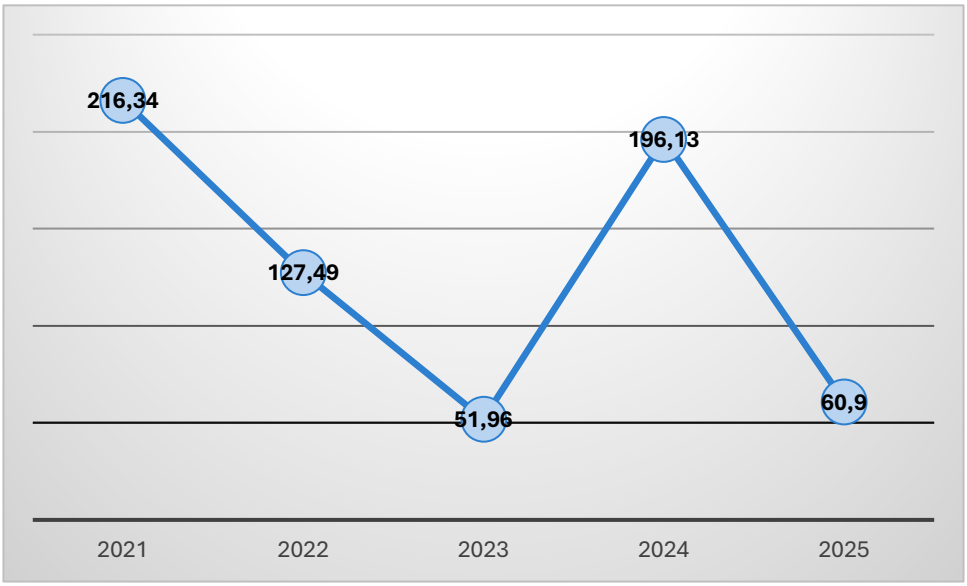
Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada program intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas, melakukan *screening* terhadap anak-anak. Program Orang Tua Asuh Bagi

Anak Stunting juga merupakan salah satu program unggulan yang dinilai berkontribusi besar dalam penanganan stunting dengan melibatkan seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, serta penguatan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dibutuhkan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan. Ke depan, fokus utama perlu diarahkan pada peningkatan cakupan dan kualitas layanan gizi, pemantauan balita secara rutin, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi dan pelayanan kesehatan dasar yang memadai.

2.2.2.3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu di Kota Pangkal Pinang menunjukkan fluktuasi tajam 2021–2025, dengan lonjakan kembali pada 2024. Gambaran tentang angka kematian ibu Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 sampai dengan 2025, adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 36
Angka Kematian Ibu Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, 2026

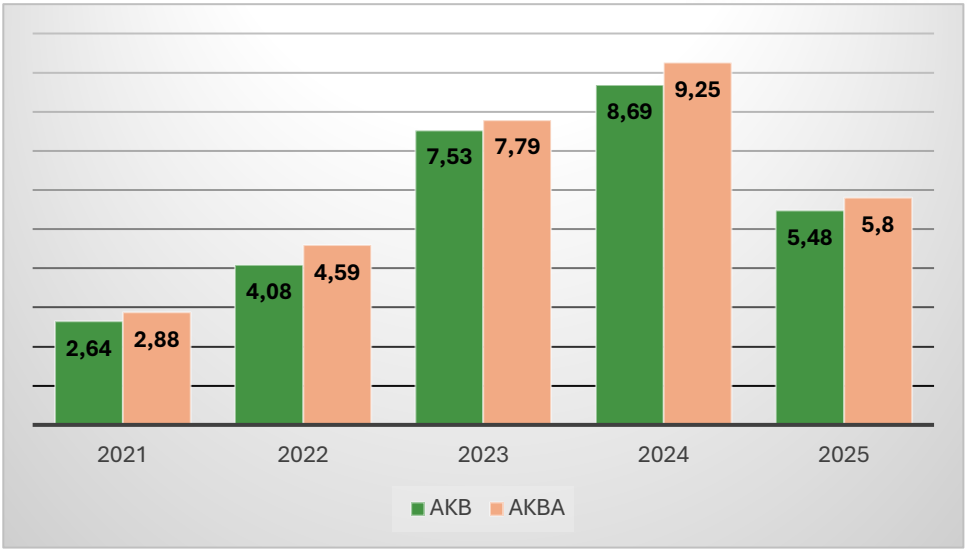
Angka kematian ibu di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan signifikan pada 2022–2023, namun kembali meningkat tajam pada 2024 sebelum menurun lagi pada 2025. Kondisi ini mencerminkan belum stabilnya kualitas layanan kesehatan maternal. Penyebab utama tingginya angka kematian ibu adalah komplikasi kehamilan dan persalinan, terutama perdarahan, infeksi, serta hipertensi dalam kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelayanan kesehatan ibu, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta akses rujukan yang cepat dan efektif untuk menekan angka kematian ibu secara berkelanjutan. Karena AKI

adalah cerminan dari keberhasilan capaian indikator layanan kesehatan dasar, seperti cakupan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil, dan cakupan layanan nifas.

2.2.2.4. Angka Kematian Bayi dan Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) dan balita (AKABA) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir dan balita sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua bayi dan balita tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi dan balita.

Gambar 2. 37
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2021 – 2025 Kota Pangkal Pinang



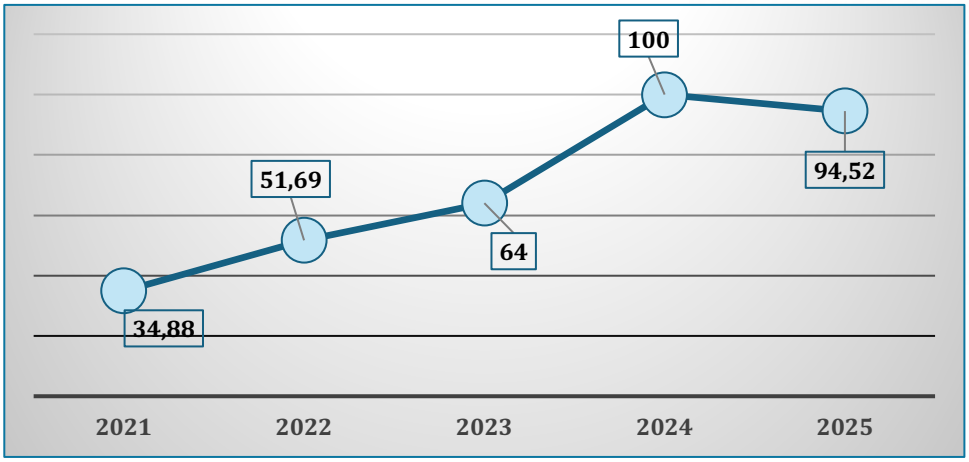
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, 2026

Perkembangan angka kematian bayi dan balita di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2024 sebelum menurun pada 2025. Lonjakan angka kematian terutama dipengaruhi oleh komplikasi kehamilan dan persalinan, infeksi, gizi buruk, serta keterbatasan akses layanan kesehatan berkualitas. Faktor sosial-ekonomi keluarga turut memperburuk kondisi, sehingga meningkatkan risiko kematian bayi dan balita. Penurunan pada tahun 2025 menjadi indikasi positif atas intervensi kesehatan yang mulai efektif, namun diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi dan imunisasi untuk menjaga keberlanjutan penurunan angka kematian bayi dan balita di masa mendatang.

2.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) (*treatment coverage*) Kota Pangkal Pinang pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi cerminan efektifnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat.

Gambar 2. 38
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) Kota Pangkal Pinang



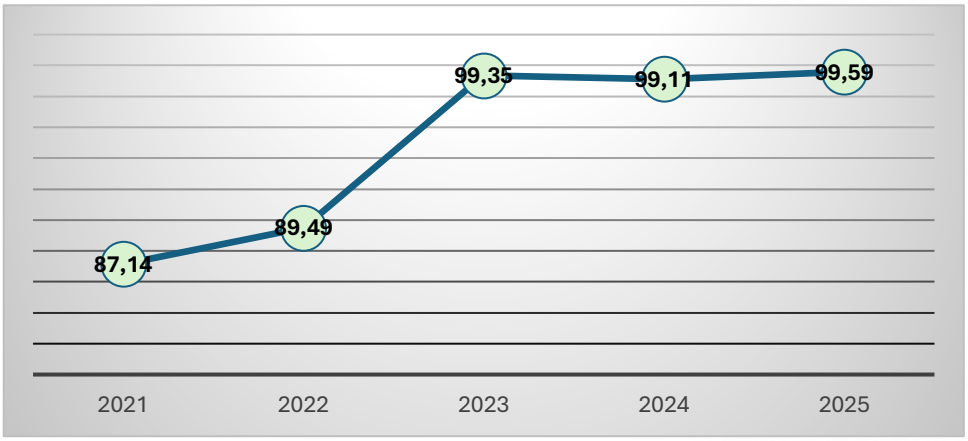
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, 2025

Secara keseluruhan, peningkatan *treatment coverage* TB dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada derajat kesehatan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Keberhasilan ini berkontribusi langsung pada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat, karena pengendalian penyakit menular merupakan prasyarat penting bagi produktivitas ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2.6. Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Peningkatan kepesertaan JKN mencerminkan semakin besarnya jumlah penduduk yang mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, sehingga memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Kondisi ini menjadi salah satu fondasi utama dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 39
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dinkes Kota Pangkal Pinang, 2026

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 87,14 persen pada tahun 2021 hingga mencapai 99,59 persen pada tahun 2025. Meskipun hampir universal, capaian belum sepenuhnya 100 persen disebabkan oleh mobilitas penduduk, pekerja sektor informal, keterbatasan sosialisasi, kendala administrasi, serta faktor ekonomi keluarga. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan integrasi data kependudukan, intensifikasi sosialisasi program, serta dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar kepesertaan JKN dapat benar-benar menyeluruh.

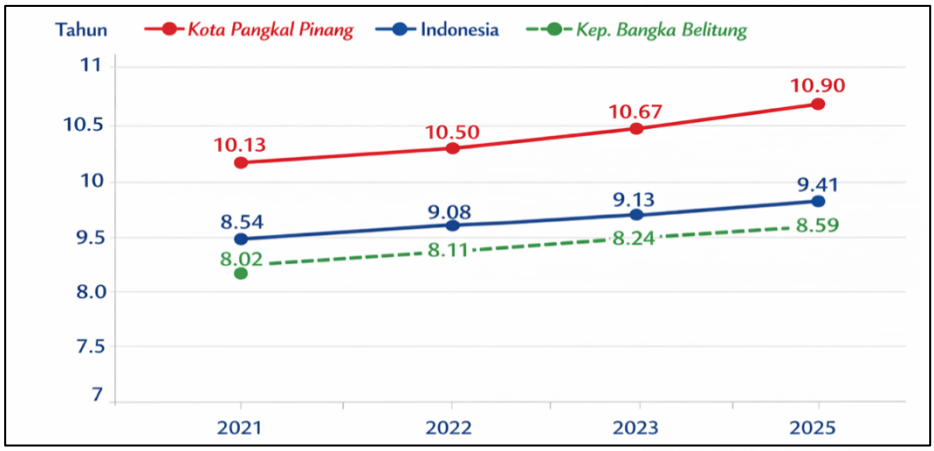
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan manusia dan kemajuan daerah. Kota Pangkal Pinang menegaskan komitmennya bahwa pendidikan tidak hanya harus berkualitas, tetapi juga merata, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi tanpa terkendala oleh latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis.

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan Kota Pangkal Pinang menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, tercermin dari meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Gambar 2. 40
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 – 2025 (Tahun)



Sumber : BPS, Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang 2026

RLS Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sebesar 10,90 tahun masih di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,59 tahun dan Nasional sebesar 9,41 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2025, RLS Kota Pangkal Pinang menempati posisi tertinggi.

2.2.3.2. Angka Literasi/ Numerasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Tabel 2. 22
Persentase Satuan Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
1. Literasi			
SD	79,10	67,26	69,76
SMP	86,91	81,03	82,13
Kesetaraan	30,50	45,48	-
2. Numerasi			
SD	58,81	54,24	57,14
SMP	66,67	68,44	69,94
Kesetaraan	32,31	43,23	-

Sumber: Dinas Pendidikan&Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, 2026

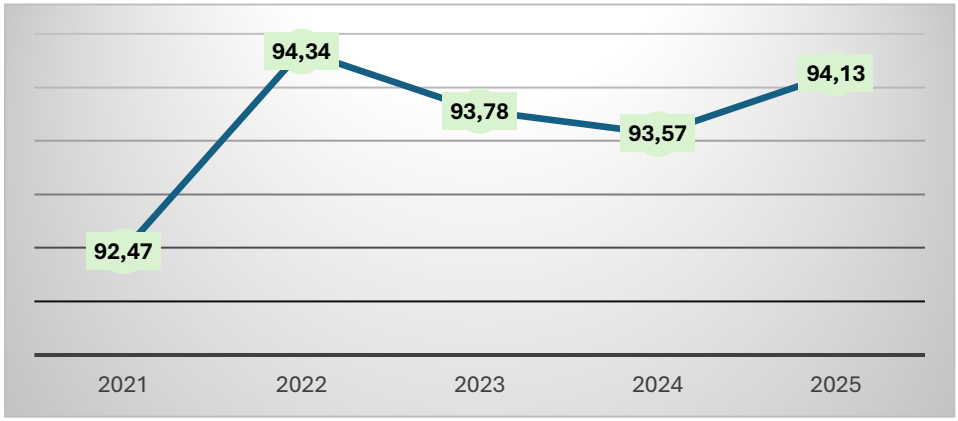
Capaian pembangunan literasi masyarakat tersebut menggambarkan bahwa Kota Pangkal Pinang telah berada pada jalur yang tepat dalam pembangunan literasi

masyarakat, namun masih perlu mengakselerasi upaya pemenuhan sarana literasi yang merata, peningkatan minat baca, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari ekosistem literasi modern untuk mencapai kategori "tinggi" pada tahun-tahun mendatang.

2.2.3.3. Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi

Kota Pangkal Pinang yang mayoritas cenderung bergerak pada sektor jasa menjadi faktor pendukung dalam permintaan pekerja pendidikan menengah dan tinggi seperti perubahan struktur ekonomi menuju sektor jasa dan manufaktur bernilai tambah, digitalisasi/ otomasi yang memerlukan keterampilan teknis dan pengetahuan dan regulasi/ sertifikasi yang mensyaratkan kualifikasi tertentu. Gambaran persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kota Pangkal Pinang selama kurun waktu 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 41
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



Sumber : Pangkal Pinang Dalam Angka, BPS,, 2022-2026 (diolah)

Secara keseluruhan, di Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir terlihat tren peningkatan yang stabil pada proporsi pekerja dengan pendidikan menengah dan tinggi.

2.2.3.4. Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Di Kota Pangkal Pinang, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat dari 172.042 orang pada Semester II Tahun 2023 menjadi 178.022 orang pada Semester II Tahun 2024, dan kembali bertambah menjadi 183.229 orang pada Semester I Tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan proporsi penduduk berpendidikan tinggi dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 23
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Periode	Penduduk Usia ≥15 Tahun Berpendidikan Tinggi (Orang)	Total Penduduk Usia ≥15 Tahun (Orang)	Proporsi (%)
2023 (Semester II)	26.767	172.042	15,59
2024 (Semester II)	25.264	178.022	14,19
2025 (Semester I)	28.559	183.229	15,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, 2026

Secara umum, ke depan diperlukan upaya yang lebih konsisten untuk memperluas akses dan partisipasi pendidikan tinggi, memperkuat kesinambungan pendidikan, serta memastikan pertumbuhan jumlah penduduk berpendidikan tinggi berjalan lebih cepat dan stabil dibandingkan pertumbuhan penduduk usia produktif, sehingga kualitas sumber daya manusia Kota Pangkal Pinang dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

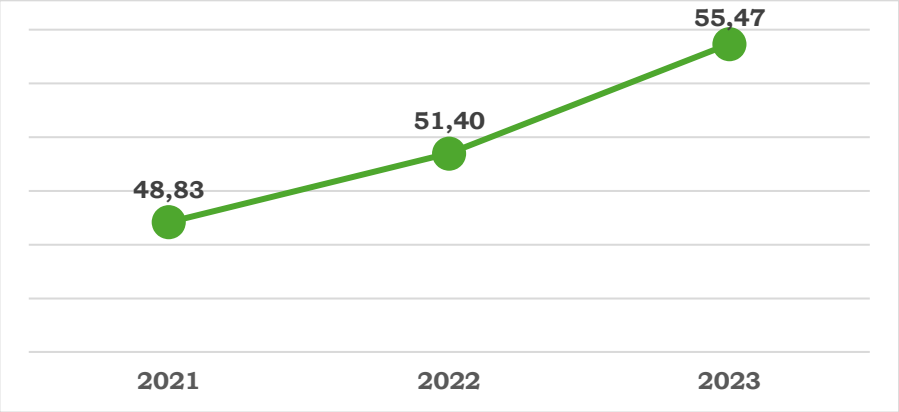
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan instrumen penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang menghadapi risiko sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pangkal Pinang menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2021 sampai dengan 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam memperluas akses jaminan sosial bagi tenaga kerja, sekaligus menggambarkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi pekerja dalam program perlindungan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Pangkal Pinang.

Gambar 2. 42
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Level Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2023



Sumber : Jamsostek Kota Pangkal Pinang, 2021-2023

2.2.4.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Selama periode 2020 hingga 2024, partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal di Kota Pangkal Pinang masih relatif rendah. Data nasional menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas hanya sekitar 51 persen, dengan mayoritas terserap di sektor informal. Kondisi ini juga tercermin di Pangkal Pinang, di mana penyandang disabilitas lebih banyak bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, jasa mandiri, dan pertanian, sementara keterlibatan mereka di perusahaan formal masih di bawah satu persen.

Dalam kerangka RPJM Daerah 2025–2029, isu ini harus ditempatkan sebagai salah satu indikator pembangunan sosial inklusif. Target realistis yang dapat ditetapkan adalah peningkatan persentase pekerja disabilitas di sektor formal hingga 1,2–1,5 persen pada tahun 2026, dan mencapai 2 persen pada akhir periode RPJM Daerah. Pencapaian ini akan menjadi bukti nyata bahwa Pangkal Pinang tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

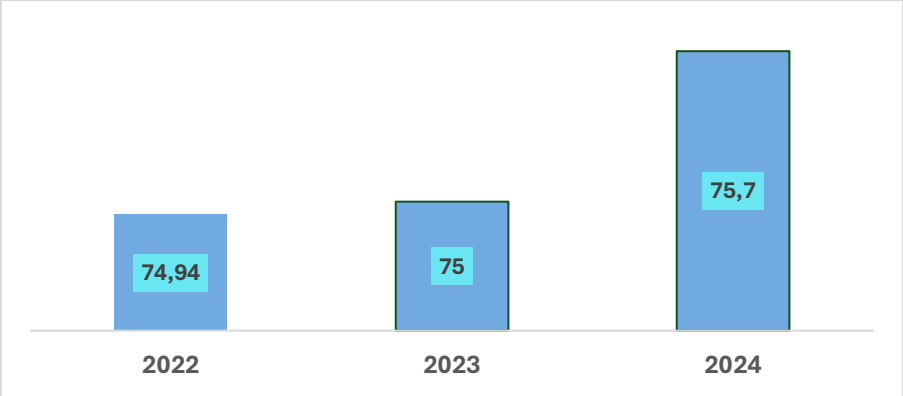
Kehidupan beragama yang maslahat dan kebudayaan yang maju merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis, berdaya, dan berkeadaban.

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat pembangunan inklusif di Kota Pangkal Pinang. Sepanjang periode 2022–2024, kondisi kerukunan umat beragama di Pangkal Pinang

relatif stabil dengan skor indeks berada dalam kategori tinggi, sejalan dengan tren nasional yang berkisar antara 72 hingga 76. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pangkal Pinang mampu menjaga harmoni antarumat beragama meskipun menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

Gambar 2. 43
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2024



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025

Dalam kerangka RPJM Daerah 2025–2029, kerukunan umat beragama perlu dijadikan indikator pembangunan sosial yang terukur. Pemerintah daerah dapat menetapkan target peningkatan indeks hingga 77–78 pada akhir periode RPJM Daerah, dengan strategi penguatan FKUB, pelaksanaan survei lokal tahunan, integrasi moderasi beragama ke dalam program pendidikan dan sosial, serta kampanye publik yang menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan. Dengan demikian, Pangkal Pinang tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memperkokoh identitas sebagai kota yang rukun dan inklusif.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Faktor pendorong utama pembangunan kebudayaan di Pangkal Pinang antara lain keberadaan warisan budaya Melayu yang terjaga, tradisi multikultural yang hidup berdampingan, serta peran aktif komunitas seni dalam menghidupkan ruang publik. Pemerintah daerah juga berperan melalui program pelestarian budaya dan integrasi kebudayaan dalam pendidikan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan data IPK di tingkat kota, modernisasi dan urbanisasi yang berpotensi mengikis tradisi lokal, minimnya integrasi pelaku seni ke dalam ekosistem ekonomi kreatif, serta keterbatasan akses generasi muda terhadap kebudayaan tradisional.

Dalam kerangka RPJM Daerah 2025–2029, pembangunan kebudayaan di Pangkal Pinang harus diarahkan pada penguatan data kebudayaan melalui survei lokal, revitalisasi ruang publik budaya sebagai pusat interaksi lintas generasi, pengembangan

ekonomi kreatif berbasis budaya, serta integrasi kebudayaan dalam pendidikan formal dan nonformal. Target yang realistis adalah peningkatan skor IPK lokal hingga ≥56 pada tahun 2029, melampaui rata-rata nasional, sehingga Pangkal Pinang tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai kota dengan identitas budaya yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.

2.2.5.3. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan indikator berbasis data yang digunakan sebagai standar pengukuran dan evaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dengan mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap berbagai aspek tata kelola perzakatan. IZN dirancang sebagai *measurement standard* yang adaptif (*living index*) untuk mencerminkan perkembangan sistem pengelolaan zakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Pangkal Pinang, capaian Indeks Zakat Nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,00 dengan *interpretasi Beginer*/Pemula, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di daerah ini masih berada pada tahap awal pengembangan, sehingga memerlukan penguatan kelembagaan, sistem, serta dukungan kebijakan yang lebih terarah agar kinerja perzakatan ke depan dapat meningkat dan berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan sosial ekonomi daerah.

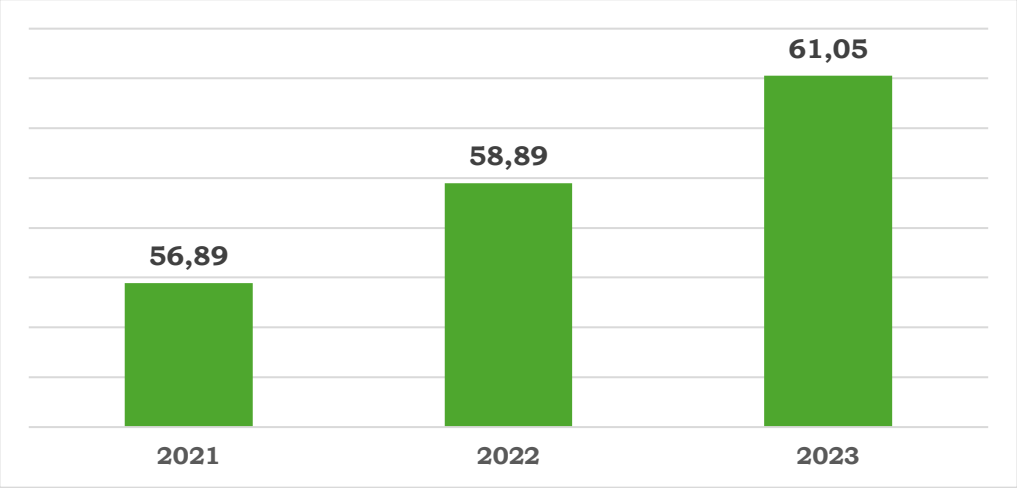
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Subbab ini menegaskan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Kota Pangkal Pinang yang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 56,89, yang meningkat menjadi 58,89 pada tahun 2022. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan indeks mencapai 61,05. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup keluarga di kota tersebut, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program pemerintah yang fokus pada pengembangan kapasitas keluarga dan peningkatan kondisi hidup masyarakat.

Gambar 2. 44
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 - 2023

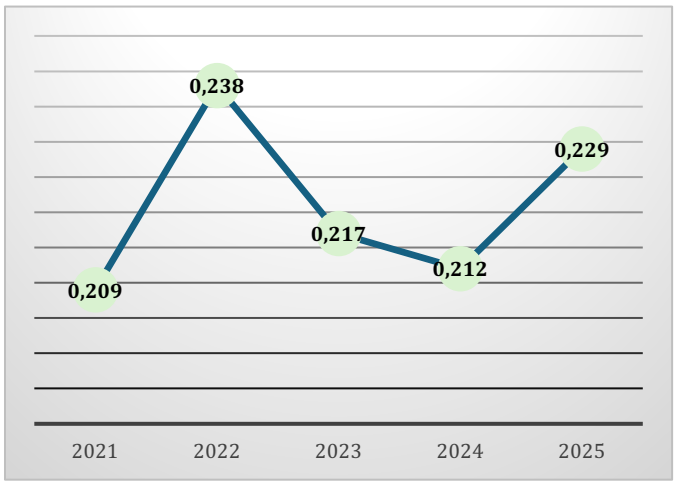


Sumber : KemenPPPA, 2024 (diolah)

2.2.6.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Bagi pembangunan daerah, IKG menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan manusia secara inklusif, menentukan kebijakan daerah yang responsif gender, memantau efektivitas program kesetaraan dan mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik.

Gambar 2. 45
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Pangkal Pinang



Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang, 2026 (diolah)

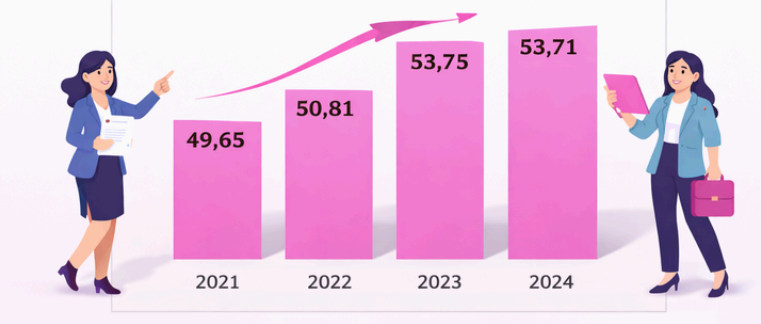
Indeks Ketimpangan Gender Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi dengan puncak ketimpangan pada tahun 2022 (0,238) dan penurunan pada 2023–2024, sebelum sedikit meningkat kembali pada 2025. Tren ini memperlihatkan bahwa meskipun ketimpangan gender relatif terkendali, masih

terdapat dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

2.2.6.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)

Untuk mendorong pembangunan inklusif dengan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor formal untuk memperkuat daya saing daerah maka TPAK perempuan menjadi indikator penting dalam pembangunan daerah. Perkembangan TPAK perempuan di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dengan sedikit fluktuasi.

Gambar 2. 46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Pangkal Pinang



Sumber: BPS, 2026

TPAK Perempuan di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 49,65% pada tahun 2021 menjadi 53,71% pada tahun 2025. Tren ini memperlihatkan adanya peningkatan konsisten partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2024. Secara keseluruhan, kontribusi perempuan terhadap pasar kerja semakin kuat.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Subbab ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus memperbaiki indeks daya saing daerah melalui kebijakan yang terukur, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Kota Pangkal Pinang yang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kota Pangkal Pinang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan dinamika demografis yang relatif stabil sepanjang periode 2020–2024.

Tabel 2. 24
Perkembangan Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Ketergantungan (%)
2020	49,20
2021	48,75
2022	47,90
2023	47,30
2024	46,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkal Pinang, 2024 (diolah)

Secara umum, angka ketergantungan di Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren menurun selama periode 2020–2024, yang menandakan meningkatnya potensi produktivitas daerah. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi Pemerintah Kota untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor ekonomi unggulan.

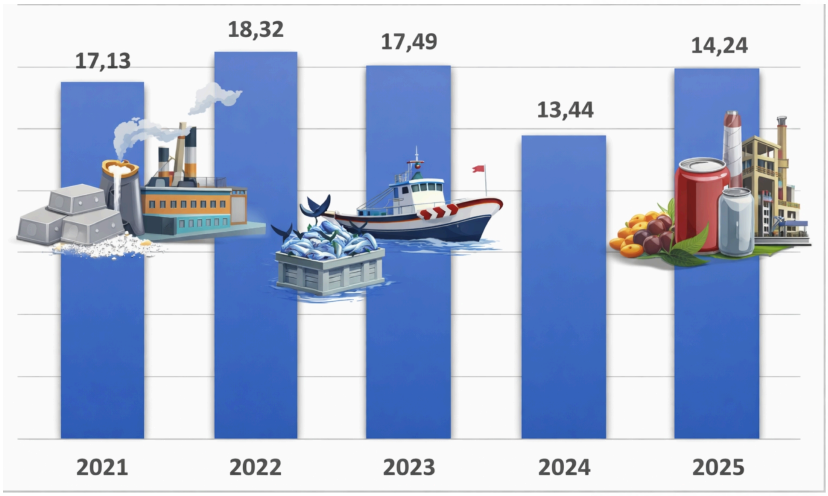
2.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) dan inovasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemanfaatan IPTEK dan inovasi tidak hanya menjaga stabilitas produktivitas di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif.

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB sektor industri pengolahan Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 dengan menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Data memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan sempat mengalami pertumbuhan positif hingga 2022, namun menghadapi tekanan besar pada 2024 sebelum kembali menunjukkan tanda pemulihan di 2025.

Gambar 2. 47
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB



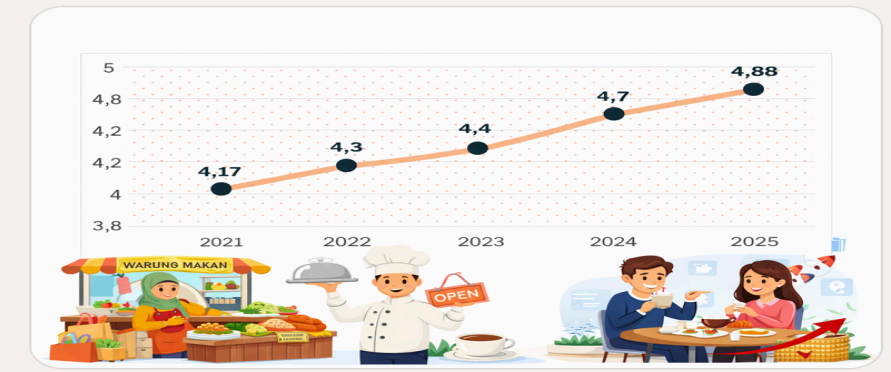
Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang, 2026

Rasio PDRB sektor industri pengolahan Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi pasar global, kapasitas produksi, serta diversifikasi subsektor. Peningkatan kontribusi hingga 2022 menegaskan peran kuat subsektor pengolahan logam timah sebagai komoditas unggulan daerah. Penurunan tajam pada 2024 menunjukkan adanya tantangan struktural, baik dari sisi harga komoditas maupun keterbatasan teknologi pengolahan.

2.3.2.2. Pengembangan Pariwisata

Selama periode tahun 2021-2025 rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan, serta perluasan usaha perhotelan dan restoran di wilayah tersebut. Peningkatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada penguatan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, promosi destinasi wisata, serta peningkatan kualitas layanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner dan perhotelan.

Gambar 2. 48
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2025

Kenaikan rasio PDRB pada sektor ini juga dapat diartikan sebagai indikasi peningkatan *multiplier effect* terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perdagangan, dan industri kreatif. Meskipun demikian, dinamika pertumbuhan sektor ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, kondisi ekonomi nasional, serta daya beli masyarakat. Penguatan sektor ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut tercermin dari indikator pariwisata Kota Pangkal Pinang. Jumlah wisatawan mancanegara meningkat tajam dari 163 orang pada tahun 2021 menjadi 1.527 orang pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 tercatat 879 orang. Di sisi lain, jumlah restoran/rumah makan ber-TDUP meningkat signifikan dari 135 unit pada tahun 2021 menjadi 613 unit pada tahun 2025, menunjukkan tumbuhnya aktivitas usaha kuliner di daerah.

Tabel 2. 25
Indikator Pengembangan Pariwisata di Kota Pangkal Pinang

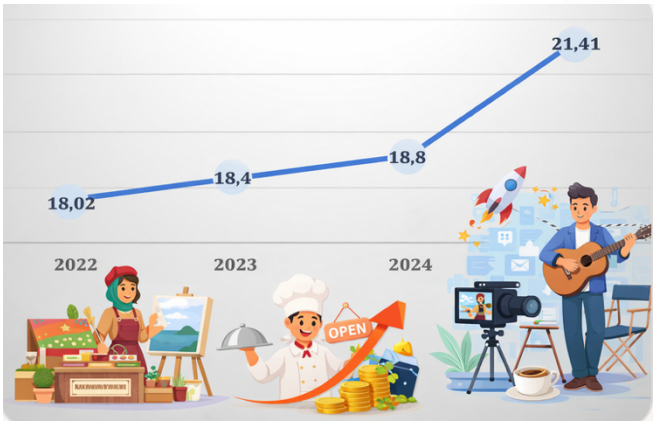
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Orang)	31.517	35.819	102.429	111.175	112.698
2. Jumlah Restoran/ Rumah Makan yang mendapatkan TDUP	135	304	370	387	613
3. Jumlah Hotel Bintang dan Non-bintang di Kota Pangkal Pinang, 2022-2025					
– Bintang	18	20	19	19	19
– Non Bintang	16	28	27	28	28
4. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang (%)	24,72	38,17	29,48	25,96	-

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2026

2.3.2.3. Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB

Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif di Kota Pangkal Pinang dari 18,02 Persen pada 2022 menjadi 21,41 persen pada 2025. Tren ini menggambarkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan, terutama pada tahun terakhir yang menunjukkan lonjakan tajam. Hal ini menandakan bahwa subsektor ekonomi kreatif, seperti seni, musik, desain, dan digital, semakin berperan dalam mendorong PDRB daerah..

Gambar 2. 49
Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2025 (%)



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2025

Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Pangkal Pinang periode 2022–2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan transformasi ekonomi daerah menuju sektor berbasis kreativitas dan inovasi. Pelaku ekonomi kreatif, mulai dari seniman, desainer, hingga pengusaha digital, menjadi motor penggerak baru yang memperkuat struktur ekonomi lokal.

2.3.2.4. PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Laju pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan puncak pertumbuhan pada tahun 2023.

Gambar 2. 50
Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



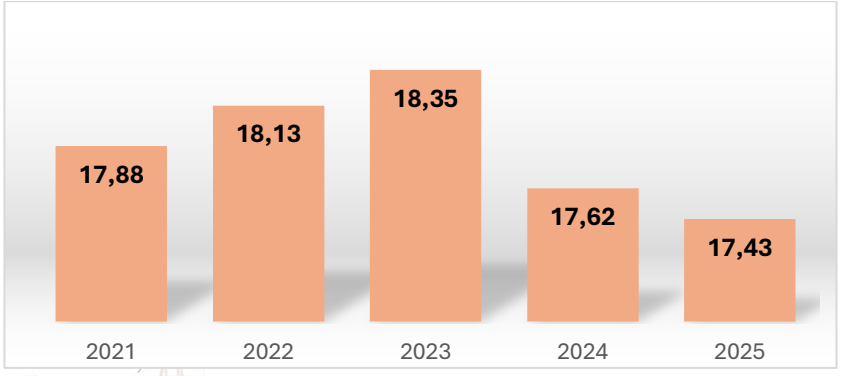
Sumber: BPS,Kota Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2026

Grafik menunjukkan fluktuasi tajam pada laju pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025. Lonjakan signifikan pada tahun 2023 hingga 12,34%, menandakan ekspansi besar sektor keuangan, peningkatan aktivitas investasi dan penetrasi produk asuransi di masyarakat.

2.3.2.5. Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi Bangka Belitung

Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan kontribusi hingga 2023, kemudian sedikit menurun pada 2024–2025. Pangkal Pinang tetap menjadi kontributor utama ekonomi provinsi, terutama melalui sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif

Gambar 2. 51
Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Pangkal Pinang, 2025

Peningkatan kontribusi hingga 2023 mencerminkan dinamika positif sektor perdagangan dan jasa, sementara penurunan pada 2024–2025 menjadi sinyal perlunya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor produktif.

2.3.2.6. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD

Rasio kewirausahaan meningkat dari 4,72 persen pada 2020 menjadi 5,40 persen pada 2021, namun kembali menurun menjadi 5,29 persen pada 2022 dan turun lebih lanjut ke 4,16 persen pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun semangat wirausaha sempat tumbuh pesat pasca pandemi, daya tahan dan keberlanjutan usaha masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek permodalan dan akses pasar. Sementara itu, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan cukup tajam dari 1,16 persen pada 2020 menjadi hanya 0,60 persen pada 2022, yang menandakan menurunnya aktivitas koperasi di sektor riil. Di sisi lain, kinerja BUMD yang diukur melalui Return on Asset (ROA) menunjukkan perbaikan signifikan, dari -2,85 persen pada 2020 menjadi positif 2,83 persen pada 2022, meskipun kemudian sedikit menurun ke 1,65 persen pada 2023. Perbaikan ini menggambarkan peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah dan kinerja keuangan BUMD yang mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2. 26
Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,72	5,40	5,29	4,16	4,09
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,16	1,05	0,60	0,1	0,26
Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-2,85	-0,19	2,83	1,65	NA

Sumber : BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2024

2.3.2.7. Pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang

Berdasarkan data ODS UMKM Kota Pangkal Pinang, jumlah pelaku UMKM tercatat sebanyak 26.529 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari sisi sektor usaha, pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang didominasi oleh sektor jasa lainnya sebanyak 22.067 unit, diikuti perdagangan besar dan eceran (2.620 unit) serta penyedia akomodasi dan makan minum (726 unit), dengan industri pengolahan sebanyak 569 unit. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur UMKM Kota Pangkal Pinang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, mencerminkan karakteristik perekonomian perkotaan sekaligus

menjadi potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. 27
Pelaku UMKM berdasarkan Sektor Usaha di Kota Pangkal Pinang Tahun 2024

No	Sektor Usaha	Jumlah Pelaku UMKM
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	40
2	Pertambangan dan penggalian	16
3	industri pengolahan	569
4	Penggadaan listrik dan gas	17
5	penggadaan air, peng sampah, Limbah dan Daur ulang	16
6	konstruksi	71
7	perdagangan besar dan eceran	2.620
8	Transportasi dan pergudangan	20
9	Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum	726
10	Informasi Dan Komunikasi	303
11	Real Estat	29
12	Jasa pendidikan	19
13	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9
14	Jasa Lainnya	22.067
15	Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosaial	1
16	Jasa keuangan dan asuransi	3
17	Jasa Perusahaan	3
Total		**26.529**

2.3.2.8. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik

1. Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Pencari Kerja

Penempatan tenaga kerja di Kota Pangkal Pinang merupakan komponen strategis dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data terkini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah mengalami penurunan ke kisaran 5,73 persen pada tahun 2025. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2025 berada di level 67,10 persen, dan lebih dari setengah pekerja masih terserap di sektor informal. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesempatan kerja formal dan ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

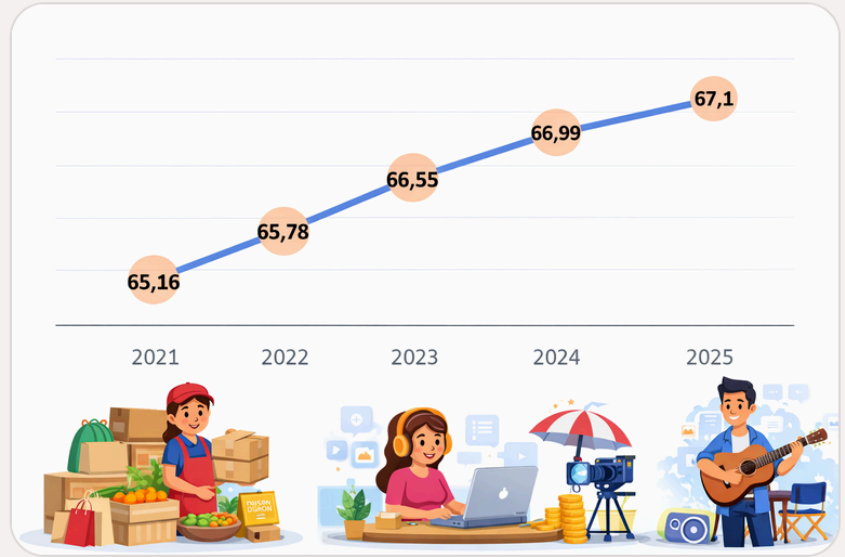
Selain itu, Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Pelatihan ini difokuskan pada sektor-sektor potensial daerah seperti perdagangan, jasa, dan industri kreatif, sehingga lulusan pelatihan dapat terserap secara optimal di pasar kerja lokal maupun regional.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 65,16 persen menjadi 67,10 persen.

Gambar 2. 52

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka , 2026

Perkembangan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Pangkal Pinang pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025, menggambarkan pertumbuhan yang konsisten yang menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

2.3.2.9. Tingkat Penguasaan IPTEK

1. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas Inovasi, merupakan salah satu pilar penting dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pilar ini mengukur sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan, mengadopsi, serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Perkembangan skor Kapabilitas Inovasi Kota Pangkal Pinang dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang menarik, sekaligus mencerminkan tantangan dan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi.

Tahun 2022: Skor 3,19 (Cukup Baik dan Stabil)

Tahun 2023: Skor 1,04 (Penurunan Signifikan)

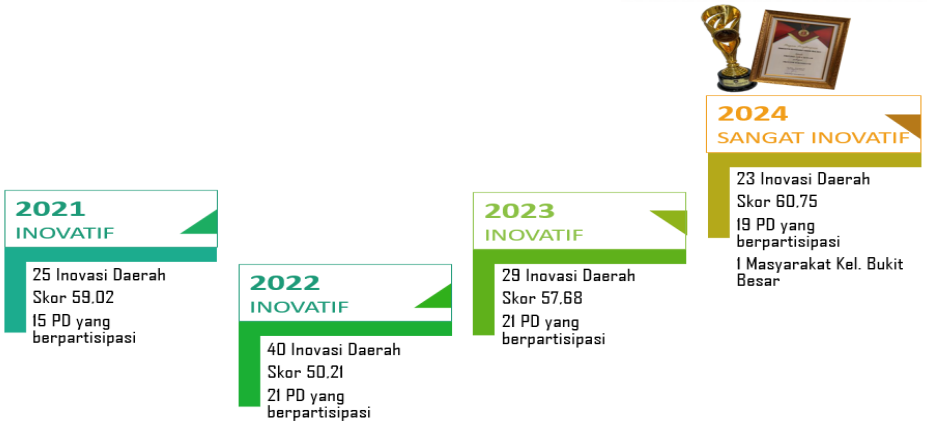
Tahun 2024: Skor 3,16 (Pemulihan dan Penguatan Ekosistem Inovasi)

Tahun 2025: Dalam Tahap Pengukuran

2. Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan inovasi daerah Kota Pangkal Pinang dari tahun 2021 hingga 2024, dengan tren peningkatan kualitas dan pengakuan terhadap kinerja inovatif pemerintah daerah.

Gambar 2. 53
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, (Data Diolah)

Perkembangan inovasi daerah Kota Pangkal Pinang periode 2021–2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kreativitas dan efisiensi pelayanan publik. Peningkatan skor hingga mencapai predikat **"Sangat Inovatif"** pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan transformasi dari kuantitas menuju kualitas inovasi. Partisipasi aktif perangkat daerah dan masyarakat menjadi bukti bahwa ekosistem inovasi di Pangkal Pinang semakin matang dan inklusif. Pemerintah daerah perlu mempertahankan momentum ini dengan memperluas kolaborasi lintas sektor dan memperkuat sistem penghargaan bagi inovator daerah agar inovasi terus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.

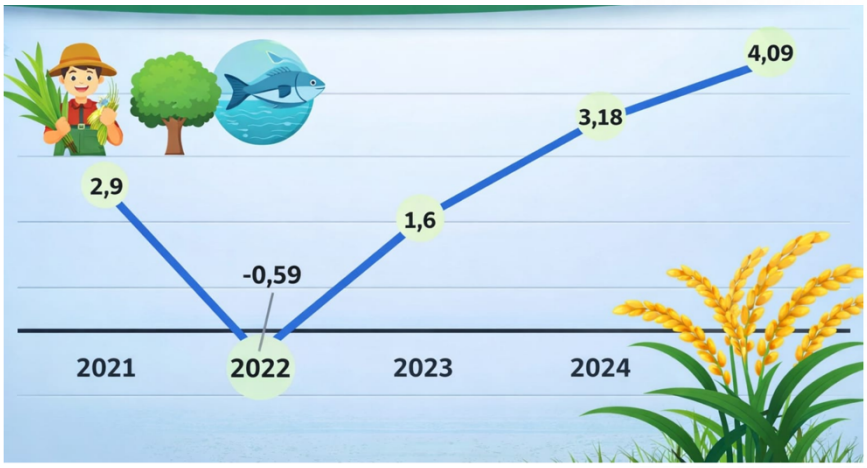
2.3.2.10. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru di Kota Pangkal Pinang terus diupayakan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama melalui penguatan sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kinerja ekonomi pada sektor ini menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2021–2025.

1. PDRB Sektor Pertanian,Kehutan dan Perikanan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkal Pinang, nilai PDRB sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada periode 2021-2025 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi, sejalan dengan dinamika produksi dan harga komoditas pertanian.

Gambar 2. 54
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: BPS, Kota Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2026

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan pola pemulihan yang kuat setelah kontraksi pada tahun 2022. Peningkatan berkelanjutan hingga 2025 mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, serta memperluas akses pasar komoditas lokal. Sektor ini kembali menjadi fondasi ekonomi daerah yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Secara geografis, Kota Pangkal Pinang sebagai pusat ekonomi pesisir dan pelabuhan utama di Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar dari perikanan, wisata bahari dan industri pengolahan. Berdasarkan dokumen RPJPD kota Pangkal Pinang, *baseline* IBEI tahun 2025 sebesar 24,45 poin dan target sampai dengan tahun 2029 sebesar 35,14 poin. Ekonomi biru diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dengan prinsip keberlanjutan melalui peningkatan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir, serta pembersihan sampah plastik di sepanjang aliran menuju laut.

2.3.3. Transformasi Digital

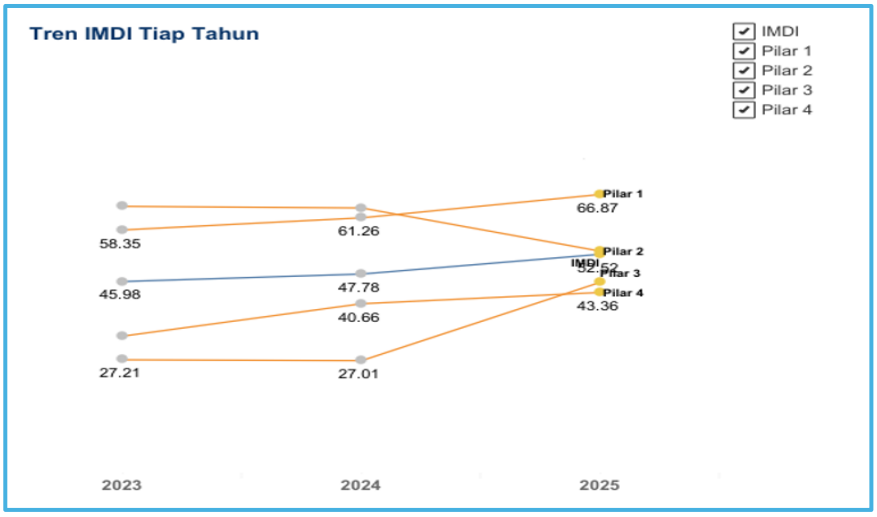
Transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, sistem administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.3.3.1. Indeks Masyarakat Digital.

Indeks ini menjadi instrumen strategis untuk menilai kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi digital, serta sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan ekosistem digital daerah.

Berdasarkan data dari imdi.sdmdigital.id, perkembangan Indeks Masyarakat Digital Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 55
Grafik Indeks Masyarakat Digital Kota Pangkal Pinang

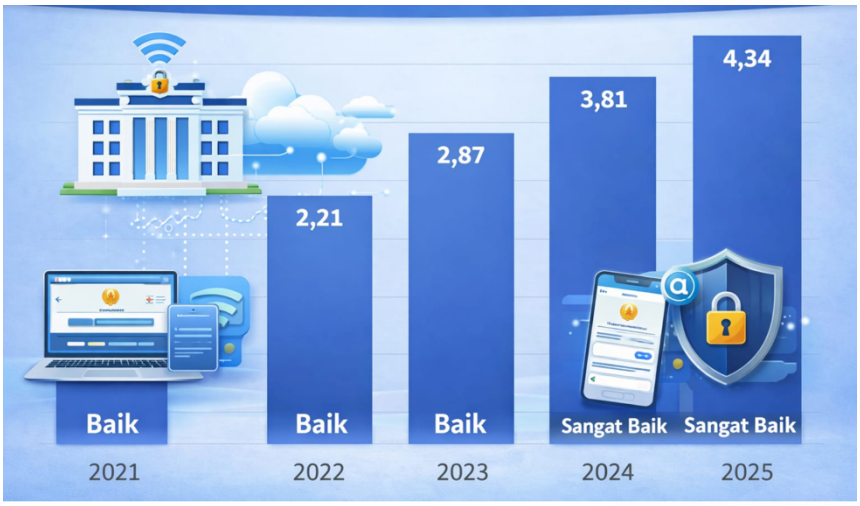


Sumber: https://imdi.sdmdigital.id

2.3.3.2. Indeks Pemerintah Digital

Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan transformasi digital di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju Pemerintahan Digital Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang tercermin melalui peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gambar 2. 56
Indeks SPBE Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang

Capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam penerapan sistem digital, tetapi juga menjadi landasan penting bagi Pangkal Pinang untuk menghadapi perubahan besar dalam sistem penilaian nasional. Mulai tahun 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB memperkenalkan Indeks Pemerintah Digital sebagai pengganti Indeks SPBE. Berbeda dengan SPBE, Indeks Pemerintah Digital memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Pemerintah Digital tidak hanya menilai kesiapan infrastruktur dan kebijakan digital, tetapi juga mencakup dimensi teknologi digital terkini, keamanan siber, interoperabilitas sistem, tingkat penggunaan layanan publik digital, serta kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Dengan indikator yang lebih komprehensif, Pemerintah Digital dirancang untuk mengukur secara lebih holistik sejauh mana transformasi digital telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kualitas layanan pemerintah.

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing serta memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global. Di Kota Pangkal Pinang, arah pembangunan ini tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB menurut pengeluaran.

2.3.4.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan *net ekspor* barang dan jasa di Kota Pangkal Pinang selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi.

Tabel 2. 28
Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	4.613	4.953	5.512	5.703	5.859
PMTB ADHK (miliar rupiah)	2.379	2.390	2.553	2.519	2.493

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2026

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan dan kontribusi kedua indikator ini menegaskan pentingnya upaya penguatan investasi produktif dan peningkatan daya saing ekspor untuk mendorong stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2. 29
Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Pangkal Pinang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	32,41	30,00	28,67	29,31	30,11
Struktur PMTB					
a. Bangunan (miliar rupiah) **b. Bangunan (%)**	3.736 27,76	3.967 25,80	4.195 24,28	4.734 25,16	4.928 26,02
c. Non Bangunan (miliar rupiah) **d. Non Bangunan(%)**	626 4,65	646 4,20	758 4,39	780 4,14	775 4,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang, 2025

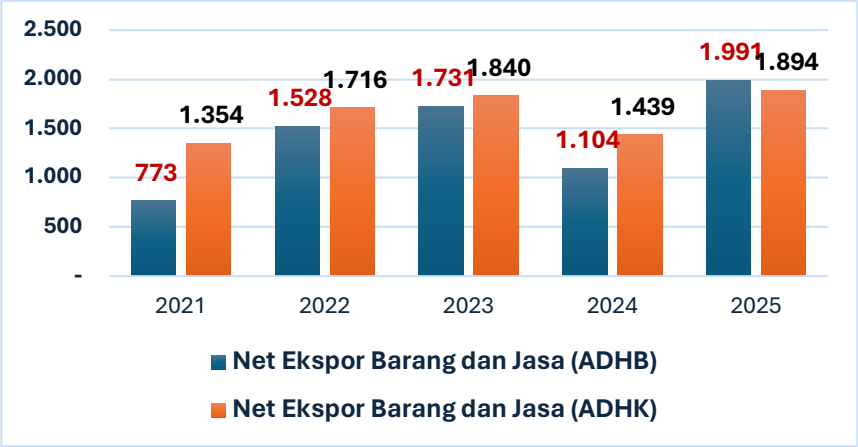
Aktivitas investasi dalam perekonomian Kota Pangkal Pinang memiliki peranan yang signifikan, hal ini terlihat dari peranan komponen PMTB dalam PDRB Kota Pangkal Pinang. Komponen ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan rata-rata peranan selama lima tahun terakhir (2020-2024) pada kisaran 29-33 persen, secara rinci terlihat pada tabel di atas. Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa konstruksi mendominasi perekonomian Kota Pangkal Pinang. Hal ini tampak dari proporsi PMTB Bangunan sekitar 82 - 86 persen dari total PMTB dalam kurun waktu 2020-2024.

2.3.4.2. Net Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memainkan peran krusial dalam integrasi ekonomi domestik dan global, berfungsi sebagai jembatan antara pasar lokal dan internasional. Melalui ekspor, negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif yaitu kemampuan

untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih rendah atau kualitas yang lebih baik dibandingkan negara lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri domestik. Dalam konteks integrasi ekonomi global, ekspor membantu negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, yang memungkinkan mereka untuk memperluas pasar bagi produk-produk domestik.

Gambar 2. 57
Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025 (Rp. Milyar)



Sumber: Kota Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2026

Net ekspor barang dan jasa Kota Pangkal Pinang tahun 2021 s.d tahun 2025 menunjukkan nilai yang positif yang mengindikasikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor atau hasil produksi di dalam daerah mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah sehingga sisanya dapat diekspor ke luar daerah. Net ekspor barang dan jasa periode 2020-2023 mengalami peningkatan hal ini karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pada komoditas timah dan produk non timah, terutama lemak dan minyak hewani/nabati yang menjadi komoditas utama pendukung ekspor Kota Pangkal Pinang. Sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan hal ini karena pergeseran struktur ekonomi, terutama penurunan ekspor komoditas unggulan seperti timah dan produk turunannya. Meskipun terjadi penurunan net ekspor barang dan jasa pada tahun 2024 ADHB sebesar 1.079,91 juta rupiah dan ADHK sebesar 1.395,95 juta rupiah, nilai riil (ADHK) masih berada di atas capaian tahun 2020, yang menandakan fundamental ekspor masih relatif kuat.

2.3.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan ruang hidup yang layak bagi masyarakat. Kota Pangkal Pinang, sebagai ibu kota provinsi, dituntut untuk tidak hanya menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi,

tetapi juga memastikan kualitas kehidupan warganya melalui penyediaan hunian yang memadai.

2.3.5.1. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat serta tingkat kesejahteraan di Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan data Dinas Perkim dan BPS, perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola fluktuatif, namun secara umum tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi.

Tabel 2. 30
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 - 2023

Uraian	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	97,26%	96,78%	91,47%	95,35%

Sumber : RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2026

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada 2022, kondisi hunian masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam empat tahun terakhir relatif stabil dan berada pada tingkat capaian yang baik. Namun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses hunian yang layak, aman, dan terjangkau, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

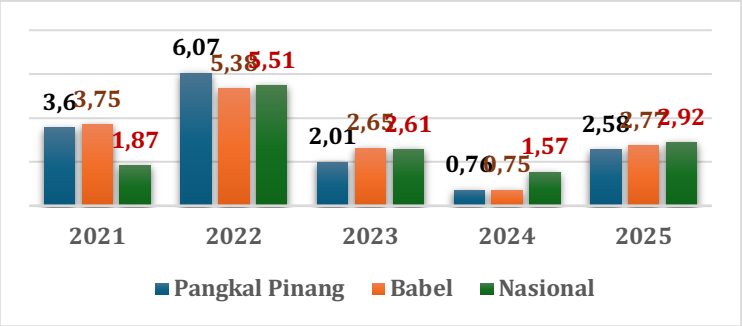
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Subbab ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang terukur, pengendalian inflasi yang efektif, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta perluasan akses keuangan masyarakat.

2.3.6.1. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Kota Pangkal Pinang periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif namun relatif lebih terkendali dibandingkan provinsi maupun nasional.

Gambar 2. 58
Inflasi di Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2025 (%)



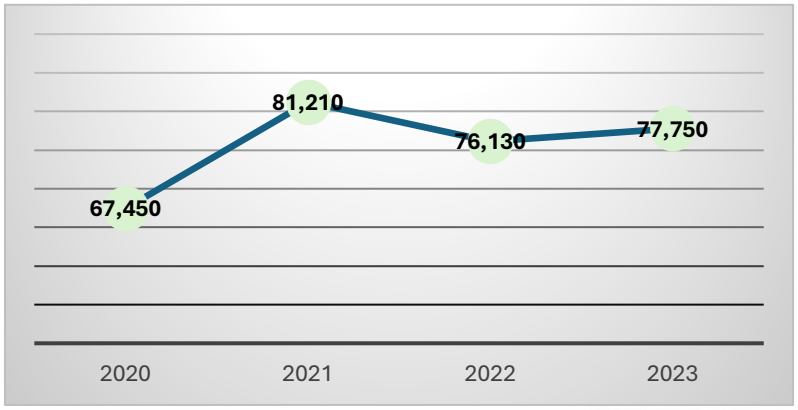
Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2026

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan nilai yang fluktuatif namun relatif lebih terkendali dibandingkan provinsi maupun nasional dengan rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Pangkal Pinang sebesar 3 persen. Lonjakan inflasi pada 2022 mencerminkan dampak pemulihan ekonomi dan tekanan harga pangan, namun penurunan signifikan pada 2023–2024 menandakan keberhasilan pengendalian harga di tingkat daerah. Pada 2025, inflasi Pangkal Pinang tetap lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, menegaskan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi daerah, terutama melalui stabilisasi bahan pokok dan penguatan sektor produksi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki daya kendali inflasi yang lebih baik, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

2.3.6.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. IPKD ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Gambar 2. 59
Perkembangan Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2020 – 2023



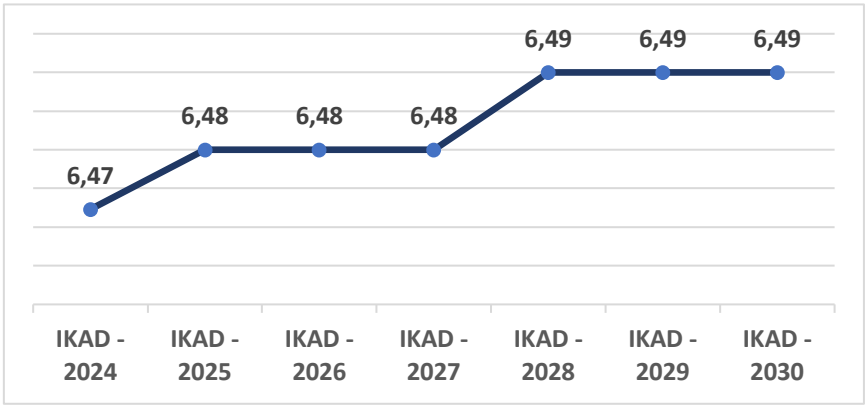
Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025

Secara keseluruhan, tren 2020–2023 menunjukkan pola peningkatan yang cukup stabil, dengan puncak capaian pada 2021 dan upaya konsolidasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2.3.6.3. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Gambar 2. 60
Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang



Sumber: https://ikad-inklusi.org/, 2025

IKAD digunakan sebagai instrumen pengukuran sekaligus indikator kuantitatif untuk memetakan dan menyajikan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia secara komprehensif. Berdasarkan nilai IKAD Kota Pangkal

Pinang tahun 2024 sebesar 6,47 poin memiliki nilai tertinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan target IKAD Kota Pangkal Pinang pada tahun 2030 sebesar 6,49 poin.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

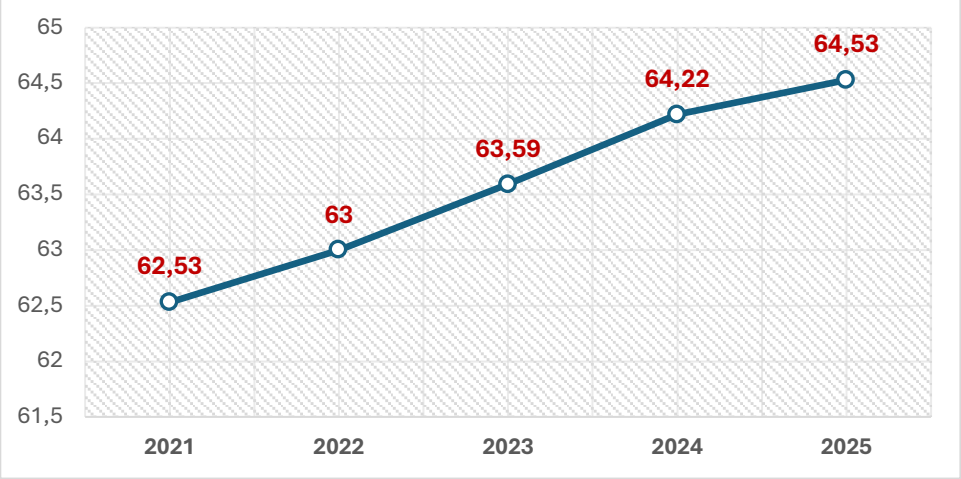
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi serta adaptif merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.4.1.1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggabungkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Komponen SAKIP meliputi penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian data, pengikhtisaran data, pelaporan kinerja.

Gambar 2. 61
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Kemenpan dan RB, 2025 (Diolah)

Selama kurun waktu tersebut Pemerintah Kota Pangkal Pinang bisa mempertahankan nilai AKIP dengan predikat B. Predikat tersebut menggambarkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen dan antusiasme instansi pemerintah untuk meningkat upaya reformasi birokrasi, dengan upaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi.

2.4.1.2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Tabel 2. 31
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	CC	BB
Nilai Evaluasi RB	61,71	62,78	63,13	57,83	76,14

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, 2025

Tahun 2024 IRB pemerintah Kota Pangkal Pinang mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 76,14 atau naik 18,31 poin dan menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian dengan capaian ini Kota Pangkal Pinang masih termasuk dalam kategori BB atau baik. Meskipun demikian sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Dampak nyata terhadap pembangunan yang masih rendah dapat dilihat dari nilai RB tematik tahun 2023 yaitu 1,97 dan perubahan peningkatan ditunjukkan pada tahun 2024 pada aspek RB Tematik mencapai 10,67.

2.4.1.3. Indeks Reformasi Hukum

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 sebesar 45,89 dengan kategori C (buruk). Dari 4 variabel dan indikator penilaian, Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum memenuhi bobot nilai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena selain indeks reformasi hukum ini merupakan penilaian yang baru bagi pemerintah daerah sehingga masih terdapat beberapa persyaratan pembobotan yang belum dipenuhi secara administratif dan juga belum ada pendampingan dalam hal pengisian bukti dukung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian IRH Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Masih berada pada posisi nilai maksimal, dengan kategori AA (Istimewa), IRH Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendapatkan nilai 99,40. Dari 4 variabel dan indikator yang dinilai ada 3 variabel penilaian yang dipenuhi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan nilai maksimal.

Capaian nilai pada Tahun 2025 sudah dianggap maksimal karena Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama 3 Pemerintah kabupaten memperoleh nilai tertinggi.

2.4.1.4. Indeks Pelayanan Publik

Untuk mengetahui kondisi pelayanan publik yang diberikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu agar memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Tabel 2. 32
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Pangkal Pinang

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,98	3,75	4,05
Predikat	B-	B	B	A-

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, 2025

Tahun 2023 indeks mengalami penurunan menjadi 3,75 dengan kategori "B", yang dapat disebabkan oleh faktor adaptasi terhadap sistem baru, perubahan regulasi, atau belum optimalnya konsistensi penerapan pelayanan prima di seluruh unit pelayanan dan tahun 2024 IPP kembali meningkat menjadi 4,05 dengan kategori "A-", yang menunjukkan bahwa upaya pembenahan dan inovasi pelayanan publik mulai memberikan hasil positif.

2.4.1.5. Indeks Integritas Nasional

Bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang, capaian Indeks Integritas menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel 2. 33
Perkembangan Indeks Integritas Nasional (IIN)

Tahun	Nilai Indeks Integritas Nasional (IIN)
2020	NA
2021	72,52
2022	70,11
2023	70,55
2024	67,97

Sumber: Inspektorat Kota Pangkal Pinang (diolah), 2024.

Secara umum, Indeks Integritas Nasional Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2.4.1.6. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah satuan ukur yang dikembangkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menilai kinerja kepemimpinan Kepala Daerah berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, dan indikator yang komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. IKKD dirancang sebagai alat evaluasi tahunan yang tidak hanya mengawal kinerja administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas kepemimpinan Kepala Daerah dalam mendorong pembangunan daerah dan memberdayakan potensi lokal. Meskipun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, hasil publikasi dan penetapan Kepala Daerah terbaik baru akan dilakukan pada tahun 2025 karena pertimbangan sensitivitas politik menjelang Pemilu 2024, sehingga evaluasi lebih objektif dilaksanakan setelah periode pengabdian Kepala Daerah berjalan penuh.

2.4.1.7. Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia dengan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kohesi sosial di tengah keberagaman.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Kota Pangkal Pinang menempatkan aspek ini sebagai prioritas strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap prinsip kesetaraan.

2.4.2.1. Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

Dalam penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum (tantribum), ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah, serta dapat mengupanyakan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum bagi masyakarat. Selain itu, konflik sosial yang disebabkan oleh kegiatan pelanggaran terhadap berbagai aturan yang sudah ditetapkan dapat menurun. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel capaian indikator presentase penurunan pelanggaran perda dan perkada dan gangguan tantribum yang dapat diselesaikan di Kota Pangkal Pinang tahun 2020-2024 dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34
Capaian Indikator Presentase Penurunan Pelangggaran Perda dan Perkada dan Gangguan Tantribum yang dapat diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	100	100	100	100	100
2. Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Pangkal Pinang, 2025

Di sisi lain, perlindungan masyarakat merupakan usaha yang aktif dalam memberdayakan warga dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi bencana, serta berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Tabel 2. 35
Capaian Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	112	117	30	105	NA
2	Persentase Penegakan Perda/ Perwako	100	100	100	100	100
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Pangkal Pinang, 2024

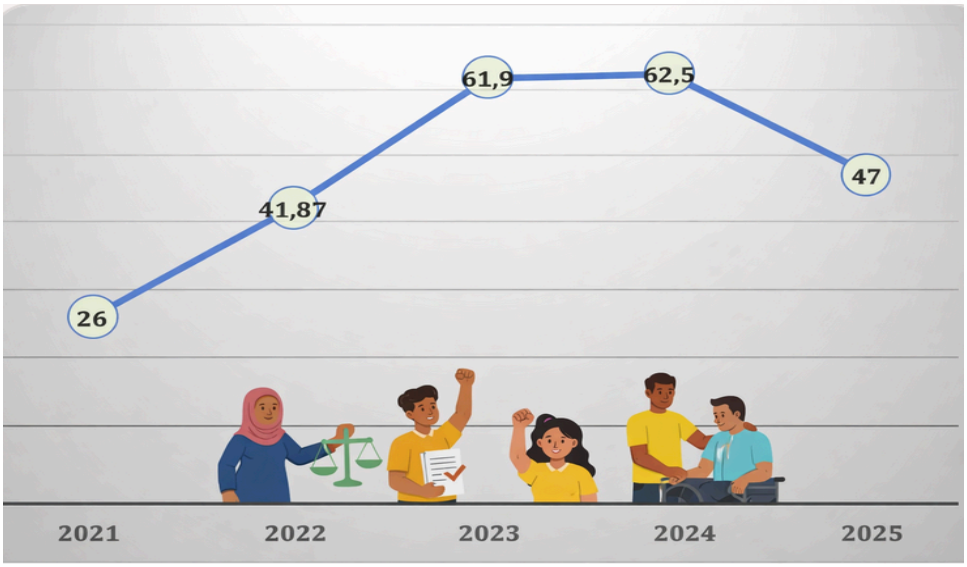
Hal ini menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin rasa aman bagi masyarakat melalui sinergi antara aparat penegak perda, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat. Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan bahwa fungsi keamanan dan ketertiban

menjadi prioritas penting dalam mendukung stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM Kota Pangkal Pinang dari tahun 2021 sampai dengan 2024 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 62
Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021 – 2025



Sumber: KemenkumHam, 2025 (diolah)

Grafik menunjukkan fluktuasi nilai dari 26 pada 2021 hingga 62,5 pada 2024, sebelum menurun ke 47 pada 2025. Pola ini menggambarkan dinamika capaian indikator sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Kota Pangkal Pinang.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan tercermin dari kemampuannya dalam meningkatkan daya saing wilayah secara konsisten. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan daerah dalam menghadapi dinamika global, nasional, dan lokal.

Pada tahun 2024, IDSD Kota Pangkal Pinang mencapai skor tertinggi sebesar 4,07, meningkat dari 3,51 di tahun 2023. Meskipun data tahun 2022 belum tersedia secara keseluruhan, tren kenaikan ini mencerminkan kinerja pembangunan yang membaik. Dua pilar dengan capaian tertinggi di tahun 2024 adalah Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Adopsi

TIK, masing-masing dengan skor 5,00, yang mengindikasikan bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki daya tarik pasar yang besar serta kemajuan signifikan dalam transformasi digital.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kota Pangkal Pinang dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2019)

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,91	59,05	45,25	83,77	70,43
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	102,08	86,37	89,01	98,30	90,18
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	85,77	82,70	70,28	98,07	89,71
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalarn pendidikan kesetaraan	%	22,67	16,83	100,00	100,00	75,48
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,27	0,20	0,27	2,20	3,00
2	Persentase RS Rujukan Tingkat	%	57,14	28,57	71,43	100,00	88,89

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten/kota yang terakreditasi						
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,34	90,49	94,77	95,66	99,27
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94,84	93,14	96,06	98,24	99,78
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,33	96,68	99,36	100,00	99,88
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	91,96	96,09	91,48	99,32	99,35
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,00	86,19	91,12	98,70	99,89
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	87,42	95,66	98,56	99,43	97,02
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,98	94,36	97,48	96,82	68,77
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,20	93,30	95,29	99,00	100,00
11	Persentase penderita DM yang	%	94,46	99,12	98,19	100,00	100,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,25	97,84	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	71,28	100,00	100,00	100,00	100,00
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	77,77	95,13	100,00	100,00	100,00
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,00	0,00	NA	0,00	0,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,00	0,00	NA	0,00	0,00
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,00	0,00	NA	0,00	0,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan	%	19,57	75,93	63,37	99,29	41,80

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota						
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	0,00	98,78	68,77	95,92	98,21
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	374111,00	93,09	94,90	94,90	93,91
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,00	0,00	0,00	50,00	49,33
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah	%	0,00	50,43	66,67	66,67	0,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	10 ha di kabupaten/kota yang ditangani						
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,50	3,79	3,52	2,81	2,57
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	26,55	38,19	100,00	100,00	100,00
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100,00	209.845 orang	460,97	99,47	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0,00	1000 orang	0,00	0,14	0,22
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		100,00	0,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	12 menit	12,49 menit	13,69 menit	13 menit
f) Sosial							

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	%	59,70	38,81	58,12		
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100,00	100,00	100,00		
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	54,60	255,00	85,00	85,71	0,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	0,00	6,02	7,09	11,33	5,97
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	9367,84	36,92	34,96	39,46	50,74
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100,00	100,00	6,89	2,34	78,16
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	153,82	11,50	46,49	45,69	58,69

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota						
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,40	2,37	2,77	2,40	2,27
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	2,99	0,02	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	17,66	15,26	27,97	43,40	65,16
h) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	36,00	35,35	34,30	315,83	315,61
i) Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	0,00	100,00	75,38	96,66
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	NA	97,82	0,00	93,00	0,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan	%	0,00	0,00	100,00	75,38	100,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dalam rangka penanaman modal.						
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
j) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	66,45	62,22	62,18	62,25	65,26
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	92,38	94,51	95,74	91,20	96,60
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota	%	67,44	26,32	44,12	11,11	11,11
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	97,82	99,08	97,67	97,82	99,56
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	54,57	68,30	70,00	73,03	76,67
3	kepemilikan akta kelahiran	%	86,30	95,36	97,25	98,42	98,77
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	6,06	7 OPD	60,61	60,61	58,82

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	berdasarkan janjian Kerjasama						
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0,00	0,00	NA	0,00	0,00
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	0,00	0,00	NA	0,00	0,00
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,00	2,00	1,98	2,26	2,25
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,88	77,94	98,14	66,02	71,34
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,35	7,66	25,63	8,31	5,37
n) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	94,12	94,12	0,87	0,88	0,88
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	0,27	0,27	0,18	0,18	0,35
o) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	9,09	21,21	30,30	93,94	94,12
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	58,82	56,67	100,00	100,00	100,00
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota						
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	35,29	24,37	36,97	26,67	27,73
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,14	4,70	7,74	2,86	100,00
q) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	4,54	62,29	19,43	234,72	207,88
r) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,69	0,25	0,32	0,31	0,32
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,84	0,85	0,83	0,45	1,87
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	0 medali	1 medali	0 medali	3 medali	4 medali
s) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
t) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0,00	90,91	0,00	0,00	30,23
u) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	66,67	68,75	100,00
v) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	61,00	0,07	30,33	66,58	85,40
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	-	0,00	2,80	3,23	71,83	87,01
w) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	71,00	56,00	59,75	100,00	99,16
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	57,00	51,00	165,33	55,80	65,41
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	2377,84	1832,89	92,26	77,50	107,22

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)						
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-82,07	-42,40	426,99	77,76	-13,95
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-57,78	46,27	40,00	28,30	-11,59
3	Tingkat hunian akomodasi	%	29,95	21,59	34,06	37,90	32,20
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,10	4,15	4,30	18,64	4,70
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,86	10,33	16,48	18,64	17,58
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	50,18	77,82	88,41	435,40	620,41 ton/hektar/tahun
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%		NA	NA	1,00	0,00
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	%	67,12	82,76	85,46	87,43	86,26

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70,16	35,67	47,62	98,64	73,12
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	104,20	74,30	83,81	45,76	88,05
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	21,56	1,32	1,04	4,95	79,11
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0,00	50,00	50,00	93,00	67,42
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	oleh instansi terkait						
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten / kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	85,00	95,00	85,00	100,00	100,00
h) Transmigrasi							
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	0,05	42,39	26,51	17,18	19,91
2	Rasio PAD	%	1,05	1,10	19,87	18,90	19,97
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	34,07	94,57	77,83	72,98	81,85
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan clengan metode kompetitif	%	20,00	163,00	66,67	96,95	45,39
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	21,20	28,96	57,48	99,04	20,50
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	289,00	390,23	82,50	82,55	83,79
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	7,03	23,34	21,22	27,45	25,95
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	11,00	44,85	39,36	49,08
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	0,02	0,03	4,97	13,87	3,18
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	0,11	0,23	9,64	15,76	12,47
3	Manajemen Aset	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	14,66	1,08	14,95	10,34	6,88
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia unluk pelayanan	%	78,52	90,37	91,04	91,90	98,99
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.5. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

2.5.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

Gambaran umum keuangan Kota Pangkal Pinang secara umum disajikan melalui realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2.5.1.1. Kinerja Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan mulai tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diberlakukan mulai tahun 2020, bahwa pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa, dan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah yang berfokus pada penggalian potensi lokal, peningkatan efisiensi tata kelola, dan penguatan sistem fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJM Daerah serta memastikan kesinambungan program pembangunan daerah.

PAD mengalami fluktuasi yang mencerminkan tantangan dan adaptasi fiskal daerah dengan pertumbuhan yang menunjukkan tren positif sebesar 9,70 persen. Pendapatan Transfer menjadi komponen dominan dalam struktur APBD terutama pada komponen Dana Perimbangan 87,98 persen. Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami tren penurunan yang signifikan sebesar 23,92 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN					GROWTH
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PENDAPATAN	**843.377.885.961,92**	**948.312.093.447,38**	**1.010.522.096.551,02**	**1.044.028.730.143,83**	**1.015.626.819.761,80**	**4,90**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**140.964.396.672,73**	**168.864.062.465,32**	**201.971.524.717,61**	**197.873.082.823,83**	**200.700.225.463,80**	**9,70**
1.1.1	Pajak Daerah	78.015.230.917,20	93.456.851.905,00	117.328.042.462,00	125.800.534.186,00	125.181.313.088,00	13,02
1.1.2	Retribusi Daerah	12.754.645.808,29	11.919.957.986,42	12.073.462.782,74	12.517.645.045,04	25.913.592.150,68	26,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.337.807.846,73	6.032.648.895,15	6.707.028.141,02	9.094.236.429,00	8.271.971.930,10	12,69
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	44.856.712.100,51	57.454.603.678,75	65.862.991.331,85	50.460.667.163,79	41.333.348.295,02	0,31
1.2	**Pendapatan Transfer**	**648.486.124.709,19**	**753.843.037.165,06**	**776.508.606.491,00**	**839.890.378.048,00**	**807.899.546.588,00**	**5,90**
1.2.1	Dana perimbangan	565.471.957.000,00	647.557.399.530,00	653.920.635.917,00	717.262.537.061,00	716.853.539.821,00	6,28
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	43.544.540.000,00	69.275.123.683,00	124.245.314.355,00	107.119.737.202,00	68.641.712.000,00	22,18
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	432.562.497.000,00	424.862.442.000,00	422.743.581.728,00	439.623.388.626,00	460.990.961.277,00	1,64
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.749.800.000,00	109.471.575.186,00	65.688.767.397,00	90.605.528.202,00	97.222.884.488,00	36,13
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	43.615.120.000,00	43.948.258.661,00	41.242.972.437,00	79.913.883.031,00	89.997.982.056,00	25,25
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pusat-lainnya)	0,00	37.880.456.000,00	29.979.805.000,00	12.106.347.000,00	6.780.585.000,00	-31,12
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	37.880.456.000,00	29.979.805.000,00	0,00	0,00	-30,21
1.2.2.2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	12.106.347.000,00	6.780.585.000,00	-11,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.014.167.709,19	68.405.181.635,06	92.608.165.574,00	110.521.493.987,00	84.265.421.767,00	3,34
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	79.346.167.709,19	65.346.181.635,06	88.634.365.574,00	105.950.963.287,00	84.265.421.767,00	4,27
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	3.668.000.000,00	3.059.000.000,00	3.973.800.000,00	4.570.530.700,00	0,00	-17,92
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**53.927.364.580,00**	**25.604.993.817,00**	**32.041.965.342,41**	**6.265.269.272,00**	**7.027.047.710,00**	**-23,92**

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN					GROWTH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.282.200.580,00	655.977.955,00	0,00	0,00	0,00	-49,35
1.3.2	Pendapatan darurat	28.645.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	24.949.015.862,00	32.041.965.342,41	6.265.269.272,00	7.027.047.710,00	-9,96

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang, 2025

Jika dicermati per komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer selalu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Meskipun demikian, PAD Kota Pangkal Pinang sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Meningkatnya proporsi PAD ini berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah Kota Pangkal Pinang dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2. 38
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Pangkal Pinang

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
TARGET PENDAPATAN	838,099	915,125	944,372	1.015,092	1.015,749	945,69
PAD	134,560	143,392	187,560	178,137	195,257	167,78
Pendapatan Transfer	651,007	733,687	831,954	813,303	749,647	755,92
Lain-lain Pendapatan yang sah	52,531	38,046	38,530	5,000	7,190	28,26
REALISASI PENDAPATAN	843,378	948,312	1.010,522	1.044,029	1.015,627	972,37
PAD	140,964	168,864	201,972	197,873	200,700	182,07
Pendapatan Transfer	648,486	753,843	776,509	839,890	807,900	765,33
Lain-lain Pendapatan yang sah	53,927	25,605	32,042	6,265	7,027	24,97
KINERJA PENDAPATAN (%)	99,37	96,50	93,45	97,23	100,01	97,31

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang, 2025

Dengan kondisi tersebut, maka dibutuhkan analisis terkait rasio- rasio pendapatan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara berbagai komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode anggaran. Berikut penjabaran pada masing-masing rasio yang telah dihitung.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian fiskal merupakan alat pengukur, untuk mengukur seberapa besar PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Berikut merupakan rasio kemandirian fiskal Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir:

Tabel 2. 39
Kategori Kemandirian Keuangan Kota Pangkal Pinang

2020	2021	2022	2023	2024
21,74	22,40	26,01	23,56	24,84
INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	KONSULTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

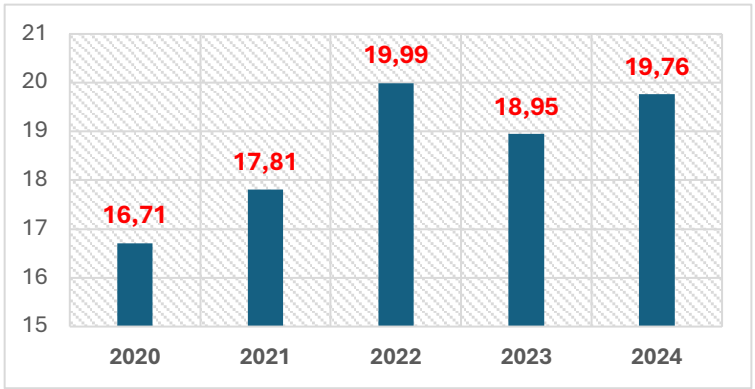
Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Kemandirian fiskal Kota Pangkal Pinang lebih banyak pada kategori instruktif, atau biasa disebut top-down. Hal ini memiliki arti yakni di mana pemerintah pusat atau kepala daerah memberikan arahan langsung kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, atau berdasarkan instruksi langsung dari Pemerintah pusat.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan belanja daerahnya menggunakan PAD. Berikut grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2. 63
Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pangkal Pinang 2020 – 2024



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

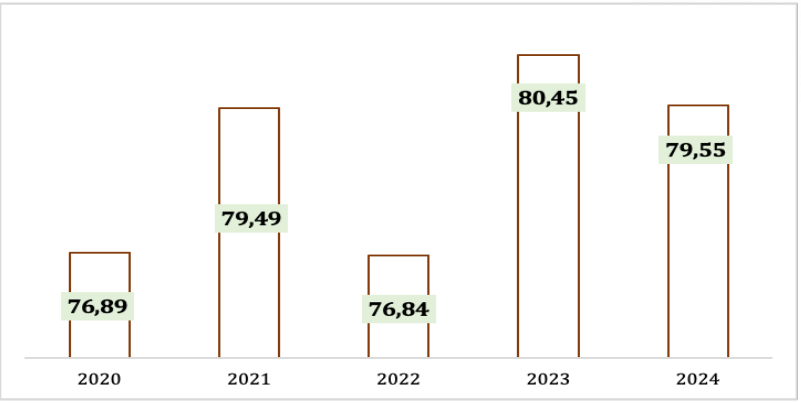
Dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang masih berada di bawah 20 persen, Kota Pangkal Pinang masih memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Untuk meningkatkan desentralisasi fiskal, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam optimalisasi sumber-sumber PAD,

seperti optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut grafik rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2. 64
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang 2020 – 2024



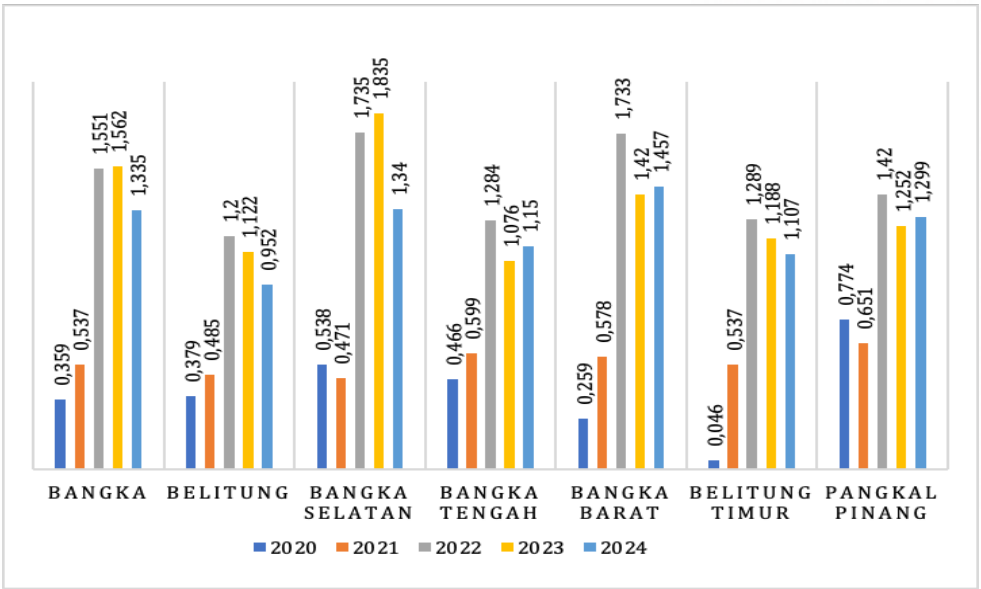
Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan Kota Pangkal Pinang cenderung berada pada angka yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio kapasitas fiskal (IKFD) adalah indikator untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Nilai IKFD Kota Pangkal Pinang dan daerah di sekitarnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2. 65
Rasio Kapasitas Fiskal Kota/ Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2020-2024



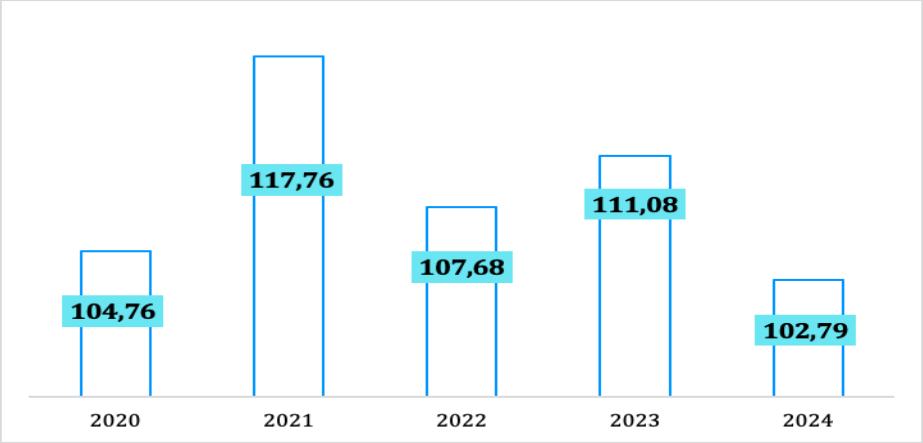
Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Selama periode 2020–2024, IKFD Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren pergeseran dari kategori rendah menuju sedang, dengan rasio berkisar antara 0,6 - 1,2. Berdasarkan grafik di atas, Kota Pangkal Pinang mengalami fluktuasi nilai IKFD selama lima tahun terakhir. Akan tetapi, indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2020 – 2024 menunjukkan pergeseran dari kategori rendah menuju sedang, dengan tren positif meski masih terbatas. Kemandirian fiskal belum tercapai, sehingga strategi penguatan PAD dan optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi kunci untuk menurunkan ketergantungan pada pusat dan meningkatkan otonomi fiskal daerah.

5. Rasio Efektivitas

Efektivitas keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja fiskal pemerintah daerah.

Gambar 2. 66
Rasio Efektivitas Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 – 2024



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir berada di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kinerja PAD melalui digitalisasi, optimalisasi pajak, dan diversifikasi sumber pendapatan. Ke depan, strategi ini perlu diperkuat agar efektivitas tetap terjaga sekaligus mendukung peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

2.5.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Pangkal Pinang terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Capaian kinerja belanja Kota Pangkal Pinang tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif: dari cukup efektif pada masa pandemi menuju sangat efektif pada 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan ekonomi lokal.

Tabel 2. 40
Target dan Realisasi Belanja Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Belanja	**975,07**	**1.006,94**	**1.079,39**	**1.173,44**	**1.117,94**	**1.070,56**
Belanja Operasi	779,19	784,30	854,39	910,81	949,37	855,61
Belanja Modal	177,13	220,63	207,95	261,63	167,98	207,06
Belanja Tak Terduga	18,75	2,00	17,05	1,01	0,60	7,88
Belanja Transfer	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Realisasi Belanja	**886,21**	**903,11**	**982,69**	**1.104,19**	**1.061,05**	**987,45**
Belanja Operasi	779,19	714,70	788,11	859,25	895,45	807,34
Belanja Modal	177,13	188,18	194,50	244,77	165,36	193,99
Belanja Tak Terduga	18,75	0,24	0,08	0,16	0,24	3,89
Belanja Transfer	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Kinerja Belanja	**90,89**	**89,69**	**91,04**	**94,10**	**94,91**	**92,24**

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Untuk proporsi realisasi komponen belanja terhadap total belanja daerah Kota Pangkal Pinang periode 2020-2024 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan pada proporsi Belanja Operasi serta penurunan proporsi Belanja Modal. Jika dirata-rata pada periode itu, proporsi Belanja Operasi sebesar 80,31 persen dan proporsi Belanja Modal sebesar 19,35 persen.

2.5.2. Neraca Daerah

Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala Daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas). Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

2.5.2.1. Aset

Secara agregat nilai aset Kota Pangkal Pinang dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,44 persen per tahun dari Rp. 3,103 triliun (2020) menjadi Rp. 3,416 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Investasi Jangka Panjang (0,65 persen per tahun). Aset Tetap (1,90 persen per tahun) dan Aset Lainnya (17,92 persen Per tahun). Adapun jenis Aset Lancar mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar - 4,48 persen pertahun.

2.5.2.2. Kewajiban

Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Kewajiban Jangka Pendek tersebut mengalami tren meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 10,75 persen per tahun dari Rp. 8,839 miliar (2020) menjadi Rp. 13,297 miliar (2024).

2.5.2.3. Ekuitas Dana

Nilai Ekuitas Dana Kota Pangkal Pinang berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,41 persen per tahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 3,094 Triliun menjadi Rp. 3,403 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2024 nilainya terus mengalami fluktuasi. Manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi. mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya. Secara keseluruhan Neraca Kota Pangkal Pinang disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2. 41
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024 (rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	23.319.671.850,05	120.276.159.890,49	145.401.357.868,10	92.775.623.749,93	52.121.747.175,78	22.27
Kas di Bendahara Penerimaan	725.000,00		6.733.165,00	11.320.000,00		98.78
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.017,00	53.319.011,00		3.000,00		(15.97)
Kas di BLUD	4.807.505.309,72	14.500.739.152,96	15.121.719.915,96	5.382.251.244,96	2.699.452.683,96	(13.44)
Kas di Bendahara JKN	217.039.648,00	710.247,00				(100.00)
Kas di Bendahara FKTP			982.349,00	140.663.042,00	165.502.843,00	1.197.99
Kas di Bendahara BOS	7.467.993.119,12	4.186.718.155,12	2.300.650.722,53	2.455.220.895,53	1.130.439.072,16	(37.62)
Kas dana BOK Puskesmas					617.330.750,00	
Kas Lainnya	560.266.753,00	24.278.632,00	30.662.557,00	1.447.251.726,98	30.723.150,00	(51.61)
Setara Kas						
Deposito	60.000.000.000,00					
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	58.979.657.143,00	61.225.175.053,00	58.872.475.929,00	62.248.011.195,00	65.146.363.060,00	2.52
Penyisihan Piutang Pajak						
Piutang Retribusi	1.350.898.000,00	1.265.620.010,22	1.381.297.010,22	1.434.888.010,22	14.389.443.936,85	80.66
Penyisihan Piutang Retribusi						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.032.648.895,15	6.707.028.141,02	9.094.236.429,00	8.271.971.930,10		(100.00)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.809.978.343,70	8.679.913.931,19	3.864.555.119,62	13.894.158.558,44	1.346.792.302,00	(16.80)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.366.743.104,75	14.094.561.560,00				(100.00)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Transfer Antar Daerah			15.676.126.748,00	16.215.784.571,00	15.452.678.235,00	
Penyisihan Piutang						
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	17.125.000,00	17.125.000,00				(100.00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	33.092.200,00	33.092.200,00				(100.00)
Beban Dibayar Dimuka	261.582.110,74	217.704.262,27	279.872.360,73	264.819.216,96	300.258.389,68	3.51
Piutang Lainnya	275.212.509,00	275.212.509,00	325.729.709,00	325.529.709,00	325.529.709,00	4.29
Persediaan	10.700.938.298,22	12.920.294.108,21	14.128.005.670,88	25.756.416.884,08	28.356.779.476,69	27.59
Penyisihan Piutang	(32.520.874.560,20)	(34.606.608.362,60)	(37.492.007.558,21)	(43.292.925.146,96)	(50.840.446.241,86)	11.82
Jumlah Aset Lancar	**157.680.208.741**	**209.871.043.501**	**228.985.664.831**	**187.326.398.752**	**131.253.917.542**	**(4.48)**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Dana Bergulir						
Penyisihan Dana Bergulir						
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen						
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	120.975.006.031,68	122.841.642.695,20	124.804.007.822,71	126.364.572.683,94	124.147.134.172,09	0.65
Jumlah Investasi Permanen	120.975.006.032	122.841.642.695	124.804.007.823	126.364.572.684	124.147.134.172	0.65
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**120.975.006.032**	**122.841.642.695**	**124.804.007.823**	**126.364.572.684**	**124.147.134.172**	**0.65**
ASET TETAP						
Tanah	1.048.301.132.624,60	1.072.711.153.335,60	1.098.124.299.067,44	1.107.688.126.601,44	1.055.224.842.711,88	0.16
Peralatan dan Mesin	409.505.769.900,86	453.999.713.816,95	518.326.792.629,54	604.810.977.303,72	660.703.844.022,18	12.70
Gedung dan Bangunan	823.759.447.637,88	862.150.058.977,68	953.958.515.026,44	1.059.831.371.553,07	1.121.843.461.177,79	8.03
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1.384.336.341.947,64	1.503.777.681.664,93	1.729.984.563.697,24	1.784.031.004.836,93	1.830.392.725.323,13	7.23
Aset Tetap Lainnya	14.776.843.778,41	14.593.717.071,41	15.245.334.209,41	12.152.382.157,71	13.219.629.251	-2.75
Konstruksi dalam Pengerjaan	109.669.573.315,66	138.463.958.592,23	16.926.821.080,99	6.391.050.743,74	4.686.607.496,99	-54.53
Akumulasi Penyusutan	(1.030.218.300.835,96)	(1.187.935.582.847,16)	(1.350.853.532.960,03)	(1.512.653.192.710,20)	(1.709.719.579.549,11)	13.50
Jumlah Aset Tetap	**2.760.130.808.369**	**2.857.760.700.612**	**2.981.712.792.751**	**3.062.251.720.486**	**2.976.351.530.434**	**1.90**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang						
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.116.317.581,00	24.116.317.581,00	86.610.186.000,00	86.610.186.000,00	86.610.186.000,00	37.66
Aset Tak Berwujud	8.375.493.014,96	8.389.963.014,96	8.564.249.664,96	8.588.249.664,96	8.588.249.664,96	0.63
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(8.262.752.220,60)	(8.309.179.392,79)	(8.390.463.894,98)	(8.455.969.674,98)	(8.501.241.004,96)	0.71
Aset Lain-Lain	40.090.832.837,43	39.766.568.818,67	39.458.632.178,67	37.713.703.178,67	37.646.103.178,67	-1.56
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						
Jumlah Aset Lainnya	**64.319.891.213**	**63.963.670.022**	**126.242.603.949**	**124.456.169.169**	**124.343.297.839**	**17.92**
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Tanah					53.675.173.980	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan					7.904.049.233	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					(1.024.446.371)	
Jumlah Properti Investasi					60.554.776.842	
JUMLAH ASET	**3.103.105.914.355**	**3.254.437.056.830**	**3.461.745.069.353**	**3.500.398.861.091**	**3.416.650.656.829**	**2.44**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	408.857.870,00	466.046.772,00	4.014.135,00	14.160.381,98	3.125.953,00	-70.43
Pendapatan Diterima Dimuka	1.787.846.374,59	1.296.720.547,34	1.196.724.367,48	795.405.615,45	903.144.180,31	-15.69
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemda Lainnya						
Utang Belanja			12.767.663.019,76	13.422.623.899,51	12.300.533.952,40	(1,85)
Utang Bunga						
Utang Beban	847.459.175,00	1.038.867.976,00				(100,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.795.691.249,21	13.959.486.111,79	94.050.000,00	88.650.000,00	91.050.000,00	(64,60)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**8.839.854.669**	**16.761.121.407**	**14.062.451.522**	**14.320.839.897**	**13.297.854.086**	**10,75**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**8.839.854.669**	**16.761.121.407**	**14.062.451.522**	**14.320.839.897**	**13.297.854.086**	**10,75**
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	3.094.266.059.686,01	3.237.675.935.422,43	3.447.682.617.830,98	3.486.078.021.194,30	3.403.352.802.742,99	2,41
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**3.094.266.059.686**	**3.237.675.935.422**	**3.447.682.617.831**	**3.486.078.021.194**	**3.403.352.802.743**	**2,41**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.103.105.914.355**	**3.254.437.056.830**	**3.461.745.069.353**	**3.500.398.861.091**	**3.416.650.656.829**	**2,44**

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang. 2025 (diolah)

2.5.2.4. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kota Pangkal Pinang periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio lancar Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian agar kewajiban lancar tidak terus meningkat dan tetap berada pada tingkat yang sebanding dengan aset lancar yang dimiliki. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi likuiditas yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya. Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 42
Rasio Lancar Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	157.680.208.741	209.871.043.501	228.985.664.831	187.326.398.752	131.253.917.542
KEWAJIBAN LANCAR	8.839.854.669	16.761.121.407	14.062.451.522	14.320.839.897	13.297.854.086
RASIO LANCAR	**17,84**	**12,52**	**16,28**	**13,08**	**9,87**

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang. 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Jika dilihat dari data yang tersedia, rasio hutang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*) Kota Pangkal Pinang pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Nilai rasio tercatat 0,003 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,005 pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 0,004 pada tahun 2022, dan tetap berada pada level 0,004 pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun dengan rasio terbaik (terendah), di mana total kewajiban hanya sekitar 0,3 persen dari total ekuitas. Sebaliknya, angka

tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana kewajiban mencapai sekitar 0,5 persen dari total ekuitas.

Meskipun demikian, seluruh nilai rasio sepanjang 2020–2024 menunjukkan bahwa kewajiban Kota Pangkal Pinang masih jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki. Artinya, kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka panjang masih berada dalam kondisi yang sehat dan aman. Namun, melihat kecenderungan kenaikan kewajiban pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pangkal Pinang tetap perlu berhati-hati dalam menambah hutang di masa mendatang agar rasio tersebut tidak bergerak ke arah yang kurang menguntungkan dan tetap berada pada tingkat yang terkelola dengan baik.

Tabel 2. 43
Rasio Hutang Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	8.839.854.669	16.761.121.407	14.062.451.522	14.320.839.897	13.297.854.086
EKUITAS	3.094.266.059.686	3.237.675.935.422	3.447.682.617.831	3.486.078.021.194	3.403.352.802.743
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	**0,003**	**0,005**	**0,004**	**0,004**	**0,004**

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang. 2024 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kota Pangkal Pinang pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, meskipun nilainya secara umum tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Rasio tertinggi (terburuk) terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,0052, sementara rasio terendah (terbaik) terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,0028. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini berada pada kisaran 0,0041 di tahun 2022 dan 2023, serta sedikit menurun menjadi 0,0039 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang tidak memiliki risiko gagal bayar, karena total aset yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban yang ada. Meskipun demikian, kenaikan kewajiban yang terlihat pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian agar rasio ini tetap terjaga pada tingkat yang sehat di masa mendatang.

Tabel 2. 44
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Pangkal Pinang

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	8.839.854.669	16.761.121.407	14.062.451.522	14.320.839.897	13.297.854.086
AKTIVA	3.103.105.914.355	3.254.437.056.830	3.461.745.069.353	3.500.398.861.091	3.416.650.656.829
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	**0,0028**	**0,0052**	**0,0041**	**0,0041**	**0,0039**

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang. 2024 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Jika melihat perbandingan antara nilai aset tetap yang mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun setiap tahunnya dengan PAD yang berada pada kisaran Rp140 miliar hingga Rp 200 miliar, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan aset tetap masih tergolong sangat rendah. Artinya, kontribusi aset tetap terhadap pembentukan PAD belum optimal dan masih perlu ditingkatkan melalui strategi peningkatan pendapatan berbasis aset, penguatan pemanfaatan aset daerah, serta optimalisasi aset yang kurang produktif. Dengan demikian, efektivitas pendayagunaan aset tetap masih memerlukan perhatian khusus agar di masa mendatang aset yang dimiliki dapat memberikan output yang lebih besar terhadap peningkatan PAD.

Tabel 2. 45
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	140.964.396.673	168.864.062.465	201.971.524.718	197.873.082.824	200.700.225.464
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.760.130.808.369	2.857.760.700.612	2.981.712.792.751	3.062.251.720.486	2.976.351.530.434
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,051	0,059	0,068	0,065	0,67

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang. 2024 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Rasio perputaran total aktiva Kota Pangkal Pinang selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat, bukan menurun. Rasio tercatat 0,045 pada tahun 2020, naik menjadi 0,052 pada tahun 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 0,058 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 rasio sedikit menurun menjadi 0,057, namun kembali naik menjadi 0,059 pada tahun 2024, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Pergerakan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan seluruh aset daerah dalam menghasilkan PAD justru mengalami peningkatan bertahap.

Tabel 2. 46
Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	140.964.396.673	168.864.062.465	201.971.524.718	197.873.082.824	200.700.225.464
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	3.103.105.914.355	3.254.437.056.830	3.461.745.069.353	3.500.398.861.091	3.416.650.656.829
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,045	0,052	0,058	0,057	0,059

Sumber: BAKEUDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah

Pada bagian proyeksi keuangan daerah ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA). dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2029.

2.5.3.1. Proyeksi Pendapatan

Pertumbuhan Pendapatan daerah Kota Pangkal Pinang pada periode 2025–2030 diproyeksikan tumbuh relatif moderat, yaitu sekitar 3,50 persen per tahun, meningkat dari Rp. 993,294 miliar pada 2025 menjadi Rp1,124 triliun pada 2030. Proyeksi ini disusun berdasarkan capaian kinerja pendapatan lima tahun terakhir, di mana rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 4,90 persen, yang sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan transfer, sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh tinggi, yakni 9,70 persen per tahun. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis, kebijakan pendapatan ke depan diarahkan untuk memperkuat dan menumbuhkan PAD secara berkelanjutan, sementara komponen pendapatan

transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tumbuh konsisten mengikuti pola historisnya.

Dalam periode 2025–2030, PAD diproyeksikan terus meningkat, dari Rp.239,425 miliar pada 2025 menjadi Rp. 304,733 miliar pada 2030, atau tumbuh rata-rata ± 4,9 persen per tahun, sejalan dengan tren historis PAD Kota Pangkal Pinang. Seluruh komponen PAD baik Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan bertumbuh secara konsisten sesuai proyeksi tersebut. Khusus pendapatan Pajak Daerah, proyeksinya menunjukkan kenaikan dari Rp. 152,180 miliar pada 2025 menjadi Rp. 204,983 miliar pada 2030, atau tumbuh sekitar 6,2 persen per tahun, sejalan dengan potensi peningkatan penerimaan dari sumber-sumber seperti Opsen PKB dan BBNKB. Secara keseluruhan, proyeksi ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD sebagai motor penggerak utama pertumbuhan pendapatan daerah sekaligus fondasi perencanaan fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh ± 3,3 persen pertahun dari Rp. 67,723 miliar (2025) menjadi Rp. 79,663 miliar (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 26,36 persen per tahun. Pada umumnya ruang pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh ± 4 persen per tahun dari Rp. 6,707 miliar (2025) menjadi Rp. 8,152 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang pertumbuhannya mencapai 12,69 persen pertahun.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,68 persen per tahun dari Rp. 12,815 miliar (2025) menjadi Rp. 11,935 miliar (2030). Target ini cukup realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2020-2024) yang berfluktuasi sebesar 0,31 persen pertahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD serta meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Secara umum Pendapatan Transfer Tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh 3,5 persen jika dibandingkan dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 5,90 persen.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 47
Proyeksi Pendapatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Realisasi		Target 2026	Proyeksi			
		2024	2025		2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.015.635.666.316**	**993.294.792.032**	**814.528.582.538**	**1.024.721.056.316**	**1.076.902.975.191**	**1.100.102.216.664**	**1.124.329.454.113**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**200.709.068.606**	**239.425.583.521**	**250.704.842.301**	**263.240.084.416**	**276.402.088.637**	**290.222.193.069**	**304.733.302.722**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	125.196.233.088	152.179.909.235	168.640.000.000	177.072.000.000	185.925.600.000	195.221.880.000	204.982.974.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.987.547.137	67.723.374.160	65.538.885.000	68.815.829.250	72.256.620.713	75.869.451.748	79.662.924.336
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.271.971.930	6.707.028.141	6.707.028.141	7.042.379.548	7.394.498.525	7.764.223.452	8.152.434.624
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.253.316.451	12.815.271.985	9.818.929.160	10.309.875.618	10.825.369.399	11.366.637.869	11.934.969.762
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**807.899.550.000**	**743.457.998.511**	**553.639.320.237**	**751.069.761.900**	**790.089.676.554**	**799.468.813.595**	**809.184.941.391**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**723.634.130.000**	**681.433.713.000**	**514.389.320.237**	**709.857.261.900**	**746.816.551.554**	**754.032.032.345**	**761.476.321.079**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**723.634.130.000**						
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	68.641.710.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	460.990.960.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	187.220.870.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	6.780.590.000	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi		Target 2026	Proyeksi			
		2024	2025		2027	2028	2029	2030
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**84.265.420.000**	**62.024.285.511**	**39.250.000.000**	**41.212.500.000**	**43.273.125.000**	**45.436.781.250**	**47.708.620.313**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	84.265.420.000	62.024.285.511	39.250.000.000	41.212.500.000	43.273.125.000	45.436.781.250	47.708.620.313
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**7.027.047.710**	**10.411.210.000**	**10.184.420.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-		-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-		-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	7.027.047.710	10.411.210.000	10.184.420.000	10.411.210.000	10.411.210.000	10.411.210.000	10.411.210.000

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

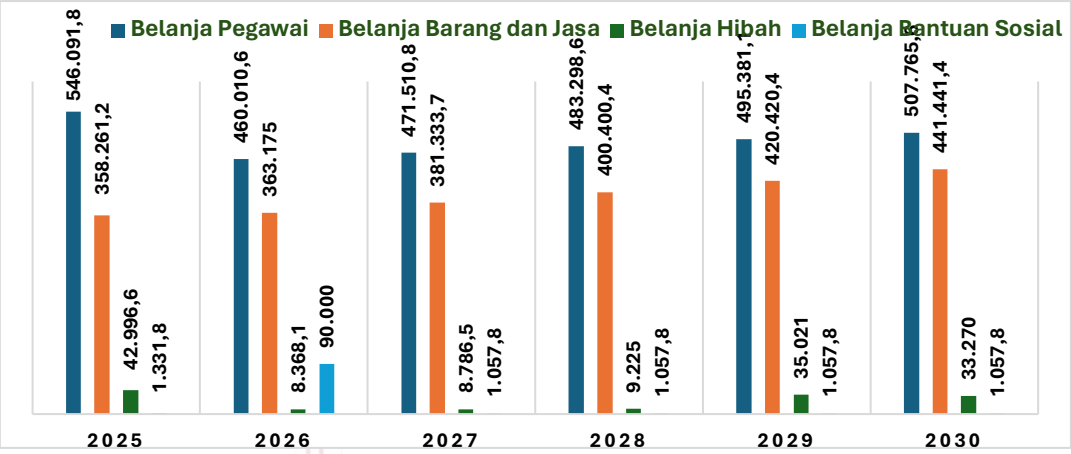
2.5.3.2. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun ke depan diproyeksikan mengalami peningkatan, bukan penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3 persen per tahun, yaitu dari Rp. 1,050 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp.1,164 triliun pada tahun 2030. Target pertumbuhan belanja ini berada pada level yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan belanja pada periode 2020–2024 yang mencapai 4,56 persen, karena pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas belanja serta menyesuaikan dengan perkembangan pendapatan daerah, khususnya pendapatan transfer yang juga cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Untuk Belanja Operasi, proyeksinya menunjukkan adanya penyesuaian yang lebih terkontrol. Nilainya meningkat tipis dari Rp. 895,448 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp. 948,681 miliar pada tahun 2025, dan selanjutnya tumbuh moderat hingga mencapai Rp.983,535 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan belanja operasi tersebut setara dengan rata-rata proyeksi sebesar 0,97 persen, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan historis 2020–2024 yang mencapai 6,01 persen, sehingga menunjukkan adanya langkah pengendalian belanja operasi agar tidak membebani struktur fiskal daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan belanja daerah pada periode 2025–2030 diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja publik, dengan fokus memperkuat belanja produktif sekaligus menekan pertumbuhan belanja rutin agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Gambar 2. 67
Target Belanja Operasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Rp. juta)



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

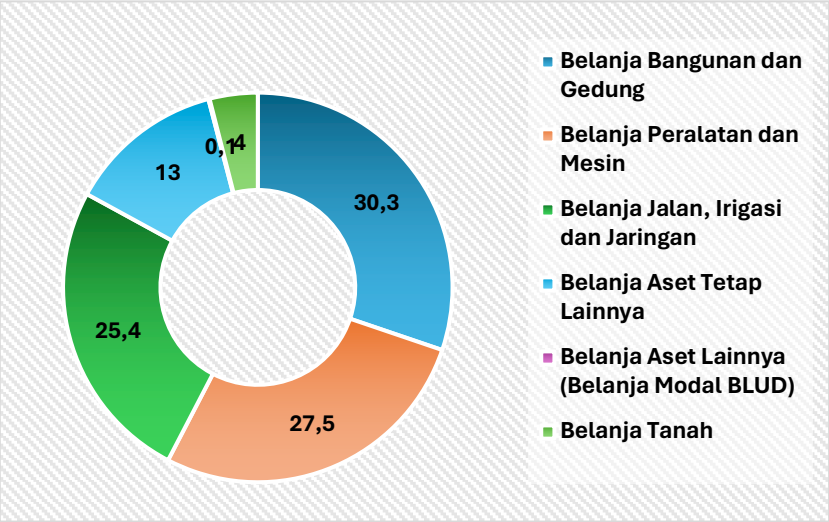
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan infrastruktur publik serta memperkuat daya tarik investasi daerah, porsi Belanja Modal Kota Pangkal Pinang diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Total belanja modal meningkat dari Rp.99,679 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp.178,163 miliar pada tahun 2030, menggambarkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan belanja modal pada periode lima tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat aset strategis yang memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Jika dilihat dari komposisinya berdasarkan proyeksi dan visualisasi pada diagram, Belanja Bangunan dan Gedung menjadi komponen dengan porsi terbesar rata-rata 30,3 persen per tahun , menunjukkan fokus pada pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti perkantoran, gedung layanan, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, Belanja Peralatan dan Mesin mencakup 27,5 persen, yang mencerminkan strategi peningkatan efisiensi layanan pemerintahan serta dukungan terhadap inovasi yang dapat mempercepat produktivitas masyarakat.

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan juga memberikan kontribusi penting dengan porsi 25,4 persen, yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah untuk membuka akses ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pertumbuhan kawasan strategis. Sementara itu, Belanja Aset Tetap Lainnya mengambil porsi 13 persen, dan Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD) tercatat 0,1 persen, menunjukkan bahwa kelompok ini tidak menjadi prioritas dalam proyeksi belanja modal.

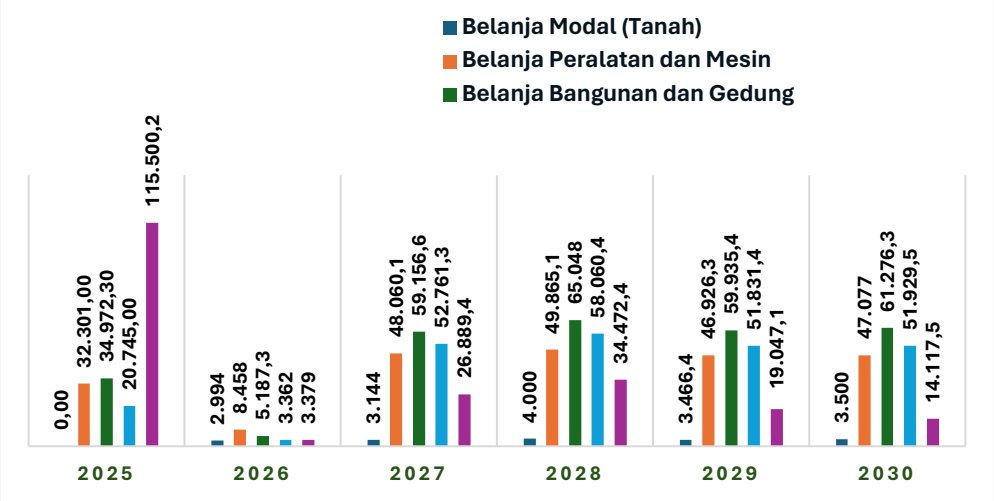
Secara keseluruhan, arah kebijakan Belanja Modal Kota Pangkal Pinang diarahkan pada pembangunan infrastruktur produktif yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah. Optimalisasi belanja modal ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya saing Kota Pangkal Pinang dalam jangka panjang. Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 68
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

Gambar 2. 69
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Rp. juta)



Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025-20230 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48
Proyeksi Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam juta)

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**	**1.061.047.000.000,00**	**1.050.068.184.753,90**	**857.028.582.538**	**1.054.880.011.665**	**1.107.624.012.248**	**1.135.314.612.554**	**1.163.697.477.868**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**895.448.370.000,00**	**948.681.479.698,82**	**831.643.641.758**	**862.688.899.541**	**893.981.837.172**	**951.880.341.837**	**983.534.829.105**
2.1.1	Belanja Pegawai	457.938.840.000,00	546.091.807.729,82	460.010.572.512	471.510.836.825	483.298.607.745	495.381.072.939	507.765.599.763
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396.972.870.000,00	358.261.212.369,00	363.174.956.396	381.333.704.216	400.400.389.427	420.420.408.898	441.441.429.343
2.1.5	Belanja Hibah	40.023.960.000,00	42.996.619.600,00	8.368.112.850	8.786.518.500	9.225.000.000	35.021.020.000	33.269.960.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	512.700.000,00	1.331.840.000,00	90.000.000	1.057.840.000	1.057.840.000	1.057.840.000	1.057.840.000
2.2	**BELANJA MODAL**	**165.360.730.000,00**	**99.679.618.631,00**	**23.384.940.780**	**190.191.112.124**	**211.642.175.076**	**181.434.270.717**	**178.162.648.763**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	115.560.000,00	-	2.994.300.000	3.144.015.000	4.000.000.000	3.466.276.500	3.500.000.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	49.337.560.000,00	32.301.034.902,00	8.457.929.200	48.060.078.031	49.865.086.269	46.926.261.154	47.076.659.691
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49.400.010.000,00	34.972.341.411,00	5.187.319.948	59.156.573.031	65.047.836.269	59.935.414.354	61.276.259.691
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.872.250.000,00	20.744.991.000,00	3.361.851.632	52.761.283.031	58.060.456.269	51.831.434.354	51.929.499.691

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.635.350.000,00	11.550.028.318,00	3.379.040.000	26.889.433.031	34.472.426.269	19.047.134.354	14.117.549.691
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	111.223.000,00	4.500.000	179.730.000	196.370.000	227.750.000	262.680.000
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**237.900.000,00**	**1.407.086.424,08**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	237.900.000,00	1.407.086.424,08	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.2.1	Transfer Bantuan	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keuangan Ke Provinsi							
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-45.411.333.684,00**	**-56.773.392.721,90**	**-42.500.000.000,00**	**-30.158.955.348,85**	**-30.721.037.057,43**	**-35.212.395.890,19**	**39.368.023.755,04**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

2.5.3.3. Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber penerimaan daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan, penggunaan SiLPA masih dialokasikan secara konsisten dalam enam tahun mendatang, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, penggunaan SiLPA sebesar Rp.56,773 miliar, kemudian menurun menjadi Rp.42,500 miliar pada 2026, Rp.30,159 miliar pada 2027, Rp.30,721 miliar pada 2028, Rp. 35,212 miliar pada 2029, dan Rp.39,368 miliar pada 2030. Proyeksi ini sejalan dengan rata-rata pertumbuhan historis penggunaan SiLPA yang berada pada level -7,57 persen serta proyeksi penurunan sebesar 5,2 persen di tahun-tahun mendatang.

Dengan pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah menargetkan peningkatan efektivitas penyerapan anggaran sehingga ketergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber pembiayaan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, tingkat penyerapan belanja ditargetkan semakin optimal sehingga porsi SiLPA yang digunakan sebagai komponen pembiayaan dapat ditekan dan diarahkan hanya sebagai penyangga fiskal, bukan sebagai sumber utama untuk menutup kebutuhan anggaran.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 49
Proyeksi APBD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam juta)

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.015.635.666.316**	**993.294.792.032**	**814.528.582.538**	**1.024.721.056.316**	**1.076.902.975.191**	**1.100.102.216.664**	**1.124.329.454.113**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**200.709.068.606**	**239.425.583.521**	**250.704.842.301**	**263.240.084.416**	**276.402.088.637**	**290.222.193.069**	**304.733.302.722**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	125.196.233.088	152.179.909.235	168.640.000.000	177.072.000.000	185.925.600.000	195.221.880.000	204.982.974.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.987.547.137	67.723.374.160	65.538.885.000	68.815.829.250	72.256.620.713	75.869.451.748	79.662.924.336
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.271.971.930	6.707.028.141	6.707.028.141	7.042.379.548	7.394.498.525	7.764.223.452	8.152.434.624
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.253.316.451	12.815.271.985	9.818.929.160	10.309.875.618	10.825.369.399	11.366.637.869	11.934.969.762
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**807.899.550.000**	**743.457.998.511**	**553.639.320.237**	**751.069.761.900**	**790.089.676.554**	**799.468.813.595**	**809.184.941.391**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**723.634.130.000**	**681.433.713.000**	**514.389.320.237**	**709.857.261.900**	**746.816.551.554**	**754.032.032.345**	**761.476.321.079**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**723.634.130.000**						
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	68.641.710.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	460.990.960.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	187.220.870.000	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	6.780.590.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**84.265.420.000**	**62.024.285.511**	**39.250.000.000**	**41.212.500.000**	**43.273.125.000**	**45.436.781.250**	**47.708.620.313**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	84.265.420.000	62.024.285.511	39.250.000.000	41.212.500.000	43.273.125.000	45.436.781.250	47.708.620.313
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**7.027.047.710**	**10.411.210.000**	**10.184.420.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**	**10.411.210.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-		-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-		-	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.3	Pendapatan Lainnya	7.027.047.710	10.411.210.000	10.184.420.000	10.411.210.000	10.411.210.000	10.411.210.000	10.411.210.000
2	**BELANJA**	**1.061.047.000.000,00**	**1.050.068.184.753,90**	**857.028.582.538**	**1.054.880.011.665**	**1.107.624.012.248**	**1.135.314.612.554**	**1.163.697.477.868**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**895.448.370.000,00**	**948.681.479.698,82**	**831.643.641.758**	**862.688.899.541**	**893.981.837.172**	**951.880.341.837**	**983.534.829.105**
2.1.1	Belanja Pegawai	457.938.840.000,00	546.091.807.729,82	460.010.572.512	471.510.836.825	483.298.607.745	495.381.072.939	507.765.599.763
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396.972.870.000,00	358.261.212.369,00	363.174.956.396	381.333.704.216	400.400.389.427	420.420.408.898	441.441.429.343
2.1.5	Belanja Hibah	40.023.960.000,00	42.996.619.600,00	8.368.112.850	8.786.518.500	9.225.000.000	35.021.020.000	33.269.960.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	512.700.000,00	1.331.840.000,00	90.000.000	1.057.840.000	1.057.840.000	1.057.840.000	1.057.840.000
2.2	**BELANJA MODAL**	**165.360.730.000,00**	**99.679.618.631,00**	**23.384.940.780**	**190.191.112.124**	**211.642.175.076**	**181.434.270.717**	**178.162.648.763**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	115.560.000,00	-	2.994.300.000	3.144.015.000	4.000.000.000	3.466.276.500	3.500.000.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	49.337.560.000,00	32.301.034.902,00	8.457.929.200	48.060.078.031	49.865.086.269	46.926.261.154	47.076.659.691
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49.400.010.000,00	34.972.341.411,00	5.187.319.948	59.156.573.031	65.047.836.269	59.935.414.354	61.276.259.691
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.872.250.000,00	20.744.991.000,00	3.361.851.632	52.761.283.031	58.060.456.269	51.831.434.354	51.929.499.691
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.635.350.000,00	11.550.028.318,00	3.379.040.000	26.889.433.031	34.472.426.269	19.047.134.354	14.117.549.691
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	111.223.000,00	4.500.000	179.730.000	196.370.000	227.750.000	262.680.000

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**237.900.000,00**	**1.407.086.424,08**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	237.900.000,00	1.407.086.424,08	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.4	Transfer Bantuan	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keuangan Lainnya							
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-45.411.333.684,00**	**-56.773.392.721,90**	**-42.500.000.000,00**	**-30.158.955.348,85**	**-30.721.037.057,43**	**-35.212.395.890,19**	**-39.368.023.755,04**
3	**PEMBIAYAAN**							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**102.193.580.000,00**	**56.773.392.721,90**	**42.500.000.000,00**	**30.158.955.348,85**	**30.721.037.057,43**	**35.212.395.890,19**	**39.368.023.755,04**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	102.193.580.000,00	56.773.392.721,90	42.500.000.000,00	30.158.955.348,85	30.721.037.057,43	35.212.395.890,19	39.368.023.755,04
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;							
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan							

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perundangundangan.							
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**							
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo							
3.2.2	Penyertaan modal daerah;							
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;							
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;							
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	PEMBIAYAAN NETTO	**102.193.580.000,00**	**56.773.392.721,90**	**42.500.000.000,00**	**30.158.955.348,85**	**30.721.037.057,43**	**35.212.395.890,19**	**39.368.023.755,04**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**56.782.246.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

2.5.3.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai. belanja bunga. belanja subsidi. belanja hibah. belanja bantuan sosial). belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan). dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 1,1 persen per tahun dari Rp. 591,827 miliar (2025) menjadi Rp. 544,093 miliar (2030).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 50
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (Rp Juta)

Uraian	Realisasi 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Operasi	**498.475.500.000,00**	**590.420.267.329,82**	**468.468.685.362,00**	**481.355.195.324,80**	**493.581.447.745,42**	**531.459.932.939,06**	**542.093.399.762,53**
Belanja Pegawai	457.938.840.000,00	546.091.807.729,82	460.010.572.512,00	471.510.836.824,80	483.298.607.745,42	495.381.072.939,06	507.765.599.762,53
Belanja Bunga							
Belanja Subsidi							
Belanja Hibah	40.023.960.000,00	42.996.619.600,00	8.368.112.850,00	8.786.518.500,00	9.225.000.000,00	35.021.020.000,00	33.269.960.000,00
Belanja Bantuan Sosial	512.700.000,00	1.331.840.000,00	90.000.000,00	1.057.840.000,00	1.057.840.000,00	1.057.840.000,00	1.057.840.000,00
Belanja Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Transfer Bagi Hasil							
Belanja Transfer Bantuan Keuangan							
Belanja Tak Terduga	**237.900.000,00**	**1.407.086.424,08**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Belanja Tak Terduga	237.900.000,00	1.407.086.424,08	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
pembayaran cicilan pokok							

Uraian	Realisasi 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utang yang jatuh tempo							
penyertaan modal daerah;							
pembentukan Dana Cadangan;							
Pemberian Pinjaman Daerah;							
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan							
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**498.713.400.000,00**	**591.827.353.753,90**	**470.468.685.362,00**	**483.355.195.324,80**	**495.581.447.745,42**	**533.459.932.939,06**	**544.093.399.762,53**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang, 2025 (diolah)

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp. 458,240 miliar terus meningkat hingga tahun 2030 Rp. 619,604 miliar. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang berfluktuasi di tahun 2025 kemudian terus meningkat hingga tahun 2030. Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 51
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	993.294.792.032,00	814.528.582.538,00	1.024.721.056.316,05	1.076.902.975.190,71	1.100.102.216.664,16	1.124.329.454.113,17
Penerimaan Pembiayaan	56.773.392.721,90	42.500.000.000,00	30.158.955.348,85	30.721.037.057,43	35.212.395.890,19	39.368.023.755,04
TOTAL PENERIMAAN	**1.050.068.184.753,90**	**857.028.582.538,00**	**1.054.880.011.664,90**	**1.107.624.012.248,15**	**1.135.314.612.554,35**	**1.163.697.477.868,21**
(***Dikurangi***):						
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	591.827.353.753,90	470.468.685.362,00	483.355.195.324,80	495.581.447.745,42	533.459.932.939,06	544.093.399.762,53
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**458.240.831.000,00**	**386.559.897.176,00**	**571.524.816.340,10**	**612.042.564.502,73**	**601.854.679.615,29**	**619.604.078.105,68**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

Tabel 2. 52
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Pembangunan OPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	993.294.792.032,00	814.528.582.538,00	1.024.721.056.316,05	1.076.902.975.190,71	1.100.102.216.664,16	1.124.329.454.113,17
Penerimaan Pembiayaan	56.773.392.721,90	42.500.000.000,00	30.158.955.348,85	30.721.037.057,43	35.212.395.890,19	39.368.023.755,04
TOTAL PENERIMAAN	**1.050.068.184.753,90**	**857.028.582.538,00**	**1.054.880.011.664,90**	**1.107.624.012.248,15**	**1.135.314.612.554,35**	**1.163.697.477.868,21**
(***Dikurangi***):						
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	1.407.086.424,08	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapasitas Riil Pagu Pembangunan OPD	**1.048.661.098.329,82**	**855.028.582.538,00**	**1.052.880.011.664,90**	**1.105.624.012.248,15**	**1.133.314.612.554,35**	**1.161.697.477.868,21**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang. 2025 (diolah)

Tabel 2. 53
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030 (juta rupiah)

Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu Pembangunan OPD					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	1.048.661.098.329,82	855.028.582.538,00	1.052.880.011.664,90	1.105.624.012.248,15	1.133.314.612.554,35	1.161.697.477.868,21
Prioritas I	471.897.494.248,42	384.762.862.142,10	473.796.005.249,21	497.530.805.511,67	509.991.575.649,46	522.763.865.040,69
Prioritas II	419.464.439.331,93	342.011.433.015,20	421.152.004.665,96	442.249.604.899,26	453.325.845.021,74	464.678.991.147,28
Prioritas III	157.299.164.749,47	128.254.287.380,70	157.932.001.749,74	165.843.601.837,22	169.997.191.883,15	174.254.621.680,23
JUMLAH	**1.048.661.098.329,82**	**855.028.582.538,00**	**1.052.880.011.664,90**	**1.105.624.012.248,15**	**1.133.314.612.554,35**	**1.161.697.477.868,21**

Sumber: BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang 2025 (diolah)

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis yang telah disajikan dalam gambaran umum daerah, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun tantangan dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang. Pengolahan data dan informasi mengenai kondisi daerah, disertai penelaahan terhadap berbagai permasalahan pembangunan pada setiap bidang urusan, menjadi dasar penting dalam merumuskan permasalahan pokok serta isu-isu strategis yang relevan.

2.6.1. Permasalahan Daerah

Dari hasil kompilasi gambaran keseluruhan tentang kondisi daerah, dapat diidentifikasi beberapa tren penting dalam aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum, yang menunjukkan kecenderungan perkembangan di berbagai aspek dalam beberapa tahun terakhir. Dirumuskan 5 permasalahan daerah pada RPJM Daerah sebagai berikut:

Gambar 2. 70
Permasalahan Daerah Kota Pangkal Pinang

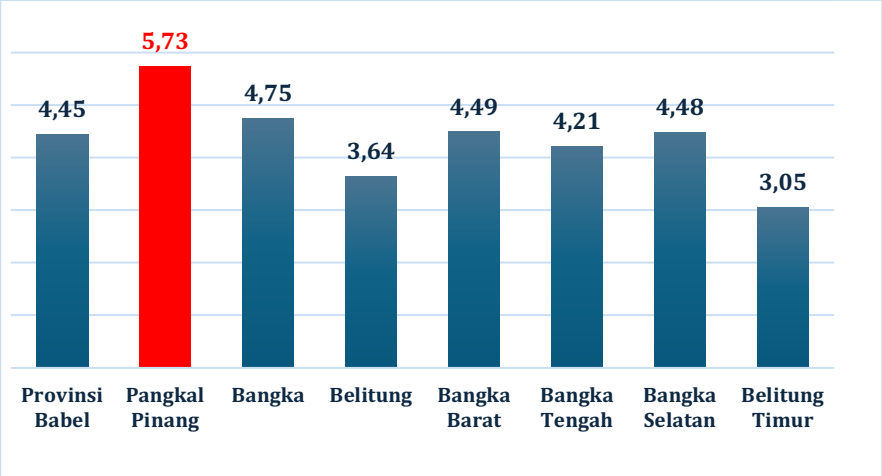


1. **Belum optimalnya transformasi dan daya saing ekonomi daerah**

Tantangan daya saing ekonomi semakin diperburuk oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2025, Kota Pangkal Pinang mencatat TPT tertinggi di tingkat provinsi. Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan

bahwa penciptaan lapangan kerja belum sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan pasar, mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan serta keterbatasan sektor usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Kondisi tersebut menandakan bahwa daya saing kota, baik dalam menarik investasi maupun menciptakan aktivitas ekonomi baru, belum berkembang secara optimal.

Gambar 2. 71
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025



Sumber: BPS, Provinsi Babel Dalam Angka, 2026

Selain itu, berbagai hambatan struktural turut memperkuat lambatnya transformasi ekonomi Kota Pangkal Pinang. Belum optimalnya hilirisasi produk pada sektor-sektor produktif menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah, sehingga aktivitas ekonomi lebih banyak berhenti pada tahap produksi primer tanpa penguatan proses pengolahan. Di sisi lain, rendahnya adopsi teknologi pada UMKM serta sektor perdagangan menghambat peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan jangkauan pasar, termasuk pemanfaatan teknologi kelautan dan sarana prasarana perikanan yang masih tertinggal untuk mendukung pengembangan industri berbasis hasil laut. Permasalahan ini diperburuk oleh belum optimalnya pengelolaan pasar baik dari sisi infrastruktur, tata kelola distribusi, maupun digitalisasi layanan yang menyebabkan rantai pasok tidak efisien dan daya saing pelaku usaha lokal masih lemah. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Kota Pangkal Pinang tidak hanya terhambat oleh permasalahan makro, tetapi juga oleh lemahnya penguatan sektor-sektor produktif

di tingkat mikro, yang berdampak langsung pada rendahnya kemampuan daerah untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing jangka panjang.

2. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pelayanan**

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Pangkal Pinang hingga saat ini masih belum optimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Tantangan ini tercermin dari beberapa aspek, antara lain kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang belum merata di mana masih dijumpai ketidaksesuaian kompetensi, kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan, serta lemahnya kolaborasi lintas-OPD. Struktur kelembagaan juga belum sepenuhnya tepat fungsi dan masih ditemukan tumpang tindih tupoksi, khususnya pada level kecamatan dan kelurahan. Selain itu, implementasi digitalisasi pemerintahan belum berjalan optimal, ditandai dengan belum meratanya literasi TIK aparatur dan belum maksimalnya pemanfaatan data, keamanan informasi, serta infrastruktur digital sebagai basis pelayanan publik modern. Akuntabilitas dan transparansi juga memerlukan penguatan lebih lanjut, terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang masih pada kategori "cukup memadai" serta masih lemahnya implementasi keterbukaan informasi publik. Kondisi ini semakin diperberat oleh belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan perizinan, inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah, serta penyebaran informasi program pemerintah. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya reformasi tata kelola secara menyeluruh agar pemerintah Kota Pangkal Pinang mampu memberikan pelayanan yang responsif, profesional, transparan, serta sejalan dengan prinsip *good governance*.

3. **Belum optimalnya pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan**

Permasalahan belum optimalnya pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Kota Pangkal Pinang tampak dari belum memadainya ketersediaan dan kapasitas infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan pangan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Fluktuasi ketersediaan pangan selama beberapa tahun terakhir dari 96,97 persen pada 2019 hingga melonjak ke 170,896 persen pada 2020, kemudian turun kembali

ke 122,169 persen pada 2022 dan 130,275 persen pada 2023 menggambarkan belum stabilnya sistem logistik daerah, termasuk penyimpanan, distribusi, hingga sarana pendukung produksi pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur ketahanan pangan belum berkembang secara konsisten sehingga rentan terhadap dinamika permintaan, pasokan, maupun gangguan eksternal. Di sisi lain, rendahnya pemanfaatan kawasan industri, tercermin dari hanya sekitar 30 persen perusahaan yang terdaftar dalam SIINas, mengindikasikan bahwa fasilitas kawasan industri belum berfungsi optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan belum didukung oleh infrastruktur utilitas dan tata ruang yang kuat.

Selain itu, kapasitas infrastruktur perkotaan untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masih terbatas. Volume produksi sampah yang meningkat dari 147 ton per hari pada 2018 menjadi 165 ton per hari pada 2023 tidak diimbangi dengan penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sejak 2018 tetap berjumlah empat unit. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap sistem pengelolaan sampah daerah, yang berpotensi menimbulkan penumpukan dan memperpendek umur layanan fasilitas yang ada. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan beban layanan dan kapasitas sarana prasarana memperlihatkan bahwa perencanaan infrastruktur perkotaan belum sepenuhnya responsif terhadap peningkatan kebutuhan pelayanan dasar, baik pada sektor kebersihan, pengelolaan kawasan, maupun fasilitas publik lainnya.

Di sisi lingkungan hidup, tantangan keberlanjutan semakin terlihat dari tren penurunan kualitas lingkungan daerah. IKLH yang turun dari 66,45 pada 2020 menjadi 62,25 pada 2023 menjadi indikator penting bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat. Penurunan ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti peningkatan volume sampah, kualitas air permukaan yang menurun, peningkatan emisi dan polusi udara, serta terbatasnya ruang terbuka hijau. Kombinasi antara keterbatasan infrastruktur perkotaan dan degradasi lingkungan hidup menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan Kota Pangkal Pinang belum sepenuhnya mengarah pada prinsip kota tangguh dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penyediaan infrastruktur sumber daya air belum memadai untuk menjamin ketahanan air baku, pengendalian banjir, dan kualitas air lingkungan, sementara sarana pendukung mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, drainase perkotaan, dan infrastruktur proteksi pesisir belum berkembang secara proporsional dengan tingkat risiko bencana yang meningkat. Transformasi digital yang masih berjalan lambat juga berdampak pada efisiensi layanan publik, sistem

informasi infrastruktur, serta pemantauan lingkungan yang belum terintegrasi secara *real time*. Bersamaan dengan itu, pengelolaan lingkungan dan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim masih belum optimal, tercermin dari lemahnya pengawasan, terbatasnya sarana pengendalian pencemaran, serta minimnya infrastruktur hijau yang mampu mereduksi dampak ekologis. Keseluruhan permasalahan ini memperlihatkan urgensi untuk memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi pembangunan agar Kota Pangkal Pinang dapat bergerak menuju kota yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan.

4. **Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia**

Permasalahan belum optimalnya pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkal Pinang semakin terlihat ketika membandingkan kinerja pembangunan manusia dengan kota-kota sekitar. Dengan capaian IPM sebesar 81,64 pada tahun 2025, Pangkal Pinang masih berada pada posisi terendah dibandingkan kota lain di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat berjalan lebih lambat dibandingkan daerah pembanding, sehingga kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah masih cukup lebar. Rendahnya posisi IPM ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya berkembang secara optimal untuk mendorong peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Pada dimensi pendidikan, Pangkal Pinang masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS tahun 2025 yang hanya mencapai 13,5 tahun merupakan yang terendah di antara kota pembanding, mencerminkan keterbatasan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. RLS sebesar 10,9 tahun juga menempatkan Pangkal Pinang pada posisi kedua terendah, menunjukkan bahwa penduduk rata-rata belum menamatkan pendidikan menengah atas secara penuh. Kedua indikator ini menegaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing sumber daya manusia, sehingga berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan terbatasnya peluang ekonomi masyarakat.

5. **Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Permasalahan belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkal Pinang terlihat dari masih tingginya beban sosial ekonomi yang harus ditangani pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan Pangkal Pinang pada tahun 2024–2025 menempatkan kota ini pada peringkat kelima dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi. Posisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi. Tantangan tersebut semakin relevan ketika melihat struktur penduduk rentan yang masih signifikan dan ketergantungan sebagian masyarakat pada sektor informal yang berpendapatan rendah dan tidak stabil.

Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga menjadi masalah krusial yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Gini rasio Kota Pangkal Pinang tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023, menunjukkan semakin lebarnya jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Tingginya ketimpangan ini menggambarkan distribusi hasil pembangunan yang belum merata dan peluang ekonomi yang belum dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi juga berpotensi memicu masalah sosial lainnya seperti kerentanan kelompok miskin, keterbatasan mobilitas sosial, dan penurunan kohesi sosial di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi risiko tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Nilainya berubah cukup signifikan dari 8,97 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 12,95 persen pada 2022, lalu kembali menurun menjadi 8,68 persen pada 2024. Ketidakstabilan ini menjadi indikator bahwa ketahanan pangan rumah tangga miskin dan rentan belum sepenuhnya kuat, dipengaruhi oleh faktor harga pangan, pendapatan rumah tangga, dan keterjangkauan akses pangan yang berkualitas. Kombinasi antara kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan pendapatan yang meningkat, serta konsumsi pangan

yang belum stabil menunjukkan bahwa penanganan permasalahan sosial di Kota Pangkal Pinang masih belum optimal. Hal ini memerlukan intervensi lebih komprehensif melalui perluasan perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta upaya menurunkan ketimpangan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah, maka bisa diidentifikasi permasalahan perurusan pembangunan yang ada di Kota Pangkal Pinang antara lain:

Tabel 2. 54
Permasalahan Per Urusan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang

URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN
Pendidikan	Akses dan kualitas pendidikan belum optimal dalam meningkatkan kompetensi dan pemerataan layanan.
Kesehatan	Mutu layanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat belum sepenuhnya memadai.
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Infrastruktur dasar dan pengelolaan ruang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kota berkembang.
Perumahan & Kawasan Permukiman	Kualitas permukiman dan sistem sanitasi belum memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Ketenteraman & Ketertiban Umum	Kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan ketertiban umum masih rendah.
Sosial	Penanganan kemiskinan, kerentanan sosial, dan ketimpangan belum efektif dan berkelanjutan.
Tenaga Kerja	Penyerapan tenaga kerja belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Partisipasi perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan belum optimal.
Pangan	Sistem ketahanan pangan belum stabil dan belum didukung rantai pasok yang kuat.
Pertanahan	Kepastian hukum dan tata kelola pertanahan belum optimal.
Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran belum efektif.
Adminduk & Catatan Sipil	Layanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya cepat, mudah, dan digital.
Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal dan belum terintegrasi lintas sektor.
Pengendalian Penduduk & KB	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana belum optimal.
Perhubungan	Integrasi transportasi dan minat penggunaan angkutan umum belum berkembang.
Komunikasi & Informatika	Infrastruktur TIK dan literasi digital belum memadai untuk pelayanan modern.
Koperasi & UMKM	Transformasi digital dan daya saing UMKM masih rendah.
Penanaman Modal	Iklim investasi belum cukup menarik akibat proses perizinan dan layanan usaha yang belum efisien.

URUSAN	PERMASALAHAN PER URUSAN
Kepemudaan & Olahraga	Ketersediaan sarana olahraga dan pembinaan kepemudaan belum memadai.
Statistik	Penyediaan dan integrasi data belum mendukung perencanaan berbasis bukti.
Persandian	Keamanan informasi dan sistem siber belum optimal.
Kebudayaan	Pelestarian dan literasi budaya belum berjalan efektif.
Perpustakaan	Layanan perpustakaan dan literasi masyarakat belum berkembang merata.
Kearsipan	Pengelolaan arsip belum tertata dan terdigitalisasi secara optimal.
Perikanan	Pengembangan industri perikanan terbatas oleh kewenangan dan sarana pendukung.
Perindustrian	Pemanfaatan kawasan industri dan kepatuhan pelaku industri masih rendah.
Pariwisata	Promosi dan infrastruktur pariwisata belum memadai untuk menarik kunjungan.
Pertanian	Produktivitas dan dukungan infrastruktur pertanian belum optimal.
Perdagangan	Pengelolaan pasar dan penataan aktivitas perdagangan belum tertib dan efisien.
Perencanaan	Sinkronisasi perencanaan dan penyediaan data lintas sektor belum optimal.
Keuangan	Pengelolaan aset dan tata kelola keuangan belum sepenuhnya efektif dan akuntabel.
Kepegawaian	Kapasitas dan kompetensi aparatur belum merata dan belum adaptif terhadap perubahan.
Litbang	Pemanfaatan riset dan inovasi untuk kebijakan belum optimal.
Pengawasan	Efektivitas pengawasan internal belum konsisten pada seluruh OPD.
Kesekretariatan DPRD	Dukungan administrasi dan fasilitasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.
Sekretariat Daerah	Koordinasi lintas OPD dan efektivitas tata kelola pemerintahan belum optimal.
Kesbangpol	Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat masih rendah
Kewilayahan	Layanan pemerintahan di kecamatan/kelurahan dan mitigasi risiko wilayah belum merata.

2.6.2. Isu Pembangunan Daerah

Isu strategis RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dirumuskan melalui isu internasional, isu nasional (RPJMN 2025-2029), isu strategis daerah (Arahan RPJMN terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KLHS RPJM Daerah).

2.6.2.1. Isu Global

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kota Pangkal Pinang sebagai daerah industri yang berdaya saing global. Berikut penjabaran isu global:

Gambar 2. 72
Isu Global yang Sesuai dengan Kondisi Pangkal Pinang



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. **Geopolitik dan Geoekonomi Global**

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global memberikan dampak langsung terhadap Kota Pangkal Pinang sebagai pusat aktivitas perdagangan, jasa, dan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedekatan geografis Pangkal Pinang dengan jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka menjadikan kota ini sensitif terhadap perubahan kebijakan dagang, fluktuasi nilai tukar, serta kondisi pasokan global terutama bagi sektor industri, logistik, dan kebutuhan pangan. Ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah, misalnya, berpotensi memicu gejolak harga energi dan pangan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan Pangkal Pinang.

Sebagai respons terhadap isu tersebut, Pangkal Pinang memiliki peran strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi kota melalui diversifikasi sumber bahan baku, penguatan pasar ekspor produk khas daerah, serta percepatan efisiensi rantai pasok industri. Pengembangan kawasan industri modern, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta optimalisasi pusat distribusi

dan logistik akan meningkatkan kemampuan Pangkal Pinang dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang integrasi perdagangan internasional. Dengan memposisikan diri sebagai pusat jasa logistik dan perdagangan regional yang terhubung ke pasar global, Pangkal Pinang dapat memperkuat daya saing ekonominya di tengah dinamika geoekonomi global.

2. **Dampak perubahan iklim global**

Sebagai kota pesisir yang sedang berkembang, Pangkal Pinang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim global, seperti kenaikan muka air laut, intensitas curah hujan ekstrem, abrasi pantai, dan risiko banjir yang meningkat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga mengancam operasional sektor industri, kawasan pelabuhan, permukiman pesisir, serta produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pangkal Pinang perlu memperkuat strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir berbasis ekologi, revitalisasi drainase kota, dan penguatan kawasan lindung pantai. Kota juga berperan penting dalam mendorong industri untuk bertransformasi menuju *green industry*, antara lain melalui penggunaan teknologi bersih, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah terpadu. Di samping itu, upaya pengembangan energi terbarukan seperti energi surya dan biomassa serta penataan kawasan industri rendah karbon menjadi peluang bagi Pangkal Pinang untuk meningkatkan daya saingnya sebagai kawasan industri berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan iklim global.

3. **Perkembangan Teknologi Industri 5.0**

Perkembangan teknologi global menuju era Industri 5.0, yang menekankan integrasi kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, robotika, dan otomasi cerdas, menuntut Pangkal Pinang untuk mempercepat transformasi industri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Meskipun skala industri pengolahan di Pangkal Pinang tidak sebesar kota metropolitan, kota ini memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi cerdas dalam sektor jasa, perdagangan, UMKM, dan industri.

Pangkal Pinang dapat memainkan peran penting sebagai pusat pengembangan industri cerdas skala menengah dengan membangun ekosistem inovasi, inkubator UMKM digital, pusat pelatihan teknologi, dan kemitraan riset antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan kawasan industri, sistem logistik, layanan perizinan, dan pemasaran produk akan meningkatkan efisiensi serta mendorong investasi baru. Dengan demikian, Industri 5.0 dapat dijadikan momentum bagi Pangkal Pinang untuk memperkuat daya saing UMKM, ekspansi perdagangan digital, dan menciptakan peluang kerja baru berbasis teknologi.

4. **Pergeseran identitas budaya akibat teknologi informasi**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempercepat arus budaya global, yang di satu sisi membuka peluang bagi masyarakat Pangkal Pinang untuk mengakses informasi dan kreativitas dunia, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terhadap ketahanan budaya lokal. Paparan budaya populer global, perubahan pola interaksi sosial, dan meningkatnya penggunaan platform digital oleh generasi muda berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional dan melemahkan keterikatan terhadap budaya lokal.

Namun demikian, Pangkal Pinang memiliki peran strategis untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian budaya. Pendigitalisasian arsip budaya, promosi seni tradisional melalui media sosial, penguatan event budaya berbasis komunitas, dan integrasi kearifan lokal dalam pendidikan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat. Pemerintah kota juga dapat mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya mulai dari kuliner, seni pertunjukan, *fashion*, hingga kerajinan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi sekaligus memperkokoh identitas Pangkal Pinang di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat, bukan menggantikan, jati diri budaya lokal.

2.6.2.2. Isu Nasional

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya

produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kota Pangkal Pinang. Berikut penjabaran isu strategis nasional:

Gambar 2. 73
Isu Nasional yang Sesuai dengan Kota Pangkal Pinang



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. **Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif**

RPJMN 2025–2029 menempatkan penguatan resiliensi ekonomi nasional sebagai prioritas utama melalui diversifikasi sektor unggulan, peningkatan daya saing industri, dan penguatan konektivitas logistik. Kota Pangkal Pinang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan hilirisasi mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi strategis untuk menopang agenda nasional tersebut. Pangkal Pinang berada pada jalur distribusi regional yang terhubung dengan pusat ekonomi nasional dan internasional, sehingga sangat relevan untuk berperan sebagai simpul logistik dan pusat pertumbuhan baru.

Untuk memanfaatkan peluang ini, Pangkal Pinang perlu memperkuat struktur ekonominya melalui diversifikasi sektor industri, baik di sektor pengolahan berbasis logam maupun sektor jasa modern seperti logistik, teknologi informasi, dan industri kreatif. Pengembangan kawasan industri terpadu serta penguatan infrastruktur pelabuhan dan transportasi akan meningkatkan kemampuan kota dalam menjaga stabilitas pasokan dan menarik investasi. Dengan memperkuat ekosistem usaha dan menghadirkan layanan perizinan yang semakin cepat dan transparan, Pangkal Pinang dapat menjadi

motor pertumbuhan regional sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

2. Potensi sumber daya manusia dan modal manusia

Dalam RPJMN 2025–2029, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor penentu daya saing Indonesia menuju 2045. Kota Pangkal Pinang memiliki potensi SDM yang cukup besar sebagai kota perdagangan dan pusat aktivitas industri daerah. Namun, peningkatan keterampilan, literasi digital, dan kompetensi vokasi menjadi keharusan agar SDM lokal mampu merespons kebutuhan industri masa depan.

Peran Pangkal Pinang sangat strategis dalam mendukung agenda peningkatan modal manusia nasional melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, pelatihan tenaga kerja sektor manufaktur, logistik, industri pangan, serta sektor jasa modern. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memastikan kurikulum vokasi sesuai kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah kota dapat mendorong pembangunan pusat inovasi, pusat pelatihan teknologi, dan inkubator UMKM digital untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM. Dengan memanfaatkan peluang investasi dan memperkuat kemitraan industri, Pangkal Pinang dapat menjadi kota penghasil tenaga kerja terampil yang mendukung kebutuhan industri nasional.

3. Pergeseran struktur kelas masyarakat

RPJMN menyoroti pergeseran struktur kelas masyarakat akibat ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar. Di Pangkal Pinang, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa telah mendorong peningkatan kelas menengah, namun masih terdapat kesenjangan antara pekerja formal dan informal serta antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.

Pangkal Pinang berperan penting dalam mendukung agenda nasional pengurangan ketimpangan melalui perluasan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan. Pemerintah kota juga dapat memperkuat inklusi ekonomi dengan mengembangkan koperasi modern, UMKM berbasis teknologi digital, dan program kewirausahaan yang terhubung dengan pasar regional. Pemerataan pembangunan kawasan industri, sentra ekonomi, dan permukiman perlu

diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, Pangkal Pinang dapat menjadi model kota inklusif yang mendorong mobilitas sosial dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

4. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN. Sebagai kota yang berkembang dan menghadapi arus investasi lintas sektor, Pangkal Pinang dituntut untuk menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Peran strategis Pangkal Pinang dapat diwujudkan melalui penerapan layanan digital pemerintahan *(e-government)*, penyederhanaan proses perizinan, serta penguatan integrasi data dan sistem informasi daerah. Pengembangan layanan perizinan daring, peningkatan kapasitas ASN dalam pengendalian investasi, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi akan memperkuat kepercayaan pelaku industri dan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan akan meningkatkan akuntabilitas. Dengan tata kelola yang semakin efisien, Pangkal Pinang dapat memperkuat posisinya sebagai pusat layanan publik dan investasi yang andal di tingkat nasional.

5. Rendahnya produktivitas

Rendahnya produktivitas menjadi tantangan nasional yang sangat relevan bagi Pangkal Pinang, terutama mengingat ketergantungan daerah terhadap teknologi impor dan kapasitas tenaga kerja yang belum sepenuhnya siap menghadapi Industri 4.0 dan 5.0. Pangkal Pinang memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan industri berbasis teknologi, memperkuat fungsi riset dan inovasi daerah, serta mempercepat adopsi teknologi digital pada rantai pasok logistik, industri pangan, perdagangan, dan UMKM. Pemerintah kota dapat mendorong pembangunan pusat inovasi daerah, penguatan laboratorium teknologi, serta kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan industri. Integrasi sistem digital pada layanan logistik dan kawasan industri juga akan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya produksi, dan menarik investasi bernilai tambah tinggi.

Dengan mempercepat transformasi digital dan pengembangan SDM berkemampuan tinggi, Pangkal Pinang berpotensi menjadi pusat industri yang produktif dan berdaya saing nasional, sekaligus mendukung agenda produktivitas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah Pusat memberikan arahan pembangunan kepada Kota Pangkal Pinang yang mencakup Kawasan Perkotaan Pangkal Pinang serta Kawasan Pengembangan Industri Pangkal Pinang–Sungailiat, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2. 55
Highlight Intervensi RPJMN 2025-2029 terhadap Kota Pangkal Pinang

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	
Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan	• Penyusunan *masterplan* kawasan perkotaan dan rencana tata ruang terpadu
	• Pemenuhan layanan dasar: air minum, limbah, Ruang terbuka hijau (RTH)
	• Pendidikan & pelatihan tenaga kerja terintegrasi ketenagakerjaan
	• Penataan permukiman kumuh terpadu
Pengembangan koridor industri Pangkal Pinang–Sungailiat	Fokus industri prioritas: hilirisasi timah, hilirisasi bauksit, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan & minuman
Hilirisasi timah	• Produk dasar: solder, timah lembaran, *basic alloy*
	• Produk lanjutan: solder premium, paduan timah, material konstruksi, *microchips*, baterai
Hilirisasi bauksit	• Produk dasar: SGA, CGA, *aluminium ingot*
	• Produk lanjutan: *aluminium alloy*, katalis alumina, komposit aluminium, material pesawat
Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam	Modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas logistik, integrasi kawasan industri
Pembangunan rumah murah bersanitasi baik	Rumah murah untuk pekerja, MBR, Gen Z dan milenial di kawasan perkotaan Pangkal Pinang (PHTC)
Preservasi jalan strategis	Ruas Pangkal Pinang–Sungailiat–Muntok dan Pangkal Pinang–Koba–Toboali
Pembangunan SPAM Regional Pangkal Pinang	Penyediaan air minum regional untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	
Pengembangan jaringan transmisi listrik 275 kV	Pembangunan Sistem Jaringan Transmisi 275 kV Muntok–Pangkal Pinang
Pengembangan jaringan transmisi listrik 150 kV	Interkoneksi 150 kV Pangkal Pinang–Koba–Belitung
Pembangunan TPST Regional	TPST Regional Pangkal Pinang–Bangka–Sungailiat
Pengembangan pelabuhan perikanan	Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPN Sungailiat
Pengembangan sekolah menengah unggulan	Sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Pangkal Pinang (PHTC)

Sumber: RPJMN 2025-2029

Dalam mendukung arahan RPJMN 2025–2029, Kota Pangkal Pinang berperan strategis sebagai pusat pengembangan industri, logistik, dan kawasan perkotaan modern di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan perkotaan melalui penyusunan *masterplan* terpadu, peningkatan layanan dasar, penataan permukiman kumuh, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri. Kota ini juga menjadi penggerak utama pengembangan Koridor Industri Pangkal Pinang–Sungailiat, termasuk percepatan hilirisasi timah dan bauksit, mulai dari produk dasar hingga produk teknologi tinggi seperti *microchips*, baterai, komposit aluminium, dan material konstruksi. Selain itu, Pangkal Pinang memiliki peran penting dalam modernisasi Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan rumah murah bersanitasi baik, preservasi jalan strategis, SPAM regional, serta interkoneksi jaringan listrik 150 kV dan 275 kV untuk memperkuat ketahanan energi kawasan. Kota ini juga mendukung pengelolaan sampah regional melalui TPST terpadu, penguatan sentra perikanan melalui PPN Sungailiat, dan peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan sekolah menengah unggulan yang terintegrasi. Secara keseluruhan, Pangkal Pinang menjadi simpul utama yang memastikan keberhasilan agenda hilirisasi industri, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, dan penguatan daya saing regional sesuai arah transformasi pembangunan nasional.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan

Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kota Pangkal Pinang dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen

Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui penerjemahan Asta Cita, prioritas nasional, serta *quick wins* Presiden ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Pangkal Pinang berperan memperkuat ideologi dan ketahanan sosial masyarakat perkotaan, mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi timah dan bauksit, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan perluasan kesempatan kerja berkualitas. Kota ini juga menjadi simpul penting dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan ibu-anak, pendidikan vokasi unggulan, penyediaan rumah layak bersanitasi baik, pemenuhan air minum, serta peningkatan jaminan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, Pangkal Pinang berkontribusi dalam percepatan transformasi digital, peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan, penguatan pertahanan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur energi dan logistik, serta pelestarian lingkungan dan budaya Melayu sebagai identitas kota. Melalui perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan motor pembangunan kawasan, Pangkal Pinang diharapkan mampu menyelaraskan pembangunan lokal dengan agenda nasional sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

2.6.2.3. Isu Strategis Daerah

1. **Telaah RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029**

Dalam dokumen RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis Provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah antara lain:

1. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
2. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau ditopang dengan hilirisasi sektor primer
5. Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan daya saing wilayah
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas

Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025-2029 adalah: **"Babel Berdaya 2029 "Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera"** dengan didukung 3 misi sebagai berikut:

1. Misi 1, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara merata dan berbudaya dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
2. Misi 2, Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akutabel.
3. Misi 3, Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumberdaya berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan RPJM Daerah Provinsi Bangka Belitung 2025-2029 terdapat arah kebijakan kewilayahan untuk Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

Tabel 2. 56
Lokasi Prioritas dan Intervensi Kebijakan Kota Pangkal Pinang

Penguatan perdagangan, jasa, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	1. Membangun jaringan dan kemitraan yang kuat antara UMKM, pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM
	2. Menyediakan akses ke informasi pasar, teknologi, pemodalan, dan regulasi yang relevan untuk meningkatkan daya saing UMKM
	3. Mendorong terciptanya usaha baru disektor industri kreatif dan ekonomi digital

Sumber : RPJM Daerah Provinsi Babel 2025-2029

Sebagai pusat pemerintahan dan simpul aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang memiliki peranan strategis dalam penguatan sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pangkal Pinang menjadi motor utama dalam membangun jejaring kemitraan antara UMKM, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta pelaku industri kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing. Kota ini berperan menyediakan berbagai fasilitas peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk akses terhadap informasi pasar, teknologi terbaru, pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan regulasi untuk memperkuat keberlanjutan usaha. Selain itu, Pangkal Pinang berfungsi sebagai inkubator pengembangan usaha baru, terutama pada sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui penyediaan ruang kreativitas, ekosistem inovasi, serta percepatan digitalisasi UMKM. Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan, dan ekosistem usaha yang kondusif, Pangkal Pinang diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital yang dinamis dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah.

2. Telaah RPJPD Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD 2025–2045. RPJPD menjadi pedoman utama yang memuat visi 20 tahun, misi pembangunan, isu strategis jangka panjang, serta tema dan arah kebijakan makro

yang harus dijabarkan secara lebih operasional dalam RPJM Daerah. Oleh karena itu, RPJM Daerah 2025–2029 perlu menelaah secara komprehensif seluruh muatan RPJPD agar pembangunan pada periode lima tahun pertama ini mampu meletakkan fondasi kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang daerah. Adapun isu strategis RPJPD sebagai berikut:

1. Bonus Demografi dan Pemanfaatannya untuk Akselerasi Pembangunan: Bonus demografi menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Pangkal Pinang sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan untuk menghasilkan generasi produktif yang mampu mendukung percepatan pembangunan jangka panjang.
2. Pengentasan Kemiskinan Struktural di Wilayah Perkotaan: Kemiskinan struktural masih menjadi persoalan kompleks yang terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, permukiman layak, serta kesenjangan sosial sehingga memerlukan strategi terintegrasi dan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan.
3. Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan Menuju Transformasi Ekonomi Inklusif: Ketergantungan pada sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi perlu ditransformasikan menjadi ekonomi yang lebih beragam, berkelanjutan, dan bernilai tambah melalui hilirisasi, digitalisasi, dan pemanfaatan energi terbarukan serta inovasi teknologi.
4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TIK: Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan melalui penerapan e-governance dan digitalisasi layanan agar lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif sesuai tuntutan masyarakat modern.
5. Penguatan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah: Supremasi hukum yang kuat dan stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pembangunan daerah.
6. Potensi Tergerusnya Kebudayaan Lokal di Era Globalisasi: Arus globalisasi dan penetrasi teknologi informasi berpotensi melemahkan identitas budaya Melayu Pangkal Pinang sehingga pelestarian nilai budaya lokal, penguatan karakter masyarakat, dan revitalisasi seni budaya menjadi penting untuk dijaga.
7. Implementasi Pembangunan yang Ramah Lingkungan: Pertumbuhan kota menimbulkan tekanan terhadap lingkungan sehingga diperlukan

pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengendalian polusi, penggunaan energi bersih, konservasi lahan, dan penataan ruang berkelanjutan.

8. Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah: Ancaman perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan tekanan industrialisasi menuntut Pangkal Pinang menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi lokal, diversifikasi pangan, dan penguatan sistem distribusi serta cadangan pangan daerah.

RPJPD Kota Pangkal Pinang 2025–2045 menetapkan arah pembangunan jangka panjang dengan visi **"Pangkal Pinang Berkelas 2045: Berdaya Saing, Berkelanjutan, Maju, dan Sejahtera"**. Visi ini menggambarkan komitmen daerah untuk membangun pusat pertumbuhan yang modern, inklusif, berdaya saing global, namun tetap berpijak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJPD menetapkan lima misi strategis: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; memperkuat transformasi ekonomi yang tumbuh, kreatif, dan inklusif; membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani; mewujudkan daerah yang taat hukum, demokratis, serta stabil secara ekonomi makro; dan memperkokoh ketahanan sosial budaya serta ekologi berbasis kearifan lokal.

Dalam kerangka tersebut, RPJM Daerah 2025–2029 memegang peran sebagai fase awal pembangunan jangka panjang, dengan tema pembangunan "Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan". Arah kebijakan RPJPD 2025-2029:

1. Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja.
3. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
4. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang damai dan demokratis.
5. Pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup.

Dengan menjadikan visi, misi, tema, dan arah kebijakan RPJPD sebagai dasar, RPJM Daerah 2025–2029 disusun untuk memastikan seluruh program dan

prioritas pembangunan Kota Pangkal Pinang pada periode lima tahun ini benar-benar meletakkan fondasi kuat bagi terwujudnya Pangkal Pinang Berkelas 2045 sebuah kota yang maju, berdaya saing, harmonis secara sosial budaya, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3. Telaah RTRW

Pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2045. Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Pangkal Pinang sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan konsep kota tepi air yang berwawasan lingkungan.

Rumusan RTRW Kota Pangkal Pinang memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:

Tabel 2. 57
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang

KEBIJAKAN	STRATEGI
(1) Peningkatan kualitas pusat pelayanan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi sebagai PKN	a. menetapkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan;
	b. optimalisasi fungsi pusat pelayanan yang sudah ada;
	c. mendorong berfungsinya pusat pelayanan baru;
	d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dengan kawasan sekitarnya; dan
	e. mengendalikan pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.
(2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana	a. meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan sistem jaringan prasarana secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
	b. menetapkan status dan fungsi jaringan jalan;
	c. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
	d. meningkatkan layanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan; dan
	e. mengembangkan sistem jaringan prasarana ramah lingkungan.
(3) Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	a. menyediakan, memanfaatkan, dan mempertahankan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen secara merata di seluruh wilayah Kota;

KEBIJAKAN	STRATEGI
	b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
	c. menetapkan kriteria dan batas kawasan lindung serta kriteria kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
	d. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
	e. menetapkan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
	f. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung.
(4) Peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mewujudkan kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	a. mengembangkan kegiatan ekonomi terutama sektor unggulan yang berdaya saing dan seimbang dengan daerah dan/atau negara lain;
	b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional dan internasional;
	c. mengembangkan daya tarik destinasi dan kawasan pariwisata berbasis kearifan lokal;
	d. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan yang berorientasi pasar internasional;
	e. mengembangkan kawasan permukiman dan kawasan perkantoran yang nyaman dan layak huni;
	f. mengembangkan kawasan transportasi sebagai pendukung dan penghubung wilayah Kota dengan wilayah lain;
	g. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan untuk mendukung dan menjamin stabilitas keamanan wilayah Kota;
	h. menetapkan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta sosial dan budaya; dan
	i. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sesuai peruntukannya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(5) Pengembangan konsep Kota Tepi Air dan Kota Spons berwawasan lingkungan	a. normalisasi perairan sebagai ruang terbuka biru;
	b. mempertahankan, mengembangkan, dan memanfaatkan ruang publik di tepi perairan;
	c. optimalisasi potensi perairan;

KEBIJAKAN	STRATEGI
	d. mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah untuk pengendalian banjir dan konservasi air; dan
	e. mengarahkan pembangunan Kota menjadi berorientasi perairan.

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Rencana struktur ruang wilayah Kota Pangkal Pinang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhiraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

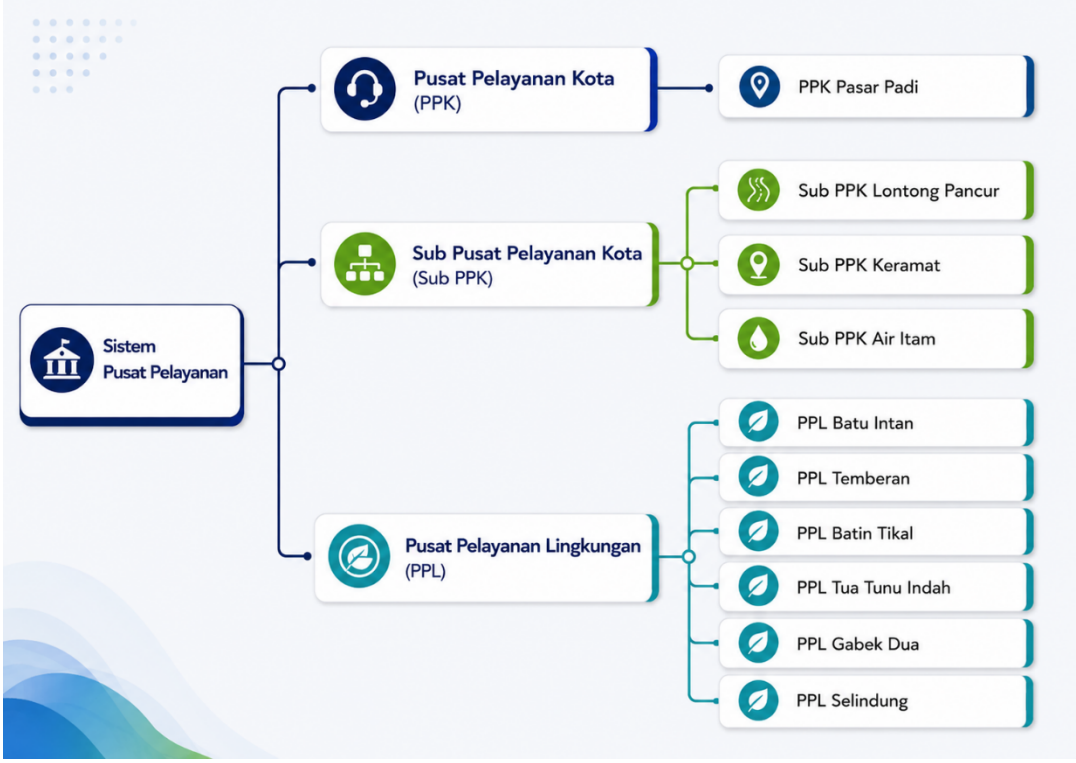
1. Sistem pusat pelayanan Kota Pangkal Pinang, meliputi :
   a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) terletak di Kawasan Pasar Ratu Tunggal dan sekitarnya, yaitu PPK Pasar Padi di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya, dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan ini sudah dikenal luas di masyarakat sebagai pusat aktivitas dari Kota Pangkal Pinang.
2. Sub PPK terdiri atas :
   1) Sub PPK Lontong Pancur di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam, yaitu kawasan sekitar Pelabuhan Pangkalbalam yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam dengan fungsi utama sebagai kawasan pelabuhan serta kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian timur laut;
   2) Sub PPK Keramat di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, yaitu kawasan sekitar Terminal Kampung Kramat dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang melayani sebagian wilayah Kota bagian barat daya;dan
   3) Sub PPK Air Itam di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, yaitu kawasan sekitar Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang melayani sebagian wilayah Kota bagian tenggara.

b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas :

   1) PPL Batu Intan di Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya;
   2) PPL Temberan di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan;
   3) PPL Batin Tikal di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari;

4) PPL Tua Tunu Indah di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang;
5) PPL Gabek Dua di Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek; dan
6) PPL Selindung di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek.

Gambar 2. 74
Sistem Pusat Pelayanan Kota Pangkal Pinang



Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Gambar 2. 75
Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota Pangkal Pinang



Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

3. Rencana Sistem jaringan transportasi kota meliputi:
   a. Sistem Jaringan Jalan;dan
   b. Sistem Jaringan Transportasi laut.
4. Rencana Sistem Jaringan Energi meliputi:
   a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;dan
   b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
5. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak.
6. Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air.
7. Infrastruktur perkotaan meliputi :
   a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   d. sistem jaringan persampahan;
   e. sistem jaringan evakuasi bencana;
   f. sistem drainase; dan
   g. jaringan pejalan kaki.

Gambar 2. 76
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pangkal Pinang

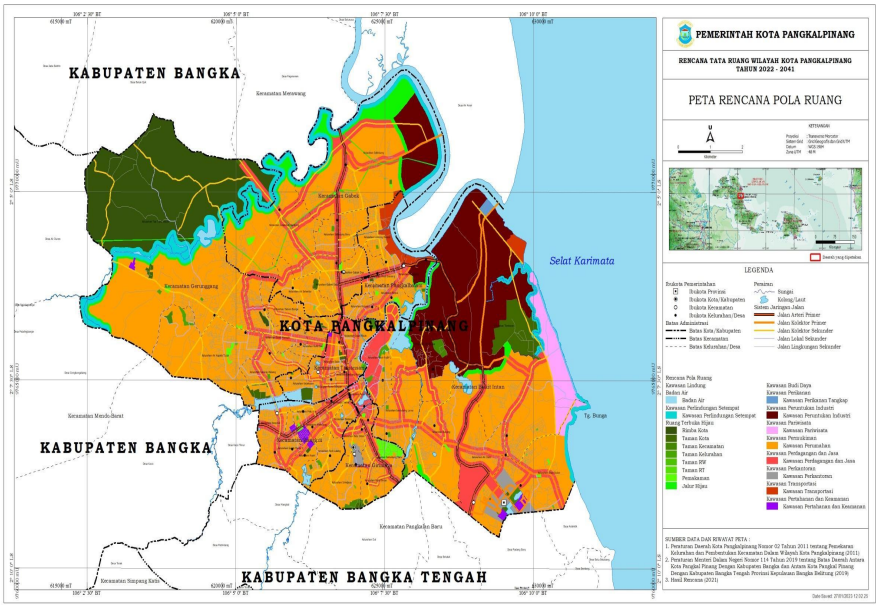


Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Rencana pola ruang wilayah Kota Pangkal Pinang merupakan pengaturan distribusi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam suatu wilayah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, meliputi :

1. Rencana kawasan lindung meliputi:
    a. Badan Air;
    b. Kawasan Perlindungan Setempat;
    c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
    d. Kawasan Cagar Budaya;dan
    e. Kawasan Ekosistem Mangrove.
2. Rencana kawasan budidaya terdiri atas :
    a. Kawasan Perikanan;
    b. Kawasan Peruntukan Industri;
    c. Kawasan Pariwisata;
    d. Kawasan Permukiman;
    e. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
    f. Kawasan Perkantoran;
    g. Kawasan Transportasi;dan
    h. Pertahanan dan Keamanan.

Gambar 2. 77
Peta Rencana Pola Ruang Kota Pangkal Pinang

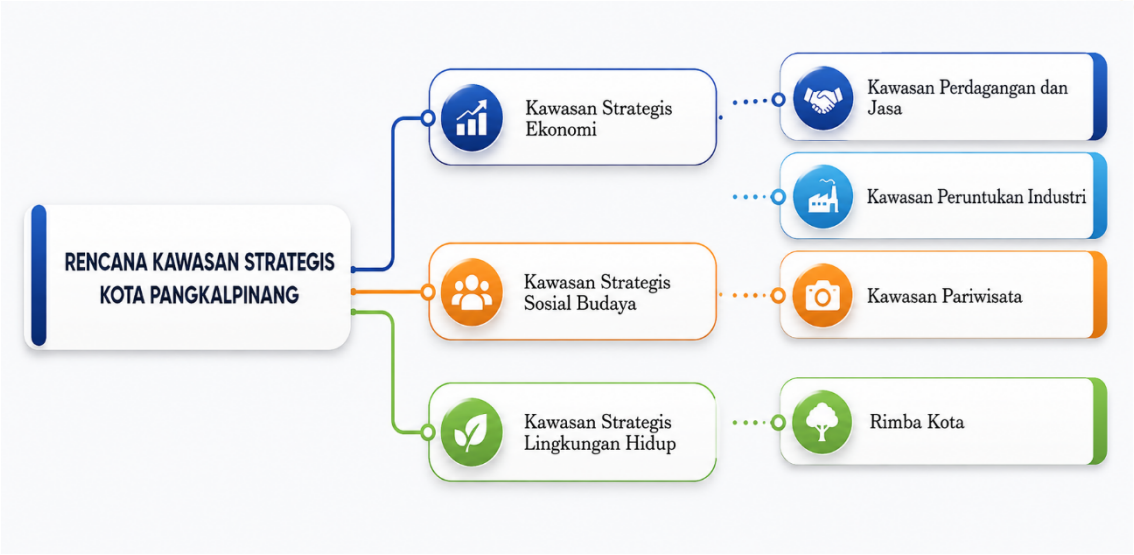


Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Rencana penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK) adalah pengaturan wilayah tertentu yang memiliki kepentingan khusus bagi kota, seperti ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan, untuk mendorong pembangunan terarah dan berdaya saing. KSK Pangkal Pinang terdiri atas :

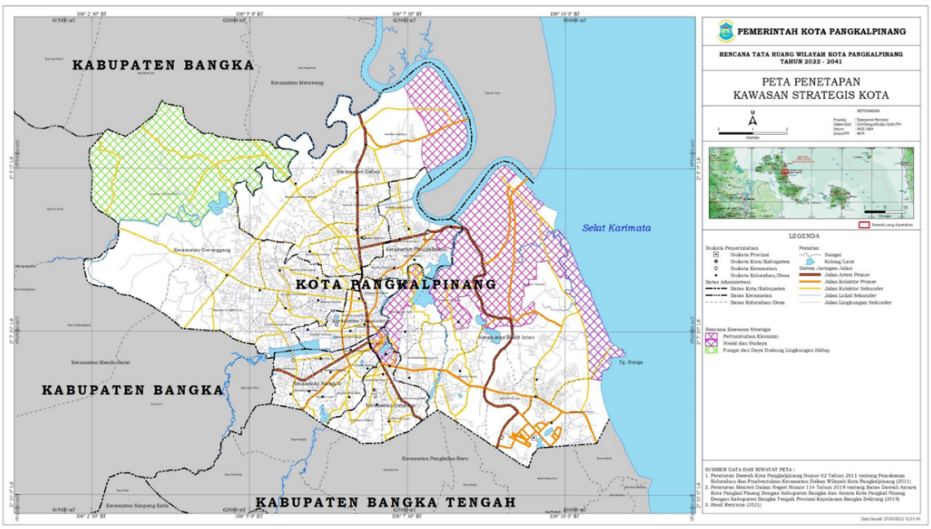
1. KSK Pertumbuhan Ekonomi meliputi :
    a. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
    b. Kawasan Peruntukan Industri.
2. KSK Sosial Budaya meliputi Kawasan Pariwisata.
3. KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi Rimba Kota.

Gambar 2. 78
Bagan Rencana KSK Pangkal Pinang



Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Gambar 2. 79
Peta Penetapan KSK Pangkal Pinang



Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

4. Telaah KLHS RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang

Perumusan isu strategis di dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 dilakukan melalui integrasi penuh dengan KLHS sebagai instrumen pembangunan dan lingkungan berkelanjutan. Proses identifikasi dilakukan melalui desk *review* terhadap dokumen perencanaan,

analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Forum Group Discussion bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta analisis karakteristik wilayah meliputi daya dukung–daya tampung, kondisi sosial-ekonomi, ekologi, serta tata kelola pemerintahan.

Berikut adalah rumusan isu strategis prioritas KLHS Kota Pangkal Pinang:

1) Kuantitas dan Kualitas Air Tanah

Masih rendahnya cakupan layanan penyediaan air bersih oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat memanfaatkan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Alternatif tersebut ditempuh masyarakat karena kualitas fisik dan kimia air permukaan seperti sungai dan kolong sudah buruk sudah tidak layak lagi sebagai sumber air minum. Air minum dari air tanah relatif lebih terlindung sehingga pencemarannya rendah.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan tercemarnya air tanah karena apabila banyak lubang di dalam tanah yang terbentuk akan memudahkan interusi air laut. Selain itu, air limbah yang ada di permukaan tanah atau air dari septic tank dapat meresap dan mencemari air sumur dalam. Potensi penurunan kuantitas air tanah akibat pemanfaatan air tanah yang berlebihan juga disebabkan tidak adanya Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Pangkal Pinang.

Berdasarkan distribusi jasa lingkungan penyediaan air jasa penyediaan air kelas sangat rendah (4,24%), rendah (58,85%) dan kelas sedang (32,63%). beberapa usaha penyediaan air bersih yang bergantung pada penampungan air hujan pada media kulong bekas tambang sebagai persediaan air sebelum diolah lebih lanjut. Jasa penyediaan air kelas rendah dan sangat rendah cenderung didominasi penutup lahan berupa bangunan permukiman kota, semak belukar, dan lahan terbuka lain yang cenderung tidak memiliki tutupan vegetasi dan tidak dapat menyerap ataupun menyimpan air dengan baik.

2) Alih Fungsi Lahan

Perubahan nilai Indeks Tutupan Lahan Kota Pangkal Pinang disebabkan beberapa faktor, diantaranya alih fungsi lahan lindung, berkurangnya tutupan hutan, meningkatnya luasan lahan permukiman. Setiap tahunnya, tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor krusial yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan ruang terbuka hijau.

RTH dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Dalam konteks daerah perkotaan maupun pinggiran kota, lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis, seperti taman kota, sempadan sungai, dan kawasan hutan kota, sering kali dikonversi menjadi lahan permukiman, perdagangan, maupun pertanian intensif. Hal ini terjadi karena lahan tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memberikan manfaat langsung dalam bentuk pendapatan atau investasi. Kawasan RTH, khususnya yang ditetapkan sebagai ruang lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai, hutan kota, dan taman ekologis, memiliki fungsi penting sebagai area resapan air yang membantu mengurangi limpasan permukaan dan mencegah terjadinya banjir. Ketika kawasan-kawasan ini dikonversi menjadi lahan budidaya—baik untuk permukiman, perdagangan, atau pertanian intensif—daya serap air menurun drastis karena meningkatnya permukaan kedap air. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko banjir, genangan, kekeringan musiman, serta berkurangnya cadangan air tanah

3) Kualitas Udara

Nilai emisi GRK dari sektor industri tahun 2010 ke 2020 menurun dari 70.962 ton CO2 menjadi 53.044 ton CO2 (± 25%) sedangkan emisi dari sektor transportasi dalam jangka waktu 10 tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 59.891 ton CO2 menjadi 197.062 (± 200%).

Proses dekomposisi anaerobik sampah organik di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dapat menjadi factor lain sebagai penyumbang polutan berupa gas metan (CH4), yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca. Scara teoritis, setiap y setiap kilogram sampah dapat memproduksi 0,5 m3 gas metan. Pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat di pemukiman, maupun di TPS atau TPA dapat menghasilkan emisi pembakaran, terutama gas CO2 dan NO2. Meskipun demikian, sumbangan faktor ini tidak terlalu besar. Nilai emisi GRK tahun 2010 – 2020 terus mengalami kenaikan terutama di sektor energi yang berasal dari aktivitas transportasi dan sektor limbah yang berasal dari peningkatkan produksi sampah di TPA

4) Tata Kelola Pengolahan Sampah dan Limbah B3

Peningkatan volume sampah setiap tahun namun tidak didukung oleh kemampuan lahan Tempat Penampungan Akhir (TPA) Parit 6. Adapun

56 persen merupakan sampah sisa makanan. Luas efektif lahan TPA Kota Pangkal Pinang sebesar ± 2,5 ha atau seluas 25.000 m2. Dalam memproyeksikan jumlah timbulan sampah Kota Pangkal Pinang dengan jumlah penduduk yaitu 239.730 jiwa, maka potensi timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 167 ton/hari atau sebesar 60.955 ton/tahun. Jika ketinggian volume sampah di TPA setinggi 1 m, maka volume sampah yang dapat terakomodir di Tempat Penampungan Akhir (TPA) sebesar 38.097 m2 konversi 3,81 Ha.

Penampungan Akhir (TPA) mencapai ± 6,54 m. Jika proses pengolahan sampah berjalan efektif (mulai dari sumber penghasil), pelapukan dan pemilahan sampah dengan tingkat efisiensi pelapukan 30% dan pemilahan 10% maka, ketinggian sampah eksisting yang didapatkan di TPA dengan timbulan sampah sebesar 148 ton/hari atau sebesar 54.020 ton/tahun setinggi ± 2,6 m. Potensi ketinggian volume sampah di TPA ini dapat menjadi dasar kebutuhan akan lahan baru bagi TPA, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengolahan sampah di mulai dari sumbernya

5) Risiko Bencana Alam

Adanya aktivitas penambangan ilegal dan pembuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Sedimen dari sisa hasil penambangan akan meningkatkan kadar *Total Suspended Solid* (TSS) dalam sungai. TSS ini akan mengendap di dasar sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan mengurangi kapasitas tampung sungai untuk menampung air hujan.

Berkurangnya kapasitas tampung sungai ini berdampak pada peningkatan kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang Akumulasi sedimen ini secara bertahap menurunkan kedalaman sungai, sehingga menurunkan kapasitas tampung aliran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, teridentifikasi sebanyak 12 kelurahan masuk ke dalam kategori tingkat urgensi banjir sangat tinggi, yaitu Kelurahan Ketapang, Gabek Dua, Gabek Satu, Air Salemba, Bukit Merapin, Kacang Pedang, Kejaksaan, Rawa Bangun, Gajah Mada, Masjid Jamik, Pasar Padi, Gedung Nasional, dan Opas Indah. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 28,57 % dari total kelurahan di Kota Pangkal Pinang memiliki risiko banjir yang cukup tinggi di masa mendatang. Selain itu,

berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui sebagian besar kelurahan di Kota Pangkal Pinang berada pada tingkat urgensi tinggi jika terjadi banjir, yaitu sebesar 45,24 % atau sejumlah 19 (sembilan belas) dari total 42 kelurahan. Di sisi lain, hanya terdapat 1 (satu) kelurahan dengan tingkat urgensi banjir berkategori sangat rendah, yaitu Kelurahan Selindung.

6) Kerusakan Ekosistem

Kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat perubahan struktur dan fungsi ekosistem sehingga tidak mampu lagi mendukung kehidupan secara seimbang. Isu ini menjadi salah satu masalah lingkungan global karena berdampak langsung pada keanekaragaman hayati, iklim, serta kehidupan manusia. Deforestasi hutan mangrove yang mengganggu habitat biota air sehingga mengakibatkan berkurangnya plasma nutfah dan stock benih ikan air payau seperti kepiting bakau dapat mengakibatkan menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan melalui media informasi (Bangka Pos.com, 20 April 2020) dari 491,36 hektar hutan mangrove di Kota Pangkal Pinang, sekitar 167,29 hektar diantaranya dalam kondisi rusak parah. Kerusakan terparah dipicu adanya aktivitas pembukaan lahan dan tambang ilegal.

Kerusakan ekosistem paling nyata adalah kerusakan pada ekosistem sungai. Penurunan kualitas air permukaan yang disebabkan oleh berbagai faktor maka akan mempengaruhi berbagai faktor pembatas dari suatu ekosistem perairan. Seperti perubahan suhu air, pH air, perubahan kadar DO yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan biota air, perubahan kadar BOD, COD dan lain-lain akan berdampak pada keseimbangan laju kehidupan biota yaitu terganggunya kemampuan dalam melakukan respirasi dan metabolisme sehingga akan menyebabkan penurunan kemampuan dalam berkembang biak. Penurunan kemampuan ini menyebabkan penurunan tingkat keragaman dan keanekaragaman biota perairan tersebut. Salah satunya adalah semakin sedikitnya tingkat keanekaragaman jumlah ikan pada Sungai di Kota Pangkal Pinang.

7) Stabilitas Ekonomi di Wilayah yang Rendah

Pada tahun 2020, hampir semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif yang mana hal ini terdampak dari pandemi covid-19. Namun, pada tahun 2021 menunjukkan terjadi kenaikan

pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada sektor industri pengolahan sebesar 29,4 Persen penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,40 Persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 15 Persen. Pada periode tahun 2022 perekonomian ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,16 Persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,91 Persen dan sektor jasa perusahaan sebesar 10,31 Persen. Laju pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2022 mengalami pelambatan yakni menjadi 6,21 Persen dibanding tahun sebelumnya yakni 9,27 Persen

8) Inkonsistensi Ruang

Berkolerasi dengan alih fungsi lahan

2.6.3. Perumusan Isu Strategis Kota Pangkal Pinang

Berdasarkan isu-isu sebelumnya maka dapat dirumuskan isu strategis Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

1. **Stabilisasi harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat**

Stabilisasi harga kebutuhan pokok merupakan isu strategis penting bagi Pangkal Pinang mengingat fluktuasi harga pangan dan komoditas dapat langsung melemahkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kota perlu memperkuat sistem distribusi pangan, meningkatkan ketersediaan pasokan melalui kerja sama lintas daerah, serta memperluas intervensi stabilisasi harga seperti operasi pasar, subsidi ongkos distribusi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga secara *real time*. Upaya memastikan akses pangan yang merata dan terjangkau menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga dan mencegah meningkatnya kerentanan sosial.

2. **Ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas**

Ketersediaan lapangan kerja yang layak menjadi kebutuhan mendesak bagi Pangkal Pinang untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kota perlu memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor potensial, mendorong investasi, memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sistem ketenagakerjaan yang inklusif akan memberi peluang bagi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas—akan memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan angkatan kerja yang produktif dan adaptif.

3. **Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat**

Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi prioritas strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Kota Pangkal Pinang perlu memperluas akses layanan kesehatan primer melalui peningkatan puskesmas, memperkuat fasilitas kesehatan tingkat rujukan, serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Selain itu, pembiayaan kesehatan yang adil dan berkelanjutan harus dijamin melalui integrasi program jaminan kesehatan serta penguatan layanan promotif dan preventif. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

4. **Penanggulangan permasalahan lingkungan hidup**

Pengelolaan sampah yang belum optimal dan ancaman banjir akibat intensitas hujan tinggi, alih fungsi lahan, serta kapasitas drainase yang terbatas menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kota Pangkal Pinang perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, meningkatkan kapasitas infrastruktur persampahan, dan mendorong pengurangan sampah dari sumber. Pengendalian banjir melalui normalisasi sungai, rehabilitasi drainase, dan pengembangan ruang terbuka hijau menjadi langkah kunci untuk menjaga kualitas lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ruang kota.

5. **Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar perkotaan**

Kesenjangan infrastruktur dasar masih dirasakan masyarakat, terutama terkait jalan lingkungan, drainase, penerangan, dan fasilitas umum. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat menentukan kenyamanan hidup warga dan mobilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan kawasan. Penguatan konektivitas antarwilayah akan mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan.

6. **Penguatan dan pemberdayaan sektor UMKM**

UMKM merupakan pilar perekonomian Kota Pangkal Pinang yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dan ketahanan usaha yang kuat. Penguatan UMKM perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan, peningkatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, serta penguatan rantai nilai produk lokal. Pemberdayaan UMKM akan menciptakan struktur ekonomi kota yang lebih inklusif dan mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi.

7. **Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**

Tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi merupakan fondasi utama peningkatan kualitas layanan publik. Kota Pangkal Pinang perlu mengembangkan layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi melalui digitalisasi administrasi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan kapasitas aparatur. Orientasi pada kepuasan masyarakat harus menjadi titik pusat reformasi pelayanan publik agar kualitas layanan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

8. **Penguatan kualitas sumber daya manusia**

Peningkatan kualitas SDM merupakan syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Akses pendidikan harus diperluas, kompetensi tenaga kerja terus ditingkatkan, dan karakter generasi muda harus dibentuk agar memiliki wawasan global namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Peningkatan kualitas SDM juga terkait erat dengan inovasi, digitalisasi, dan pengembangan talenta muda di berbagai bidang.

9. **Optimalisasi potensi ekonomi daerah**

Pangkal Pinang memiliki potensi ekonomi besar di sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru. Optimalisasi potensi ini memerlukan percepatan investasi, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan ekosistem usaha, serta diversifikasi kegiatan produktif. Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi biru akan membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat struktur ekonomi kota agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

Perumusan isu strategis dalam RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber informasi secara bertahap dan saling melengkapi. Proses ini dimulai dari melihat potensi yang dimiliki daerah, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pembangunan. Setelah itu, hasil KLHS digunakan untuk memastikan bahwa isu lingkungan, daya dukung, dan risiko bencana ikut dipertimbangkan. Proses ini juga memperhatikan isu global seperti perubahan iklim dan perkembangan teknologi, isu nasional yang berasal dari RPJMN, serta isu regional dari arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua informasi tersebut kemudian terangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 58
Rumusan Isu Strategis RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
• Memiliki posisi geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa • Didukung oleh pelabuhan sebagai pintu masuk logistik dan perdagangan antarwilayah. • Pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan akomodasi menunjukkan struktur ekonomi modern berbasis jasa. • Potensi pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata pesisir, dan jasa maritim.	Belum optimalnya transformasi dan daya saing ekonomi daerah	Stabilitas ekonomi wilayah yang rendah	Geopolitik dan Geoekonomi Global	• Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif • Rendahnya Produktivitas	• Dominasi ekonomi pada sektor primer dengan nilai tambah yang masih rendah dan rentan fluktuasi pasar global • Diversifikasi dan hilirisasi belum optimal	• Stabilisasi harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat • Ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas • Penguatan dan pemberdayaan sektor UMKM • Optimalisasi potensi ekonomi daerah

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
• Posisi Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi membuka peluang penerapan digitalisasi pelayanan publik lebih cepat. • Ketersediaan infrastruktur pemerintahan dan jaringan kelembagaan yang relatif lengkap. • Peluang besar untuk memperkuat kolaborasi pusat–provinsi–daerah karena status kota inti pelayanan.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pelayanan		Perkembangan teknologi industri 5.0	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
• Kondisi topografi yang dominan datar, sangat mendukung pengembangan permukiman, jaringan jalan, dan infrastruktur kota. • Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan nasional–	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Alih fungsi lahan Inkonsistensi ruang			• Kesenjangan infrastruktur dan infrastruktur belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar perkotaan

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
provinsi, akses listrik yang terus meningkat, serta jaringan air minum yang menjangkau hampir semua rumah tangga.					• Infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas	
• Memiliki kawasan rimba kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH sekaligus benteng ekologis kota. • Adanya ekosistem pesisir dan mangrove yang dapat diperkuat sebagai destinasi ekowisata dan pelindung abrasi. • Terdapat kolong-kolong bekas tambang yang berpotensi menjadi sumber air baku atau wisata air setelah direstorasi		Rendahnya ketersediaan (kuantitas) dan kualitas air bersih Penurunan kualitas udara Belum optimalnya tata kelola dan pengolahan sampah dan limbah B3 Tingkat risiko bencana alam terutama akibat perubahan iklim Kerusakan ekosistem	Dampak Perubahan Iklim Global		• Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana • Tingginya kerentanan dan potensi bencana	Penanggulangan permasalahan lingkungan hidup

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
• Tersedia fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan sehingga mendukung kualitas SDM jangka panjang. • Potensi peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk kebutuhan industri, perdagangan, dan ekonomi digital.	Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia		Pergeseran Identitas Budaya akibat Teknologi Informasi	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	• Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/talent drain • Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih rendah • Prevalensi stunting masih relatif tinggi	• Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat • Penguatan kualitas sumber daya manusia
• Stabilitas sosial dan ekonomi mendukung terciptanya berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.	Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat			Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi dengan rata-rata 9 persen	Peningkatan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan berkeadilan



source:
dwindapratama

03
VISI MISI

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

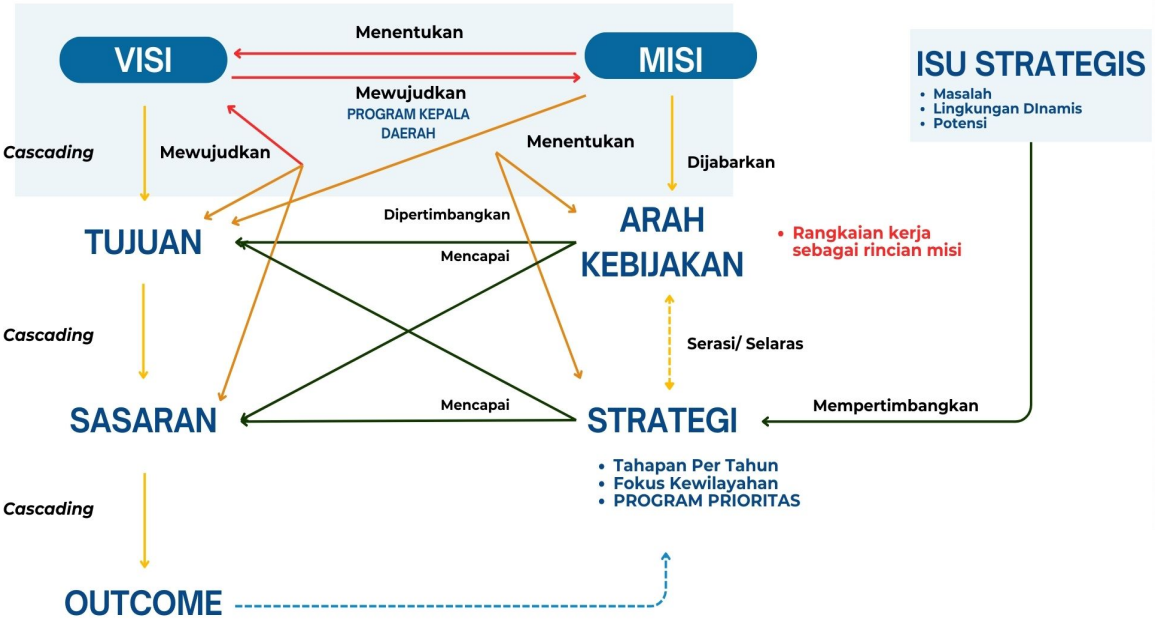
3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara optimal. Visi dan misi ini merupakan mandat dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2030, Prof. H. Saparudin, Ph.D dan Dessy Ayutrisna, S.E.,M.M, yang berpijak pada sektor-sektor unggulan daerah. Dalam konteks ekonomi, Pangkal Pinang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang menyerap sebagian besar tenaga kerja. Fondasi ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat yang multikultural dan harmonis; komunitas Melayu, Tionghoa, dan berbagai etnis nusantara lainnya hidup berdampingan membentuk modal sosial yang inklusif dan kuat.

Sebagai ibu kota provinsi, Pangkal Pinang mengemban lima fungsi utama dalam struktur pengembangan wilayah Bangka Belitung: (1) pusat pemerintahan dan permukiman penduduk; (2) pusat perdagangan dan industri; (3) pusat pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan; (4) pusat administrasi pertambangan timah; serta (5) pusat aktivitas lembaga keuangan. Peran ini menjadikan Pangkal Pinang sebagai simpul integrasi antara birokrasi, ekonomi, sosial, dan sumber daya strategis daerah. Dengan memahami peran tersebut, dibutuhkan penyusunan kerangka pembangunan yang tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Kerangka ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan dalam RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi serta misi kepala daerah yang mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai selama masa kepemimpinan. Sementara itu, sasaran merupakan rincian dari tujuan yang bersifat terukur, sehingga kemajuan kinerja dapat dipantau dari tahun ke tahun dan pada akhir periode perencanaan. Sasaran ini menjadi panduan operasional agar proses pembangunan berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan demikian, RPJM Daerah berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh pemangku kepentingan menuju capaian pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Gambar 3. 1
Konsep RPJM Daerah



Sumber: *Inmendagri 2, 2025*

3.1.1. VISI

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, di mana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJM Daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Penentuan visi pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang di Kota Pangkal Pinang. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan Kota Pangkal Pinang dilakukan secara transformatif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Untuk periode 2025–2029, arah pembangunan daerah telah dirumuskan melalui visi:

PANGKAL PINANG SMART
(Seimbang, Mapan,* Amanah*, Rukun, Tangguh)

Visi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata, pengembangan kapasitas SDM, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Secara *etimologis*, kata SMART dalam frasa Pangkal Pinang SMART berasal dari bahasa

Inggris yang berarti cerdas, tangkas, dan bijak. Dalam konteks visi pembangunan, frasa ini dimaknai sebagai kerangka nilai (*value framework*) sekaligus arah strategis pembangunan kota yang dijalankan selama lima tahun ke depan. SMART mencerminkan orientasi kepemimpinan yang adaptif, progresif, dan visioner dalam menjawab dinamika zaman serta tantangan masa depan secara terukur dan inklusif.

Secara terminologis, **SMART** merupakan akronim dari **Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh**, yang merepresentasikan arah pembangunan Kota Pangkal Pinang yang berpijak pada semangat lokal, namun sejalan dengan transformasi pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Dengan demikian, Pangkal Pinang SMART adalah gerakan kolaboratif untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah. Visi ini mengajak seluruh pelaku pembangunan, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk bergerak bersama dalam semangat gotong royong, inovasi, dan sinergi demi mewujudkan Pangkal Pinang yang lebih maju dan sejahtera bagi generasi kini dan mendatang.

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi kelanjutan teknokratis dari visi pembangunan sebelumnya, tetapi juga sebagai pedoman merajut harapan. Di balik setiap jalan yang diperbaiki, setiap anak yang sekolah, dan setiap warga yang tersenyum karena pelayanannya lebih mudah, di sanalah cita-cita Pangkal Pinang SMART ini hidup. Inilah lima pilar harapan atau pokok visi yang menjadi arah langkah Pangkal Pinang SMART untuk masyarakat Pangkal Pinang:

1. ***Seimbang* dalam memenuhi hak dasar seluruh warga**

   Pokok visi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang SEIMBANG dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh Pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan diarahkan agar setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Kota ini tumbuh untuk semua, dari pusat hingga pinggiran, tanpa meninggalkan satu pun anak bangsa

2. ***Mapan* secara perekonomian dan daya saing daerah**

   Pokok visi ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang MAPAN melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif,hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja. Kota Pangkal Pinang didorong menjadi kota dengan struktur ekonomi yang kuat, sektor UMKM yang tangguh, dan daya saing lokal yang meningkat.

3. **Amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih**

Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk Mewujudkan pemerintahan yang AMANAH dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Tata kelola pemerintahan diarahkan untuk berjalan dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme. Sehingga setiap kebijakan pemerintah lahir sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat, bukan sebagai alat kepentingan.

4. ***Rukun* dalam membangun stabilitas sosial dan demokrasi yang inklusif**

Kota Pangkal Pinang dibentuk sebagai ruang hidup bersama yang aman, damai, dan terbuka. Melalui kepemimpinan, Prof. H. Saparudin, Ph.D dan Dessy Ayutrisna, S.E.,M.M, demokrasi dibangun dalam semangat persaudaraan, di mana setiap suara dihargai dan setiap perbedaan dirangkul dalam harmoni.

5. ***Tangguh* dalam melestarikan lingkungan dan memperkuat nilai budaya**

Pokok visi ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang TANGGUH dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pokok visi TANGGUH juga menegaskan bahwa kekuatan masa depan ditanamkan melalui kesadaran untuk menjaga alam dan melestarikan budaya lokal, karena ketangguhan sebuah kota tidak hanya dilihat dari bangunannya, tapi dari bagaimana ia menjaga warisan dan jati dirinya.

Gambar 3. 2
Keselarasan Visi RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang
dengan Visi RPJMN dan Provinsi Bangka Belitung



Sumber: *Analisis Penyusun, 2025*

Visi ini selaras dan berkontribusi langsung terhadap visi pembangunan nasional dalam

RPJM Nasional 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung visi Provinsi Bangka Belitung dalam RPJM Daerah 2025–2029, yakni "Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera". Dengan keterpaduan arah pembangunan pusat, provinsi, dan kota, visi "Pangkal Pinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh)" menjadi bagian integral dari upaya kolektif membangun Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

3.1.2. MISI

Misi merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan, misi berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang dengan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Rumusan misi yang baik memberikan penjabaran yang jelas mengenai upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mudah diterjemahkan ke dalam indikator dan target yang terukur. Penyusunan misi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, agar selaras dengan tantangan dan peluang pembangunan. Substansi dari visi dan misi ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, perbaikan pelayanan publik, dan penyelesaian persoalan strategis.

Untuk mewujudkan visi "Pangkal Pinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh)", Pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan arah misi pembangunan yang dibagi ke dalam tiga pilar strategis. Ketiga pilar ini merupakan kerangka utama yang akan memandu perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama periode 2025–2029.

Upaya pencapaian visi Pangkal Pinang dilakukan melalui misi RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025-2029 yang dijelaskan sebagai berikut:

MISI 1 : **Mewujudkan pembangunan yang SEIMBANG dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.** Misi ini bertujuan untuk Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan kehidupan layak bagi seluruh lapisan masyarakat, penguatan ketahanan keluarga serta pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air minum, energi bersih, dan pangan, penguatan infrastruktur layanan publik, serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana, guna

memastikan layanan dasar yang merata dan aksesibilitas yang adil bagi seluruh warga.

MISI 2 : **Mewujudkan perekonomian yang MAPAN melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja.** Misi ini menitikberatkan pada Penguatan ekonomi lokal dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis teknologi, pengembangan kawasan industri dan infrastruktur ekonomi yang ramah lingkungan, peningkatan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital, untuk

mendukung ekonomi kreatif dan UMKM, penguatan ekonomi biru yang tumbuh stabil dan berkelanjutan, penciptaan stabilitas ekonomi makro yang kondusif bagi investasi dan daya saing daerah dalam konteks global, pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau melalui penguatan distribusi, logistik lokal, dan intervensi pasar.

MISI 3 : **Mewujudkan pemerintahan yang AMANAH dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.** Misi ini mencerminkan Peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, penguatan integritas birokrasi melalui reformasi tata kelola dan penegakan etika jabatan, pengembangan layanan digital pemerintahan yang akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat, serta peningkatan daya saing kelembagaan daerah hingga tingkat nasional dan internasional melalui Kolaborasi antarinstansi dan inovasi kepemimpinan publik.

MISI 4 : **Mewujudkan masyarakat yang RUKUN dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah.** Misi ini bertujuan untuk memperkuat kehidupan sosial yang harmonis dan toleran sebagai landasan stabilitas wilayah yang demokratis dan kondusif, pengembangan karakter religius dan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung semangat kebersamaan dan gotong royong, serta perluasan

partisipasi warga melalui penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

MISI 5 : **Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang TANGGUH dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.** Misi ini menekankan pentingnya Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui penataan ruang yang ramah lingkungan dan berkeadilan, penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam perilaku sosial dan pembangunan, serta peningkatan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pelestarian ekosistem dan keberlanjutan warisan budaya.

Misi RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 disusun secara sinergis dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJM Nasional 2025–2029 serta visi-misi Provinsi Bangka Belitung dalam RPJM Daerah 2025–2029. Setiap misi telah mengakomodasi agenda prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita, seperti penguatan infrastruktur, pembangunan ekonomi hijau dan inklusif, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Penyelarasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan searah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 3. 1
Keterkaitan Misi RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang

MISI NASIONAL	MISI PROV. BABEL	MISI KOTA PANGKAL PINANG
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);	Misi 2: Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Misi 4: Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;		
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Misi 2:	Misi 3:

MISI NASIONAL	MISI PROV. BABEL	MISI KOTA PANGKAL PINANG
serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Melakukan Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Misi 5: Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Tujuan dirancang untuk menjawab isu strategis dan permasalahan daerah, serta menjadi jembatan antara visi, misi, dan strategi pembangunan jangka menengah. Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang menggambarkan hasil pembangunan yang ingin dicapai, dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan tahunan (RKPD). Perumusan tujuan dan sasaran ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dirancang agar memenuhi prinsip SMART-C, memperhatikan isu strategis, serta dapat diukur secara jelas dalam kurun lima tahun perencanaan.

Tabel 3. 2
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029

VISI: PANGKAL PINANG SMART				
SEIMBANG, MAPAN, AMANAH, RUKUN DAN TANGGUH				
POKOK VISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	
			2025*	**2030**
SEIMBANG	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5 (Rendah)	2,10 – 3,30 (Rendah)
MAPAN	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,54	4,89 – 7,00
		PDRB Perkapita (Rp.juta)	Rp. 87,21 juta	Rp. 98,9 - 120 juta
		Indeks Daya Saing Daerah	3,97	4,40
AMANAH	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	77,23 (Sangat Baik)	79,25 (Sangat Baik)
RUKUN	Menguatnya norma budaya dan stabilitas daerah yang kondusif	Indeks Harmoni	6,5	7,0
TANGGUH	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kapasitas penanganan bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	2	10,5

Keterangan * : Realisasi

Setelah melihat pokok visi dan tujuan pembangunan di atas, maka dapat kita telaah keterkaitan antara pokok visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang akan dicapai Kota Pangkal Pinang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Pokok visi yang pertama adalah **SEIMBANG** yang berfokus pada pemerataan pemenuhan hak sosial kepada masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata". Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator "Tingkat Kemiskinan" sebagai komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan mengentaskan kemiskinan. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang memahami bahwa Kemiskiman merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga dalam upaya pengentasannya dibutuhkan variabel-variabel lain yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut terakomodir dalam sasaran yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sasaran pertama adalah **"Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif"** dengan indikator **"Indeks Pembangunan Manusia"**. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia sendiri mencakup upaya pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga Pembangunan Manusia yang berkualitas dan merata diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dalam jangka menengah maupun panjang.

Kemudian sasaran yang kedua adalah **"Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat"** yang diukur melalui **"Indeks Gini"** untuk melihat sejauh mana pemerataan pembangunan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Selain itu, diperlukan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sebagai wujud keadilan dalam pembangunan tanpa mengesampingkan peran perempuan sehingga sasaran yang ketiga adalah **"Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan"** yang digambarkan pada

indikator **''Indeks Pembangunan Gender''**. Sedangkan sasaran keempat adalah **''Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan inklusif''** yang diukur oleh indikator **''Indeks Infrastruktur''** sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur publik untuk menunjang aktivitas masyarakat secara luas.

Pokok visi kedua ''**MAPAN**'' memiliki fokus pada aspek ekonomi sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah **''Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing''** yang diukur melalui 3 (tiga) indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, dan Indeks Daya Saing Daerah**. Keberhasilan 3 (tiga) indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing di Kota Pangkal Pinang. Dalam mendukung tujuan tersebut dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai. Sasaran pertama adalah **''Meningkatnya daya saing perekonomian daerah''** yang diukur dengan indikator **''Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi''**. Capaian sasaran ini menggambarkan seberapa besar peran Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian sasaran kedua yang ingin dicapai adalah **''Menguatnya kapasitas sektor unggulan daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif''** yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu **Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB, LPE Kategori Industri Pengolahan, dan LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**. Ketiga indikator ini diharapkan mampu mewakili keberhasilan penguatan kapasitas sektor unggulan daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif. Dan sasaran terakhir pada pokok visi ini adalah **''Meningkatnya kualitas kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja''** yang diukur melalui indikator **''Tingkat Pengangguran Terbuka''**.

Pokok visi ketiga **''AMANAH''** berfokus pada reformasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih. Untuk itu, tujuan pembangunan yang ingin dicapai pada pokok visi ini adalah **''Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani''** dengan indikator **''Indeks Reformasi Birokrasi''**. Sejalan dengan tujuan tersebut, indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu **Nilai SAKIP**, **Capaian Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) Daerah**, **Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Pemerintah Digital** dengan sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah"** dan **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital"**. Ketercapaian pokok visi, tujuan, dan sasaran ini merupakan harapan dan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pokok visi keempat **"RUKUN"**, fokus pemerintah daerah adalah membangun stabilitas sosial dan demokrasi yang inklusif. Tujuan pembangunan yang dirumuskan pada pokok visi ini adalah **"Menguatnya norma budaya dan stabilitas daerah yang kondusif"** dengan tolak ukur **"Indeks Harmoni"**. Sedangkan sasaran yang menunjang pencapaian tujuan tersebut adalah **"Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan kerukunan umat beragama"** yang dapat diukur dengan indikator **"Indeks Pembangunan Kebudayaan" dan "Indeks Kerukunan Umat Beragama".** Kemudian sasaran kedua yang ingin dicapai adalah **"Meningkatnya kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah yang aman dan terkendali"**. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **"Angka Kriminalitas"**.

Pokok visi kelima **"TANGGUH"** berfokus pada pelestarian lingkungan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi degradasi dan menjaga kualitas lingkungan. Pencapaian Pokok visi ini didukung dengan tujuan **"Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kapasitas penanganan bencana"** yang diukur dengan indikator **"Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"**. Dalam mendukung tujuan ini, sasaran yang ingin dicapai adalah **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah"** dengan indikator **"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"** dan **"Indeks Resiko Bencana"**

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
PANGKAL PINANG SMART									
1. Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	**T.1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata**	**Tingkat Kemiskinan (persen)**	**4,04 (Rendah)**	**4,5* (Rendah)**	**3,10 – 4,00 (Rendah)**	**2,90 – 3,80 (Rendah)**	**2,70 – 3,70 (Rendah)**	**2,14 – 3,47 (Rendah)**	**2,10 – 3,30 (Rendah)**
	1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	80,9 (Sangat Tinggi)	81,64* (Sangat Tinggi)	82,2 - 82,3 (Sangat Tinggi)	82,7 - 82,9 (Sangat Tinggi)	83,2 - 83,5 (Sangat Tinggi)	83,7 – 84 (Sangat Tinggi)	84,2 - 84,7 (Sangat Tinggi)
	1.2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (nilai)	0,292 (Rendah)	0,249* (Rendah)	0,246 - 0,256 (Rendah)	0,241 - 0,251 (Rendah)	0,236 - 0,246 (Rendah)	0,230 - 0,241 (Rendah)	0,225 - 0,235 (Rendah)
	1.3. Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (nilai)	93,82 (Menengah)	95,29* (Menengah Tinggi)	95,49 (Menengah Tinggi)	95,69 (Menengah Tinggi)	95,89 (Menengah Tinggi)	96,09 (Menengah Tinggi)	96,29 (Menengah Tinggi)
	1.4. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan inklusif	Indeks Infrastruktur (nilai)	94,27	95,11	95,55	96,25	96,89	97,1	97,35
2. Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas	**T.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)**	**- 2,3**	**4,54***	**4,37 - 5,05**	**4,5 – 5,56**	**4,63 – 6,07**	**4,76 – 6,59**	**4,89 – 7,00**
		PDRB Per Kapita (Rp/ Juta)	**Rp. 82,19 juta**	**Rp. 87,21 juta***	**Rp. 90,8 - 94,88 juta**	**Rp. 93,0 - 102,53 juta**	**Rp. 95,2 - 110,20 juta**	**Rp. 96,70 - 117,86 juta**	**Rp. 98,9 - 120 juta**
		Indeks Daya Saing Daerah (nilai)	**4,14**	**3,97***	**4,06**	**4,14**	**4,23**	**4,31**	**4,40**

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja	2.5 Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi (persen)	17,62	17,43*	17,5 - 18,2	17,6 - 18,4	17,7 - 18,5	17,8 - 18,6	17,9 - 18,7
	2.6 Menguatnya kapasitas sektor unggulan daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif	Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (persen)	18,82	21,41*	22,2 - 22,4	22,9 - 23,00	23,5 - 23,6	24,00 - 24,10	24,4 - 24,7
		LPE Kategori Industri Pengolahan (persen)	-30,27	10,11*	6,5 - 7,8	6,6 - 7,9	6,7 - 8	6,8 - 8,1	6,9 - 8,2
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen)	1,13	2,74*	4,85 - 5,40	5 - 5,50	5,15 - 5,6	5,30 - 5,70	5,45 - 5,80
	2.7 Meningkatnya kualitas kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,98	5,73*	5,54 - 5,73	5,35 - 5,72	5,25 - 5,71	5,15 - 5,70	4,8 - 5,69
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah di akses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika	**T.3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani**	**Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)**	**76,14 (Sangat Baik)**	**76,64* (Sangat Baik)**	**77,52 (Sangat Baik)**	**78,21 (Sangat Baik)**	**78,35 (Sangat Baik)**	**79,1 (Sangat Baik)**	**79,25 (Sangat Baik)**
	3.8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP (nilai)	64,22 (B Baik)	64,53* (B Baik)	65,7 (B Baik)	65,8 (B Baik)	65,9 (B Baik)	70,15 (BB Sangat Baik)	70,2 (BB Sangat Baik)
		Capaian Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) Daerah (level)	2 (Terkelola)	2* (Terkelola)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang	3.9 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (nilai)	4,15 A- (Sangat Baik)	4,32* A- (Sangat Baik)	4,25 – 4,35 A- (Sangat Baik)	4,35 – 4,40 A- (Sangat Baik)	4,40 – 4,45 A- (Sangat Baik)	4,45 – 4,50 A- (Sangat Baik)	4,51 – 4,60 A (Pelayanan Prima)
		Indeks Pemerintah Digital (nilai)	3,81	4,34*	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3
4. Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah	**T.4. Menguatnya norma budaya dan stabilitas daerah yang kondusif**	**Indeks Harmoni (nilai)**	**NA**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**7,0**
	4.10 Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	60,23 (Tinggi)	55,54 (Sedang)	56 (Sedang)	56,5 (Sedang)	57 (Sedang)	57,5 (Sedang)	58 (Sedang)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	83,9 (Sangat Tinggi)	85,41 (Sangat Tinggi)	85,5 (Sangat Tinggi)	86 (Sangat Tinggi)	86,5 (Sangat Tinggi)	86,7 (Sangat Tinggi)	86,8 (Sangat Tinggi)
	4.11 Meningkatnya kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah yang aman dan terkendali	Angka Kriminalitas (nilai)	286	337*	328	310	300	290	280
5. Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup	**T.5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kapasitas penanganan bencana**	**Persentase Penurunan Emisi GRK (persen)**	**NA**	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**10,5**
	5.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	65,24 (Sedang)	70,77* (Baik)	69,80 (Sedang)	69,97 (Sedang)	70,15 (Sedang)	70,32 (Sedang)	70,49 (Sedang)
		Indeks Resiko Bencana (nilai)	88,47 (Sedang)	84,26* (Sedang)	83,42 (Sedang)	82,58 (Sedang)	81,74 (Sedang)	80,9 (Sedang)	80,06 (Sedang)

Keterangan:

(*) Realisasi Tahun 2025

RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi. misi. tujuan. sasaran. serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJM Daerah diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program. kegiatan. dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJM Daerah agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur. Adapun keselarasan indikator RPJM Daerah dengan Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah Kota Pangkal Pinang sebagai berikut.

Tabel 3. 4
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah dan Perangkat Daerah

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
T.1.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata	Tingkat Kemiskinan	1.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang merata dan inklusif serta pemajuan kebudayaan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya aktivitas positif kepemudaan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Aktif	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Meningkatnya kualitas keolahragaan daerah	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya budaya membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas pengelolaan arsip daerah	Cakupan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	
						Meningkatnya kepatuhan dan kinerja	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
						pengelolaan arsip daerah	Internal terhadap perangkat daerah	
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya akses Masyarakat terhadap JKN	Cakupan kepesertaan JKN	
		1.2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kesejahteraan Sosialnya	Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada PPKS sesuai dengan SPM bidang sosial	Indeks Pencapaian Capaian SPM Bidang Sosial	Dinas Sosial
							Persentase jumlah PPKS yang tertangani	
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya konsumsi pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Dinas Pangan dan Pertanian
		1.3. Meningkatnya peran serta dan partisipasi	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya kesejahteraan gender, Perlindungan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		perempuan dalam pembangunan		anak, kualitas keluarga dan pemberdayaan masyarakat		dalam partisipasi pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Perlindungan Anak dan KB
							Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	
					Indeks Perlindungan Anak	Terpenuhinya upaya perlindungan dan penjaminan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	
					Indeks Pembangunan Keluarga	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 tahun)	
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	
							Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		1.4. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas,merata dan inklusif	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	
						Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR	Persentase Pemenuhan Perumahan Bagi MBR	
				Meningkatkan kualitas pekerjaan umum dan Penataan ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas jalan dan kelengkapan-nya	Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase Ketaatan dan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	
						Meningkatnya penataan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan Sesuai Dengan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
							Perundang Undangan Yang Berlaku	
						Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikasi	
						Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Sesuai Standar	
							Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	
							Indeks Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	
						Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Luas Kawasan Yang Terlindung Dari Bahaya Banjir	
				Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Bidang	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan	Rasio Konektivitas Kota	Dinas Perhubungan
							Persentase Peningkatan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
					Perhubungan Darat	kelancaran LLAJ	Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Laik Fungsi	
T.2.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	2.1. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi	Meningkatnya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) terhadap PDRB)	Meningkatnya penanaman modal dalam mengembang-kan perekonomian daerah	Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Meningkatnya produksi pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	Kemandirian ekonomi daerah melalui produktivitas pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
						Peningkatan produktivitas peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan	
				Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Konsumsi Ikan Masyarakat	
					Pertumbuhan Produksi	Meningkatnya Produksi	Produksi Perikanan Budidaya	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
					Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya		
	Laju Pertum-buhan Ekonomi	2.2. Menguatnya kapasitas sektor unggulan daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif	Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata serta pengembangan ekonomi kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Berkembang-nya sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Dinas Pariwisata
							Rata-rata lama tinggal wisatawan	
						Meningkatnya ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	
			LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah serta kapasitas perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya aktivitas ekonomi industri kecil dan menengah	Proporsi jumlah IKM pada level Kota	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran		Nilai Ekspor bersih Perdagangan	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui potensi perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	
					Rasio Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	
						Meningkatnya usaha koperasi yang produktif	Rasio Volume Usaha Koperasi	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
						mendorong ekonomi daerah	Terhadap PDRB	
	PDRB per Kapita	2.3. Meningkatnya kualitas kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan kesempatan kerja berkualitas	Tingkat Kesempatan Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Dinas Tenaga Kerja
							Persentase penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja	
							Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Level Kota	
						Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	
T.3.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan kolaboratif melalui budaya birokrasi BerAKHLAK	Persentase hasil penilaian SAKIP perangkat daerah dengan kategori minimal BAIK (B)	Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sekretariat Daerah
							Indeks Reformasi Hukum	
							Indeks Kualitas Kebijakan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
						yang transparan dan akuntabel		
						Meningkatnya kualitas Koordinasi kebijakan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	
							Return On Aset (ROA) BUMD	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya konsistensi, kesinambungan dan pencapaian pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian program dalam RKPD	BAPPERIDA
							Persentase tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	
					Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	
							Persentase perangkat	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
							daerah hasil penilaian inovasi dengan kategori minimal "SANGAT INOVATIF"	
				Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Menurunnya temuan kesalahan tata kelola administrasi keuangan daerah	Opini BPK	BAKEUDA
						Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian PAD	
						Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas SPIP terintegrasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat
			Capaian Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) Daerah	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap Penyelenggaraan pembangunan dan penegakan integritas	Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Terlaksananya implementasi kebijakan SPIP secara terintegrasi, komprehensif dan sistematis.	Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Seluruh Perangkat Daerah

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
					Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	
		3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik PTSP	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang Ditindaklanjuti	Kecamatan
						Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang Ditindaklanjuti	
						Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Penyelesaian Pelayanan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
						kepada masyarakat	Publik Yang Tepat Waktu	
				Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase PERDA Yang Berhasil Diselesaikan	Sekretariat DPRD
							Persentase Pengesahan APBD Tepat Waktu	
				Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian kepada ASN	Survei kepuasan pelayanan kepegawaian (SKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen dan kompetensi ASN	Indeks Sistem Merit (ISM)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Indeks Pemerintahan Digital	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pemerintahan Digital	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Layanan Berbasis TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
						Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas	Indeks Keterbukaan	

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
						data dan informasi publik	Informasi Publik	
						Meningkatnya validitas data dan informasi dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik	
T.4.Menguatnya norma budaya dan stabilitas daerah yang kondusif	Indeks Harmoni	4.1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkat-nya kualitas layanan pendidikan yang merata dan inklusif serta pemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya upaya pemajuan kebudayaan daerah	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan stabilitas kehidupan demokrasi	Indeks Demokrasi	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tenteram	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Badan Kesbangpol
						Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar dan Dibina	
		4.2. Meningkatnya kondusifitas keamanan dan ketertiban daerah	Angka Kriminalitas	Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan	Indeks Pencapaian SPM Bidang Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		yang aman dan terkendali				ketentraman masyarakat		
						Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Respon rate) Penanganan Kebakaran	
T.5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kapasitas penanganan bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	5.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian terhadap Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan Hidup
							Indeks Kualitas Udara (IKU)	
							Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
						Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	
						Meningkatnya penataan dan penaatan lingkungan hidup	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	
			Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan strategis RPJM Daerah bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan.

Visi pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 adalah

"PANGKAL PINANG SMART"

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJM Daerah 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJM Daerah 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

3.2.1.1. Strategi RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025-2029

Melalui visi **"PANGKAL PINANG SMART"** Pemerintah Kota Pangkal Pinang menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kota yang **SEIMBANG** dalam memenuhi hak dasar seluruh warga, **MAPAN** secara perekonomian dan memiliki daya saing tinggi, **AMANAH** dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, **RUKUN** dalam memperkuat nilai-nilai budaya lokal, menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah, dan **TANGGUH** dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tanggap menghadapi bencana. Visi ini mencerminkan komitmen Pangkal Pinang untuk tumbuh sebagai kota modern,

berdaya saing, dan berkelanjutan dengan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, sosial, tata kelola, dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi tersebut, *grand* strategi pembangunan diarahkan pada lima fokus utama, yaitu:

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki daya saing dan kehidupan yang layak;
2) Optimalisasi perekonomian berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang merata dan produktif, seperti pariwisata bahari, industri kreatif, dan pengolahan hasil perikanan;
3) Peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas;
4) Penguatan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran dalam keberagaman budaya masyarakat kepulauan; dan
5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kota Pangkal Pinang, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 3
Tema Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2026-2030



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun penahapan pembangunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Penahapan Pembangunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029

Tema RPJPD Tahap I Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan : Meningkatkan Kondusivitas Wilayah yang Damai dan Demokratis				
Tema Tahap I Tahun 2026	**Tema Tahap II Tahun 2027**	**Tema Tahap III Tahun 2028**	**Tema Tahap IV Tahun 2029**	**Tema Tahap V Tahun 2030**
Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	**Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan**	**Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan**	**Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah**	**Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh**

Strategi Utama	Strategi Tema Tahap 1	Strategi Tema Tahap 2	Strategi Tema Tahap 3	Strategi Tema Tahap 4	Strategi Tema Tahap 5
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kehidupan layak bagi masyarakat	Mewujudkan setiap anak dan warga Pangkal Pinang memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan	Memperkuat jaring perlindungan sosial dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui pendekatan bantuan langsung	Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga atas air bersih yang layak, energi yang berkelanjutan, dan akses pangan yang memadai	Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah	Pemerataan akses dan transformasi tata kelola pelayanan publik
	Menumbuhkan partisipasi warga dalam menjaga kesehatan secara mandiri, terencana, dan berkelanjutan		Memenuhi hak dasar warga melalui infrastruktur pelayanan publik yang merata, layak, dan berkelanjutan		Mewujudkan kombinasi subsidi, penyediaan lahan, penataan permukiman, dan edukasi literasi perumahan
Optimalisasi kinerja perekonomian berbasis sektor	Penciptaan stabilitas ekonomi makro yang kondusif bagi investasi	Mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal sebagai sumber	Pengembangan kawasan industri dan	Pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau melalui	Penguatan ekonomi biru yang tumbuh stabil dan berkelanjutan

Strategi Utama	Strategi Tema Tahap 1	Strategi Tema Tahap 2	Strategi Tema Tahap 3	Strategi Tema Tahap 4	Strategi Tema Tahap 5
unggulan dan ekonomi kerakyatan yang merata dan produktif	dan daya saing daerah dalam konteks global	pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi, budaya, dan teknologi	infrastruktur ekonomi yang ramah lingkungan	penguatan distribusi, logistik lokal, dan intervensi pasar	
	Penguatan ekonomi lokal dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis teknologi		Fasilitasi kewirausahaan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan sektor informal		
	Peningkatan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital				
Peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik	Penguatan integritas birokrasi	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan investor lokal	Peningkatan daya saing kelembagaan daerah hingga tingkat nasional dan internasional	Mewujudkan iklim investasi yang bersahabat dan pelayanan perizinan yang efisien, transparan, serta pro-rakyat	Terwujudnya birokrasi yang kompeten, sejahtera, dan produktif
	Penerapan merit system dalam promosi dan penempatan jabatan	Pembenahan integrasi data dan transformasi proses pelayanan	Pengembangan layanan digital pemerintahan yang akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat	Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan komunitas	
Penguatan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran	Pengembangan karakter religius dan nilai nilai budaya lokal dan keberlanjutan warisan budaya yang menjunjung semangat kebersamaan dan gotong royong	Peningkatan promosi produk kerajinan, kuliner, dan karya komunitas sebagai wujud ekonomi kreatif yang berakar dari nilai-nilai kebhinekaan	Penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok tanpa diskriminasi	Peningkatan landasan stabilitas wilayah yang demokratis dan kondusif	Perwujudan kebhinekaan budaya, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas diplomasi kultural berbasis identitas lokal

Strategi Utama	Strategi Tema Tahap 1	Strategi Tema Tahap 2	Strategi Tema Tahap 3	Strategi Tema Tahap 4	Strategi Tema Tahap 5
	penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam perilaku sosial dan pembangunan				
Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif	Mendorong adopsi prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi, distribusi, dan tata kelola usaha	Memperkuat pembangunan sosial-budaya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan	Pengendalian degradasi ekosistem	Perwujudan masyarakat yang siap dan tanggap bencana
	Peningkatan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pelestarian ekosistem		Penataan ruang yang ramah lingkungan dan berkeadilan	Peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	

3.2.1.2. Arah Kebijakan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang 2025-2029

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi komunitas, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur publik, dukungan terhadap ekonomi kreatif dan UMKM, optimalisasi pendapatan lokal, peningkatan nilai tambah produk unggulan, fasilitasi investasi dan tenaga kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan keterampilan vokasional, reformasi tata kelola pemerintahan, percepatan pelayanan publik, penguatan kolaborasi antarinstansi, serta pelestarian budaya dan penguatan karakter sosial masyarakat.

Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. 6
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Arah Kebijakan	OPD Pengampu
1	Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Memperkuat sistem layanan pendidikan dan kesehatan formal yang cepat, terjangkau, dan bermutu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Dinas Kesehatan
		Pemanfaatan ruang publik dan fasilitas pendidikan sebagai pusat aktivitas pemuda dan literasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan olahraga sebagai wahana pembentukan karakter, kesehatan, dan prestasi generasi muda	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengarusutamaan kesetaraan gender dan Inklusi Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Dinas Sosial
		Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air minum,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi	Arah Kebijakan	OPD Pengampu
		energi bersih, dan pangan berkualitas	Dinas Pangan dan Pertanian
		Penguatan infrastruktur layanan publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Perhubungan
2	Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Mendukung ekonomi kreatif dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Dinas Pariwisata
		Meningkatkan nilai tambah produk unggulan lokal seperti perikanan dan pangan melalui industrialisasi skala kecil-menengah, teknologi tepat guna, dan penguatan rantai pasok yang terintegrasi	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemberdayaan ekonomi komunitas	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Penyediaan lahan industri yang sesuai dengan tata ruang, pembangunan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi investasi yang berpihak pada pelaku lokal dan penyerapan tenaga kerja	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penguatan daya beli masyarakat	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		Peningkatan keterampilan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan perluasan akses terhadap pasar kerja melalui sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi	Arah Kebijakan	OPD Pengampu
3	Melakukan mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang	Reformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan dan tata kelola kepegawaian yang profesional berbasis merit sistem	Sekretariat Daerah
			BKPSDMD
		Penyederhanakan prosedur perizinan usaha dan mempercepat waktu pelayanan publik berbasis digital	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kolaborasi antarinstansi dan inovasi kepemimpinan publik	BAPPERIDA
			Sekretariat DPRD
		Peningkatan aksesibilitas layanan masyarakat hingga tingkat RT	Kecamatan
		Peningkatan pengelola dan kelembagaan pengawasan penggunaan anggaran pada efektivitas perencanaan, kinerja dan pengendalian evaluasi pembangunan	Inspektorat Daerah
			Badan Keuangan Daerah
			BAPPERIDA
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal berbasis potensi riil, tata kelola digital, dan kolaborasi produktif antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat	Badan Keuangan Daerah
			Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah	Penyelenggaraan festival kerukunan budaya nusantara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan karakter sosial	
		Strategi revitalisasi warisan budaya sebagai fondasi pembangunan	
		Penguatan kerukunan sosial dan harmoni	Satpol PP

No	Misi	Arah Kebijakan	OPD Pengampu
		kehidupan bermasyarakat serta pengembangan demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas	Badan Kesbangpol
5	Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.	Peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan berbasis mitigasi bencana	Dinas Lingkungan Hidup
			BPBD

3.2.1.3. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkal Pinang 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1. Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yaitu **"Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kehidupan layak bagi masyarakat."** Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kehidupan layak bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan

pembangunan yang seimbang dan berkeadilan di Kota Pangkal Pinang. Upaya ini diwujudkan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur publik yang memadai untuk mendukung aksesibilitas bagi seluruh warga. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan jaring pengaman sosial, pemerintah berupaya memastikan setiap masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil tanpa ada yang tertinggal.

Selain menjamin kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan kesetaraan gender, dan peningkatan partisipasi publik diarahkan untuk memperkuat daya saing sekaligus memperluas akses terhadap peluang pembangunan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemerataan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup dapat terwujud sebagai cerminan Pangkal Pinang yang tumbuh sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi. Adapun dalam mengimplementasikan strategi utama tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut :

1) **Pada tahap 1**, tema pembangunan daerah adalah **Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi mewujudkan setiap anak dan warga Pangkal Pinang memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan**, dilakukan dengan memperkuat pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik yang selaras dengan tuntutan era Revolusi Industri 4.0. Melalui pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar dan penguatan karakter peserta didik, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Pangkal Pinang yang cerdas, berdaya saing, dan mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.
   - **Strategi menumbuhkan partisipasi warga dalam menjaga kesehatan secara mandiri, terencana, dan berkelanjutan,** dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan peran keluarga dan komunitas sebagai ujung tombak upaya promotif dan preventif. Dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan kesehatan lingkungan, pemeriksaan rutin, dan

pencegahan penyakit, diharapkan terbentuk budaya hidup sehat yang tumbuh dari kesadaran kolektif. Upaya ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi kesehatan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan informasi kesehatan. Dengan demikian, masyarakat Pangkal Pinang tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai modal dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2) **Pada tahap 2**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi memperkuat jaring perlindungan sosial dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui pendekatan bantuan langsung**, diarahkan untuk memastikan bahwa setiap warga Pangkal Pinang memiliki kemampuan bertahan dan bangkit dari tekanan sosial ekonomi. Melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga, daya beli masyarakat dapat terjaga dan aktivitas ekonomi lokal menjadi lebih dinamis. Selain itu, strategi ini memperkuat fondasi bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang menjadi basis utama pembangunan Pangkal Pinang. Melalui stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga, roda perekonomian daerah dapat berputar lebih kuat dan berkelanjutan, mendukung terwujudnya Pangkal Pinang yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

3) **Pada tahap 3**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga atas air bersih yang layak, energi yang berkelanjutan, dan akses pangan yang memadai** berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang merata dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur air bersih, pengembangan energi

ramah lingkungan yang efisien, serta penguatan sistem distribusi dan ketersediaan pangan lokal. Dengan memastikan ketiga kebutuhan pokok ini terpenuhi secara adil, masyarakat Pangkal Pinang dapat menikmati lingkungan hidup yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Lebih jauh, strategi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan Pangkal Pinang yang nyaman melalui pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan. Ketersediaan air, energi, dan pangan yang terjamin tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh dimensi keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh warga.

- **Strategi memenuhi hak dasar warga melalui infrastruktur pelayanan publik yang merata, layak, dan berkelanjutan** menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi. Melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkeadilan, setiap warga Pangkal Pinang dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa kesenjangan wilayah. Pembangunan fasilitas publik yang inklusif juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh layanan yang memadai untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Strategi ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Pangkal Pinang yang nyaman, dengan pemerataan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sebagai pilar utamanya. Infrastruktur publik yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan pemerintah, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi yang seimbang. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan hidup seluruh warga Pangkal Pinang.

4) **Pada tahap 4**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi menyediakan akses hunian layak dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah** berfokus pada upaya menghadirkan tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan perumahan yang inklusif serta penataan kawasan permukiman yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan,

strategi ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar akan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Akses terhadap hunian layak menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya, karena lingkungan tempat tinggal yang baik berpengaruh langsung pada kesejahteraan fisik dan mental warga. Strategi ini turut mendukung terwujudnya Pangkal Pinang yang makmur, di mana kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pelestarian budaya lokal dan terciptanya wilayah yang kondusif. Hunian yang layak dan tertata mendorong terbentuknya komunitas yang harmonis, menumbuhkan nilai gotong royong, serta memperkuat identitas sosial-budaya masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kehidupan yang layak dan bermartabat, Pangkal Pinang dapat tumbuh sebagai kota yang makmur, inklusif, dan berdaya saing

5) **Pada tahap 5, tema pembangunan adalah Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh.**

Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi Pemerataan akses dan transformasi tata kelola pelayanan publik** menekankan pentingnya menghadirkan layanan pemerintah yang transparan, efisien, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan pemerataan akses yang adil, setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan publik secara bermartabat. Langkah ini menciptakan sistem pelayanan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Strategi ini secara langsung mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kehidupan layak, karena pelayanan publik yang baik menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat. Ketika layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, dan infrastruktur sosial dapat diakses secara merata, maka keadilan sosial dapat terwujud secara nyata. Melalui tata kelola yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan warga, Pangkal Pinang bergerak menuju keseimbangan pembangunan yang berkeadilan, agar setiap warga memperoleh hak dasarnya secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

- **Strategi mewujudkan kombinasi subsidi, penyediaan lahan, penataan permukiman, dan edukasi literasi perumahan** merupakan langkah terpadu untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fisik tempat tinggal, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya. Melalui subsidi dan penyediaan lahan yang tepat sasaran, pemerintah mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni, sementara penataan permukiman dilakukan agar lingkungan menjadi lebih tertib, aman, dan sehat. Strategi ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kehidupan layak, karena hunian yang layak berperan penting dalam membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan sosial, setiap warga diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati tempat tinggal yang aman dan nyaman. Melalui keseimbangan antara kebijakan bantuan, pengelolaan ruang, dan edukasi publik, Kota Pangkal Pinang memperkuat fondasi kehidupan masyarakat yang sejahtera dan inklusif yang mencerminkan pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dalam pemenuhan hak dasar seluruh warga.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Memperkuat sistem layanan pendidikan dan kesehatan formal yang cepat, terjangkau, dan bermutu**

   Arah kebijakan ini menekankan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang cepat, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas fasilitas layanan, meningkatkan sarana prasarana, memastikan ketersediaan tenaga medis yang profesional hingga tingkat kelurahan, serta memperkuat sistem rujukan dan layanan gawat darurat melalui dukungan teknologi digital. Pada saat yang sama, sektor pendidikan diperkuat melalui pemerataan fasilitas belajar, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran agar seluruh anak dapat mengakses pendidikan formal yang berkualitas tanpa hambatan geografis maupun ekonomi. Penguatan kedua sektor ini memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat secara lebih komprehensif serta mendorong

terciptanya masyarakat yang lebih sehat, terdidik, produktif, dan berdaya dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

2. **Pemanfaatan ruang publik dan fasilitas pendidikan sebagai pusat aktivitas pemuda dan literasi**

   Pemanfaatan ruang publik dan fasilitas pendidikan sebagai pusat aktivitas pemuda dan literasi diarahkan untuk menjamin akses yang setara bagi seluruh warga terhadap pemenuhan layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, informasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Arah kebijakan ini menekankan optimalisasi fungsi ruang publik dan sarana pendidikan yang inklusif, ramah pemuda, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui penguatan peran ruang publik sebagai wahana pembelajaran, kreativitas, dan interaksi sosial, diharapkan tercipta pemerataan kesempatan dalam meningkatkan literasi, partisipasi pemuda, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

3. **Pengembangan olahraga sebagai wahana pembentukan karakter, kesehatan, dan prestasi generasi muda**

   Pengembangan olahraga sebagai wahana pembentukan karakter, peningkatan kesehatan, dan pencapaian prestasi generasi muda diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan ini menekankan penyediaan dan peningkatan infrastruktur publik yang memadai, aman, dan merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang mudah diakses, olahraga didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus media pembinaan karakter disiplin, sportivitas, dan kerja sama. Dengan demikian, pengembangan olahraga berkontribusi nyata dalam menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan serta mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi.

4. **Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial**

   Arah kebijakan ini menegaskan komitmen untuk menjadikan kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai prinsip utama dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang setara terhadap pendidikan,

pekerjaan, layanan publik, dan pengambilan keputusan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperkaya kualitas pembangunan melalui partisipasi yang lebih luas dan beragam. Program-program pengarusutamaan gender diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi fondasi bagi terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga Kota Pangkal Pinang.

5. **Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air minum, energi bersih, dan pangan berkualitas**

   Arah kebijakan ini difokuskan pada jaminan ketersediaan dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat, yaitu air minum yang layak, energi bersih, dan pangan yang berkualitas. Pemerintah mendorong pembangunan dan modernisasi infrastruktur distribusi air bersih, pengembangan energi terbarukan, serta penguatan sistem ketahanan pangan berbasis lokal. Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan setiap warga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar tersebut, kesenjangan sosial dapat diminimalkan, dan kesejahteraan dapat lebih merata. Kebijakan ini mencerminkan wujud nyata pembangunan yang berkeadilan, karena hak dasar seluruh warga dipenuhi secara setara. Selain itu, strategi ini juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan energi ramah lingkungan.

6. **Penguatan infrastruktur layanan publik**

   Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan publik yang memadai melalui pembangunan infrastruktur yang merata, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas jalan, jembatan, drainase, transportasi, serta infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan pinggiran agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara adil. Dengan infrastruktur yang kuat dan merata, mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi dapat meningkat, sekaligus memperkuat daya saing daerah. Arah kebijakan ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang seimbang dan berkeadilan karena membuka akses yang sama

bagi seluruh warga terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, penguatan infrastruktur publik menjadi kunci untuk menciptakan Pangkal Pinang yang inklusif, nyaman, dan tangguh.

Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja, ialah **"Optimalisasi kinerja perekonomian berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang merata dan produktif".** Strategi optimalisasi kinerja perekonomian berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang merata dan produktif diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi Pangkal Pinang melalui pengembangan potensi utama daerah, khususnya sektor perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, transportasi dan logistik, serta akomodasi dan kuliner. Penguatan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan mendorong inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta integrasi rantai pasok antar sektor agar lebih efisien dan bernilai tambah tinggi. Melalui dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna, pemerintah berupaya menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada sektor formal, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat yang menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat daya saing sektor unggulan dan memperluas peluang ekonomi berbasis komunitas, Pangkal Pinang diharapkan tumbuh menjadi kota yang tangguh, mandiri, dan kompetitif di tingkat regional. Langkah ini sejalan dengan tujuan mewujudkan kondisi mapan secara perekonomian dan daya saing daerah, di mana kemajuan ekonomi berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan global. Adapun dalam mengimplementasikan strategi utama tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut :

1) **Pada tahap 1**, tema pembangungan adalah **Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi penciptaan stabilitas ekonomi makro yang kondusif bagi investasi dan daya saing daerah dalam konteks global**. Strategi ini bertujuan untuk

menjaga iklim ekonomi Pangkal Pinang tetap sehat, adaptif, dan menarik bagi investor. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi fiskal dan moneter daerah yang stabil melalui pengendalian inflasi, efisiensi belanja publik, serta peningkatan pendapatan daerah berbasis potensi riil. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya investasi produktif yang mampu memperkuat sektor-sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, transportasi dan logistik, serta akomodasi dan kuliner. Dengan iklim usaha yang kondusif, pelaku ekonomi lokal, termasuk UMKM, dapat lebih berkembang dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi global dengan memperkuat konektivitas, efisiensi birokrasi, serta kemudahan perizinan bagi dunia usaha. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, stabilitas ekonomi akan bertransformasi menjadi kekuatan penggerak utama bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Langkah ini memperkuat optimalisasi sektor unggulan yang berbasis ekonomi kerakyatan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pangkal Pinang dapat tampil sebagai daerah yang tangguh dan kompetitif dalam menghadapi persaingan ekonomi regional maupun global

- **Strategi Penguatan ekonomi lokal dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis teknologi** diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Melalui pendekatan ini, sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan di Pangkal Pinang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dengan dukungan inovasi dan teknologi tepat guna. Hilirisasi komoditas unggulan tidak hanya memperkuat rantai pasok lokal, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industri kreatif yang mampu mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tinggi. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dapat tumbuh secara merata karena masyarakat terlibat langsung dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi lokal mendorong peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing daerah di pasar yang lebih luas. Penguatan ekonomi kreatif juga menjadi instrumen penting untuk mengembangkan ide dan inovasi berbasis kearifan lokal agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Melalui langkah-langkah ini,

diharapkan terbentuk struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

- **Strategi peningkatan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital** berfokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja modern. Langkah ini mencakup peningkatan keterampilan digital, literasi teknologi, serta kemampuan inovatif dan kolaboratif yang menjadi tuntutan utama di era industri 4.0. Pemerintah daerah dapat mendorong pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan kompetitif. Selain itu, pengembangan ekosistem kerja digital seperti inkubator bisnis, *co-working space*, dan platform ekonomi kreatif turut membuka ruang bagi pekerja muda untuk berinovasi. Peningkatan daya saing tenaga kerja juga memerlukan dukungan kebijakan yang mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi kelompok masyarakat produktif di sektor informal. Dengan tenaga kerja yang adaptif dan berkompetensi tinggi, daerah mampu menarik investasi dan memperkuat posisi dalam rantai nilai ekonomi nasional. Melalui strategi ini, transformasi digital tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

2) **Pada tahap 2,** tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa Berbasis Ekonomi Kerakyatan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi "**Mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi, budaya, dan teknologi".** Strategi ini bertujuan untuk memperkuat peran sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Melalui pemanfaatan kearifan lokal, seni, dan budaya sebagai identitas daerah, pelaku ekonomi kreatif dapat menciptakan produk dan jasa bernilai tambah tinggi yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global. Pemerintah daerah dapat mendorong ekosistem ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang ekspresi, inkubasi bisnis, dan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha kreatif. Selain itu, penguatan kapasitas SDM kreatif melalui pelatihan digitalisasi, manajemen usaha, serta pemasaran berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Integrasi antara sektor kreatif dan teknologi juga membuka peluang baru dalam inovasi produk dan diversifikasi ekonomi daerah. Dukungan terhadap kolaborasi antara komunitas

kreatif, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata dapat memperluas pasar serta memperkuat identitas ekonomi daerah. Dengan strategi ini, sektor ekonomi kreatif tidak hanya menjadi sarana peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berakar pada potensi lokal.

3) **Pada tahap 3,** tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi pengembangan kawasan industri dan infrastruktur ekonomi yang ramah lingkungan** yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi daerah. Melalui perencanaan kawasan industri yang terintegrasi dan berbasis prinsip hijau, pembangunan diarahkan agar efisien dalam penggunaan energi, mengurangi limbah, serta meminimalkan dampak lingkungan. Pengembangan kawasan industri ini juga menjadi motor penggerak bagi peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti jaringan transportasi, energi bersih, dan sistem pengelolaan limbah terpadu. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri akan mendorong efisiensi produksi serta memperkuat daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menciptakan regulasi dan insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga contoh penerapan pembangunan hijau yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Langkah ini mendukung terciptanya struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, produktif, dan kompetitif melalui pengembangan kawasan industri yang modern dan berwawasan lingkungan.
- **Strategi fasilitasi kewirausahaan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan sektor informal** menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan akses terhadap pelatihan, permodalan, dan pendampingan usaha, para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk yang berdaya saing tinggi. Dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, karena kreativitas dan inovasi lokal dapat menjadi nilai tambah dalam memperluas pasar dan memperkuat identitas ekonomi daerah. Selain itu, pemberdayaan

UMKM di sektor hilirisasi komoditas unggulan, seperti timah, kuliner, dan kerajinan khas Pangkal Pinang, dapat mendorong terbentuknya rantai nilai yang lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha dengan investor, lembaga keuangan, serta platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas. Dengan demikian, strategi ini menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif dan hilirisasi yang tangguh, adaptif, serta berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

4) **Pada tahap 4**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau melalui penguatan distribusi, logistik lokal, dan intervensi pasar** merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan memperbaiki sistem distribusi dan logistik, terutama yang terhubung langsung dengan sentra produksi dan kawasan industri, ketersediaan barang dapat dijaga secara merata di seluruh wilayah Pangkal Pinang. Pengembangan infrastruktur logistik yang efisien juga akan menekan biaya transportasi dan rantai pasok, sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, intervensi pasar melalui operasi pasar, cadangan pangan daerah, dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal akan membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Strategi ini sekaligus memperkuat konektivitas antara kawasan industri dengan jaringan distribusi lokal, menciptakan sinergi yang mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi daerah. Dengan stabilitas harga yang terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan pelaku usaha dapat beroperasi lebih optimal. Langkah ini pada akhirnya berkontribusi pada penguatan fondasi ekonomi lokal yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5) **Pada tahap 5,** tema pembangunan adalah **Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi **"Penguatan ekonomi biru yang tumbuh stabil dan berkelanjutan".** Strategi ini menekankan pada optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan pesisir sebagai penggerak ekonomi lokal yang produktif dan ramah lingkungan. Melalui

pendekatan ini, kegiatan perikanan, pariwisata bahari, dan industri pengolahan hasil laut diarahkan untuk memberikan nilai tambah tinggi bagi masyarakat pesisir. Hilirisasi komoditas unggulan seperti olahan ikan, rumput laut, dan produk turunan hasil laut menjadi kunci dalam memperkuat rantai nilai ekonomi biru sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan kawasan industri berbasis kelautan juga berperan penting dalam memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah serta mendukung efisiensi rantai pasok. Selain itu, integrasi ekonomi kreatif dalam sektor ini mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Penguatan kapasitas pelaku usaha lokal melalui inovasi dan teknologi turut memastikan agar pengelolaan sumber daya laut tetap berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini bukan hanya menumbuhkan ekonomi biru yang stabil, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi lokal yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Mendukung ekonomi kreatif dan UMKM**

   Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan ekonomi kreatif dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang berdaya saing. Melalui dukungan terhadap sektor-sektor seperti kuliner, fesyen, kriya, dan digital, Pangkal Pinang berupaya menciptakan ekosistem usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk lokal agar mampu menembus pasar nasional maupun global. Dengan memperkuat jejaring usaha antar pelaku lokal, ekonomi kreatif tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkaya identitas budaya daerah. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM turut menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pangkal Pinang yang *Mapan secara perekonomian dan daya saing daerah*, di mana pertumbuhan ekonomi berakar pada potensi lokal dan kreativitas warganya

2. **Meningkatkan nilai tambah produk unggulan lokal seperti perikanan dan pangan melalui industrialisasi skala kecil-menengah, teknologi tepat guna, dan penguatan rantai pasok yang terintegrasi**

   Arah kebijakan ini menitikberatkan pada pengembangan produk unggulan Pangkal Pinang seperti timah, perikanan, pangan, dan kerajinan lokal melalui industrialisasi dan inovasi teknologi. Dengan penerapan teknologi tepat guna, pelaku usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan efisiensi produksi serta

mutu hasil olahan. Pemerintah berperan dalam memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir agar nilai tambah ekonomi tetap berada di wilayah lokal. Integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan pemasaran akan mempercepat pertumbuhan industri daerah. Selain memperluas lapangan kerja, kebijakan ini juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan begitu, pengembangan nilai tambah produk unggulan menjadi motor penggerak utama bagi terciptanya Pangkal Pinang yang mapan secara perekonomian dan memiliki daya saing yang kokoh di tingkat regional maupun nasional.

3. **Pemberdayaan ekonomi komunitas**

   Kebijakan pemberdayaan ekonomi komunitas bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah melalui pengembangan potensi lokal. Pemerintah mendorong pembentukan kelompok usaha mikro, koperasi, serta wirausaha sosial yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di tingkat komunitas. Pendekatan ini menitikberatkan pada peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, serta pendampingan usaha agar komunitas dapat mandiri secara ekonomi. Dengan memperkuat ekonomi berbasis masyarakat, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Kebijakan ini mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan karena setiap warga diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam roda perekonomian. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi komunitas menjadi pilar penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi daerah.

4. **Penyediaan lahan industri yang sesuai dengan tata ruang, pembangunan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi investasi yang berpihak pada pelaku lokal dan penyerapan tenaga kerja**

   Kebijakan ini difokuskan pada penciptaan lingkungan investasi yang kondusif melalui penyediaan kawasan industri terencana dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan kesesuaian tata ruang agar pengembangan kawasan industri tidak mengganggu keseimbangan lingkungan maupun sosial. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, energi, dan utilitas publik diperkuat untuk menarik investor dan memperlancar kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal serta penyerapan tenaga kerja daerah. Fasilitasi investasi diarahkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dengan terbentuknya ekosistem industri yang

inklusif dan adaptif, Pangkal Pinang semakin mendekati visinya sebagai daerah yang mapan secara perekonomian dan berdaya saing tinggi.

5. **Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penguatan daya beli masyarakat**

   Arah kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga melalui pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah memperkuat sistem distribusi dan logistik agar pasokan bahan pangan tetap terjaga dan harga tidak berfluktuasi tajam. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan sektor pertanian lokal menjadi kunci dalam menjaga rantai pasok yang efisien. Selain itu, intervensi pasar dilakukan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang dapat menurunkan kesejahteraan. Kebijakan ini juga mendukung pelaku usaha kecil dengan menjaga daya serap pasar terhadap produk lokal. Dengan stabilitas ekonomi masyarakat yang terjaga, daya beli meningkat dan roda perekonomian daerah berputar lebih kuat, menjadikan Pangkal Pinang semakin mapan secara perekonomian dan berdaya saing berkelanjutan.

6. **Peningkatan keterampilan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan perluasan akses terhadap pasar kerja melalui sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)**

   Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi, tenaga kerja Pangkal Pinang diharapkan memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri. Pemerintah menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memperkuat *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, pengembangan pusat pelatihan dan inkubasi usaha membantu mencetak tenaga kerja mandiri dan inovatif. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperluas kesempatan kerja yang layak dan berdaya saing. Dengan tersedianya SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman, Pangkal Pinang akan semakin mapan secara perekonomian dan memiliki daya saing daerah yang tangguh.

Misi 3. Melakukan mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, ialah "**Peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik."** Upaya ini dalam rangka membangun tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan sistem digital, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur, pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, efisien, dan bebas dari praktik koruptif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan Keputusan publik juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, budaya kerja yang professional dan berintegritas terus dikembangkan agar setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikiran, pemerintahan yang dijalankan mencerminkan semangat Amanah dalam mengabdi kepada masyarakat secara adil, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun dalam mengimplementasikan strategi utama tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut :

1) **Pada tahap 1**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi Penguatan integritas birokrasi** menekankan pentingnya membangun aparatur yang beretika, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Melalui penerapan sistem pengawasan internal yang efektif, peningkatan kapasitas moral aparatur, serta penegakan disiplin kerja yang konsisten, birokrasi diarahkan menjadi lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Upaya ini juga didukung oleh penguatan budaya kerja yang menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Dengan birokrasi yang berintegritas, setiap kebijakan dan pelayanan publik dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini mencerminkan nilai *amanah*

dalam tata kelola pemerintahan, di mana kepercayaan masyarakat dijaga melalui komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian yang tulus

- **Strategi Penerapan *merit system* dalam promosi dan penempatan jabatan** bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Dengan menempatkan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja, proses karier di lingkungan pemerintahan menjadi lebih transparan dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun politik. Sistem ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kompetitif dan berintegritas, di mana setiap pegawai termotivasi untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain memperkuat kualitas sumber daya aparatur, penerapan *merit system* juga menjadi bentuk nyata tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui kebijakan ini, nilai *amanah* dalam tata kelola pemerintahan tercermin dalam praktik yang jujur, adil, dan berorientasi pada profesionalisme.

2) **Pada tahap 2**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan investor lokal,** diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, adil, dan transparan. Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Melalui regulasi yang jelas, prosedur perizinan yang sederhana, serta penegakan hukum yang konsisten, pelaku usaha memperoleh jaminan dalam menjalankan kegiatan ekonominya tanpa rasa khawatir terhadap ketidakpastian kebijakan. Upaya ini sejalan dengan semangat Amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, di mana setiap kebijakan diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
- **Strategi Pembenahan integrasi data dan transformasi proses pelayanan** bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui integrasi data yang terkelola secara terpadu, proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan juga membuka peluang bagi peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mengakses berbagai kemudahan perizinan, bantuan, dan informasi ekonomi secara merata. Langkah ini mencerminkan nilai amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, di mana setiap aparatur dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam memberikan pelayanan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, kebocoran maupun penyimpangan dapat diminimalkan, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Pada akhirnya, transformasi ini menjadi landasan penting bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

3) **Pada tahap 3**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi peningkatan daya saing kelembagaan daerah hingga tingkat nasional dan internasional ini** diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pembangunan secara optimal. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta optimalisasi tata kelola berbasis kinerja dan inovasi. Dengan memperkuat sistem kelembagaan yang adaptif dan berdaya saing, daerah mampu mengelola potensi sumber daya secara lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur sebagai prasyarat peningkatan daya saing daerah. Infrastruktur yang terbangun secara adil di seluruh wilayah akan memperkuat konektivitas ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang usaha. Seluruh langkah tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai Amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- **Strategi pengembangan layanan digital pemerintahan yang akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat** bertujuan untuk menciptakan sistem

pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mempercepat proses pelayanan, meminimalkan birokrasi yang berbelit, serta memastikan keterbukaan informasi publik. Inovasi digital ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang modern dan berbasis data. Selain meningkatkan kualitas layanan, strategi ini juga berkontribusi pada pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah, agar setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperkuat inklusivitas pembangunan. Seluruh proses ini dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, sehingga setiap kemajuan teknologi diiringi dengan tanggung jawab moral dan integritas dalam melayani masyarakat.

4) **Pada tahap 4,** tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi mewujudkan iklim investasi yang bersahabat dan pelayanan perizinan yang efisien, transparan, serta pro-rakyat** diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal maupun skala besar. Dengan memperkuat sistem perizinan yang cepat, terbuka, dan berbasis digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Upaya ini juga mempercepat arus investasi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan kondusivitas wilayah menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan kepastian berusaha, sehingga investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga publik berjalan harmonis. Seluruh langkah tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi misi amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, sehingga iklim investasi yang tercipta tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan integritas dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
- **Strategi peningkatan kolaborasi lintas sektor dan komunitas** bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat

dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama yang terbuka dan partisipatif, berbagai potensi lokal dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat jejaring sosial dan ekonomi daerah, termasuk dalam pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas dan kekuatan Pangkal Pinang. Keterlibatan komunitas budaya dan pelaku kreatif lokal menjadi penting dalam menjaga warisan tradisi agar tetap hidup di tengah arus modernisasi dan transformasi digital. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga melestarikan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan. Seluruh proses ini dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip Amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, memastikan setiap bentuk kerja sama dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

5) **Pada tahap 5,** tema pembangunan ini Adalah **Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:

- **Strategi terwujudnya birokrasi yang kompeten, sejahtera, dan produktif** diarahkan untuk membangun aparatur yang memiliki kapasitas tinggi, integritas kuat, serta motivasi kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Melalui peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang kondusif, birokrasi diharapkan mampu bekerja lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Birokrat yang profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kepekaan sosial dalam memberikan pelayanan yang adil dan berimbang bagi seluruh masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi wujud nyata dari penerapan upaya menciptakan Amanah dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, di mana setiap aparatur negara diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan transparansi. Melalui semangat Amanah tersebut, birokrasi tidak hanya berfokus pada kinerja administratif, tetapi juga pada pelayanan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tercipta birokrasi yang kompeten, sejahtera, dan produktif sebagai fondasi pemerintahan yang dipercaya dan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjuta.

Strategi-strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Reformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan dan tata kelola kepegawaian yang profesional berbasis *merit sistem***

   Reformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan dan tata kelola kepegawaian yang profesional berbasis sistem merit merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas. Arah kebijakan ini menekankan penataan kelembagaan yang efektif dan akuntabel, serta pengelolaan aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi prinsip objektivitas, keadilan, dan kompetensi dalam setiap proses manajemen kepegawaian. Penerapan sistem merit memastikan bahwa rekrutmen, penempatan, promosi, dan pengembangan karier aparatur dilaksanakan secara terbuka dan berbasis kinerja, sehingga memperkuat transparansi birokrasi dan meminimalkan praktik non-prosedural. Penegakan kode etik dan disiplin aparatur menjadi fondasi dalam membangun integritas birokrasi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menumbuhkan budaya kerja profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. Didukung oleh penguatan mekanisme pengawasan internal dan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan, reformasi ini mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, birokrasi yang transparan dan berintegritas menjadi pilar utama dalam menghadirkan pemerintahan yang amanah dan profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2. **Penyederhanakan prosedur perizinan usaha dan mempercepat waktu pelayanan publik berbasis digital**

   Penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan percepatan waktu pelayanan publik berbasis digital merupakan arah kebijakan strategis untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan berintegritas. Kebijakan ini diarahkan pada pemangkasan tahapan perizinan, standarisasi proses layanan, serta pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi guna meningkatkan kepastian waktu, biaya, dan persyaratan pelayanan. Melalui digitalisasi layanan perizinan dan pelayanan publik, proses pelayanan menjadi lebih mudah diakses, terukur, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang. Integrasi data antar perangkat daerah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Arah kebijakan ini juga memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Dengan demikian, percepatan pelayanan publik berbasis digital menjadi instrumen penting dalam menghadirkan pemerintahan yang amanah dan profesional, yang berorientasi pada hasil serta berpihak pada kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

3. **Kolaborasi antar instansi dan inovasi kepemimpinan publik**

   Kolaborasi antar instansi dan inovasi kepemimpinan publik berperan penting dalam memperkuat sinergi pemerintahan yang kolaboratif dan berintegritas tinggi. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga, koordinasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Kepemimpinan publik yang inovatif juga mendorong transformasi digital, efisiensi birokrasi, dan solusi kreatif terhadap permasalahan daerah. Dengan budaya kerja kolaboratif, pemerintah kota dapat menciptakan tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Langkah ini mencerminkan semangat pemerintahan amanah dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, yang berfokus pada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

4. **Peningkatan aksesibilitas layanan masyarakat hingga tingkat RT**

   Peningkatan aksesibilitas layanan hingga tingkat RT merupakan wujud nyata pemerintahan yang pro-rakyat, inklusif, dan transparan. Melalui pemanfaatan layanan digital yang mudah diakses, pemerintah dapat memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan publik tanpa hambatan geografis atau birokratis. Program ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat paling bawah, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap prinsip amanah dan profesional, yakni memastikan hak dasar warga terpenuhi secara adil. Langkah ini sekaligus mencerminkan tata kelola yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. **Peningkatan pengelola dan kelembagaan pengawasan penggunaan anggaran pada efektivitas perencanaan, kinerja dan pengendalian evaluasi pembangunan**

   Peningkatan pengelolaan dan penguatan kelembagaan pengawasan penggunaan anggaran diarahkan untuk memastikan efektivitas perencanaan, kinerja, serta

pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Arah kebijakan ini menekankan penguatan peran pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, serta integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang kuat dan berbasis kinerja, setiap tahapan pembangunan dapat dikendalikan secara efektif sekaligus mencegah pemborosan dan penyimpangan anggaran. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, menjunjung tinggi etika jabatan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. **Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal berbasis potensi riil, tata kelola digital, dan kolaborasi produktif antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat**

   Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang dikelola secara transparan dan efisien. Dengan dukungan tata kelola digital, pemerintah kota berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus memperluas basis pendapatan dari sektor potensial seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sinergi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi riil daerah juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis data dan inovasi. Dengan meningkatnya kinerja keuangan daerah, pembangunan dapat berlangsung lebih mandiri dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan kemandirian fiskal ini menjadi langkah nyata dalam membangun Pangkal Pinang yang mapan secara perekonomian dan unggul dalam daya saing daerah.

Misi 4. Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah, ialah dengan **"Penguatan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran."** Strategi ini bertujuan untuk membangun tatanan masyarakat yang rukun, saling

menghargai, dan berdaya dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Melalui upaya ini, pemerintah mendorong terciptanya ruang interaksi sosial yang inklusif, di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Penguatan nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, strategi ini mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menjaga keharmonisan lingkungan sosialnya. Dengan masyarakat yang **rukun dan berdaya**, potensi konflik dapat ditekan dan semangat kebersamaan dalam membangun kesejahteraan bersama semakin kuat, menciptakan lingkungan sosial yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun dalam mengimplementasikan strategi utama tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut :

1) **Pada tahap 1**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan melalui strategi:
   - **Pengembangan karakter religius dan nilai nilai budaya lokal dan keberlanjutan warisan budaya yang menjunjung semangat kebersamaan dan gotong royong."** Strategi ini menekankan pentingnya pengembangan karakter religius dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam mempererat hubungan antarwarga. Dengan memperkuat akar budaya dan keimanan, masyarakat tidak hanya memiliki ketahanan moral, tetapi juga semangat untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan sosial. Upaya ini mendorong terciptanya masyarakat yang rukun dan berdaya, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Pada akhirnya, langkah ini mendukung terwujudnya ruang publik yang aman, nyaman, dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat.
   - **Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam perilaku sosial dan pembangunan** berfokus pada upaya menanamkan kembali kearifan lokal sebagai dasar dalam setiap aktivitas sosial dan proses pembangunan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam membangun karakter masyarakat yang berbudaya dan berintegritas. Melalui pembangunan budaya yang berakar pada identitas lokal, masyarakat diarahkan untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat rasa memiliki

terhadap daerahnya. Selain itu, integrasi nilai budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan moral dan sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkepribadian dan berkarakter lokal.

2) **Pada tahap 2**, tema pembangungan adalah **Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi **"Peningkatan promosi produk kerajinan, kuliner, dan karya komunitas sebagai wujud ekonomi kreatif yang berakar dari nilai-nilai kebhinekaan."** Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan promosi produk kerajinan, kuliner, dan karya komunitas sebagai bentuk penguatan ekonomi kreatif yang tumbuh dari kekayaan nilai-nilai kebhinekaan. Melalui promosi yang inklusif dan kolaboratif, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang mempererat hubungan antarwarga. Kegiatan ekonomi kreatif ini tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kebanggaan terhadap identitas budaya daerah. Dengan demikian, masyarakat menjadi rukun dan berdaya, aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berbasis kebersamaan. Langkah ini sekaligus mendukung terwujudnya ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah sebagai wadah interaksi sosial yang harmonis dan produktif.

3) **Pada tahap 3,** tema pembangunan adalah **"Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan."** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi **"Penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok tanpa diskriminasi."** Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah sebagai sarana interaksi sosial yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui ruang publik yang terbuka dan mudah diakses, warga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya secara bersama-sama. Interaksi yang terbangun di ruang publik ini memperkuat rasa saling menghargai, memperluas jejaring sosial, dan menumbuhkan solidaritas antarkelompok. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih rukun dan berdaya, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

4) **Pada tahap 4,** tema pembangunan adalah "**Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah**" Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi **"Peningkatan landasan stabilitas wilayah yang demokratis dan kondusif."** Strategi ini berfokus pada penguatan landasan stabilitas wilayah yang demokratis dan kondusif sebagai prasyarat terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Melalui penegakan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap perbedaan, suasana kebersamaan dapat terus terjaga. Kondisi ini mendorong tumbuhnya masyarakat yang rukun dan berdaya, yang mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Dengan stabilitas yang terjaga, ruang publik dapat berkembang menjadi ruang yang aman, inklusif, dan ramah, tempat warga berinteraksi tanpa rasa takut maupun diskriminasi. Pada akhirnya, strategi ini memperkuat kohesi sosial dan mendukung pembangunan daerah yang damai serta berkelanjutan.

5) **Pada tahap 5,** tema pembangunan adalah **"Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh"** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi "**Perwujudan kebhinekaan budaya, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas diplomasi kultural berbasis identitas lokal."** Strategi ini menitikberatkan pada perwujudan kebhinekaan budaya sebagai kekuatan utama dalam memperkuat kohesi sosial dan memperluas diplomasi kultural berbasis identitas lokal. Melalui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta pengakuan terhadap keberagaman, masyarakat didorong untuk saling menghormati dan berkolaborasi dalam berbagai aktivitas sosial maupun budaya. Upaya ini memperkuat ikatan antarwarga dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan berdaya. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman, ruang-ruang publik pun dapat berkembang menjadi ruang yang aman, inklusif, dan ramahvbagi semua kelompok. Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat citra Pangkal Pinang sebagai kota yang terbuka dan berbudaya.

Strategi-strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. **Penyelenggaraan festival kerukunan budaya Nusantara**

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan dan semangat kebersamaan sebagai wadah interaksi lintas budaya dan generasi. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, dan kuliner lokal, sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat. Melalui partisipasi aktif warga dalam festival ini, tercipta ruang dialog

dan kolaborasi sosial yang memperkuat solidaritas antar komunitas. Langkah ini turut membangun masyarakat yang rukun dan berdaya, di mana nilai toleransi dan gotong royong tumbuh secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyelenggaraan festival ini mendorong terbentuknya ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah, tempat seluruh warga dapat berkumpul, berekspresi, dan merayakan kebhinekaan dengan damai serta penuh semangat persatuan.

2. **Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan karakter sosial**
   Arah kebijakan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan karakter sosial berperan penting dalam mewujudkan pembangunan sosial budaya yang tangguh dan berkelanjutan karena keduanya memperkuat identitas, kohesi, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Pelestarian budaya lokal menjaga jati diri, tradisi, dan pengetahuan masyarakat sehingga tidak tergerus oleh arus modernisasi, sementara penguatan karakter sosial seperti gotong royong, toleransi, dan solidaritas membentuk modal sosial yang kokoh untuk mendorong partisipasi dan mencegah kerentanan sosial. Sinergi antara pelestarian budaya dan pembentukan karakter ini menciptakan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai lokal namun tetap adaptif dan inklusif, sehingga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sosial budaya yang berkelanjutan dari generasi ke generasi.
3. **Revitalisasi warisan budaya sebagai fondasi pembangunan bertujuan** untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi identitas dan kekuatan sosial masyarakat. Melalui pelestarian seni, bahasa, adat istiadat, serta peningkatan apresiasi terhadap sejarah dan budaya lokal, strategi ini memperkuat jati diri daerah dalam menghadapi arus modernisasi. Penguatan nilai-nilai budaya lokal juga mendorong tumbuhnya rasa bangga dan kepemilikan masyarakat terhadap warisan leluhur, sekaligus memperkuat kohesi sosial antarwarga. Revitalisasi ini tidak hanya difokuskan pada pelestarian, tetapi juga pada pemanfaatan budaya sebagai sumber inovasi dan inspirasi dalam pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, warisan budaya menjadi fondasi moral dan sosial dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, dan tetap berakar pada identitas lokal.
4. **Penguatan kerukunan sosial dan harmoni kehidupan bermasyarakat serta pengembangan demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas**
   Penguatan kerukunan sosial dan harmoni kehidupan bermasyarakat serta pengembangan demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, toleran, dan saling menghargai dalam keberagaman. Arah kebijakan ini menekankan penguatan nilai-nilai kebersamaan, dialog sosial, dan gotong royong, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik secara adil dan setara. Melalui demokrasi lokal yang menjunjung integritas, transparansi, dan keterwakilan seluruh kelompok masyarakat, diharapkan tercipta kepercayaan sosial dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan demokratis menjadi fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang rukun dan berdaya dalam mendukung pembangunan daerah.

Misi 5. Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup, ialah **"Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan."** Strategi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam melalui pendekatan yang berpijak pada nilai-nilai budaya lokal. Tradisi masyarakat Pangkal Pinang yang menjunjung harmoni dengan alam menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya. Upaya ini diwujudkan melalui penataan ruang yang berawasan lingkungan serta meningkatkan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya menjaga daya dukung lingkungan, tetapi jgua memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keberlanjutan hidup bersama.

Adapun dalam mengimplementasikan strategi utama tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut :

1) **Pada tahap 1**, tema pembangungan adalah **Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan**. Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi meliputi:
   - **Strategi pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif.** Strategi ini berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam di sekitarnya. Pendekatan ini menempatkan warga bukan hanya

sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal yang menghormati alam dan keseimbangan ekosistem, masyarakat didorong untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti gotong royong, pelestarian kawasan hijau, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi wujud nyata dari peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dengan partisipasi yang luas, kesadaran kolektif, serta nilai budaya yang memperkuat ketahanan sosial-ekologis, strategi ini berperan penting dalam membangun masyarakat yang tangguh**,** serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

- **Strategi Peningkatan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pelestarian ekosistem.**

  Strategi peningkatan kepedulian kolektif masyarakat terhadap pelestarian ekosistem dan keberlanjutan warisan budaya bertujuan membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan kebudayaan lokal. Upaya ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui penguatan nilai budaya lokal seperti gotong royong, keselarasan dengan alam, dan rasa hormat terhadap warisan leluhur, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem di sekitarnya. Edukasi dan pemberdayaan komunitas dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan partisipatif seperti penghijauan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan pelestarian kawasan budaya menjadi wujud nyata penerapan strategi ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat memperkuat kapasitas sosial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan budaya. Melalui langkah ini diharapkan terbentuk masyarakat yang tangguh, berdaya, dan berwawasan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

2) **Pada tahap 2**, tema pembangunan adalah **Pangkal Pinang Maju Berbasis Perdagangan dan Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan.** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi

- **Strategi mendorong adopsi prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi, distribusi, dan tata kelola usaha.** Strategi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan selaras

dengan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi hijau, efisiensi energi, dan pengurangan limbah produksi, pelaku usaha didorong untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Strategi ini juga menekankan pentingnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, agar setiap aktivitas ekonomi tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelestarian sumber daya alam. Di sisi lain, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup menjadi kunci keberhasilan implementasi prinsip ini. Masyarakat diajak berperan aktif sebagai konsumen dan produsen yang sadar lingkungan melalui edukasi dan pembinaan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan sistem ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan lingkungan dan sosial yang tangguh untuk masa depan.

3) **Pada tahap 3**, tema pembangunan ialah "**Pangkal Pinang Nyaman berbasis pemerataan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkelanjutan.**" Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi

- **Strategi memperkuat pembangunan sosial-budaya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan**. Menitikberatkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui penguatan nilai-nilai **budaya** lokal seperti gotong royong, kearifan dalam mengelola alam, serta solidaritas sosial, masyarakat dibentuk menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan sosial maupun lingkungan. Strategi ini juga mendorong peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga warisan alam dan budaya. Kegiatan berbasis komunitas seperti pelestarian situs budaya, penghijauan, serta revitalisasi tradisi lokal menjadi sarana untuk memperkuat identitas daerah sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya agar selaras dengan prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini menciptakan masyarakat yang berdaya, tangguh secara sosial-budaya, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

- **Strategi penataan ruang yang ramah lingkungan dan berkeadilan** diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Pendekatan ini menempatkan prinsip berwawasan lingkungan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang, sehingga setiap pemanfaatan lahan dilakukan secara bijak, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pengendalian alih fungsi lahan, perlindungan kawasan hijau, serta pengaturan zonasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, strategi ini memastikan keadilan dalam akses terhadap ruang dan sumber **daya**. Penataan ruang yang berwawasan lingkungan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian, strategi ini berperan penting dalam menciptakan ruang hidup yang tertata, nyaman, serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) **Pada tahap 4,** tema pembangunan ialah **"Pangkal Pinang Makmur berbasis pelestarian kebudayaan dan kondusivitas wilayah"** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi:

- **Strategi pengendalian degradasi ekosistem** berfokus pada upaya menjaga keseimbangan alam melalui pencegahan kerusakan lingkungan dan pemulihan kawasan yang terdampak. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dengan memperkuat kesadaran kolektif terhadap pelestarian ekosistem. Melalui edukasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta partisipasi aktif warga dalam kegiatan konservasi, masyarakat didorong untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Strategi ini juga mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan guna mencegah penurunan kualitas lahan dan air. Dengan meningkatnya kepedulian dan tangguhnya masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, pengendalian degradasi ekosistem dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
- **Strategi peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana** diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh **dalam** mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Melalui penguatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, strategi ini juga mendorong perilaku adaptif terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak. Edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta penguatan kelembagaan lokal menjadi bagian penting dalam membangun budaya tangguh dan sadar risiko. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, daerah akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana, sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

5) **Pada tahap 5,** tema pembangunan ialah **"Perwujudan Pangkal Pinang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh"** Untuk mendukung tema ini, ditetapkan strategi

- **Strategi perwujudan masyarakat yang siap dan tanggap bencana** menekankan pentingnya membangun kesadaran, kesiapsiagaan, serta kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko bencana alam. Melalui edukasi berkelanjutan, pelatihan mitigasi, dan penguatan sistem peringatan dini, masyarakat didorong untuk memiliki ketangguhan dalam melindungi diri dan lingkungannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup, karena lingkungan yang terjaga dengan baik dapat mengurangi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Dengan menanamkan nilai tangguh dan peduli terhadap alam, masyarakat tidak hanya menjadi reaktif terhadap bencana, tetapi juga proaktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pada akhirnya, strategi ini membentuk komunitas yang lebih siaga, mandiri, dan berdaya dalam menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, serta selaras dengan alam.

Strategi-strategi di atas memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. **Peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan berbasis mitigasi bencana**
   Peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian lingkungan hidup serta kesiapsiagaan berbasis mitigasi bencana diarahkan untuk membangun ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini menekankan penguatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam upaya perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta peningkatan kapasitas menghadapi potensi bencana sejak tahap

pencegahan dan mitigasi. Melalui sinergi lintas sektor, edukasi kebencanaan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal serta teknologi, diharapkan terbentuk masyarakat yang tangguh, sadar risiko, dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kota Pangkal Pinang. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 7
Program Prioritas Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
1. Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	**T.1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata**			**Tingkat Kemiskinan**		
		1.1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif		**Indeks Pembangunan Manusia**		
			Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal	Indeks Distribusi Guru SD (Dengan satuan: Indeks)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Distribusi Guru SMP (Dengan satuan: Indeks)		
			Meningkatnya Akses Pendidikan PAUD dan NON FORMAL	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal kesetaraan (dengan satuan persen)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan kualifikasi S1/D IV (Dengan satuan: Persen) .		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Akses Pendidikan PAUD dan NON FORMAL	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya perpustakaan yang bersertifikat	Persentase Perpustakaan yang sudah terakreditasi (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersedian Arsip (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan dan Keaktipan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dengan Satuan:%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Risiko Terinfeksi HIV (Dengan Satuan:%)		
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Masa krisis,KLB dan kejadian lainnya (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Surveilans, Imunisasi dan kesehatan Haji (Dengan Satuan:%)		
			Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesionalisme yang baik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit (Dengan Satuan:%)		
			Terwujudnya pelayanan kesehatan prima	Indeks capaian indikator pelayanan di rumah sakit (Dengan Satuan:%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			dan profesionalisme yang baik			
			Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesionalisme yang baik	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu dan Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dengan Satuan:orang dan %)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Angka kematian balita (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan	Pesentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Balita (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan Limbah Medis sesuai standart (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olaraga (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 75% dengan pencapaian SPM (Dengan Satuan:%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase Fasyankes yang sesuai standar (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase puskesmas dan Labkesda dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase Integrasi informasi kesehatan (Dengan Satuan:%)		
			meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang sesuai standar (Dengan Satuan:%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda	Persentase Pembinaan dan Pengembangan olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Keikutsertaan Atlet Kota dalam kejuaraan tingkat Provinsi. (Dengan Satuan: Persen)		
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Dengan Satuan: Persen)		
			Meningkatnya pelatih yang bersertifikasi	Persentase Cakupan Pelatih Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persen)		
		1.2 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		**Indeks Gini**		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
				kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan: Persen)		
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan: Persen)		
				Persentase Pemerlu Pelayanan 100 Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (Dengan Satuan: Persen)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH (Dengan Satuan:Skor/Nilai)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Keluarga Sejahtera			Keluarga Berencana
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		1.3 Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan		**Indeks Pembangunan Gender**		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		1.4 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan inklusif		**Indeks Infrastruktur**		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (Dengan satuan: persen)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kota yang aman, nyaman, dan andal.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Jalan yang Laik Fungsi	kondisi ideal (Dengan satuan: Persen)		
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)	Persentase Titik Parkir illegal dijalan kota yang ditertibkan (Dengan satuan: Persen)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta	**T.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
				PDRB per Kapita		
				Indeks Daya Saing Daerah		
		2.1 Meningkatnya daya saing perekonomian daerah		**Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang Terhadap Provinsi**		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
peningkatan daya saing tenaga kerja			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Dengan satuan: Kg)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok Perikanan Budidaya yang dibantu dan dibina (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) (dengan satuan: Kg/ Kapita/ Tahun)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan keamanan pangan (Dengan Satuan: Persen)		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Kg)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap yang dibantu dan dibina (Dengan Satuan: Persen)		
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (sapi/ kambing/ ayam) (Dengan Satuan: Persen)		
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Dengan Satuan: Persen)		
		2.2 Menguatnya kapasitas sektor unggulan daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif		**Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB**		
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis yang dipromosikan (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				LPE Kategori Industri Pengolahan		
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Presentasi Koperasi yang dilindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang bertranformasi dari Informal ke Formal (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Dengan Satuan: Persen)	USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berpotensi ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		2.3 Meningkatnya kualitas kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja		**Tingkat Pengangguran Terbuka**		
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Dengan Satuan: Rupiah/ Orang)		
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
3. Melakukan Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang	**T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani**			**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		**Nilai SAKIP**		
			Meningkatnya tata Kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekda Bag Umum
				Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi (Dengan Satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPERIDA
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil	Persentase implementasi rencana	PROGRAM PENELITIAN DAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	kelitbangan (Dengan Satuan: Persen)	PENGEMBANGAN DAERAH	
				Maturitas SPIP		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase kualitas tata Kelola bidang pencegahan dan investigasi (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan SDM (Dengan satuan: Persen)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Pelayanan Publik, Sosial, dan Kemasyarakatan (Dengan satuan: Persen)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Keuangan dan Aset (Dengan satuan: Persen)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			anggaran ataupun kewenangan			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Pengawas Lainnya Tahun Anggaran N-1 (Dengan satuan: Persen)		
		3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital		**Indeks Pelayanan Publik**		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemiikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Dengan satuan: Persen)		
			Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (Dengan satuan: Persen)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan satuan: Persen)		
			Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan satuan: Persen)		
			Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan	Persentase Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kerjasama daerah yang efektif	Persentase Kerjasama Daerah yang efektif (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Nilai Evaluasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan satuan: Persen)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
			Terwujudnya penyelenggaraan event lembaga profesi ASN	Persentase event yang terlaksana (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Terpenuhinya pemberian penghargaan ASN	Persentase pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan satuan: Persen)		
			Terpenuhinya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Persentase ASN yang melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan ASN (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan sesuai dengan formasi (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja AS	Persentase pegawai dengan dengan SKP bernilai baik (Dengan satuan: Persen)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
			Meningkatnya penerimaan pajak Daerah	Persentase Ketetapan Pajak Daerah (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah
			Meningkatnya capaian pajak daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Presentase tersedianya dokumen penganggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Digital	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
4. Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembang-kan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah	**T.4. Menguatnya norma budaya dan stabilitas daerah yang kondusif**			**Indeks Harmoni**		
		4.1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan kerukunan umat beragama		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**		
			Meningkatnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (CB) peringkat Kota Pangkal Pinang	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			pengembangan kebudayaan	Kebudayaan (Dengan satuan: Persen)		
				Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama		
			Tertanganinya gangguan dan konflik secara efektif	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani .	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.2. **Meningkatnya kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah yang aman dan terkendali**		**Angka Kriminalitas**		
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan terhadap masyarakat (Dengan satuan: Persen)		Satpol PP
			Meningkatnya Penanganan Gangguan	Persentase Penyelenggaraan		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Ketentraman, Ketertiban Umum	Trantibumlinmas (Dengan satuan: Persen)		
			Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (Dengan satuan: Persen)		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satpol PP
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan satuan: Persen)		
5. Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan	**T.5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutran dan ketahanan lingkungan daerah**			**Penurunan Emisi GRK**		
		5.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.			Terlaksananya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati; Persentase RTH (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan (Dengan satuan: Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:%)		
			Meningkatnya Penanganan	Persentase Penanganan Tanggap Darurat (Dengan Satuan:%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM	NAMA OPD
			Bencana pada saat tanggap darurat			

3.2.3. Program-Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang 2025-2029

Program Unggulan Wali Kota Kota Pangkal Pinang dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan masyarakat. Selama masa kampanye, Wali Kota terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi janji Wali Kota terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan RPJM Daerah karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel 3. 8
Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
MISI 1: Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	**1. Program Pendidikan Bermutu Untuk Semua**	1) Pembangunan SMPN 11 dan SMPN 12 Kota Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Pengusulan ruang belajar (RKB) SMPN 11 Kota Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3) Persiapan pembangunan SMPN 12 Kota Pangkal Pinang : FS dan DED (APBD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4) Perlengkapan sekolah gratis untuk SD dan SMP (seragam gratis, tas dan alat tulis)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5) Bantuan siswa berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6) Bantuan beasiswa SD & SMP (siswa miskin)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7) Peningkatan dan pemerataan kualitas guru : pelatihan tenaga pendidikan dan kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8) Kajian pemberian insentif guru TK/PAUD, SD dan SMP : pembuatan raperda insentif guru	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9) Perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah SD dan SMP (revitalisasi bersumber dari APBN/DAK)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		10) Koordinator dan melakukan assesment terkait usulan revitalisasi sekolah PAUD, SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		11) Kajian relokasi SDN 11 Kampung Asam dan relokasi Pasar Kecamatan Rangkui (Jl. Irian)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12) Isu terkait guru Non ASN dibatasi hingga 31 Desember 2026 berdasarkan SE Menteri Pendidikan Menengah Nomor 7 Tahun 2026	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		13) Penguatan literasi dan kunjungan ke perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		14) Kolaborasi dengan dinas pendidikan terkait kunjungan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		15) Pengelolaan arsip dan pendampingan ke OPD	Program pengelolaan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		16) Pembuatan buku tentang budaya Nganggung dengan budaya Cheng Beng	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		17) Peningkatan kualitas PASKIBRAKA	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		18) Pembinaan ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
	2. Program Keluarga Sehat	1) Mobil pelayanan *home care*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2) BPJS gratis kolaborasi dengan Dinas Kesehatan	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
	3. Program Layanan Kesehatan Mudah Dan Merata	1) Masyarakat berobat gratis dengan KTP	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2) Pembentukan *Trauma Centre*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3) Persiapan pembentukan *Geriatri*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		4) Modernisasi dan digitalisasi pelayanan RSUD Depati Hamzah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		5) Event cek kesehatan gratis berkolaborasi dengan instansi lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		6) Peningkatan kualitas dan mutu tenaga kesehatan: pelatihan nakes	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		7) Peningkatan kualitas dan mutu sarana prasarana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan (RSUD)
		8) Promosi dan publikasi jenis-jenis pelayanan RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan (RSUD)
		9) Peningkatan dana BLUD (puskesmas)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan (RSUD)
		10) Integrasi KTP kota pangkal pinang dengan BPJS kesehatan	Program Pendaftaran Penduduk	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	4. Program Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender	1) Membantu program pembentukan dan pemberdayaan koperasi merah putih berdasarkan tipologi wilayah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		2) Pemberian insentif bagi nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3) Bantuan pakan ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4) Program bantuan benih dan calon induk ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		5) Optimalisasi tim penggerak PKK di setiap kecamatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana
		6) Program pemberdayaan perempuan berkelanjutan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB)
		7) Gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraa keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB)
		8) Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB)
		9) Bantuan hidup Rp 5 juta/ kk	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10) Bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		11) Renovasi rumah tidak layak huni (APBN) kolaborasi dengan Dinas Perkim	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		12) Pemenuhan kesediaan *readiness criteria* (RC) sekolah rakyat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		13) Penyelesaian dan *updating* data yang masih terlapor sebagai non-desil	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		14) Peningkatan kualitas hidup masyarakat berkolaborasi dengan OPD terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		15) Pemberdayaan masyarakat berkolaborasi dengan OPD terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		16) Bantuan kepada nelayan dimasa paceklik	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		17) Optimalisasi hibah ke tempat ibadah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	5. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Air Bersih, Energi, Dan Ketahanan Pangan	1) Pembangunan SPAM selindung (embung ekaguna)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2) Pembangunan WTP Tua Tunu	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3) Penyelesaian pembebasan lahan SPAM Selindung (Embung Ekaguna)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4) Optimalisasi sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		5) Program ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
		6) Penguatan KWT untuk ketahanan pangan keluarga	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
		7) Revitalisasi rumah potong hewan (RPH)	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
		8) Pembinaan program ketahanan pangan perkotaan berbasis *urban farming*	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
		9) Perencanaan untuk ketahanan pangan sektor perikanan (ex. Lahan rinjani)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6. Program Pengembangan Dan Pemerataan Infrastruktur Publik	1) Revitalisasi pasar pagi Kota Pangkal Pinang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		2) Persiapan pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar di setiap kecamatan (pembebasan lahan di PU),	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		3) Penataan dan pengelolaan pasar induk	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		4) Percepatan penyelesaian penyusunan RTRW kota pangkal pinang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5) Penyelesaian tindak lanjut hasil audit tata ruang (pelanggaran tata ruang)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6) Pembebasan lahan pasar kecamatan (skala prioritas)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7) Penyusunan RDTR kota pangkal pinang (note: prioritas RTRW harus selesai terlebih dahulu)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8) Pembangunan dan perawatan jalan, saluran/selokan dan trotoar di kota pangkal pinang	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9) Kolaborasi dengan DLH tentang penataan kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10) Internet gratis di beberapa fasum	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11) Raperda penyelenggaraan kabel *fiber optic* dan lainnya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		12) Kajian kabel bawah tanah kolaborasi dengan PU	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		13) Pengadaan server dan ruang server untuk pelayanan publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		14) "Pangkal Pinang Terang Benderang" pemasangan lampu jalan / PJU di wilayah pangkal pinang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		15) Pengelolaan dan inovasi parkir modern	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		16) Penataan parkir terutama di kawasan pusat kota dan perdagangan, badan jalan, pasar dan sekolah-sekolah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		17) Penyediaan dan pemeliharaan PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		18) Pemetaan dalam penataan parkir di kawasan potensial	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		19) Penguatan sarana dan prasarana transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		20) Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		21) RT berdaya Rp 50 juta/tahun	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
	7. Program Fasilitasi Perumahan Rakyat Untuk Keadilan Akses Hunian	1) Pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK)/ rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi *backlog* rumah yang tidak layak.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		2) Usulan pembangunan 2 *tower* rusunawa	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3) Penyelesaian serah terima PSU perumahan yang telah memenuhi kriteria	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4) penyusunan RP3KP	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
MISI 2: Mewujudkan perekonomian yang mapan melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja	**8. Program Penguatan Ekonomi Dan Wirausaha Lokal**	1) Bantuan modal usaha Rp 3 juta s/d Rp 100 juta untuk komunitas dan rumah produksi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		2) UMKM naik kelas : pembinaan, pendampingan, pelatihan, sertifikasi halal, sertifikasi HACCP, sertifikasi HKI dan PiRT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		3) Pembangunan tempat usaha terpadu bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		4) Penataan dan pengelolaan UMKM dan pedagang kaki lima	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Pemuda dan Olahraga
		5) Event UMKM dan promosi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		6) Event olahraga tahunan piala wali kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		7) Event kepemudaan berbasis budaya lokal	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		8) Festival wirausaha muda untuk pemula berkolaborasi dengan DISNAKER dan DISKOPDAG UMKM	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	9. Program Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	1) Pemanfaatan eks puskesmas Gerunggang menjadi rumah produksi pengolahan nanas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		2) Pembangunan kampung nelayan merah putih	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3) Penguatan sarana dan prasarana bagi nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4) Sosialisasi dan pembinaan layanan sertifikasi pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5) Bimtek budidaya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
	10. Program Pengembangan Kawasan Industri	1) Persiapan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya untuk perubahan kawasan peruntukan industri menjadi kawasan industri Ketapang Kota Pangkal Pinang (PSN)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		2) Persiapan dokumen pendukung untuk pengusulan pengembangan pelabuhan Pangkal Balam menjadi proyek strategis nasional (PSN)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	1) Pembangunan gedung kesenian Kota Pangkal Pinang (APBN)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Peningkatan dan kepengelolaan sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		3) Festival ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		4) Pengadaan kapal kayu, dermaga serta fasilitas pendukung, wc dan *rest area* untuk sejagat (2027)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	12. Program Pangkal Pinang Siap Kerja	1) Pembangunan balai latihan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2) *Job Fair*/ bursa lowongan kerja semesteran/tahunan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		3) Pangkal Pinang Siap Kerja : bantuan siap kerja senilai 2 juta untuk gen z dan milenial untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP yang berkelanjutan hingga bekerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		4) Kolaborasi dengan DISKOPDAG UMKM dalam bantuan modal siap kerja dan pelatihan pendamping UMKM.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		5) Info lowongan kerja di Kota Pangkal Pinang	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	13. Program Pasar Murah Rutin	Pasar murah kerja sama dengan Disperindakop UMKM	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
	14. Program Gerakan Bangkit PAD	1) Percepatan pelaksanaan *smart parking* (peningkatan PAD parkir)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		2) Perencanaan pembangunan dermaga nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3) Penyusunan kajian-kajian teknis dalam pengembangan dan optimasi peningkatan PAD	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		4) Optimalisasi penerimaan asli daerah kota pangkal pinang	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
		5) Penurunan PBB P2 dan PBB P2 gratis bagi masyarakat kurang mampu	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
		6) Penganggaran berbasis kinerja	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
		7) Peningkatan PAD Kota Pangkal Pinang dan APBD Kota Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
		8) Peningkatan pendapatan pajak melalui PBB	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
		9) Penguatan APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		10) Penguatan MCSP KPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		11) Peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban OPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
MISI 3: Melakukan Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan berintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang	**15. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)**	1) Percepatan penyelesaian aplikasi *super app*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Pelaksanaan *smart city* Kota Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3) Pendampingan publikasi website dan medsos opd	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4) Digitalisasi data kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5) Optimalisasi layanan di Mall Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	16. Program ASN Smart & Happy	1) Perencanaan berbasis kinerja dan fungsi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2) Meritokrasi karir dan jabatan untuk ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		3) Tunjangan belajar bagi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		4) Peningkatan kualitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	17. Program Walikota Dan Wakil Walikota Menyapa	1) Penguatan media massa dan informasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Koordinator persiapan dan kesiapan PSN (Kawasan Terintegrasi Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam - Kawasan Industri Ketapang)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3) Koordinasi program-program strategis kota pangkalpinang	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		4) Penguatan pemantauan organisasi masyarakat dan partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5) Penegakkan perda di Kota Pangkal Pinang	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		6) Penataan dan penindakan pelanggaran perda bersama dengan OPD terkait	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		7) Pangkal Pinang *Zero* Tambang	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		8) Optimalisasi fungsi legislatif ke masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
		9) Peningkatan kepuasan masyarakat terkait DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
		10) Optimalisasi fungsi pengawasan ke OPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		11) Optimalisasi pembuatan peraturan daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		12) Penguatan dan optimalisasi RT, RW, marbot, guru ngaji dan TPA	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		13) Fasilitasi pendampingan penyusuna raperda maupun raperkada bagi OPD dalam pencapaian visi misi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		14) Koordinator OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
		15) Percepatan legalisasi UPT-UPT lingkup pemerintah Kota Pangkal Pinang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
	18. PROGRAM PROF-CECE MELAYANI (Pelayanan	1) Optimalisasi dan integrasi mall pelayanan publik dengan OPD lainnya	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
	Perizinan Dan Investasi Yang Mudah, Optimal, Ramah, Dan Ekonomis)	2) Kemudahan berusaha terkait investasi dan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3) Transparansi dan digitalisasi investasi dan perizinan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4) Garda terdepan dalam pelayanan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
MISI 4: Mewujudkan masyarakat yang rukun dan berdaya sebagai fondasi stabilitas sosial, serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah	**19. Program Festival Kerukunan Budaya Nusantara**	1) Pelaksanaan event kebudayaan dan pendidikan digabung menjadi skala lokal hingga nasional	Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Acara kepariwisataan skala lokal (Maulid Nabi, 1 Muharram, Cheng Beng) kolaborasi dengan Kesra, Nasional Hingga Internasional	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		3) Pelaksanaan Event Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang kolaborasi Dinas Pariwisata dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		4) Pelaksanaan tahunan event wisata budaya Kampung Bintang	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
MISI 5: Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai	**20. Program Pangkal Pinang Berbudaya**	Taman Wilhelmina sebagai pusat pagelaran seni dan budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	21. Program Kota Hijau Dan Lingkungan Berkelanjutan	1) Pembangunan TPS3R melalui APBD di dua kecamatan di APBD 2027	Program Pengelolaan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
budaya lokal, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.		2) Revitalisasi TPS3R Gedung Nasional dan Ketapang di APBD-P 2026	Program Pengelolaan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3) Pembangunan menuju kota hijau berkelanjutan (pengadaan bibit pohon peneduh)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		4) Kolaborasi dengan Dinas PU dalam pembangunan TPS3R dan TPST	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5) Pengadaan armada motor pengangkut sampah (APBD/CSR/APBN)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		6) Pengadaan 2 unit armada mobil pengangkut sampah dan 2 unit bak sampah (APBD/CSR/APBN)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		7) Pengadaan jaringan pipa HDPE dan jaringan pipa gas metana	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		8) Kajian pengangkutan sampah apabila dilakukan sore atau malam hari	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		9) Program daur ulang sampah menjadi barang	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		10) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan taman kota (penanaman pohon dan pemeliharaan prasarana taman)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		11) Percepatan penyusunan KLHS RTRW Kota Pangkal Pinang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		12) Penyusunan jakstrada persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		13) Penyediaan bank sampah induk pada tiap kecamatan dan bank unit di tiap kelurahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		14) Pengadaan perahu sampah koordinasi dengan dinas sosial dan pengadaan mesin tempel dan jaring sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		15) Pengajuan lahan *preservasi mangrove* sepanjang pesisir sungai selindung dan sungai salim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		16) Pengajuan taman safari tua tunu kerjasama dengan BRIN	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		17) Pembangunan baru/ peningkatan TPST (penyiapan *Readiness Criteria*)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		18) Pembangunan baru/ peningkatan TPS3R (penyiapan *Readiness Criteria*)	Program Pengelolaan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		19) Program pencegahan dan penanggulangan banjir: normalisasi sungai dan drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20) Pembangunan TPS3R sebanyak 6 unit kapasitas 20 ton/ unit berkolaborasi dengan Dinas PU (usulan ke kementerian PU)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

MISI	NAMA PROGRAM	FOKUS PROGRAM	NAMA PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PELAKSANA
		21) Pencegahan dan penanggulangan banjir kolaborasi dengan dinas pekerjaan umum dan kecamatan	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		22) Pencegahan dan penanggulangan bencana lainnya	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		23) Bantuan sementara bagi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		24) Mitigasi dan penanggulangan kebakaran di kota pangkal pinang	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
		25) CCTV di tempat yang rawan pembuangan sampah sembarangan dan rawan banjir	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
	22. Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan	1) Kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal pengangkutan sampah dan melakukan kajian *business plan* pembagian hasil retribusi antara pihak swasta dan pemerintah daerah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		2) Pengajuan kandang hewan atau *aviary* melalui CSR di lokasi rencana Taman Safari Tua Tunu	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya dukungan program prioritas daerah Kota Pangkal Pinang terhadap Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Keselarasan Program Strategis Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM STRATEGIS KOTA PANGKAL PINANG
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);	Prioritas 2: Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Program Festival Kerukunan Budaya Nusantara
		Program Pangkal Pinang Berbudaya
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;		Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Air Bersih, Energi dan Ketahanan Pangan
		Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Prioritas 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Program Pangkal Pinang Siap Kerja
		Program Pengembangan dan Pemerataan Infrastruktur Publik
		Program Fasilitasi Perumahan Rakyat Untuk Keadilan Akses Hunian
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Program Penguatan Ekonomi dan Wirausaha Lokal
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	Prioritas 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Program Pendidikan Bermutu Untuk Semua
		Program Keluarga Sehat
		Program Layanan Kesehatan Mudah dan Merata
		Program Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, dan Kesetaraan Gender
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Prioritas 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Program Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah
		Program Pengembangan Kawasan Industri
		Program Pasar Murah Rutin

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM STRATEGIS KOTA PANGKAL PINANG
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		Program Gerakan Bangkit PAD
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan	Prioritas 2: Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Program ASN SMART dan HAPPY
		Program Layani MORE (Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Mudah, Optimal, Ramah dan Ekonomis)
		Program Walikota dan Wakil Walikota Menyapa
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Program Kota Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
		Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan

3.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

3.2.4.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJM Nasional 2025-2029

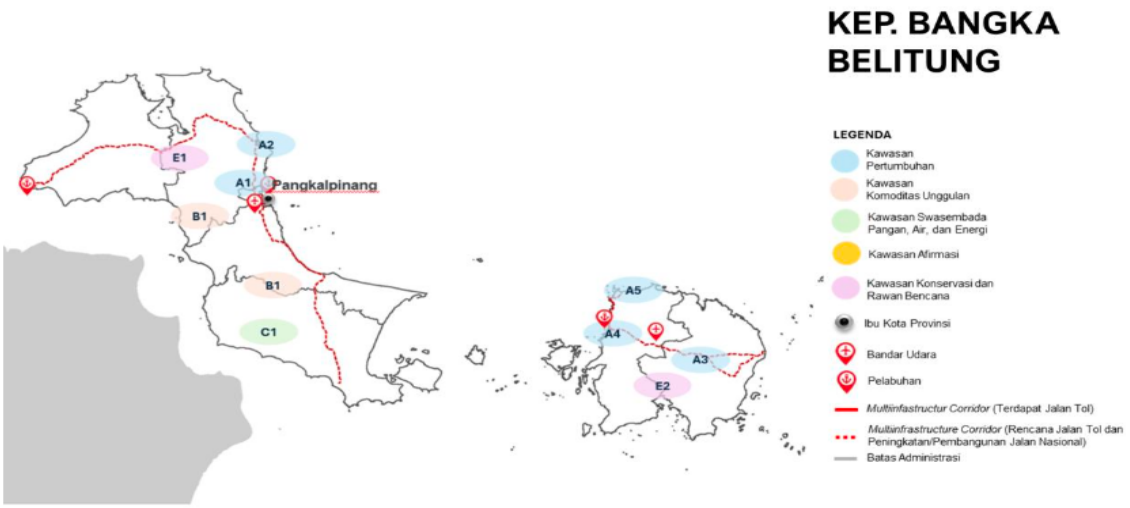
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025–2029, Lampiran IV menetapkan bahwa arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang, diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan. Wilayah ini mencakup Kawasan Perkotaan Pangkal Pinang (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkal Pinang–Sungailiat (A2).

Adapun *highlight* indikasi intervensi di kawasan tersebut meliputi berbagai program strategis pembangunan perkotaan dan industri yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pangkal Pinang, antara lain melalui:
   - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
   - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
   - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
   - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
b. Pengembangan koridor industri Pangkal Pinang–Sungailiat (sektor industri prioritas: hilirisasi timah dan bauksit, hilirisasi kelapa sawit, dan industri makanan dan minuman)
c. Hilirisasi timah, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar timah, yaitu solder, timah lembaran, dan alloy dasar, serta produk hilirisasi lanjutan timah solder premium, timah paduan, material konstruksi, microchips, baterai
d. Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan aluminium ingot, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit aluminium alloy, katalis alumina, komposit aluminium, material pesawat
e. Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam
f. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pangkal Pinang (PHTC)
g. Preservasi jalan ruas Pangkal Pinang–Sungailiat–Muntok dan Pangkal Pinang–Koba–Toboali
h. Pembangunan SPAM Regional Pangkal Pinang
i. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno Pangkal Pinang (PHTC)

j. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Muntok–Pangkal Pinang
k. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 150 kV Pangkal Pinang–Koba–Belitung (Interkoneksi 150 kV Bangka–Belitung)
l. Pembangunan TPST Regional Pangkal Pinang–Bangka–Sungailiat
m. Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat
n. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Pangkal Pinang (PHTC)
o. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah

Gambar 3. 4
Pengembangan Kewilayahan di Kepulauan Bangka Belitung Pada RPJM Nasional 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, disusunlah arah pelaksanaan program strategis yang mencakup berbagai sektor prioritas. Tabel berikut merangkum program strategis nasional beserta proyek/kegiatan utama, nomenklatur program yang digunakan dalam perencanaan daerah, serta urusan pemerintahan terkait. Tabel ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, menyusun rencana kerja, dan mengoptimalkan pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 10
Dukungan Program Daerah Terhadap Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Sekolah rakyat	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan pangan dengan proyek/ kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Makan bergizi gratis	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan
Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh presiden			

3.2.4.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kota Pangkal Pinang 2025-2045

Berikut ini merupakan Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang Kota Pangkal Pinang dalam jangka waktu tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan RTRW Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2045 sebagai pedoman pelaksanaan penataan ruang daerah secara terarah dan berkelanjutan dalam periode lima tahunan. Indikasi program ini memuat arahan pemanfaatan ruang yang operasional dan aplikatif untuk mendukung perwujudan struktur dan pola ruang kota, sekaligus menjamin keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan pembangunan Kota Pangkal Pinang dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Tabel 3. 11
Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 berdasarkan RTRW 2025-2045

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA				
A.1. Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan				
A.1.1. Perwujudan PKN Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.2. Perwujudan PPK Pasar Padi	PPK Pasar Padi	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.3. Perwujudan Sub PPK				
A.1.4. Perwujudan Sub PPK Lontong Pancur	Sub PPK Lontong Pancur	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.5. Perwujudan Sub PPK Keramat	Sub PPK Keramat	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.6. Perwujudan Sub PPK Air Itam	Sub PPK Air Itam	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7. Perwujudan PPL				
A.1.7.1. Perwujudan PPL Batu Intan	PPL Batu Intan	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.2. Perwujudan PPL Temberan	PPL Temberan	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.3. Perwujudan PPL Batin Tikal	PPL Batin Tikal	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.1.7.4. Perwujudan PPL Tua Tunu Indah	PPL Tua Tunu Indah	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.5. Perwujudan PPL Gabek Dua	PPL Gabek Dua	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.6. Perwujudan PPL Selindung	PPL Selindung	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.7. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
A.1.7.8. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
A.1.7.9. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.10. Revitalisasi kawasan pusat pelayanan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.11. Pembangunan landmark Kota	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.1.7.12. Pemanfaatan ruang kawasan pusat pelayanan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
A.1.7.13. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pusat pelayanan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
A.2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana				
A.2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan				
A.2.1.1.1. Perwujudan Jalan Umum				

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.1.1.1.1.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.1.1.2. Pembangunan dan peningkatan jalan arteri primer	Kota Pangkal Pinang	APBN	Kementerian PUPR	-
A.2.1.1.1.1.3. Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor primer	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop, APBD Kota	Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.1.1.4. Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor sekunder	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.1.1.5. Pembangunan dan peningkatan jalan lokal sekunder	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.1.1.6. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan sekunder	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.2. Perubahan status dan fungsi jaringan jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
A.2.1.1.2.1. Pemeliharaan jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.2.2. Pengadaan tanah untuk jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
A.2.1.1.2.3. Sertifikasi jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
A.2.1.1.2.4. Penyusunan, penetapan, sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.1.1.2.5. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.2.6. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.2.7. Monev penyelenggaraan jalan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.3. Perwujudan terminal penumpang				
A.2.1.1.3.1. Perencanaan terminal penumpang				
A.2.1.1.3.1.1. Perencanaan terminal penumpang tipe B	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop	Dinas Perhubungan Prop	-
A.2.1.1.3.1.2. Perencanaan terminal penumpang tipe C	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.3.1.3. Pembangunan terminal penumpang				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.3.1.4. Pembangunan terminal penumpang tipe B	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop	Dinas Perhubungan Prop	-
A.2.1.1.3.1.5. Pembangunan terminal penumpang tipe C	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.3.1.6. Pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop, APBD Kota	Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.3.1.7. Operasi dan pemeliharaan terminal penumpang	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop, APBD Kota	Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.1.1.3.2. Monev terminal penumpang	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop, APBD Kota	Dinas Perhubungan Prop, Dinas Perhubungan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
A.2.1.1.4. Perwujudan Jembatan				
A.2.1.1.4.1. Pembangunan dan peningkatan jembatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.4.2. Pemeliharaan jembatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.1.4.3. Sertifikasi jembatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prop, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.1.2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut				
A.2.1.2.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
A.2.1.2.2. Perencanaan pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
A.2.1.2.3. Pembangunan pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
A.2.1.2.4. Operasi dan pemeliharaan pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
A.2.1.2.5. Pengawasan pengoperasian pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
			Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	
A.2.2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi				
A.2.2.1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
A.2.2.1.1. Pengawasan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN	-
A.2.2.2. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan				
A.2.2.2.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL)	Kota Pangkal Pinang	APBN	Kementerian ESDM	-
A.2.2.2.2. Penatausahaan izin ketenagalistrikan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN	-
A.2.2.2.3. Penyediaan tenaga listrik	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN	-
A.2.2.2.4. Perencanaan jaringan kelistrikan bawah tanah	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN	-
A.2.2.2.5. Pengawasan jaringan kelistrikan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN	-
A.2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi				
A.2.3.1. Perwujudan jaringan tetap				
A.2.3.1.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi rencana induk jaringan serat optik	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.1.2. Fasilitasi perizinan jaringan serat optik	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.3.1.3. Pengawasan jaringan serat optik	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.2. Perwujudan jaringan bergerak				
A.2.3.2.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi rencana induk menara telekomunikasi	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.2.2. Fasilitasi perizinan menara telekomunikasi	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.2.3. Perencanaan menara telekomunikasi bersama	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.2.4. Pembangunan menara telekomunikasi bersama	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.3.2.5. Pengawasan menara telekomunikasi	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kominfo Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
A.2.4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
A.2.4.1. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.2. Pembangunan jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.3. Pemeliharaan jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
A.2.4.4.1. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.4.4.2. Perencanaan konektivitas infrastruktur kota dengan sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.3. Pembangunan RTH di kawasan sekitar jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.4. Pembangunan kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.5. Perwujudan konsep limpasan nol (zero runoff) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.6. Rehabilitasi sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.7. Operasi dan pemeliharaan sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.4.8. Normalisasi sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.5. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
A.2.4.5.1. Perencanaan kawasan sekitar jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.4.5.2. Penataan kawasan sekitar jaringan sumber daya air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.5. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan				
A.2.5.1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
A.2.5.1.1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) air minum	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, BUMD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.5.1.2. Perwujudan SPAM Regional	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, BUMD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.3. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Penyediaan Air Minum	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.4. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.5. Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, BUMD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.6. Pembangunan dan pengembangan fasilitas SPAM	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.7. Operasi dan pemeliharaan fasilitas SPAM	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.8. Perluasan jaringan SPAM	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.1.9. Monev SPAM	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
A.2.5.2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)				
A.2.5.2.1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) air limbah domestik	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
A.2.5.2.2. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk SPAL	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.5.2.3. Penyusunan, penetapan, sosialisasi strategi sanitasi kota (SSK)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
A.2.5.2.4. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana SPAL	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
A.2.5.2.5. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
A.2.5.2.6. Monev SPAL	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
A.2.5.3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				
A.2.5.3.1. Pembangunan instalasi pengolahan limbah B3	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (DLH)
A.2.5.3.2. Rehabilitasi/ pemeliharaan instalasi pengolahan limbah B3	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (DLH)
A.2.5.3.3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
A.2.5.3.4. Monev pengolahan limbah B3	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
A.2.5.4. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan				

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.5.4.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi NSPK persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.2. Pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan sampah	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.3. Peningkatan jaringan pelayanan sampah	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.5. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.6. Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.7. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.8. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.4.9. Monev persampahan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.2.5.5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana				
A.2.5.5.1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
A.2.5.5.2. Penyusunan, penetapan, sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.5.5.3. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
A.2.5.5.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
A.2.5.5.5. Penyediaan tempat, jalur dan rambu evakuasi bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
A.2.5.5.6. Monev jaringan evakuasi bencana	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kota, Satpol PP Kota, Dinas Sosial Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
A.2.5.6. Perwujudan Sistem Drainase				
A.2.5.6.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
A.2.5.6.1.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi rencana induk drainase berwawasan lingkungan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.6.1.2. Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.6.1.3. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan drainase	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.6.1.4. Pembangunan RTH di kawasan sekitar jaringan drainase	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.6.1.5. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.6.1.6. Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
A.2.5.6.2. Monev jaringan drainase	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
A.2.5.7. Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki				
A.2.5.7.1. Perencanaan sarana dan prasarana pejalan kaki	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.5.7.2. Pembangunan sarana dan prasarana pejalan kaki	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.5.7.3. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pejalan kaki	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
A.2.5.7.4. Monev jaringan pejalan kaki	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA				
B.1. Perwujudan Kawasan Lindung				
B.1.1. Perwujudan Badan Air				
B.1.1.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.1.1.1.1. Pembangunan kolam retensi dan waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.1.2. Pembangunan konektivitas jaringan drainase, sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
B.1.1.1.3. Normalisasi sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.2. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.1.1.2.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.1.1.2.2. Pembangunan dan peningkatan tanggul sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.2.3. Operasi dan pemeliharaan tanggul sungai, kolong, kolam retensi, waduk/embung	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.3. Sertifikasi badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, BPN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.4. Pemanfaatan ruang badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.1.5. Pengendalian pemanfaatan ruang badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat				
B.1.2.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.1.2.1.1. Pembangunan dan pemeliharan RTH di Kawasan Perlindungan Setempat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.1.2.1.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
B.1.2.1.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
B.1.2.2. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.1.2.2.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.1.2.2.2. Pembangunan dan peningkatan jalan inspeksi	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B.1.2.2.3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengaman sempadan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B.1.2.2.4. Pembangunan dan peningkatan ruang publik di sempadan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B.1.2.2.5. Pengembangan ekowisata	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
B.1.2.3. Pengadaan tanah untuk kawasan perlindungan setempat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.2.4. Sertifikasi tanah kawasan perlindungan setempat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.2.5. Pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.2.6. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.3. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau				
B.1.3.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
B.1.3.1.1. Penyusunan *masterplan* RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.1.2. Pemutakhiran data RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.1.3.1.3. Pembangunan RTH	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.1.4. Rehabilitasi/pemeliharaan RTH	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, Dinas Perkim Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.1.5. Pembangunan sarana dan prasarana RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.1.6. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.1.7. Perwujudan konsep limpasan nol (zero run off) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.3.1.8. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.1.3.2. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.1.3.2.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.1.3.2.2. Pengembangan ekowisata	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota,	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
			Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	
B.1.3.2.3. Pengadaan tanah untuk RTH	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.3.2.4. Sertifikasi tanah RTH	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.3.2.5. Pemanfaatan ruang RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.3.2.6. Pengendalian pemanfaatan ruang RTH	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.4. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya				
B.1.4.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
B.1.4.2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
B.1.4.3. Konservasi cagar budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
B.1.4.4. Pengadaan tanah untuk Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.4.5. Sertifikasi tanah Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.1.4.6. Pemanfaatan ruang Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
B.1.4.7. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Dikbud, Dinas Dikbud Prov, Dinas Dikbud Kota, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2. Perwujudan Kawasan Budi Daya				
B.2.1. Perwujudan Kawasan Perikanan				
B.2.1.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan	Kota Pangkal Pinang	APBD Prop	DKP Prop	-

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Perikanan Pantai				
B.2.1.2. Perencanaan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kawasan Perikanan	APBD Prop	DKP Prop	-
B.2.1.3. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kawasan Perikanan	APBD Prop	DKP Prop	-
B.2.1.4. Operasi dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kawasan Perikanan	APBD Prop	DKP Prop	-
B.2.1.5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Prop, DKP Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
B.2.1.6. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.1.6.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Perikanan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.1.6.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero run off*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.1.6.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.1.7. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.2.1.7.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.1.7.2. Penataan sempadan dan jalur hijau Kawasan Peruntukan Industri di sekitar badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B.2.1.8. Pemanfaatan ruang Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Prop, DKP Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
B.2.1.9. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Prop, DKP Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
B.2.2. Perwujudan Kawasan Industri				
B.2.2.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.2.2. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan Kawasan Industri	Kawasan Industri	APBN, APBD Kota	Kementerian Perindustrian, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.2.3. Pembangunan Kawasan Industri	Kawasan Industri	APBN, APBD Kota	Kementerian Perindustrian, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.2.4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Industri	Kawasan Industri	APBN, APBD Kota	Kementerian Perindustrian, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.2.5. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.2.5.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Industri	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.2.5.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero run off*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.2.5.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.2.6. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.2.6.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.2.2.6.2. Penataan sempadan dan jalur hijau Kawasan Peruntukan Industri di sekitar badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
B.2.2.7. Pengadaan tanah Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.2.8. Sertifikasi tanah Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.2.9. Pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.2.10. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
B.2.3. Perwujudan Kawasan Pariwisata				
B.2.3.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.3.1.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Pariwisata	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.3.1.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.3.1.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.3.2. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.2.3.2.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.2.3.2.2. Pembangunan dan peningkatan tanggul pantai	Kota Pangkal Pinang	APBN	Kementerian PUPR	-
B.2.3.2.3. Operasi dan pemeliharaan tanggul pantai	Kota Pangkal Pinang	APBN	Kementerian PUPR	-
B.2.3.2.4. Pengembangan ekowisata	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
B.2.3.3. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk Pariwisata Kota (Riparkot)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
B.2.3.4. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBN, APBD Kota	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
B.2.3.5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.3.6. Pengadaan tanah Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.3.7. Sertifikasi tanah Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata Kota, BPN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.3.8. Pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.3.9. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.4. Perwujudan Kawasan Permukiman				
B.2.4.1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas Perkim Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
B.2.4.2. Penyediaan rumah layak huni	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas Perkim Kota, masyarakat	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
B.2.4.3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas Perkim Kota, masyarakat	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
B.2.4.4. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Perkim Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
B.2.4.5. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Perkim Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
B.2.4.6. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan dan PSU-nya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perkim Kota	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
B.2.4.7. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perkim Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
B.2.4.8. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Perkim Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
B.2.4.9. Perwujudan kota spons (sponge city)				

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.4.9.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.4.9.2. Perwujudan konsep limpasan nol (zero runoff) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kawasan Permukiman	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.4.9.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kawasan Permukiman	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.4.10. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.2.4.10.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.2.4.10.2. Penataan Kawasan Permukiman di sekitar badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.4.11. Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Perkim Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
B.2.4.12. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Perkim Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
B.2.5. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa				
B.2.5.1. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.5.2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
B.2.5.3. Perencanaan pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
B.2.5.4. Pembangunan pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
B.2.5.5. Pengadaan tanah untuk pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.5.6. Sertifikasi tanah pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
B.2.5.7. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
B.2.5.8. Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pendukung pasar kecamatan	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
B.2.5.9. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.5.9.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.5.9.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kawasan Perdagangan dan Jasa	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.5.9.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.5.10. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.5.10.1. Konservasi mangrove	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Prov, Dinas LHK Prov, DKP Prov, Dinas Pariwisata Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas LH Kota, DKP Kota, Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
B.2.5.10.2. Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa di sekitar badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.5.11. Pemanfaatan ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.5.12. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kota Pangkal Pinang	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.6. Perwujudan Kawasan Perkantoran				
B.2.6.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.6.2. Penataan dan pengembangan Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.6.3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.6.4. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.6.4.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.6.4.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.6.4.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.6.5. Perwujudan kota tepi air (*waterfront city*)				
B.2.6.5.1. Penataan Kawasan Perkantoran di sekitar badan air	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.6.6. Pemanfaatan ruang Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.6.7. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.7. Perwujudan Kawasan Transportasi				
B.2.7.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas PUPR Kota, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
B.2.7.2. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
B.2.7.3. Pembangunan pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
B.2.7.4. Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prop, DKP Prop, Dinas Perhubungan Kota, DKP Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.7.5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
B.2.7.6. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.7.6.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.7.6.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kawasan Transportasi	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.7.6.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kawasan Transportasi	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.7.7. Pemanfaatan ruang Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.7.8. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan				
B.2.8.1. Perwujudan kota spons (*sponge city*)				
B.2.8.1.1. Pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)
B.2.8.1.2. Perwujudan konsep limpasan nol (*zero runoff*) melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan skala individu dan komunal	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
B.2.8.1.3. Penyediaan teknologi terkait pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBN, APBD Prov, APBD Kota, masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
B.2.8.2. Penataan dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.8.3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
B.2.8.4. Pemanfaatan ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.8.5. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBD Kota	Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA				
C.1. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa				
C.1.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan dan Jasa	KS Perdagangan dan Jasa	APBD Kota	Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
C.1.2. Pengadaan tanah Teluk Bayur CBD	Teluk Bayur CBD	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BPN, Dinas PUPR Kota	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
C.1.3. Perencanaan kawasan Teluk Bayur CBD	Teluk Bayur CBD	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
C.1.4. Pembangunan kawasan Teluk Bayur CBD	Teluk Bayur CBD	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
C.1.5. Revitalisasi Pasar Ratu Tunggal	Pasar Ratu Tunggal	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM NOMENKLATUR
C.1.6. Pembangunan landmark KS Perdagangan dan Jasa	KS Perdagangan dan Jasa	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
C.2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri				
C.2.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Peruntukan Industri	KS Peruntukan Industri	APBD Kota	Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
C.2.2. Pembangunan *landmark* KS Peruntukan Industri	KS Peruntukan Industri	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kopdag Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
C.3. Perwujudan Kawasan Pariwisata				
C.3.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata	KS Pariwisata	APBD Kota	Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
C.3.2. Pembangunan *landmark* KS Pariwisata	KS Pariwisata	APBD Kota	Dinas Pariwisata Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
C.4. Perwujudan Rimba Kota				
C.4.1. Penyusunan, penetapan, sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Rimba Kota	KS Rimba Kota	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
C.4.2. Pembangunan *landmark* KS Rimba Kota	KS Rimba Kota	APBD Kota	Dinas LH Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)



source: explorebangka

04 PROGRAM & KINERJA

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodesasi RPJM Daerah.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk periode 2025-2030, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2030. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program PD dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034;

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Pangkal Pinang, APBD Provinsi Bangka Belitung, APBN, serta sumber pendanaan lainnya. Pada Dokumen RPJM Daerah ini, Pagu Indikatif yang tertera telah sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Berikut outcome dan program perangkat daerah yang disertai target indikator dan pendanaan.

Tabel 4. 1
Program Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**477.228.815.971**		**561.895.667.631**		**602.683.574.572**		**602.186.475.716**		**621.979.699.389**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**213.764.721.032**		**229.109.877.944**		**240.798.495.401**		**246.683.019.566**		**253.074.906.835**		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**213.764.721.032**		**229.109.877.944**		**240.798.495.401**		**246.683.019.566**		**253.074.906.835**		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					173.026.646.253		193.158.846.168		200.760.727.719		205.683.619.838		213.652.937.907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					40.273.074.779		35.426.031.776		39.427.767.682		40.289.399.728		38.666.968.928	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Akses Pendidikan PAUD dan NON FORMAL	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi	31.22	36.20	41.17		46.15		51.13		56.11		61.08		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dalam pendidikan Nonformal kesetaraan (Dengan Satuan:Persen)													dan Kebudayaan
	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:Persen)	98,28	95,1	99,28		99,77		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan kualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:Persen)	91.33	93.89	94.73		95.57		96.41		97.25		98.10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B (Dengan Satuan:Persen)	81.96	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Akses Pendidikan PAUD dan NON FORMAL	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)	65,75	68,36	72		75,19		78,23		81.27		84,23		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (Dengan Satuan:Persen)	74.85	74.70	75.45		76.20		76.95		77.70		78.45		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					50.000.000		65.000.000		75.000.000		145.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Muatan	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lokal Pada Satuan Pendidikan Dasar	kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persen)													
	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah melaksanakan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:Persen)	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		60		60		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					250.000.000		280.000.000		320.000.000		350.000.000		390.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal	Indeks Distribusi Guru SD (Dengan Satuan:Indeks)	N/A	0,82	0.84		0.86		0.88		0.90		0.90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal	Indeks Distribusi Guru SMP (Dengan Satuan:Indeks)	0.80	0.80	0.80		0.83		0.85		0.88		0.90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					165.000.000		180.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terkendalinya Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:Persen)	82	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terkendalinya Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	52	82	84		86		92		92		92		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)													
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**197.298.005.238**		**207.162.905.500**		**217.521.050.775**		**222.959.077.045**		**228.533.053.971**	
	DINAS KESEHATAN					**197.298.005.238**		**207.162.905.500**		**217.521.050.775**		**222.959.077.045**		**228.533.053.971**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					167.306.083.210		165.642.890.525		161.647.871.613		182.166.318.151		167.781.395.234	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		persentase capaian indikator mutu pelayanan rumah sakit (Dengan Satuan:%)	100	84,6	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.862.749.028		40.707.848.975		55.082.864.162		39.857.013.894		59.925.785.737	Dinas Kesehatan
	Terpenuhinya upaya kesehatan	Cakupan dan Keaktipan	98 dan 80	98 dan 80	98 dan 80		98,6 dan 85		98,6 dan 86		99 dan 87		99 dan 89		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dengan Satuan:%)													
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dengan Satuan:%)													
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	90	90	92		94		96		98		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Kesehatan Masa krisis,KLB dan kejadian lainnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	Persentase Pelayanan Surveilans, Imunisasi dan kesehatan Haji (Dengan Satuan:%)	95	95	96		97		98		99		100		Dinas Kesehatan
	Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesionalisme yang baik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit (Dengan Satuan:%)	89	89,5	89,9		90		90,2		90,5		90,7		Dinas Kesehatan
	Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesionalisme yang baik	Indeks capaian indikator pelayanan di rumah sakit (Dengan Satuan:%)	86	86,5	86,7		86,9		87		87,2		87,4		Dinas Kesehatan
	Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesionalisme yang baik	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (Dengan Satuan:%)	49	49	49		50		51		52		53		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka kematian ibu dan Persentase Pelayanan	60,95 dan 100	60,95 dan 99,12	60,90 dan 100		60,85 dan 100		60,00 dan 100		59,95 dan 100		59,90 dan 100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Kesehatan Ibu Bersalin (Dengan Satuan:orang dan %)													
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dengan Satuan:%)	100	99,73	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Angka kematian balita (Dengan Satuan:%)	100 dan 5,9	99,28 dan 5,8	100 dan 5,7		100 dan 5,6		100 dan 5,5		100 dan 5,4		100 dan 5,3		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (Dengan Satuan:%)	17,3	17,3	17,5		16,3		15,2		14,2		14,2		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Pesentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Balita (Dengan Satuan:%)	100	99,91	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan Limbah Medis sesuai standart (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olaraga (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 75% dengan pencapaian SPM (Dengan Satuan:%)	99	99	99,1		99,3		99,4		99,5		99,5		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase Fasyankes yang sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase puskesmas dan Labkesda dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	meningkatnya kualitas kesehatan	Persentase Integrasi informasi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	kesehatan (Dengan Satuan:%)													
	meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (PSDK)	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					833.696.000		288.035.000		294.035.000		432.285.000		294.035.000	Dinas Kesehatan
	Terwujudnya SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	80	80	82		84		86		88		90		Dinas Kesehatan
	Terwujudnya SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten	Persentase peningkatan kompetensi ASN Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					282.877.000		419.421.000		391.570.000		398.750.000		427.128.000	Dinas Kesehatan
	Terpenuhinya sarana prasarana farmasi, alat kesehatan dan makanan yang memenuhi persyaratan sesuai standar	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT (Dengan Satuan:%)	80	80	82		84		86		88		90		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya sarana prasarana farmasi, alat kesehatan dan makanan yang memenuhi persyaratan sesuai standar	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:%)	80	80	82		84		86		88		90		Dinas Kesehatan
	Terpenuhinya sarana prasarana farmasi, alat kesehatan dan makanan yang memenuhi persyaratan sesuai standar	Persentase sarana tempat pengelolaan pangan yang memenuhi standar kesehatan (Dengan Satuan:%)	70	70	75		80		80		85		85		Dinas Kesehatan
	Terpenuhinya sarana prasarana farmasi, alat kesehatan dan makanan yang memenuhi persyaratan sesuai standar	Persentase PIRT yang memiliki izin edar (Dengan Satuan:%)	70	70	75		80		80		85		85		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					12.600.000		104.710.000		104.710.000		104.710.000		104.710.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu bidang kesehatan yang aktif dan melayani siklus hidup (Dengan Satuan:%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	jumlah kegiatan germas yang dilakukan sesuai standart (Dengan Satuan:Kali)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kegiatan UKBM yang dilakukan dinas kesehatan sesuai standart (Dengan Satuan:Puskesmas)	9	9	9		9		9		9		9		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**28.550.264.565**		**58.126.267.793**		**73.492.581.183**		**59.901.145.712**		**65.912.424.355**		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**28.550.264.565**		**58.126.267.793**		**73.492.581.183**		**59.901.145.712**		**65.912.424.355**		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					10.423.086.527		13.578.267.793		11.664.581.183		12.108.145.712		10.859.424.355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.305.000.000		3.655.000.000		4.680.000.000		4.555.000.000		2.555.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	46,4380	0	46.4388		55.7906		62.7537		64.1396		64.2950		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)													
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.652.000.000		1.240.000.000		1.090.000.000		1.090.000.000		940.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya rumah tangga berakses air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	41,25	0	41,25		42,25		43,25		44,25		45,25		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					545.000.000		1.960.000.000		1.960.000.000		1.935.000.000		1.935.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	0	0	2		6		8		10		15		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					650.000.000		1.385.000.000		1.185.000.000		1.185.000.000		1.885.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya rumah tangga berlayanan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) (Dengan Satuan:Persen)	98,21	99,73	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.607.183.038		12.350.000.000		10.650.000.000		10.300.000.000		9.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	78.85	0	79.19		82.53		85.00		87.34		89.59		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					810.000.000		4.380.000.000		10.380.000.000		2.880.000.000		10.380.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan penerbitan IMB daerah	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	35	30	35		36		37		38		39		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.650.000.000		18.250.000.000		29.950.000.000		24.890.000.000		27.290.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kota yang aman, nyaman, dan andal.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	93,54	93,54	93,55		93,59		93,64		93,69		93,73		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					143.000.000		148.000.000		118.000.000		118.000.000		118.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (Dengan Satuan:Persen)	0	0	8		28		48		68		88		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					764.995.000		1.180.000.000		1.815.000.000		840.000.000		400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:Persen)	0	0	80		80		80		80		80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**6.976.082.501**		**32.324.886.626**		**33.941.130.957**		**34.789.659.231**		**35.659.400.712**	
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					**6.976.082.501**		**32.324.886.626**		**33.941.130.957**		**34.789.659.231**		**35.659.400.712**	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.655.957.601		10.192.886.626		10.881.130.957		12.172.750.000		11.629.400.712	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	N/A	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan	N/A	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)													
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:Persen)	N/A	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					432.800.000		4.362.000.000		4.925.000.000		5.042.000.000		5.900.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Dengan Satuan:persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					73.254.500		6.915.000.000		6.510.000.000		6.320.000.000		6.495.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					767.650.000		5.725.000.000		6.145.000.000		6.135.000.000		6.205.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan:Persen)	N/A	2,03	10,90		12,23		13,93		16,19		19,31		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					46.420.400		5.130.000.000		5.480.000.000		5.119.909.231		5.430.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Dengan Satuan:Persen)	N/A	2,38	2,44		2,50		2,56		2,63		2,70		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**24.183.446.326**		**25.392.618.643**		**26.662.249.575**		**27.328.805.814**		**28.012.025.960**	
	SATPOL PP					**17.815.542.902**		**18.706.320.047**		**19.641.636.050**		**20.132.676.951**		**20.635.993.875**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					16.469.679.302		16.710.156.447		17.213.306.050		17.357.676.951		17.730.993.875	Satpol PP
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)													
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					901.463.600		1.321.763.600		1.488.330.000		1.755.000.000		1.750.000.000	Satpol PP
	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
	Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan terhadap masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum,	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (Dengan Satuan:%)													
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					444.400.000		674.400.000		940.000.000		1.020.000.000		1.155.000.000	Satpol PP
	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Dengan Satuan:%)	75	75	75		78		85		90		100		Satpol PP
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satpol PP
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**6.367.903.424**		**6.686.298.596**		**7.020.613.525**		**7.196.128.863**		**7.376.032.085**		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.245.367.677		5.313.867.677		5.448.867.677		5.528.093.116		5.707.996.338	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.122.535.747		1.372.430.919		1.571.745.848		1.668.035.747		1.668.035.747	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**6.456.296.309**		**9.779.111.125**		**10.268.066.681**		**10.524.768.348**		**10.787.887.556**	
	DINAS SOSIAL					**6.456.296.309**		**9.779.111.125**		**10.268.066.681**		**10.524.768.348**		**10.787.887.556**	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.038.596.309		6.775.461.125		7.320.966.681		7.511.268.348		7.847.387.556	Dinas Sosial
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					252.000.000		526.500.000		491.000.000		328.900.000		338.900.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:%)	85.93	85.93	90		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					99.700.000		540.400.000		488.900.000		627.400.000		549.400.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dasarnya (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					21.000.000		1.429.600.000		1.457.200.000		1.529.200.000		1.529.200.000	Dinas Sosial
	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:%)		70	80		82,75		85		87,5		90		Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (Dengan Satuan:%)		70	80		82,75		85		87,5		90		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					45.000.000		487.150.000		490.000.000		508.000.000		503.000.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**110.564.870.144**		**157.806.408.990**		**152.250.806.324**		**174.268.988.365**		**175.455.197.194**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3.190.040.698**		**8.349.542.732**		**8.767.019.869**		**8.986.195.366**		**9.210.850.250**		
	DINAS TENAGA KERJA				**3.190.040.698**		**8.349.542.732**		**8.767.019.869**		**8.986.195.366**		**9.210.850.250**		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					3.188.540.698		6.933.508.296		6.940.838.565		6.961.180.150		6.839.091.145	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perangkat daerah (Dengan Satuan:%)													
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		53.954.000		59.349.400		65.284.340		179.934.363	Dinas Tenaga Kerja
	Terlaksananya kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%)	N/A	N/A	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					0		545.756.530		910.188.983		1.001.207.882		1.101.328.669	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	N/A	41.56	27.27		45.45		63.64		90.91		100		Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Rupiah/Orang)	95999,76	98836,49	99000		99200		99500		99900		100300		Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.500.000		531.323.906		521.642.921		573.522.994		630.496.073	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	N/A	21,4	25		26.2		27.4		28.6		29.8		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)													
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					0		285.000.000		335.000.000		385.000.000		460.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis dan Kondusif Guna Meningkatkan Produktivitas Perusahaan Serta Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Dengan Satuan:Persen)	N/A	68,56	70		75		80		85		90		Dinas Tenaga Kerja
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**5.215.869.717**		**5.998.224.953**		**6.239.123.450**		**6.419.190.162**		**6.614.883.541**	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB					**5.215.869.717**		**5.998.224.953**		**6.239.123.450**		**6.419.190.162**		**6.614.883.541**	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.663.669.717		5.323.724.953		5.522.123.450		5.672.190.162		5.867.883.541	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Persentase ketersediaan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)													Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					20.000.000		32.500.000		42.000.000		60.000.000		61.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Dengan Satuan:Persen)	2,40	3,5	3,6		3,7		3,8		3,9		4,0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					305.930.000		350.930.000		363.930.000		370.930.000		370.930.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		14.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan /atau penyusunan Kebijakan (Dengan Satuan:%)	0	0	0		5		7		9		11		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					0		22.500.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Terpenuhinya Standar Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)	30	30	0		36		37		38		39		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					226.270.000		253.570.000		256.070.000		256.070.000		256.070.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**6.575.495.958**		**10.683.985.556**		**9.802.836.384**		**11.156.414.768**		**11.391.762.387**	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					**6.575.495.958**		**10.683.985.556**		**9.802.836.384**		**11.156.414.768**		**11.391.762.387**	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.488.360.958		9.117.006.336		9.204.806.384		9.520.934.768		9.756.282.387	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					53.782.000		784.744.000		156.730.000		868.730.000		868.730.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH (Dengan Satuan:Skor/Nilai)	87.5	87,5	87.5		88		88.5		90		90		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					6.859.000		531.405.220		326.425.000		543.435.000		543.435.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					26.494.000		250.830.000		114.875.000		223.315.000		223.315.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	85		85		90		95		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**5.093.800.000**		**22.200.000.000**		**10.850.000.000**		**26.550.000.000**		**22.700.000.000**		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**5.093.800.000**		**22.200.000.000**		**10.850.000.000**		**26.550.000.000**		**22.700.000.000**		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					3.543.800.000		19.700.000.000		7.750.000.000		22.800.000.000		18.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penetapan tanah untuk fasum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					1.200.000.000		1.750.000.000		2.250.000.000		2.800.000.000		3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Penataan Ruang
	Meningkatnya pemanfaatan tanah kosong secara produktif dan berkelanjutan.	Persentase pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	80		80		80		80		80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					0		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertip pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Dengan Satuan:%)	NA	NA	NA		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**30.275.826.774**		**36.789.618.112**		**38.629.099.018**		**39.594.826.494**		**40.584.697.156**		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**30.275.826.774**		**36.789.618.112**		**38.629.099.018**		**39.594.826.494**		**40.584.697.156**		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					18.571.520.633		19.833.015.570		20.824.666.349		21.345.283.007		21.878.915.083	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola dan	Persentase ketersediaan sarana dan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah	prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)													
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					141.250.000		750.000.000		787.500.000		807.187.500		827.367.188	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Dengan Satuan:%)	80	80	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					536.631.950		572.730.909		601.367.454		616.401.640		631.811.681	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu (Dengan Satuan:%)	41,46	41,46	38		39		40		41		42		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.037.378.375		1.100.000.000		1.155.000.000		1.183.875.000		1.213.471.875	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati ; Persentase RTH (Dengan Satuan:%)	74,5 ; 0,16	74,5 ; 0,16	74,5 ; 0,16		74,5 ; 0,16		74,5 ; 0,16		74,5 ; 0,16		75,4 ; 0,16		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN					12.573.500		22.950.705		24.098.240		24.700.696		25.318.214	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BERACUN (LIMBAH B3)														
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (Dengan Satuan:%)	72,73	72,73	73		73		73		73		73		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					47.232.000		48.648.960		51.081.408		52.358.443		53.667.404	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:%)	35	35	33		34		35		36		37		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		40.000.000		42.000.000		43.050.000		44.126.250	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(PPLH) (Dengan Satuan:%)													
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					13.590.000		13.997.700		14.697.585		15.065.025		15.441.650	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.250.000		10.557.500		11.085.375		11.362.509		11.646.572	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.905.400.316		14.397.716.768		15.117.602.607		15.495.542.673		15.882.931.239	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan (Dengan Satuan:%)	14,5	14,5	15		16		17		18		19		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.471.657.828**		**6.795.240.719**		**7.135.002.755**		**7.313.377.824**		**7.496.212.270**		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**6.471.657.828**		**6.795.240.719**		**7.135.002.755**		**7.313.377.824**		**7.496.212.270**		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.793.652.828		5.958.235.719		6.097.997.755		6.228.127.824		6.400.962.270	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					441.155.000		452.155.000		452.155.000		585.000.000		595.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (Dengan Satuan:%)	6.0	0	6.05		6.10		6.15		6.20		6.25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (Dengan Satuan:%)	79,53	77,28	76		76		77		78		79		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemiikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Dengan Satuan:%)	99,11	98,81	99,6		99,61		99,62		99,63		99,64		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					188.900.000		188.900.000		188.900.000		214.250.000		214.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan (Dengan Satuan:%)	98,87	99,02	99,03		99,2		99,4		99,5		99,7		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (Dengan Satuan:%)	99.69		99,75		99,76		99,77		99,78		99,79		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:%)	78,66	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:%)	72,92	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					47.950.000		188.950.000		388.950.000		279.000.000		279.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Dengan Satuan:%)	58,82	82,35	65,0		65,5		66		66,5		67		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (Dengan Satuan:%)	13.41	15,93	14,45		15,00		15,50		15,71		15,75		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase data Profil Kependudukan yang disusun dan Dipublikasikan (Dengan Satuan:%)		100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**514.090.000**		**850.000.000**		**980.000.000**		**1.025.000.000**		**1.060.000.000**	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB					**514.090.000**		**850.000.000**		**980.000.000**		**1.025.000.000**		**1.060.000.000**	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					0		30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					514.090.000		820.000.000		945.000.000		985.000.000		1.020.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Kelurahan (LKK) (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.483.345.000**		**1.725.745.000**		**1.783.545.000**		**1.783.545.000**		**1.783.545.000**		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					66.000.000		144.675.000		146.000.000		146.000.000		146.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun /Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19 tahun) (Dengan Satuan:Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun)	15,10	15,10	24,14		21,7		20,0		18,7		18,7		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					437.995.000		516.720.000		553.195.000		553.195.000		553.195.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	5,37	16,4	16,3		16,2		16,1		16		15,9		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Dengan Satuan:%)	71,34	60,5	61		62		63		64		65		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					979.350.000		1.064.350.000		1.084.350.000		1.084.350.000		1.084.350.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan:%)	21,56	21,58	22		22,5		23		23,5		24		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**16.138.573.341**		**21.945.502.008**		**23.042.777.108**		**23.618.846.536**		**24.209.317.700**	
	DINAS PERHUBUNGAN					**16.138.573.341**		**21.945.502.008**		**23.042.777.108**		**23.618.846.536**		**24.209.317.700**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					12.101.159.484		12.834.000.000		13.512.777.108		13.808.846.536		14.259.317.700	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN					4.037.413.857		9.111.502.008		9.530.000.000		9.810.000.000		9.950.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:persen)	30	30	30		29.5		29		28.5		28		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan yang Laik Fungsi	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (Dengan Satuan:Persen)	69		69		70		71		72		73		Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)	Persentase Titik Parkir ilegal dijalan kota yang ditertibkan (Dengan Satuan:%)	0	0	75		80		88		93		100		Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**8.930.363.096**		**11.335.950.975**		**11.926.365.216**		**12.224.636.592**		**12.530.346.996**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**8.930.363.096**		**11.335.950.975**		**11.926.365.216**		**12.224.636.592**		**12.530.346.996**	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.536.108.696		6.004.841.537		6.301.042.420		6.463.601.445		6.628.301.692	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perangkat daerah (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.599.972.500		1.941.086.637		2.033.482.360		2.082.895.982		2.133.510.354	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.794.281.900		3.390.022.801		3.591.840.436		3.678.139.165		3.768.534.950	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Digital	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Digital	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintah Daerah (SPLPD) (Dengan Satuan:Persen)													
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**8.474.649.505**		**9.637.373.381**		**10.781.790.944**		**12.590.551.904**		**14.516.924.353**	
	DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN					**8.474.649.505**		**9.637.373.381**		**10.781.790.944**		**12.590.551.904**		**14.516.924.353**	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.345.169.505		9.455.373.381		10.629.923.906		12.095.551.904		13.621.924.353	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					0		20.000.000		22.000.000		50.000.000		75.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Mandiri dan Akuntabel dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa (Dengan Satuan:%)	52	0	0		52		53		54		55		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					0		20.000.000		20.000.000		50.000.000		70.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya Kualitas tata kelola dan kinerja koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi secara berkala	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya (Dengan Satuan:%)	7	0	7		8		9		10		11		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					0		25.000.000		25.000.000		55.000.000		85.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan (Dengan Satuan:%)	60	0	0		65		68		70		75		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					26.680.000		47.000.000		48.000.000		120.000.000		185.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Presentasi Koperasi yang dilindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:Persen)	80	0	0		84		84		84		84		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					102.800.000		50.000.000		16.867.038		170.000.000		390.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal (Dengan Satuan:%)	3	0	3,7		3,7		3,7		3,7		3,7		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Dengan Satuan:%)	20	3	3		3		3		3		3		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0		20.000.000		20.000.000		50.000.000		90.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Pengembangan Umkm	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Dengan Satuan:%)	0	0	1		1,25		1,50		1,75		2		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4.817.815.871**		**5.058.706.665**		**5.311.641.998**		**5.444.433.048**		**5.580.543.874**		
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**4.817.815.871**		**5.058.706.665**		**5.311.641.998**		**5.444.433.048**		**5.580.543.874**		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.566.335.871		4.723.835.871		4.975.911.998		5.137.903.048		5.273.013.874	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					6.750.000		60.000.000		60.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi (Dengan Satuan:%)	N/A	96	96		96		96		96		96		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0		29.500.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (Dengan Satuan:%)	0,02	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					125.450.000		125.450.000		125.450.000		125.450.000		125.450.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN					86.280.000		86.920.794		87.280.000		88.080.000		89.080.000	Dinas Penanaman Modal,

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya investasi di kabupaten/kota	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	208	-46,96	-44,94		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**5.795.302.890**		**8.085.068.034**		**8.489.321.436**		**8.701.554.472**		**8.919.093.333**	
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					**5.795.302.890**		**8.085.068.034**		**8.489.321.436**		**8.701.554.472**		**8.919.093.333**	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					3.696.410.390		4.497.643.706		4.092.521.301		4.253.569.880		4.499.544.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya tata kelola dan	Persentase ketersediaan dokumen	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	akuntablitas kinerja perangkat daerah	perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)													
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					364.996.500		736.250.000		1.064.250.000		897.250.000		980.250.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan:Persen)	0,68	0,68	0,88		0,90		0,93		0,96		0,98		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan (Dengan Satuan:Persen)	0,12	0,15	0,18		0,21		0,23		0,26		0,28		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (Dengan Satuan:Persen)	59,32	59,37	60,94		62,50		64,06		65,63		67,19		Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda (Dengan Satuan:Persen)	N/A	0,70	0,75		0,81		0,88		0,96		1,05		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.583.896.000		2.676.174.328		3.132.550.135		3.325.734.592		3.189.299.036	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda	Persentase Pembinaan dan Pengembangan olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	N/A	N/A	25		50		75		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Terpenuhinya Pelatih Olahraga yang Bersertifikat	Persentase Cakupan Pelatih Bersertifikat (Dengan Satuan:Persen)	N/A	12,12	15,2		18		21		24		27		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda	Persentase Keikutsertaan Atlet Kota dalam kejuaraan tingkat Provinsi. (Dengan Satuan:Persen)	N/A	42,85	57,14		62,5		66		70		72		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Dengan Satuan:Persen)	N/A	14	16		17,6		18		19,6		20		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya partisipasi kemandirian dan semangat kepramukaan	Jumlah organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dengan Satuan:Organisasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**68.632.200**		**75.608.876**		**78.263.725**		**79.683.553**		**81.141.879**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**68.632.200**		**75.608.876**		**78.263.725**		**79.683.553**		**81.141.879**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					68.632.200		75.608.876		78.263.725		79.683.553		81.141.879	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persen)	70	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**46.299.800**		**86.000.000**		**67.808.903**		**69.928.645**		**72.116.134**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					46.299.800		86.000.000		67.808.903		69.928.645		72.116.134	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya tingkat pengamanan komunikasi dan informasi strategis Pemerintah Daerah melalui penerapan persandian sesuai Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:Persen)	0	50	60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**2.589.897.195**		**3.062.471.195**		**2.982.471.195**		**3.192.471.195**		**3.047.471.195**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**2.589.897.195**		**3.062.471.195**		**2.982.471.195**		**3.192.471.195**		**3.047.471.195**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					881.926.000		1.104.500.000		1.104.500.000		1.134.500.000		1.164.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Dengan Satuan:Persen)	50	40	26		27		29		30		32		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					400.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (Dengan Satuan:Persen)	36	26	36		43		49		57		64		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					148.971.195		148.971.195		148.971.195		148.971.195		148.971.195	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya upaya pembinaan SDM dan objek sejarah Kota Pangkal Pinang	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (Dengan Satuan:Persen)	40	80	45		50		55		60		65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar	70	39	42		48		49		54		60		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	budaya (CB) peringkat Kota Pangkal Pinang	budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (Dengan Satuan:Persen)													dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					334.000.000		534.000.000		454.000.000		634.000.000		459.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum (Dengan Satuan:Persen)	N/A	N/A	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**4.769.410.271**		**4.923.970.784**		**5.145.339.323**		**5.288.911.174**		**5.417.891.126**	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					**4.769.410.271**		**4.923.970.784**		**5.145.339.323**		**5.288.911.174**		**5.417.891.126**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.645.256.271		4.765.905.784		4.937.157.497		5.066.346.174		5.193.389.568	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					124.154.000		158.065.000		200.065.000		222.565.000		224.501.558	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya perpustakaan yang bersertifikat	Persentase Perpustakaan yang sudah terakreditasi (Dengan Satuan:%)			26		27		29		31		33		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0		0		8.116.826		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (Dengan Satuan:%)	0	0	1		1		1		1		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**113.800.000**		**203.400.000**		**238.400.000**		**229.421.632**		**238.400.000**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					113.800.000		183.400.000		218.400.000		209.421.632		228.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersedian Arsip (Dengan Satuan:%)			90		90		92		92		95		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)			70		70		73		73		75		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**12.069.111.503**		**37.153.860.878**		**39.764.353.478**		**38.110.738.653**		**37.495.461.219**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**4.519.077.351**		**6.745.031.219**		**7.082.282.780**		**7.259.339.849**		**7.440.823.346**	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					**4.519.077.351**		**6.745.031.219**		**7.082.282.780**		**7.259.339.849**		**7.440.823.346**	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.083.172.851		4.851.082.981		5.487.282.780		5.189.339.849		5.195.823.346	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					236.500.000		728.948.238		530.000.000		730.000.000		780.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Kg)	1.649.330	1.649.330	1.832.400		1.859.090		1.897.090		1.944.520		2.062.860		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap yang dibantu dan dibina (Dengan Satuan:%)	0	0	76,19		80,95		85		90,48		95		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					154.394.500		820.000.000		720.000.000		970.000.000		1.095.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan	850.000	850.000	257.500		266.500		277.200		289.600		304.100		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Budidaya (Dengan Satuan:Kg)													
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok Perikanan Budidaya yang dibantu dan dibina (Dengan Satuan:%)	0	0	90		91		92		93		94		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					30.110.000		80.000.000		80.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	0	20		22		24		26		28		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dengan	-	0	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Satuan:Pelaku Usaha)													
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					14.900.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan Masyarakat (KIM)	konsumsi ikan Masyarakat (KIM) (Dengan Satuan:Kg/Kapita/ Tahun)	0	0	42.58		43.26		44.00		44.79		45.64		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	0	0	20		21		22		23		24		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**5.143.498.152**		**12.400.673.060**		**13.020.706.713**		**13.346.224.380**		**13.679.879.990**	
	DINAS PARIWISATA					**5.143.498.152**		**12.400.673.060**		**13.020.706.713**		**13.346.224.380**		**13.679.879.990**	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.324.315.052		4.640.373.060		4.794.706.713		5.073.124.380		5.104.324.990	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
	Meningkatnya tata kelola dan	Persentase ketersediaan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah	sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)													
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					396.556.400		5.475.000.000		6.040.000.000		6.240.000.000		6.350.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Dengan Satuan:Persen)	0		5		5		5		5		5		Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					375.765.000		1.055.000.000		1.135.000.000		1.295.000.000		1.420.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis yang dipromosikan (Dengan Satuan:Persen)	70		80		85		90		95		100		Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					46.861.700		845.000.000		740.500.000		477.550.000		439.805.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Persen)	19,52		16,34		17,35		18,27		19,12		19,90		Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					0		385.300.000		310.500.000		260.550.000		365.750.000	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatiftif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Dengan Satuan:%)	46.75	0	0		45.69		48.70		51.40		53.82		Dinas Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**190.196.000**		**1.419.991.000**		**2.906.339.000**		**1.870.490.000**		**1.960.815.000**	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					**190.196.000**		**1.419.991.000**		**2.906.339.000**		**1.870.490.000**		**1.960.815.000**	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					64.712.000		412.500.000		205.000.000		414.000.000		432.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (Dengan Satuan:%)	NA	4,61	4,57		4,63		4,76		4,94		5,09		Dinas Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (sapi) (Dengan Satuan:%)	75	0	75		76		76		77		78		Dinas Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Dengan Satuan:%)	NA	2,18	2,22		2,39		2,55		2,69		2,74		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					56.877.000		535.949.000		2.296.339.000		851.490.000		768.315.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	80		80		85		87		88		90		Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya penyediaan dan	Persentase prasarana	80	0	80		81		82		83		84		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pengembangan prasarana pertanian (peternakan)	pertanian (peternakan) yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)													
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERTANIAN					42.747.000		266.542.000		235.000.000		285.000.000		315.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dengan Satuan:%)	84		84		85		85		86		87		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					5.860.000		20.000.000		20.000.000		35.000.000		45.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya pengendalian penyakit tanaman	Persentase Luas lahan pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					20.000.000		185.000.000		150.000.000		285.000.000		400.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya pembinaan kelompok petani	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	80		80		81		82		83		85		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**646.340.000**		**15.122.665.599**		**15.180.524.985**		**11.944.184.424**		**9.653.942.883**	
	DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN					**646.340.000**		**15.122.665.599**		**15.180.524.985**		**11.944.184.424**		**9.653.942.883**	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0		75.000.000		80.000.000		107.500.000		122.725.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	84	86	86,3		86,5		86,6		86,7		86,8		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					522.500.000		13.969.665.599		14.037.524.985		10.311.684.424		7.571.217.883	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (Dengan Satuan:%)	55	70	72		75		77		78		78		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					27.160.000		283.000.000		283.000.000		425.000.000		515.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	67	67,5	67,7		67,8		67,8		67,9		68		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					47.500.000		380.000.000		415.000.000		530.000.000		650.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pelaku usaha yang berpotensi ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor (Dengan Satuan:%)	2	2	5		5		6		7,5		7,7		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					49.180.000		155.000.000		165.000.000		250.000.000		410.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		260.000.000		200.000.000		320.000.000		385.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi (Dengan Satuan:%)	39	39	70		70		75		80		80		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**1.570.000.000**		**1.465.500.000**		**1.574.500.000**		**3.690.500.000**		**4.760.000.000**	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.570.000.000		1.326.500.000		1.427.000.000		3.435.500.000		4.375.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		54.000.000		56.000.000		90.000.000		150.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang di terbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		85.000.000		91.500.000		165.000.000		235.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Dengan Satuan:%)	75	75	76		77		78		79		80		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**105.861.915.112**		**116.155.010.867**		**121.962.761.411**		**125.011.830.447**		**128.137.126.208**		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**43.648.076.644**		**45.830.480.476**		**48.122.004.500**		**49.325.054.613**		**50.558.180.978**		
	SEKRETARIAT DAERAH				**43.648.076.644**		**45.830.480.476**		**48.122.004.500**		**49.325.054.613**		**50.558.180.978**		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					33.759.458.543		34.790.480.476		37.082.004.500		38.285.054.613		39.518.180.978	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	NA	66,00		66,10		66,20		68,00		68,00		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang Difasilitasi (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.286.147.350		9.050.000.000		9.050.000.000		9.050.000.000		9.050.000.000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan	Persentase Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan (Dengan Satuan:%)	NA		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kerjasama daerah yang efektif	Persentase Kerjasama Daerah yang Efektif (Dengan Satuan:%)	NA		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Nilai Evaluasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Dengan Satuan:Nilai)	84	84	84		85		85		86		87		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.602.470.751		1.990.000.000		1.990.000.000		1.990.000.000		1.990.000.000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan	Persentase Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan	NA		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Strategis Daerah	Pembangunan Strategis Daerah (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya Cakupan Layanan BUMD dan Efisiensi Distribusi Sumber Daya Air	Persentase Cakupan Layanan BUMD (PDAM) (Dengan Satuan:%)	13,33	0	13,33		20,52		30,90		40,09		60,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Cakupan Layanan BUMD dan Efisiensi Distribusi Sumber Daya Air	Persentase Kehilangan Air (Dengan Satuan:%)	22	0	22		21		21		21		20		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Dengan Satuan:Skor)	26,00	26,18	26,3		27		27,2		28		28,5		Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**62.213.838.468**		**70.324.530.391**		**73.840.756.911**		**75.686.775.834**		**77.578.945.230**		
	SEKRETARIAT DPRD				**62.213.838.468**		**70.324.530.391**		**73.840.756.911**		**75.686.775.834**		**77.578.945.230**		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					29.209.767.183		33.861.489.505		34.564.473.880		35.399.204.255		34.589.078.371	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Bagian Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (%) (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Bagian Keuangan	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah Bagian Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Bagian Umum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Bagian Umum	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah Bagian Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					33.004.071.285		36.463.040.886		39.276.283.031		40.287.571.579		42.989.866.859	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**61.299.322.596**		**72.364.288.726**		**75.982.503.162**		**77.882.065.741**		**79.829.117.384**		
5.01	**PERENCANAAN**				**6.423.868.112**		**7.238.682.018**		**7.736.798.619**		**7.851.524.022**		**8.098.374.497**		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				**6.423.868.112**		**7.238.682.018**		**7.736.798.619**		**7.851.524.022**		**8.098.374.497**		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.614.889.112		5.904.936.018		6.435.259.619		6.177.484.022		6.324.825.497	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan	Persentase ketersediaan	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)													Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					328.985.000		580.000.000		645.000.000		855.000.000		1.065.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					479.994.000		753.746.000		656.539.000		819.040.000		708.549.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02	**KEUANGAN**				**49.649.833.725**		**54.132.325.411**		**56.838.941.681**		**58.259.915.223**		**59.716.413.104**		
	BADAN KEUANGAN DAERAH				**49.649.833.725**		**54.132.325.411**		**56.838.941.681**		**58.259.915.223**		**59.716.413.104**		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					43.501.940.045		46.352.435.160		48.015.649.299		49.335.891.455		50.700.002.530	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					3.096.761.600		4.026.599.680		4.581.179.665		4.599.668.797		4.620.162.172	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Presentase tersedianya dokumen penganggaran yang sesuai dengan	100	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		peraturan yang berlaku (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					489.335.000		832.841.900		910.939.766		923.658.561		936.631.733	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase Ketersediaan manajemen aset / BMD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.561.797.080		2.920.448.671		3.331.172.951		3.400.696.410		3.459.616.669	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	7	3		3		3		3		3		Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya capaian pajak daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persen)	0		100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**4.845.465.759**		**7.114.156.545**		**7.138.675.722**		**7.393.682.396**		**7.619.292.483**	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH					**4.845.465.759**		**7.114.156.545**		**7.138.675.722**		**7.393.682.396**		**7.619.292.483**	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.461.052.359		5.090.287.045		5.162.004.222		5.397.060.896		5.581.645.983	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					384.413.400		2.023.869.500		1.976.671.500		1.996.621.500		2.037.646.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Terwujudnya penyelenggaraan event lembaga profesi ASN	Persentase event yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Terpenuhinya pemberian penghargaan ASN	Persentase pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	100	94.82	85		87		88		89		90		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Terpenuhinya peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Persentase ASN yang melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan ASN (Dengan Satuan:%)	NA	NA	0.60		1.83		2.11		2.29		2.47		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan sesuai dengan formasi (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	NA	NA	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	NA	NA	70		71		72		73		74		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja AS	Persentase pegawai dengan dengan SKP bernilai baik (Dengan Satuan:%)	NA	NA	80		81		82		83		84		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**71.945.000**		**3.049.124.752**		**3.532.769.640**		**3.544.549.100**		**3.592.394.800**	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					71.945.000		3.049.124.752		3.532.769.640		3.544.549.100		3.592.394.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:%)	NA	NA	17.86		26.20		29.30		32.40		35.49		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (Dengan Satuan:%)	NA	NA	0.56		30		41.94		42.35		42.55		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**308.210.000**		**830.000.000**		**735.317.500**		**832.395.000**		**802.642.500**	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					**308.210.000**		**830.000.000**		**735.317.500**		**832.395.000**		**802.642.500**	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					308.210.000		515.000.000		161.620.000		300.000.000		193.240.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		315.000.000		573.697.500		532.395.000		609.402.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase perangkat daerang yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Dengan Satuan:%)	-	-	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**8.823.446.641**		**10.264.618.973**		**10.777.849.922**		**11.047.296.170**		**11.323.478.574**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**8.823.446.641**		**10.264.618.973**		**10.777.849.922**		**11.047.296.170**		**11.323.478.574**	
	INSPEKTORAT DAERAH					**8.823.446.641**		**10.264.618.973**		**10.777.849.922**		**11.047.296.170**		**11.323.478.574**	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.207.846.641		8.389.018.973		8.877.249.922		9.136.696.170		9.392.923.132	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Meningkatnya tata kelola dan	Persentase ketersediaan	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah	administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					615.600.000		1.865.600.000		1.875.600.000		1.875.600.000		1.875.600.000	Inspektorat Daerah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Pencegahan dan Investigasi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Pelayanan Publik, Sosial, dan Kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Kualitas Tata Kelola Bidang Keuangan dan Aset (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Pengawas Lainnya Tahun Anggaran N-1 (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					0		10.000.000		25.000.000		35.000.000		54.955.442	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Bidang Keuangan dan Aset (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Bidang Pelayanan Publik, Sosial, dan Kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Bidang	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan dan Investigasi (Dengan Satuan:%)													
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Bidang Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**72.947.985.350**		**90.595.384.617**		**95.125.153.848**		**97.503.282.695**		**99.940.864.763**		
7.01	**KECAMATAN**				**72.947.985.350**		**90.595.384.617**		**95.125.153.848**		**97.503.282.695**		**99.940.864.763**		
	KECAMATAN BUKIT INTAN				**12.488.550.635**		**15.112.978.167**		**15.868.627.075**		**16.265.342.752**		**16.671.976.321**		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.064.846.370		9.425.607.840		9.547.127.075		9.863.842.752		10.340.476.321	Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					224.000.000		705.870.327		790.000.000		800.000.000		800.000.000	Kecamatan Bukit Intan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.084.704.265		4.671.500.000		5.171.500.000		5.241.500.000		5.171.500.000	Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan di Kecamatan Bukit Intan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya sarana prasarana publik terbangun di Kecamatan Bukit Intan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya tindak lanjut keluhan masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					80.000.000		260.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bukit Intan
	KECAMATAN RANGKUI				**13.120.593.698**		**15.776.623.383**		**16.565.454.552**		**16.979.590.916**		**17.404.080.689**		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.211.707.186		9.956.185.221		9.745.016.390		10.149.152.754		10.773.642.527	Kecamatan Rangkui
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					200.323.350		717.400.000		917.400.000		917.400.000		917.400.000	Kecamatan Rangkui

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Rangkui	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.708.563.162		4.838.038.162		5.638.038.162		5.638.038.162		5.438.038.162	Kecamatan Rangkui
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam pembangunan di Kecamatan Rangkui	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
	Meningkatnya sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Rangkui	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		15.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000	Kecamatan Rangkui
	Meningkatnya penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan Rangkui	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	-		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN					0		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Kecamatan Rangkui

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Rangkui	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan:%)	100	100	-		100		100		100		100		Kecamatan Rangkui
	KECAMATAN GERUNGGANG					**10.795.533.617**		**13.335.310.298**		**14.002.075.813**		**14.352.127.709**		**14.710.930.901**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.590.545.597		8.237.952.278		9.014.717.793		9.429.769.689		9.573.572.881	Kecamatan Gerunggang
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kecamatan Gerunggang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					120.703.772		120.703.772		120.703.772		120.703.772		120.703.772	Kecamatan Gerunggang
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.078.984.248		4.736.354.248		4.656.354.248		4.726.354.248		4.806.354.248	Kecamatan Gerunggang
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000	Kecamatan Gerunggang
	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		235.000.000		205.000.000		70.000.000		205.000.000	Kecamatan Gerunggang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gerunggang
	KECAMATAN TAMAN SARI					**8.641.444.657**		**11.073.516.889**		**11.627.192.734**		**11.917.872.552**		**12.215.819.366**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.349.289.817		7.140.235.016		7.127.235.016		7.257.235.016		7.277.235.016	Kecamatan Taman Sari
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					112.454.000		280.000.000		440.000.000		450.000.000		455.000.000	Kecamatan Taman Sari

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Taman Sari	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.176.400.840		3.373.281.873		3.730.000.000		3.875.637.536		4.148.584.350	Kecamatan Taman Sari
	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
	Meningkatnya sarana prasarana publik terbangun di Kecamatan Taman Sari	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Taman Sari
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Kententeraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Taman sari	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Taman Sari (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.300.000		260.000.000		299.957.718		305.000.000		305.000.000	Kecamatan Taman Sari
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Taman Sari	Tingkat Koordinasi dalam penyelanggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
	KECAMATAN PANGKALBALAM					**9.250.714.020**		**11.713.249.721**		**12.298.912.207**		**12.606.385.012**		**12.921.544.638**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.967.830.992		7.446.586.693		7.275.749.179		7.323.221.984		7.553.381.610	Kecamatan Pangkalbalam
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kecamatan Pangkalbalam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					127.609.240		335.259.240		601.759.240		801.759.240		726.759.240	Kecamatan Pangkalbalam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pangkalbalam	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.117.473.788		3.691.453.788		4.116.453.788		4.176.453.788		4.351.453.788	Kecamatan Pangkalbalam
	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan di Kecamatan Pangkalbalam.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Pangkalbalam. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
	Meningkatnya sarana prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkalbalam.	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Pangkal Balam. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		39.950.000		39.950.000		39.950.000		39.950.000	Kecamatan Pangkalbalam
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Kententeraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					37.800.000		200.000.000		265.000.000		265.000.000		250.000.000	Kecamatan Pangkalbalam
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pangkalbalam
	KECAMATAN GIRIMAYA					**8.658.116.830**		**11.091.022.671**		**11.645.573.805**		**11.936.713.150**		**12.235.130.979**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.318.365.786		6.980.546.627		7.038.097.761		7.324.237.106		7.622.654.935	Kecamatan Girimaya
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					176.937.000		287.062.000		367.062.000		367.062.000		367.062.000	Kecamatan Girimaya

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu. (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.158.964.044		3.518.414.044		3.860.414.044		3.860.414.044		3.860.414.044	Kecamatan Girimaya
	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya. (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.850.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Girimaya
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Kententeraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Girimaya	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN					0		290.000.000		355.000.000		355.000.000		355.000.000	Kecamatan Girimaya

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Girimaya
	KECAMATAN GABEK					**9.993.031.893**		**12.492.683.488**		**13.117.317.662**		**13.445.250.604**		**13.781.381.869**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.335.993.909		7.821.305.504		8.422.362.708		8.707.772.620		9.107.003.885	Kecamatan Gabek
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN					210.877.200		426.147.200		431.847.200		433.047.200		455.747.200	Kecamatan Gabek

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:Persen)	85	85	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.443.430.784		3.997.930.784		4.007.930.784		4.057.930.784		3.967.930.784	Kecamatan Gabek
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	85 %	85 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan Gabek
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Wilayah Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	85 %	85 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan Gabek
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.730.000		13.300.000		13.300.000		13.300.000		13.300.000	Kecamatan Gabek
	Meningkatnya tindak lanjut keluhan masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		234.000.000		241.876.970		233.200.000		237.400.000	Kecamatan Gabek

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gabek
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**8.233.115.222**		**8.644.770.983**		**9.077.009.532**		**9.303.934.771**		**9.536.533.140**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**8.233.115.222**		**8.644.770.983**		**9.077.009.532**		**9.303.934.771**		**9.536.533.140**	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**8.233.115.222**		**8.644.770.983**		**9.077.009.532**		**9.303.934.771**		**9.536.533.140**	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					3.357.596.372		3.541.123.757		3.704.935.771		3.699.557.781		3.746.770.943	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah kabupaten / kota (Dengan Satuan:%)	-	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.085.931.000		1.611.375.542		1.804.547.148		1.935.621.873		2.227.768.205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham akan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN					1.873.567.600		2.159.438.600		2.102.867.600		2.157.517.600		2.098.137.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
	Meningkatnya pembinaan dan pendidikan politik parpol	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik (Dengan Satuan:Persen)		18	18		18		18		18		18		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					8.445.000		82.236.542		57.845.000		57.845.000		55.238.196	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan Ormas/LSM	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi (Dengan Satuan:Persen)		10	15		20		25		30		35		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					122.000.250		700.000.000		890.000.000		995.000.000		1.055.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Persentase Masyarakat yang paham akan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI					1.785.575.000		550.596.542		516.814.013		458.392.517		353.618.196	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
	Tertanganinya gangguan dan konflik secara efektif	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL:					**857.028.582.539**		**1.054.880.011.665**		**1.107.624.012.249**		**1.135.314.612.558**		**1.163.697.477.871**		

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan upaya dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang pada periode pembangunan 2025-2029. Beberapa indikator disajikan untuk menjadi alat monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di setiap tahapannya.

4.2.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja makro merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk menilai kondisi dan capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan yang diimplementasikan penetapan targetnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,9 (Sangat Tinggi)	81,64* (Sangat Tinggi)	82,2 - 82,3 (Sangat Tinggi)	82,7 - 82,9 (Sangat Tinggi)	83,2 - 83,5 (Sangat Tinggi)	83,7 – 84 (Sangat Tinggi)	84,2 - 84,7 (Sangat Tinggi)
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,04 (Rendah)	4,5* (Rendah)	3,10 – 4,00 (Rendah)	2,90 – 3,80 (Rendah)	2,70 – 3,70 (Rendah)	2,14 – 3,47 (Rendah)	2,10 – 3,30 (Rendah)
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	- 2,3	4,54*	4,37 - 5,05	4,5 - 5,56	4,63 – 6,07	4,76 – 6,59	4,89 – 7,0
4	PDRB Per Kapita	Juta Rp/ Kapita	Rp. 82,19 juta	Rp. 87,21 juta*	Rp. 90,8 - 94,88 juta	Rp. 93,0 - 102,53 juta	Rp. 95,2 - 110,20 juta	Rp. 96,70 - 117,86 juta	Rp. 98,9 - 120 juta
5	Indeks Gini	Nilai	0,292 (Rendah)	0,249* (Rendah)	0,246 – 0,256 (Rendah)	0,241 – 0,251 (Rendah)	0,236 – 0,246 (Rendah)	0,230 – 0,241 (Rendah)	0,225 - 0,235 (Rendah)
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,98	5,73*	5,54 - 5,73	5,35 - 5,72	5,25 - 5,71	5,15 - 5,70	4,8 - 5,69

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

Tabel 4. 3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,04 (Rendah)	4,5* (Rendah)	3,10 - 4,00 (Rendah)	2,90 - 3,80 (Rendah)	2,70 - 3,70 (Rendah)	2,14 - 3,47 (Rendah)	2,10 - 3,30 (Rendah)
2	Indek Pembangunan Manusia	80,9 (Sangat Tinggi)	81,64* (Sangat Tinggi)	82,2 - 82,3 (Sangat Tinggi)	82,7 - 82,9 (Sangat Tinggi)	83,2 - 83,5 (Sangat Tinggi)	83,7 - 84 (Sangat Tinggi)	84,2 - 84,7 (Sangat Tinggi)
3	Indeks Daya Saing Daerah (Nilai)	4,14	3,97*	4,06	4,14	4,23	4,31	4,40
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	- 2,3	4,54*	4,37 - 5,05	4,5 - 5,56	4,63 – 6,07	4,76 – 6,59	4,89 – 7,0
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp/Kapita)	Rp. 82,19 juta	Rp. 87,21 juta*	Rp. 90,8 - 94,88 juta	Rp. 93,0 - 102,53 juta	Rp. 95,2 - 110,20 juta	Rp. 96,70 - 117,86 juta	Rp. 98,9 – 120 juta
6	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	76,14 (Sangat Baik)	76,64* (Sangat Baik)	77,52 (Sangat Baik)	78,21 (Sangat Baik)	78,35 (Sangat Baik)	79,1 (Sangat Baik)	79,25 (Sangat Baik)
7	Indeks Harmoni (Nilai)	NA	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
8	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	NA	2	4	6	8	10	10,5
9	Indeks Gini (Nilai)	0,292 (Rendah)	0,249* (Rendah)	0,246 - 0,256 (Rendah)	0,241 - 0,251 (Rendah)	0,236 - 0,246 (Rendah)	0,230 - 0,241 (Rendah)	0,225 - 0,235 (Rendah)
10	Indeks Infrastruktur (Nilai)	94,27	95,11	95,55	96,25	96,89	97,1	97,35
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,98	5,73*	5,54 - 5,73	5,35 - 5,72	5,25 - 5,71	5,15 - 5,70	4,8 - 5,69
12	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,15 A- (Sangat Baik)	4,32* A- (Sangat Baik)	4,25 – 4,35 A- (Sangat Baik)	4,35 – 4,40 A- (Sangat Baik)	4,40 – 4,45 A- (Sangat Baik)	4,45 – 4,50 A- (Sangat Baik)	4,51 – 4,60 A (Pelayanan Prima)
13	Indeks Pemerintahan Digital	3,81	4,34*	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	60,23 (Tinggi)	55,54 (Sedang)	56 (Sedang)	56,5 (Sedang)	57 (Sedang)	57,5 (Sedang)	58 (Sedang)

*Ket.: * Realisasi Tahun 2025*

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	**Aspek Geografi dan Demografi**										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	87,27	88,56	89,3	90,49	91,29	92,5	93,25		Dinas Pangan&Pertanian
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,68	8,24	7,8	7,36	6,92	6,48	6,04	IUP RPJP Daerah	Dinas Pangan&Pertanian
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	NA	2.600	2.618	2.635	2.653	2.670	2.688	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Ekonomi&SDA
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	%	96,47	98,67	96,86	97,06	97,26	97,46	97,66		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
5	Kapasitas air baku	M3/detik	NA	0,153	0,153	0,303	0,303	0,453	0,79	IUP RPJP Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	14,64	16,5	18,36	20,22	22,08	23,94	IUP RPJP Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,24 (Sedang)	70,77* (Baik)	69,80 (Sedang)	69,97 (Sedang)	70,15 (Sedang)	70,32 (Sedang)	70,49 (Sedang)	IUP RPJP Daerah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	6,3	8,48	10,65	12,83	15	17,18	IUP RPJP Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	0,001	3,75	7,5	11,25	15	18,75	IUP RPJP Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	NA	80,01	80,61	81,21	81,8	82,4	83	IUP RPJP Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
11	Indeks Risiko Bencana	Poin	88,47 (Sedang)	84,26* (Sedang)	83,42 (Sedang)	82,58 (Sedang)	81,74 (Sedang)	80,9 (Sedang)	80,06 (Sedang)	IUP RPJP Daerah	BPBD
12	Persentase Penurunan Emisi GRK										
	Tahunan	%	NA	2	4	6	8	10	10,5	IUP RPJP Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,55	1,01	1,92	1,98	2,03	2,08	2,13		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
14	Rasio Penduduk	Poin	102,8	102,6	102,4	102,2	102,1	101,9	101,7		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
15	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	2318	2341	2417	2475	2534	2592	2650		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	- 2,3	4,54*	4,37 - 5,05	4,5 - 5,56	4,63 – 6,07	4,76 – 6,59	4,89 – 7,0		BAPPERIDA
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,04 (Rendah)	4,5* (Rendah)	3,10 - 4,00 (Rendah)	2,90 - 3,80 (Rendah)	2,70 - 3,70 (Rendah)	2,14 - 3,47 (Rendah)	2,10 - 3,30 (Rendah)		BAPPERIDA
3	PDRB PerKapita	Juta Per Kapita	Rp. 82,19 juta	Rp. 87,21 juta*	Rp. 90,8 - 94,88 juta	Rp. 93,0 - 102,53 juta	Rp. 95,2 - 110,20 juta	Rp. 96,70 - 117,86 juta	Rp. 98,9 - 120 juta		BAPPERIDA
4	Indeks Gini	Poin	0,292 (Rendah)	0,249* (Rendah)	0,246 - 0,256 (Rendah)	0,241 - 0,251 (Rendah)	0,236 - 0,246 (Rendah)	0,230 - 0,241 (Rendah)	0,225 - 0,235 (Rendah)		BAPPERIDA
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,9 (Sangat Tinggi)	81,64* (Sangat Tinggi)	82,2 - 82,3 (Sangat Tinggi)	82,7 - 82,9 (Sangat Tinggi)	83,2 - 83,5 (Sangat Tinggi)	83,7 - 84 (Sangat Tinggi)	84,2 - 84,7 (Sangat Tinggi)		BAPPERIDA
6	Indeks Kesehatan	Poin	85,02	85,28	85,54	85,8	86,08	86,37	86,68		Dinas Kesehatan
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,64	75,90 – 76,00	76,3 – 76,4	76,6 – 76,8	76,9 – 77,0	77,20 – 77,60	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Ibu	per 100,000 kelahiran hidup	196	110	109	97	86	77	77	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi Stunting (pendek dan	%	17,3	19	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	sangat pendek) pada balita (%)										
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	%	64*	100	100	100	100	100	100	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) (%)	%	88,56*	100	100	100	100	100	100	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98	99,59	99,65	99,7	99,85	100	100	IUP RPJP Daerah	Dinas Kesehatan
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Level Kota (%)	%	55,47*	50,57	55	60	65	70	75	IUP RPJP Daerah	Dinas Tenaga Kerja
14	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	NA	NA	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	IUP RPJP Daerah	Dinas Tenaga Kerja
15	Indeks Pendidikan	Poin	0,725	0,738	0,744	0,753	0,762	0,77	0,779		Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,92	10,99	11,05	11,23	11,42	11,61	11,79	IUP RPJP Daerah	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,3	13,5	13,85	14,21	14,57	14,95	15,34	IUP RPJP Daerah	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
18	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:										Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Literasi Membaca										
	SD	Poin	67,26	69,76	72,26	74,76	77,26	79,76	82,26	IUP RPJP Daerah	
	SMP	Poin	81,03	82,13	83,23	84,33	85,43	86,53	87,63	IUP RPJP Daerah	
	Kesetaraan	Poin	45,48	45,49	45,5	45,51	45,52	45,53	45,54	IUP RPJP Daerah	
	Numerasi										
	SD	Poin	54,24	57,14	60,04	62,94	65,84	68,74	71,64	IUP RPJP Daerah	
	SMP	Poin	68,44	69,94	71,44	72,94	74,44	75,94	77,44	IUP RPJP Daerah	
	Kesetaraan	Poin	43,23	43,24	43,25	43,26	43,27	43,28	43,29	IUP RPJP Daerah	
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun	%	13,41	14,05	14,45	15	15,5	15,71	15,75	IUP RPJP Daerah	Dinas Kependudukan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi										& Pencatatan Sipil
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja	%	NA	69,03	70,08	71,13	72,17	73,22	74,27	IUP RPJP Daerah	Dinas Tenaga Kerja
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	87,01	15,6	16	17	19	21	23	IUP RPJP Daerah	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	60,23 (Tinggi)	55,54 (Sedang)	56 (Sedang)	56,5 (Sedang)	57 (Sedang)	57,5 (Sedang)	58 (Sedang)	IUP RPJP Daerah/ IKU	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	83,9 (Sangat Tinggi)	85,41 (Sangat Tinggi)	85,5 (Sangat Tinggi)	86 (Sangat Tinggi)	86,5 (Sangat Tinggi)	86,7 (Sangat Tinggi)	86,8 (Sangat Tinggi)	IUP RPJP Daerah/ IKU	Bakesbangpol
24	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	61,86	73,5	74	74,5	75	75,5	76	IUP RPJP Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana
25	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,211	0,21	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	IUP RPJP Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Keluarga Berencana
III	**Aspek Daya Saing Daerah**										
1	Angka Ketergantungan	Poin	45,53*	46,13	46,51	46,9	47,28	47,66	47,94	IUP RPJP Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	13,44	14,24	15,49	16,53	17,56	18,59	19,62	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,7	4,88	4,9	4,95	5,03	5,11	5,19	IUP RPJP Daerah	Dinas Pariwisata
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	163	622	654	685	716	747	778	IUP RPJP Daerah	Dinas Pariwisata
5	Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	%	18,8	21,41*	22,2 - 22,4	22,9 - 23,00	23,5 - 23,6	24,00 - 24,10	24,4 - 24,7	IUP RPJP Daerah/ IKU	Dinas Pariwisata
6	Proposi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota (%)	%	NA	96,7	96,77	96,83	96,9	96,96	97,03	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	%	3,4	3,37	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,16*	2,28	4,49	4,78	5,07	5,36	5,65	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
9	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,6**	0,65	0,63	0,602	0,576	0,551	0,527	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,98	5,73*	5,54 - 5,73	5,35 - 5,72	5,25 - 5,71	5,15 - 5,70	4,8 - 5,69	IUP RPJP Daerah	Dinas Tenaga Kerja
11	Return of Aset (ROA) BUMD (PDAM)	%	1,65*	0	5,2	7,8	25,7	24	24	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Ekonomi & SDA
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,7	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	IUP RPJP Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana
13	Penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja (%)	%	48	45	48	50	52	54	56	IUP RPJP Daerah	Dinas Tenaga Kerja
14	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Poin	3,16	3,52	3,69	3,7	3,8	3,9	4	IUP RPJP Daerah	BAPPERIDA
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	60,75	55,52	65,01	66,31	67,64	68,99	70,37	IUP RPJP Daerah	BAPPERIDA
16	Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	4,95	4,95	5,07	5,13	5,19	5,25	5,31	IUP RPJP Daerah	Dinas Pangan&Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
17	Indeks Masyarakat Digital	Poin	47,78	52,52	53,62	54,71	55,81	56,91	58	IUP RPJP Daerah	Dinas Komunikasi & Informatika
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	30,11	28,78	29,06	29,27	29,30	29,33	29,36	IUP RPJP Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP
19	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%PDRB	5,83	9,78	9,83	9,97	10,05	10,15	10,24	IUP RPJP Daerah	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
20	Indeks Infrastruktur	Poin	94,27	95,11	95,55	96,25	96,89	97,1	97,35		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
21	Kontribusi PDRB Kota Pangkal Pinang terhadap provinsi (%)	%	17,62	17,43*	17,5 - 18,2	17,6 - 18,4	17,7 - 18,5	17,8 - 18,6	17,9 - 18,7		BAPPERIDA
22	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	NA	13,33	16,25	19,17	22,08	25	27,92	IUP RPJP Daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman
23	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,06	1,2	1,2	1,21	1,23	1,24	1,26		BAKEUDA
24	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	%	1,299	1,352	1,404	1,457	1,51	1,562	1,615		BAKEUDA
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,67*	0,69	0,81	0,92	1,04	1,15	1,27	IUP RPJP Daerah	BAKEUDA

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
26	Tingkat Inflasi	%	0,76	2,58	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Ekonomi & SDA
27	Kontribusi PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi	%	4,74	4,51	4,86	4,98	5,09	5,2	5,31	IUP RPJP Daerah	BAPPERIDA
28	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	6,47	6,48	6,48	6,49	6,49	6,49	6,49	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Ekonomi & SDA
29	Indeks Zakat Nasional	poin	0	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Kesra
IV	Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,14 (Sangat Baik)	77,23* Sangat Baik)	77,52 Sangat Baik)	78,21 Sangat Baik)	78,35 Sangat Baik)	79,1 Sangat Baik)	79,25 Sangat Baik)	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Organisasi
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	96,52	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Hukum
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,81	4,34*	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	IUP RPJP Daerah	Dinas Komunikasi & Informatika
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,15 A- (Sangat Baik)	4,32* A- (Sangat Baik)	4,25 – 4,35 A- (Sangat Baik)	4,35 – 4,40 A- (Sangat Baik)	4,40 – 4,45 A- (Sangat Baik)	4,45 – 4,50 A- (Sangat Baik)	4,51 – 4,60 A (Pelayanan Prima)	IUP RPJP Daerah	ORGANISASI
5	Indeks Integritas Nasional	Poin	67,97	72,32	75	78	79	80	81	IUP RPJP Daerah	INSPEKTORAT
6	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin	NA	60	62,58	65,16	67,73	70,31	72,89	IUP RPJP Daerah	BAPPERIDA

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						KET	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Angka kriminalitas	per 100.000 Penduduk	286	337*	328	310	300	290	280		SATPOL PP
8	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	NA	20	25	30	35	40	45	IUP RPJP Daerah	SATPOL PP
9	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	%	62,5	47	72	73	74	75	80	IUP RPJP Daerah	Setda Bagian Hukum
10	Nilai SAKIP	Poin	64,22 (B Baik)	64,53* (B Baik)	65,7 (B Baik)	65,8 (B Baik)	65,9 (B Baik)	70,15 (BB Sangat Baik)	70,2 (BB Sangat Baik)		Setda Bagian Organisasi
11	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,1	3,97*	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4		BAPPERIDA

Keterangan:

*) Realisasi Tahun 2025

4.2.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian di setiap urusan pemerintahan daerah yang merupakan poin penting dan strategis dalam pelaksanaan kinerja suatu organisasi. IKK berfungsi sebagai tolok ukur yang menggambarkan sejauh mana program, kegiatan, maupun kebijakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Dengan adanya IKK, organisasi dapat secara obyektif mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

IKK tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga memperhatikan outcome yang lebih luas, sehingga dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunan IKK harus relevan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta terukur melalui indikator yang spesifik, realistis, dapat dicapai, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Berikut IKK pada pelaksanaan pembangunan Kota Pangkal Pinang.

Tabel 4. 5
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Urusan Pendidikan**							
1.a.1	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	68,36	72	75,19	78,23	81,27	84,23
1.a.2	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	95,1	99,28	99,77	100	100	100
1.a.3	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	36,2	41,17	46,15	51,13	56,11	61,08
1.a.4	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	%	59,12	59,92	62,58	65,25	68,58	69,58
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	%	53,82	57,45	60,47	61,98	62,74	65,76
2	**Urusan Kesehatan**							
1.b.1	Persentase Kematian Ibu	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
1.b.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	17,3	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2
1.b.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	%	99,73	100	100	100	100	100
1.b.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	99,12	100	100	100	100	100
1.b.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	99,28	100	100	100	100	100
1.b.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	99,91	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
1.b.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99,89	100	100	100	100	100
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1.c.2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	93,54	93,55	93,59	93,64	93,69	93,73
1.c.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	%	98,13	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
1.c.4	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	99,73	100	100	100	100	100
1.c.5	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	%	46,44	46,45	46,46	46,47	46,48	46,49
1.c.6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44
1.c.7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%	0	100	100	100	100	100
1.c.9	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	6,15	6,16	6,17	6,18	6,19	6,2
1.c.10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	%	0	100	100	100	100	100
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
1.d.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
1.d.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	%	0	100	100	100	100	100
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	2,03	99	99	99	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
1.d.4	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	%	2,38	100	100	100	100	100
5	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
1.e.1	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	%	100	100	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	100	100	100	100
1.e.3	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
1.e.4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100
1.e.5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100
1.e.6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Sosial**							
1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100
1.f.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100
1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti							
1.f.5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
7	**Urusan Tenaga Kerja**							
2.a.1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	N/A	100	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	%	68,56	70	75	80	85	90
2.a.3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	29,56*	32,56	35	38	41	45
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.b.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
2.b.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
9	**Urusan Pangan**							

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
2.c.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	113,12	100	100	100	100	100
10	**Urusan Pertanahan**							
2.d.1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%	0	70	70	70	80	80
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	%	0	0	50	50	100	100
11	**Urusan Lingkungan Hidup**							
2.e.1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	55,56	33	34	35	36	37
2.e.2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	98,87	99	99	99	99	99
12	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
2.f.1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	99,02	99,03	99,2	99,4	99,5	99,7
2.f.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	77,28	76	76	77	78	79
2.f.3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100
2.f.4	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	98,81	99,6	99,61	99,62	99,63	99,64
2.f.5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
	Melaporkan							
2.f.6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
2.f.7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
2.h.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun)	%	109	108,5	108	107,5	107	106,5
2.h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	60,5	61	62	63	64	65
2.h.3	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	216,36	215,04	213,72	212,40	211,08	209,76
15	**Urusan Perhubungan**							
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Indeks	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93
2.i.2	Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**							
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	94,12	100	100	100	100	100
2.j.2	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100
2.j.3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
17	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
2.k.1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	45	47	49	51	53	55
2.k.2	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	%	100	100	100	100	100	100
18	**Urusan Penanaman Modal**							
2.l.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	-46,96	-44,94	1,00	1,00	1,00	1,00
2.l.2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	76,53	96	96	96	96	96
19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**							
2.m.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,08	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16
2.m.2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
2.m.3	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	9,167	10,1	11,3	12,4	13,6	14,8
2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	%	100	100	100	100	100	100
20	**Urusan Statistik**							
2.n.1	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	%	100	100	100	100	100	100
21	**Urusan Persandian**							
2.o.1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	42,37	52	62	72	82	92
22	**Urusan Kebudayaan**							
2.p.1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	97,83	60	70	80	90	100
2.p.2	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang	%	-22.69	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
	Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah							
23	**Urusan Perpustakaan**							
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	%	56,66	61	62	63	64	65
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	%	15,6	16	17	19	21	23
24	**Urusan Kearsipan**							
2.r.1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	77,89	78	78,5	79	79,5	80
25	**Urusan Kelautan dan Perikanan**							
3.a.1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	88,195	88,495	88,795	89,095	89,395	89,695
3.a.2	Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	Kg/ Kap/ Th	41,95	42,58	43,26	44,00	44,79	45,64
26	**Urusan Pariwisata**							
3.b.1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	%	2,29	2,5	2,6	2,7	2,8	3
3.b.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	%	281,6	8,04	8,93	9,56	9,98	10,2
3.b.3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	%	10,51	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5
27	**Urusan Pertanian**							
3.c.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	4,61	4,57	4,63	4,76	4,94	5,09
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	%	2,18	2,22	2,39	2,55	2,69	2,74
3.c.3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	-4,23	3,31	4,45	5,66	6,5	6,55
3.c.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
	Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))							
28	**Urusan Perdagangan**							
3.d.1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	92,08	94	96	97	98	99
29	**Urusan Perindustrian**							
3.e.1	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	%	34,45	36	37,55	39,1	40,65	42,2
3.e.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	0,42	1,5	2,58	3,66	4,74	5,82
3.e.3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	16,16	17,5	18,84	20,18	21,52	22,86
3.e.4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	2,79	3,8	4,81	5,82	6,83	7,84
30	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan**							
4.a.1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	100	100	100	100	100
31	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**							
4.b.1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari	%	39,99	35	30	30	30	30

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
	Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	27,77	28	29	30	31	32
4.b.3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	%	58,35	60	61	62	63	63
4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	3,06	5	7	9	11	12
32	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**							
4.c.1	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	81,99	82	82,5	83	83,5	84
33	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**							
4.d.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	%	100	100	100	100	100	100
34	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan**							
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	level 2	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
4.e.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun					
			2025*	2026	2027	2028	2029	2030
4.e.3	Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
4.e.4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	%	88,55	89	90	91	92	93
35	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan**							
4.f.1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor	40	40	40	40	40	40
4.f.2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	26,18	26,3	27	27,2	28	28,5
4.f.3	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor	26,25	26,25	26,3	26,3	27	27
36	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah**							
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.g.2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	%	26,32	26,5	27	27,5	28	28,5
37	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik**							
4.h.1	Penilaian Mal administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	85,04	85,05	86	86,01	86,02	87



source: newbirulaut

05
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama RPJP Daerah Kota Pangkal Pinang periode 2025-2045. RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Pangkal Pinang lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Wali Kota Pangkal Pinang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah/ unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
4. Setiap perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra PD Kota Pangkal Pinang yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah ini;
5. RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD Kota Pangkal Pinang setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan

Wali Kota yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJM Daerah ditetapkan, maka RPJM Daerah dapat diubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJM Daerah;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Wali Kota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota; dan
9. Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJM Daerah

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Pangkal Pinang, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian didukung oleh tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, serta mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Ruang lingkup pengendalian pembangunan Kota Pangkal Pinang terbagi menjadi dua bagian, yakni Pengendalian perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas prioritas pembangunan Daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup:

a. penjabaran perencanaan RPJP Daerah ke RPJM Daerah, dan RPJM Daerah ke dokumen Renstra PD;
b. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
c. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

a. penjabaran perencanaan RPJM Daerah ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah;
b. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
c. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek/tahunan (RKPD). Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

a. pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan Daerah;
b. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
c. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah; dan
d. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Pengendalian juga mempertimbangkan aspek seperti:

a. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan;
b. Capaian Kinerja dan Indikator;
c. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran;
d. Kualitas Pelayanan Publik terutama dalam urusan wajib pelayanan dasar;
e. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder;
f. Ketepatan Waktu Pelaksanaan;
g. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi;
h. Koordinasi Antar-Perangkat Daerah khususnya beberapa OPD yang mempunyai *crosscutting.*

5.3 Perubahan RPJM Daerah

Dalam rangka penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, dapat dilakukan perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Pedoman terkait perubahan RPJM Daerah diatur sebagai berikut:

1. Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

2. Perubahan terhadap target kinerja tahunan RPJM Daerah dapat dilakukan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.4 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJM Daerah hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJM Daerah sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Pangkal Pinang maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang ini menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Pangkal Pinang dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJM Daerah sebagai pedoman dimaksud pada poin 1) antara lain bertujuan

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Daerah dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya.

3) RKPD Kota Pangkal Pinang masa transisi di Tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM Daerah periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN